Kementerian PPN/ Bappenas

Laporan Akhir Kegiatan Tahun 2024: Evaluasi Pembangunan Daerah

Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

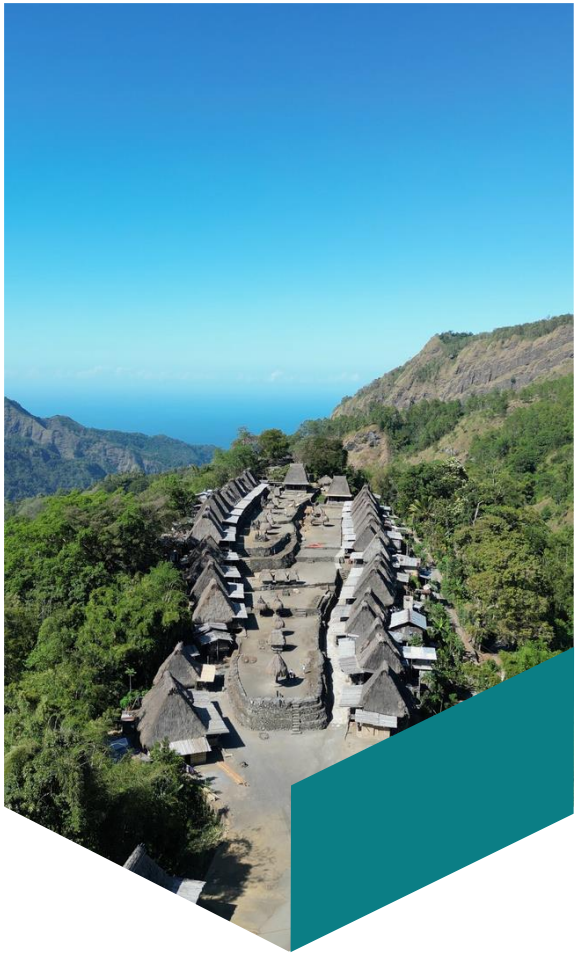

Tim Penyusun

Pengarah:
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

Penanggung Jawab:
Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Tim Penyusun:
Dwi Ratih Suryantining Esti
Yulia Agnis Sutarno
Amelia Ari Putri
Fahmi Rohman Bimantoro
Muhammad Yusuf Zaky Amanullah
Wahyu Sabtika
Aulia Rachma Pramudya
Gian Fany
Muhammad Zulfikar Ihsan
Bur Ilham Gunawan
Ni Ketut Sri Yani Putri

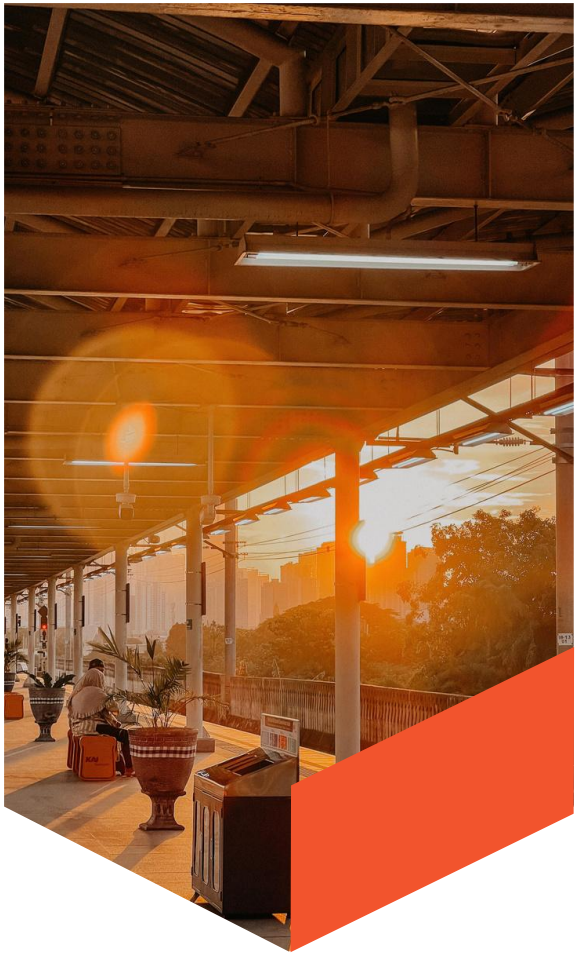

Kata Pengantar

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, salah satu tahapan penting dalam perencanaan adalah evaluasi pelaksanaan rencana. Peran evaluasi diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Hasil evaluasi akan menjadi masukan bahan penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan. Untuk memberikan informasi pembangunan daerah, kami melaksanakan Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD).

Kegiatan EPD 2024 berfokus pada evaluasi ketercapaian sasaran pembangunan nasional serta pelaksanaan intervensi baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kegiatan EPD 2024 tidak hanya dilaksanakan pada intervensi yang bersumber dari APBN, namun juga APBD, dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu pelaksanaan evaluasi ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan banyak perbaikan. Oleh sebab itu, masukan dan saran yang membangun dari pengguna hasil evaluasi, sangat kami harapkan agar tujuan evaluasi dapat tercapai.

Jakarta, Januari 2025
Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Rohmad Supriyadi

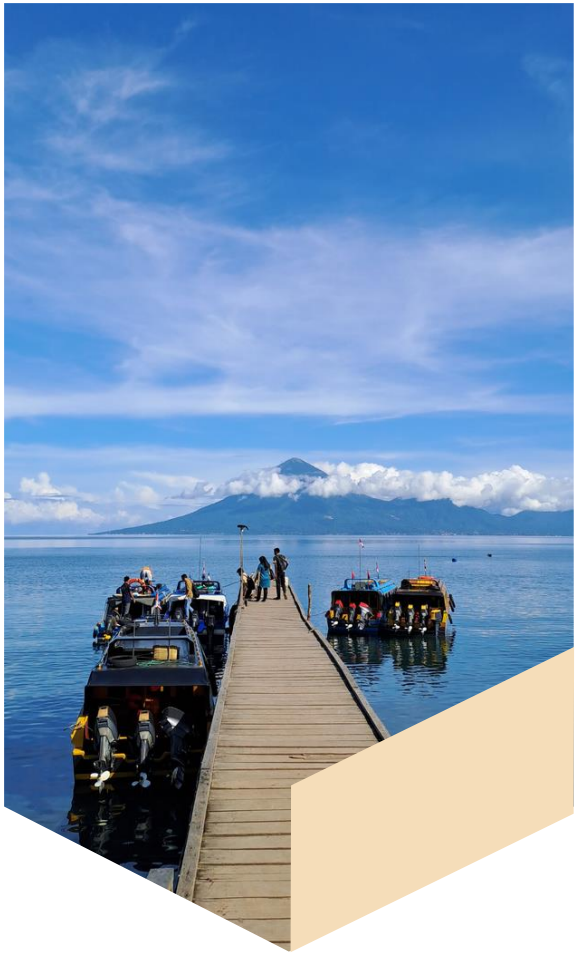

Daftar Isi

Tim Penyusun (ii)
Kata Pengantar (iii)
Daftar Isi (iv)
I. Pendahuluan (1)
II. Ruang Lingkup dan Metodologi Evaluasi (3)
III. Hasil Evaluasi RPJMN Tahun 2020-2024 (7)
- Evaluasi Kinerja Makro Daerah Tahun 2019 - 2023
- Evaluasi Kontribusi Tahun 2020 - 2023
- Evaluasi Kinerja Agenda Pembangunan di Daerah

IV. Hasil Evaluasi RKP Tahun 2024 (45)
- Evaluasi Kinerja Makro Daerah Tahun 2024
- Evaluasi Kontribusi
- Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional di Daerah
- *Baseline* Indikator Utama Pembangunan

V. Capaian Makro Kewilayahan Tahun 2014-2024 (69)
VI. Kesimpulan dan Rekomendasi (85)
- Kesimpulan
- Rekomendasi Umum
- Rekomendasi berdasarkan Kewilayahan
- Rekomendasi berdasarkan Provinsi

01

Pendahuluan

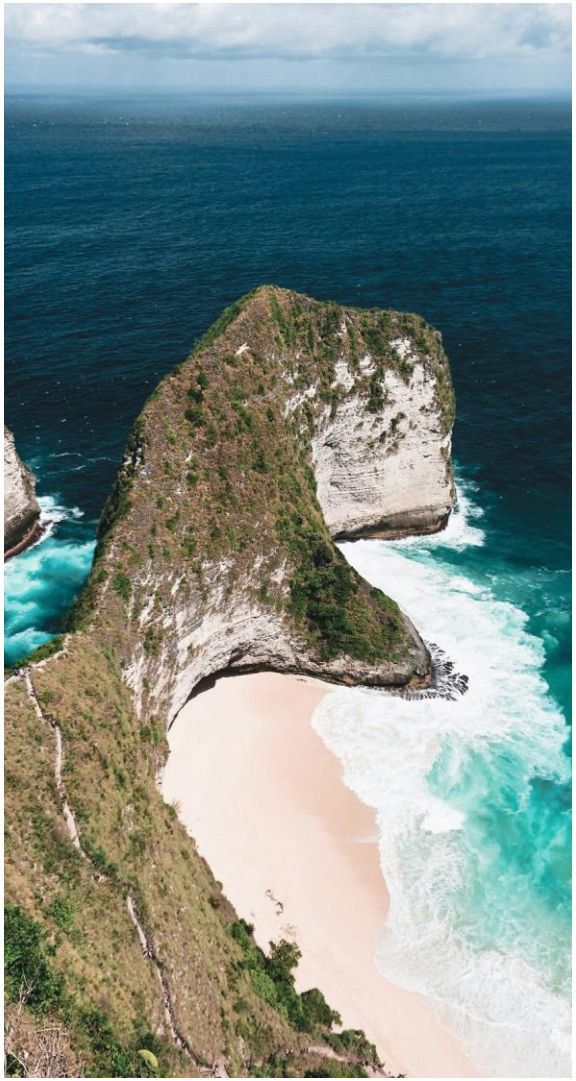

Pendahuluan

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan menjadi suatu proses yang berkelanjutan dan dijadikan sebagai sarana yang bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan proses pembangunan nasional yang lebih berkualitas.

Kegiatan evaluasi pada khususnya dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menganalisis permasalahan dan faktor pendukung keberhasilan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Selain itu, dalam mengawal upaya pencapaian sasaran pembangunan baik di level nasional maupun daerah, peranan evaluasi menjadi sangat penting dan strategis. Untuk itu, evaluasi pembangunan nasional tidak cukup dilihat dari aspek sektoral, namun juga perlu melihat dari aspek kewilayahan atau daerah. Adanya pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) juga menguatkan prinsip bahwa kontribusi pembangunan daerah sangat penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Secara umum, kegiatan Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD) yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan c.q Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas bertujuan untuk melihat ketercapaian sasaran pembangunan nasional serta pelaksanaan program/intervensi baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di daerah. Adapun Evaluasi Pembangunan Daerah saat ini difokuskan pada evaluasi yang dilaksanakan di level provinsi.

Kami berharap isi laporan ini dapat menjadi bahan masukan dan insiprasi para pembaca untuk:

1. Menyusun kebijakan pembangunan tahun selanjutnya
2. Menyusun perencanaan berbasis kewilayahan
3. Merancang intervensi sektor yang tepat
4. Basis data untuk pemantauan, pengendalian, dan evaluasi selanjutnya
5. Bahan yang bermanfaat bagi pemerintah, akademisi, peneliti, bisnis, dan masyarakat

02

Ruang Lingkup Evaluasi Pembangunan Daerah

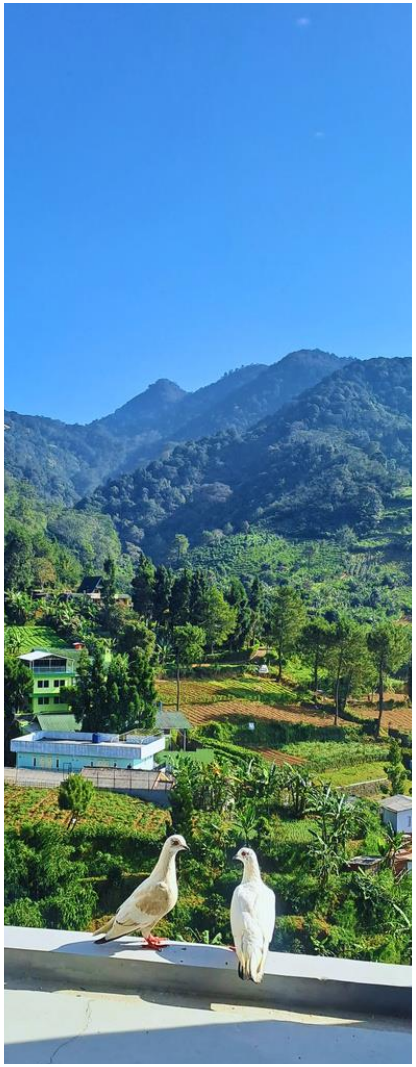

Ruang Lingkup
Laporan Akhir Evaluasi Pembangunan Daerah

Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2024 terdiri dari 2 (dua) ruang lingkup, yaitu dokumen RPJMN Tahun 2020-2025 dan RKP Tahun 2024. Evaluasi Pembangunan Daerah pada lingkup RPJMN meliputi (1) Evaluasi Kinerja Makro Tahun 2019-2023, (2) Evaluasi Kontribusi Tahun 2020-2023, dan (3) Evaluasi Kinerja Agenda Pembangunan di Daerah. Evaluasi Pembangunan Daerah pada lingkup RKP meliputi (1) Evaluasi Kinerja Makro Tahun 2024, (2) Evaluasi Kontribusi Tahun 2022-2023, (3) Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional di Daerah, dan (4) *Baseline* Indikator Utama Pembangunan.

Evaluasi Pembangunan Daerah	
Dokumen Perencanaan	**Evaluasi Pelaksanaan**
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	• Evaluasi Kinerja Makro RPJMN 2019 – 2023 • Evaluasi Kontribusi 2020-2023 • Evaluasi Kinerja Agenda Pembangunan di Daerah
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	• Evaluasi Kinerja Makro RKP 2024 • Evaluasi Kontribusi 2022-2023 • Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional di Daerah • *Baseline* Indikator Utama Pembangunan

Metode Analisis Skoring EPD Tahun 2024

Evaluasi terhadap capaian kinerja dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis *gap* dan skoring komposit terhadap lima indikator makro (Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, dan Indeks Pembangunan Manusia).

Tahapan Skoring Kinerja Makro

- **Identifikasi Angka Sasaran** — Identifikasi angka sasaran yang dijadikan sebagai pembanding yaitu target RKP kewilayahan, target RKPD, realisasi tahun 2023, dan rata-rata wilayah
- **Penentuan Kriteria Skor** — Menentukan kriteria skor untuk tiap perbandingan
- **Identifikasi Angka Realisasi** — Identifikasi angka realisasi capaian terkini untuk tiap-tiap indikator makro
- **Analisis *Gap*** — Membandingkan angka realisasi capaian tiap-tiap indikator dengan empat angka sasaran (analisis *gap*)
- **Perhitungan Skor Indikator** — Menentukan skor indikator untuk tiap-tiap perbandingan antara capaian dan sasaran

Kriteria Skor Indikator

Angka Pembanding	Kriteria Skor Indikator		
	1 (Merah)	2 (Kuning)	3 (Hijau)
Target RKP 2024	Capaian <60% dari Target	Capaian antara ≥ 60% dan < 90% dari Target	Capaian ≥ 90% dari Target
Target RKPD 2024	Capaian < 60% dari Target	Capaian antara ≥ 60% dan < 90% dari Target	Capaian ≥ 90% dari Target
Realisasi Tahun 2023	Capaian < 0	0 ≤ Capaian < 0.5 x Positif Range	Capaian ≥ 0.5 x Positif Range
Rata-rata Wilayah Tahun 2024	Capaian < (min+(range/3))	(min+(range/3)) ≤ Capaian < (max-(range/3))	Capaian ≥ (max-(range/3))
Capaian Nasional	Capaian < 0	0 ≤ Capaian < 0.5 x Positif Range	Capaian ≥ 0.5 x Positif Range

Tahapan dan Metode Evaluasi berdasarkan AP, PN, dan IUP

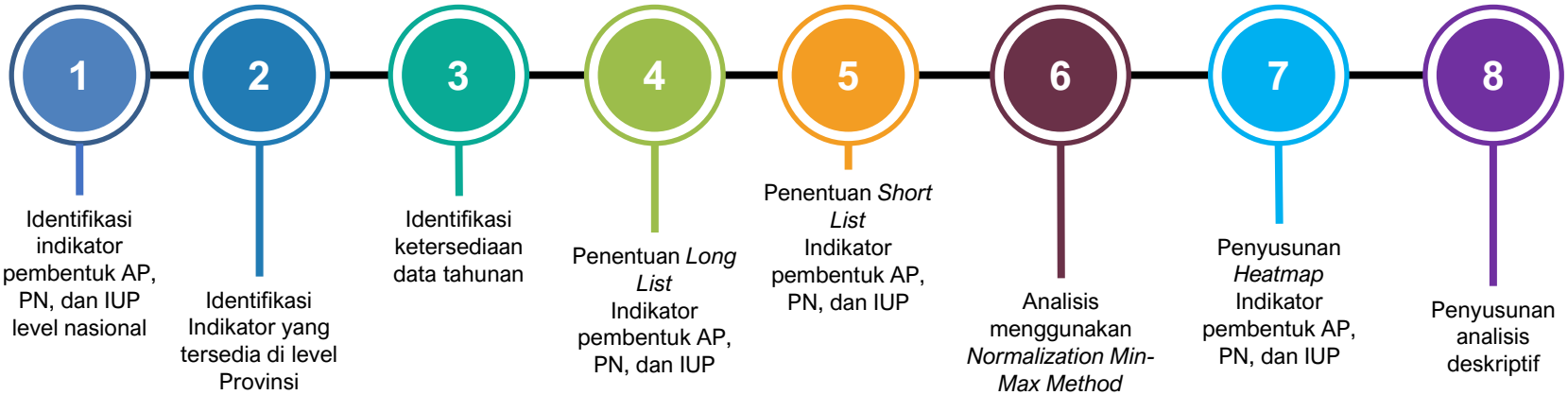

Keterangan:
PN = Prioritas Nasional | AP = Agenda Pembangunan | IUP = Indikator Utama Pembangunan

Metode Min-Max

Indikator dengan arah positif :

$$z = \frac{x - \min(x)}{[\max(x) - \min(x)]}$$

Indikator dengan arah negatif :

$$z = 1 - \frac{x - \min(x)}{[\max(x) - \min(x)]}$$

Keterangan:
z : merupakan *variable* yang akan dihitung
x : merupakan nilai dari sebuah data/indikator di provinsi x
min (x) : nilai terkecil dari sebuah data/indikator
max (x) : nilai terbesar dari sebuah data/indikator

Heatmap

Keterangan warna pada ***heatmap*** merupakan **perbandingan relatif antar daerah** sehingga tidak menggambarkan capaian secara riil

Manfaat

1. Rekomendasi penentuan lokasi intervensi (termasuk intervensi afirmasi)
2. Penajaman kegiatan prioritas atau proyek prioritas di daerah

03

Hasil Evaluasi RPJMN Tahun 2020-2024

3.1 Evaluasi Kinerja Makro Daerah Tahun 2019 - 2023

Pertumbuhan Ekonomi di 34 Provinsi
Tahun 2019 - 2023

NO	PROVINSI	CAPAIAN PERTUMBUHAN EKONOMI				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	ACEH	4,14	-0,37	2,79	4,21	4,23
2	SUMATERA UTARA	5,22	-1,07	2,61	4,73	5,01
3	SUMATERA BARAT	5,01	-1,61	3,29	4,36	4,62
4	RIAU	2,81	-1,13	3,36	4,55	4,21
5	JAMBI	4,35	-0,51	3,69	5,13	4,66
6	SUMATERA SELATAN	5,69	-0,11	3,58	5,23	5,08
7	BENGKULU	4,94	-0,02	3,27	4,31	4,26
8	LAMPUNG	5,26	-1,66	2,77	4,28	4,55
9	KEP. BANGKA BELITUNG	3,32	-2,29	5,05	4,40	4,38
10	KEP. RIAU	4,83	-3,80	3,43	5,09	5,20
11	DKI JAKARTA	5,82	-2,39	3,56	5,25	4,96
12	JAWA BARAT	5,02	-2,52	3,74	5,45	5,00
13	JAWA TENGAH	5,36	-2,65	3,33	5,31	4,98
14	DI YOGYAKARTA	6,59	-2,67	5,58	5,15	5,07
15	JAWA TIMUR	5,53	-2,33	3,56	5,34	4,95
16	BANTEN	5,26	-3,39	4,49	5,03	4,81
17	BALI	5,6	-9,34	-2,46	4,84	5,71
18	NUSA TENGGARA BARAT	3,9	-0,62	2,30	6,95	1,80
19	NUSA TENGGARA TIMUR	5,25	-0,84	2,52	3,05	3,52
20	KALIMANTAN BARAT	5,09	-1,82	4,80	5,07	4,46
21	KALIMANTAN TENGAH	6,12	-1,41	3,59	6,45	4,14
22	KALIMANTAN SELATAN	4,09	-1,82	3,48	5,11	4,84
23	KALIMANTAN TIMUR	4,7	-2,90	2,55	4,48	6,22
24	KALIMANTAN UTARA	6,89	-1,09	3,98	5,34	4,94
25	SULAWESI UTARA	5,65	-0,99	4,16	5,42	5,48
26	SULAWESI TENGAH	8,83	4,86	11,70	15,17	11,91
27	SULAWESI SELATAN	6,91	-0,71	4,64	5,09	4,51
28	SULAWESI TENGGARA	6,5	-0,65	4,10	5,53	5,35
29	GORONTALO	6,4	-0,02	2,41	4,04	4,50
30	SULAWESI BARAT	5,56	-2,34	2,57	2,30	5,25
31	MALUKU	5,41	-0,91	3,05	5,11	5,21
32	MALUKU UTARA	6,25	5,39	16,79	22,94	20,49
33	PAPUA BARAT	2,66	-0,76	-0,51	2,01	3,91
34	PAPUA	-15,74	2,39	15,16	8,97	5,22

NO	PROVINSI	TREN KINERJA PERTUMBUHAN EKONOMI			
		2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
1	ACEH	Melambat	Membaik	Stagnan	Stagnan
2	SUMATERA UTARA	Melambat	Membaik	Membaik	Stagnan
3	SUMATERA BARAT	Melambat	Membaik	Stagnan	Stagnan
4	RIAU	Melambat	Membaik	Stagnan	Melambat
5	JAMBI	Melambat	Membaik	Stagnan	Melambat
6	SUMATERA SELATAN	Melambat	Membaik	Membaik	Melambat
7	BENGKULU	Melambat	Membaik	Stagnan	Melambat
8	LAMPUNG	Melambat	Membaik	Membaik	Stagnan
9	KEP. BANGKA BELITUNG	Melambat	Membaik	Melambat	Melambat
10	KEP. RIAU	Melambat	Membaik	Membaik	Stagnan
11	DKI JAKARTA	Melambat	Membaik	Membaik	Melambat
12	JAWA BARAT	Melambat	Membaik	Membaik	Melambat
13	JAWA TENGAH	Melambat	Membaik	Membaik	Melambat
14	DI YOGYAKARTA	Melambat	Membaik	Melambat	Melambat
15	JAWA TIMUR	Melambat	Membaik	Membaik	Melambat
16	BANTEN	Melambat	Membaik	Stagnan	Melambat
17	BALI	Melambat	Membaik	Membaik	Stagnan
18	NUSA TENGGARA BARAT	Melambat	Membaik	Membaik	Melambat
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Melambat	Membaik	Stagnan	Stagnan
20	KALIMANTAN BARAT	Melambat	Membaik	Stagnan	Melambat
21	KALIMANTAN TENGAH	Melambat	Membaik	Membaik	Melambat
22	KALIMANTAN SELATAN	Melambat	Membaik	Membaik	Melambat
23	KALIMANTAN TIMUR	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
24	KALIMANTAN UTARA	Melambat	Membaik	Stagnan	Melambat
25	SULAWESI UTARA	Melambat	Membaik	Stagnan	Stagnan
26	SULAWESI TENGAH	Melambat	Membaik	Membaik	Melambat
27	SULAWESI SELATAN	Melambat	Membaik	Stagnan	Melambat
28	SULAWESI TENGGARA	Melambat	Membaik	Stagnan	Melambat
29	GORONTALO	Melambat	Membaik	Membaik	Stagnan
30	SULAWESI BARAT	Melambat	Membaik	Melambat	Membaik
31	MALUKU	Melambat	Membaik	Membaik	Stagnan
32	MALUKU UTARA	Melambat	Membaik	Membaik	Melambat
33	PAPUA BARAT	Melambat	Stagnan	Membaik	Membaik
34	PAPUA	Membaik	Membaik	Melambat	Melambat

Keterangan warna pada ***heatmap*** merupakan **perbandingan relatif antar daerah**

Keterangan Capaian Indikator Makro 2019-2023:

Sangat Kurang — Sangat Baik

Keterangan Tren Kinerja Indikator Makro 2019-2023:

: Tren Kinerja Membaik (tren >=15%)
: Tren Kinerja Stagnan (0<tren<15%)
: Tren Kinerja Melambat (<0%)

Perekonomian Indonesia masih ditunjang Sektor Industri Pengolahan

Capaian pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi cukup bervariasi. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah dimana perekonomian kedua daerah tersebut ditopang oleh pertambangan dan hilirisasi komoditas nikel.

Sektor Pertanian dan Pariwisata Perlu Akselerasi

Provinsi NTB memiliki pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 2023 yang disebabkan oleh melambatnya sektor pertanian serta belum optimalnya transformasi ekonomi nontambang terutama pada sektor pariwisata dan industri pengolahan.

Belum Optimalnya Hilirisasi Pertanian

Secara umum, faktor penghambat utama pencapaian indikator pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi antara lain: (1) Belum optimalnya hilirisasi produk unggulan khususnya pertanian dan perikanan; (2) Ketergantungan yang tinggi terhadap pertambangan sehingga pertumbuhan belum inklusif; (3) Diversifikasi ekonomi belum optimal; (4) Perubahan iklim; (5) Belum meratanya infrastruktur dan aksesibilitas konektivitas wilayah; serta (6) Inflasi.

Tingkat Kemiskinan di 34 Provinsi
Tahun 2019 - 2023

NO	PROVINSI	CAPAIAN TINGKAT KEMISKINAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	ACEH	15,32	14,99	15,33	14,64	14,45
2	SUMATERA UTARA	8,83	8,75	9,01	8,42	8,15
3	SUMATERA BARAT	6,42	6,28	6,63	5,92	5,95
4	RIAU	7,08	6,82	7,12	6,78	6,68
5	JAMBI	7,6	7,58	8,09	7,62	7,58
6	SUMATERA SELATAN	12,71	12,66	12,84	11,90	11,78
7	BENGKULU	15,23	15,03	15,22	14,62	14,04
8	LAMPUNG	12,62	12,34	12,62	11,57	11,11
9	KEP. BANGKA BELITUNG	4,62	4,53	4,90	4,45	4,52
10	KEP. RIAU	5,9	5,92	6,12	6,24	5,69
11	DKI JAKARTA	3,47	4,53	4,72	4,69	4,44
12	JAWA BARAT	6,91	7,88	8,40	8,06	7,62
13	JAWA TENGAH	10,8	11,41	11,79	10,93	10,77
14	DI YOGYAKARTA	11,7	12,28	12,80	11,34	11,04
15	JAWA TIMUR	10,37	11,09	11,40	10,38	10,35
16	BANTEN	5,09	5,92	6,66	6,16	6,17
17	BALI	3,79	3,78	4,53	4,57	4,25
18	NUSA TENGGARA BARAT	14,56	13,97	14,14	13,68	13,85
19	NUSA TENGGARA TIMUR	21,09	20,90	20,99	20,05	19,96
20	KALIMANTAN BARAT	7,49	7,17	7,15	6,73	6,71
21	KALIMANTAN TENGAH	4,98	4,82	5,16	5,28	5,11
22	KALIMANTAN SELATAN	4,55	4,38	4,83	4,49	4,29
23	KALIMANTAN TIMUR	5,94	6,10	6,54	6,31	6,11
24	KALIMANTAN UTARA	6,63	6,80	7,36	6,77	6,45
25	SULAWESI UTARA	7,66	7,62	7,77	7,28	7,38
26	SULAWESI TENGAH	13,48	12,92	13,00	12,33	12,41
27	SULAWESI SELATAN	8,69	8,72	8,78	8,63	8,70
28	SULAWESI TENGGARA	11,24	11,00	11,66	11,17	11,43
29	GORONTALO	15,52	15,22	15,61	15,42	15,15
30	SULAWESI BARAT	11,02	10,87	11,29	11,75	11,49
31	MALUKU	17,69	17,44	17,87	15,97	16,42
32	MALUKU UTARA	6,77	6,78	6,89	6,23	6,46
33	PAPUA BARAT	22,17	21,37	21,84	21,33	20,49
34	PAPUA	27,53	26,64	26,86	26,56	26,03

NO	PROVINSI	TREN KINERJA TINGKAT KEMISKINAN			
		2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
1	ACEH	Membaik	Melambat	Membaik	Membaik
2	SUMATERA UTARA	Stagnan	Melambat	Membaik	Membaik
3	SUMATERA BARAT	Stagnan	Melambat	Membaik	Melambat
4	RIAU	Membaik	Melambat	Membaik	Stagnan
5	JAMBI	Stagnan	Melambat	Membaik	Stagnan
6	SUMATERA SELATAN	Stagnan	Melambat	Membaik	Stagnan
7	BENGKULU	Membaik	Melambat	Membaik	Membaik
8	LAMPUNG	Membaik	Melambat	Membaik	Membaik
9	KEP. BANGKA BELITUNG	Stagnan	Melambat	Membaik	Melambat
10	KEP. RIAU	Melambat	Melambat	Melambat	Membaik
11	DKI JAKARTA	Melambat	Melambat	Stagnan	Membaik
12	JAWA BARAT	Melambat	Melambat	Membaik	Membaik
13	JAWA TENGAH	Melambat	Melambat	Membaik	Membaik
14	DI YOGYAKARTA	Melambat	Melambat	Membaik	Membaik
15	JAWA TIMUR	Melambat	Melambat	Membaik	Stagnan
16	BANTEN	Melambat	Melambat	Membaik	Melambat
17	BALI	Stagnan	Melambat	Melambat	Membaik
18	NUSA TENGGARA BARAT	Membaik	Melambat	Membaik	Melambat
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Membaik	Melambat	Membaik	Stagnan
20	KALIMANTAN BARAT	Membaik	Stagnan	Membaik	Stagnan
21	KALIMANTAN TENGAH	Membaik	Melambat	Melambat	Membaik
22	KALIMANTAN SELATAN	Membaik	Melambat	Membaik	Membaik
23	KALIMANTAN TIMUR	Melambat	Melambat	Membaik	Membaik
24	KALIMANTAN UTARA	Melambat	Melambat	Membaik	Membaik
25	SULAWESI UTARA	Stagnan	Melambat	Membaik	Melambat
26	SULAWESI TENGAH	Membaik	Melambat	Membaik	Melambat
27	SULAWESI SELATAN	Melambat	Melambat	Stagnan	Melambat
28	SULAWESI TENGGARA	Membaik	Melambat	Membaik	Melambat
29	GORONTALO	Membaik	Melambat	Membaik	Membaik
30	SULAWESI BARAT	Stagnan	Melambat	Melambat	Membaik
31	MALUKU	Membaik	Melambat	Membaik	Melambat
32	MALUKU UTARA	Melambat	Melambat	Membaik	Melambat
33	PAPUA BARAT	Membaik	Melambat	Membaik	Membaik
34	PAPUA	Membaik	Melambat	Membaik	Membaik

Keterangan warna pada ***heatmap*** merupakan **perbandingan relatif antar daerah**

Keterangan Capaian Indikator Makro 2019-2023:

Sangat Kurang — Sangat Baik

Keterangan Tren Kinerja Indikator Makro 2019-2023:

: Tren Kinerja Membaik (tren >=15%)
: Tren Kinerja Stagnan (0<tren<15%)
: Tren Kinerja Melambat (<0%)

Tingkat Kemiskinan Kawasan Timur Indonesia Masih Tinggi

Selama lima tahun terakhir, capaian tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia antara lain Wilayah Papua, Wilayah Maluku, Wilayah Sulawesi, dan Wilayah Nusa Tenggara selalu menjadi yang tertinggi di nasional.

Lebih dari 50 Persen Bantuan Sosial Masih Belum Tepat Sasaran

Berdasarkan data Bappenas (2024), tercatat hanya 41,53 persen penerima bantuan sosial yang tepat sasaran pada tahun 2023. Rendahnya akurasi penyaluran bantuan sosial disebabkan salah satunya oleh belum terintegrasinya sistem pendataan penerima bantuan.

Keterpaduan Data dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Menjadi Prioritas

Beberapa faktor penghambat utama penurunan tingkat kemiskinan, antara lain: (1) sumber data kemiskinan yang beragam (DTKS, Regsosek, P3KE), sedangkan Regsosek belum dapat dimanfaatkan oleh Pemda; (2) penyaluran bantuan sosial yang kurang tepat sasaran; (3) bantuan sosial banyak yang bersifat konsumtif; (4) pemanfaatan dana desa yang belum signifikan untuk penurunan kemiskinan; (5) belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana dasar seperti rumah layak huni, sanitasi, air bersih dan air minum; serta (6) inflasi. Untuk itu, perlu menjadi prioritas saat ini yaitu kebijakan dan intervensi yang dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Tingkat Pengangguran Terbuka di 34 Provinsi
Tahun 2019 - 2023

NO	PROVINSI	CAPAIAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	ACEH	6,17	6,59	6,30	6,17	6,03
2	SUMATERA UTARA	5,39	6,91	6,33	6,16	5,89
3	SUMATERA BARAT	5,38	6,88	6,52	6,28	5,94
4	RIAU	5,76	6,32	4,42	4,37	4,23
5	JAMBI	4,06	5,13	5,09	4,59	4,53
6	SUMATERA SELATAN	4,53	5,51	4,98	4,63	4,11
7	BENGKULU	3,26	4,07	3,65	3,59	3,42
8	LAMPUNG	4,03	4,67	4,69	4,52	4,23
9	KEP. BANGKA BELITUNG	3,58	5,25	5,03	4,77	4,56
10	KEP. RIAU	7,5	10,34	9,91	8,23	6,80
11	DKI JAKARTA	6,54	10,95	8,50	7,18	6,53
12	JAWA BARAT	8,04	10,46	9,82	8,31	7,44
13	JAWA TENGAH	4,44	6,48	5,95	5,57	5,13
14	DI YOGYAKARTA	3,18	4,57	4,56	4,06	3,69
15	JAWA TIMUR	3,82	5,84	5,74	5,49	4,88
16	BANTEN	8,11	10,64	8,98	8,09	7,52
17	BALI	1,57	5,63	5,37	4,80	2,69
18	NUSA TENGGARA BARAT	3,28	4,22	3,01	2,89	2,80
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3,14	4,28	3,77	3,54	3,14
20	KALIMANTAN BARAT	4,35	5,81	5,82	5,11	5,05
21	KALIMANTAN TENGAH	4,04	4,58	4,53	4,26	4,10
22	KALIMANTAN SELATAN	4,18	4,74	4,95	4,74	4,31
23	KALIMANTAN TIMUR	5,94	6,87	6,83	5,71	5,31
24	KALIMANTAN UTARA	4,49	4,97	4,58	4,33	4,01
25	SULAWESI UTARA	6,01	7,37	7,06	6,61	6,10
26	SULAWESI TENGAH	3,11	3,77	3,75	3,00	2,95
27	SULAWESI SELATAN	4,62	6,31	5,72	4,51	4,33
28	SULAWESI TENGGARA	3,52	4,58	3,92	3,36	3,15
29	GORONTALO	3,76	4,28	3,01	2,58	3,06
30	SULAWESI BARAT	2,98	3,32	3,13	2,34	2,27
31	MALUKU	6,69	7,57	6,93	6,88	6,31
32	MALUKU UTARA	4,81	5,15	4,71	3,98	4,31
33	PAPUA BARAT	6,43	6,80	5,84	5,37	5,38
34	PAPUA	3,51	4,28	3,33	2,83	2,67

NO	PROVINSI	TREN KINERJA TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA			
		2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
1	ACEH	Melambat	Membaik	Stagnan	Stagnan
2	SUMATERA UTARA	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
3	SUMATERA BARAT	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
4	RIAU	Melambat	Membaik	Stagnan	Stagnan
5	JAMBI	Melambat	Stagnan	Membaik	Stagnan
6	SUMATERA SELATAN	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
7	BENGKULU	Melambat	Membaik	Stagnan	Membaik
8	LAMPUNG	Melambat	Melambat	Membaik	Membaik
9	KEP. BANGKA BELITUNG	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
10	KEP. RIAU	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
11	DKI JAKARTA	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
12	JAWA BARAT	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
13	JAWA TENGAH	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
14	DI YOGYAKARTA	Melambat	Stagnan	Membaik	Membaik
15	JAWA TIMUR	Melambat	Stagnan	Membaik	Membaik
16	BANTEN	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
17	BALI	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
18	NUSA TENGGARA BARAT	Melambat	Membaik	Stagnan	Stagnan
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
20	KALIMANTAN BARAT	Melambat	Melambat	Membaik	Stagnan
21	KALIMANTAN TENGAH	Melambat	Stagnan	Membaik	Membaik
22	KALIMANTAN SELATAN	Melambat	Melambat	Membaik	Membaik
23	KALIMANTAN TIMUR	Melambat	Stagnan	Membaik	Membaik
24	KALIMANTAN UTARA	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
25	SULAWESI UTARA	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
26	SULAWESI TENGAH	Melambat	Stagnan	Membaik	Stagnan
27	SULAWESI SELATAN	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
28	SULAWESI TENGGARA	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
29	GORONTALO	Melambat	Membaik	Membaik	Melambat
30	SULAWESI BARAT	Melambat	Membaik	Membaik	Stagnan
31	MALUKU	Melambat	Membaik	Stagnan	Membaik
32	MALUKU UTARA	Melambat	Membaik	Membaik	Melambat
33	PAPUA BARAT	Melambat	Membaik	Membaik	Melambat
34	PAPUA	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik

Keterangan warna pada ***heatmap*** merupakan **perbandingan relatif antar daerah**

Keterangan Capaian Indikator Makro 2019-2023:

Sangat Kurang — Sangat Baik

Keterangan Tren Kinerja Indikator Makro 2019-2023:

: Tren Kinerja Membaik (tren >=15%)
: Tren Kinerja Stagnan (0<tren<15%)
: Tren Kinerja Melambat (<0%)

Tingkat Pengangguran Terbuka Masih Didominasi di Wilayah Perkotaan

Secara umum, capaian TPT di 34 Provinsi selama lima tahun terakhir terus membaik. Provinsi Sulawesi Barat, Papua, dan Bali merupakan daerah dengan TPT terendah sedangkan Provinsi Banten, Jawa Barat, Kep. Riau, dan DKI Jakarta memiliki TPT tertinggi. Terlihat bahwa pengangguran terbanyak berada di provinsi dengan karakteristik perkotaan yang didominasi sektor industri dan jasa.

Persentase TPT Berdasarkan Daerah Tempat Tinggal (persen)

Perkotaan	Perdesaan
6,40	3,88

Sumber: BPS, 2024

Perlu Integrasi antara Dunia Pendidikan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri

Direkomendasikan adanya kebijakan untuk penurunan TPT di daerah antara lain: (1) penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan untuk mendukung industri kreatif dan ekonomi lokal; (2) penguatan kebijakan *link and match* dunia pendidikan dan dunia industri/dunia usaha berbasis sumber daya lokal; dan (3) peningkatan produktivitas serta *up-skilling* dan *re-skilling* tenaga kerja.

Rasio Gini di 34 Provinsi
Tahun 2019 - 2023

NO	PROVINSI	CAPAIAN RASIO GINI				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	ACEH	0,319	0,323	0,324	0,311	0,296
2	SUMATERA UTARA	0,317	0,316	0,314	0,312	0,309
3	SUMATERA BARAT	0,306	0,305	0,306	0,300	0,280
4	RIAU	0,334	0,329	0,326	0,326	0,324
5	JAMBI	0,321	0,320	0,321	0,320	0,343
6	SUMATERA SELATAN	0,331	0,339	0,341	0,339	0,338
7	BENGKULU	0,340	0,334	0,326	0,315	0,333
8	LAMPUNG	0,329	0,327	0,323	0,314	0,324
9	KEP. BANGKA BELITUNG	0,269	0,262	0,256	0,236	0,245
10	KEP. RIAU	0,341	0,339	0,343	0,342	0,340
11	DKI JAKARTA	0,394	0,399	0,409	0,423	0,431
12	JAWA BARAT	0,402	0,403	0,412	0,417	0,425
13	JAWA TENGAH	0,361	0,362	0,372	0,374	0,369
14	DI YOGYAKARTA	0,423	0,434	0,441	0,439	0,449
15	JAWA TIMUR	0,370	0,366	0,374	0,371	0,387
16	BANTEN	0,365	0,363	0,365	0,363	0,368
17	BALI	0,366	0,369	0,378	0,363	0,362
18	NUSA TENGGARA BARAT	0,379	0,376	0,381	0,373	0,375
19	NUSA TENGGARA TIMUR	0,356	0,354	0,346	0,334	0,325
20	KALIMANTAN BARAT	0,327	0,317	0,313	0,314	0,321
21	KALIMANTAN TENGAH	0,336	0,329	0,323	0,319	0,317
22	KALIMANTAN SELATAN	0,334	0,332	0,330	0,317	0,313
23	KALIMANTAN TIMUR	0,330	0,328	0,334	0,327	0,322
24	KALIMANTAN UTARA	0,295	0,292	0,292	0,272	0,277
25	SULAWESI UTARA	0,367	0,370	0,365	0,365	0,370
26	SULAWESI TENGAH	0,327	0,326	0,316	0,308	0,304
27	SULAWESI SELATAN	0,389	0,389	0,382	0,377	0,377
28	SULAWESI TENGGARA	0,399	0,389	0,390	0,387	0,371
29	GORONTALO	0,407	0,408	0,408	0,418	0,417
30	SULAWESI BARAT	0,365	0,364	0,356	0,362	0,351
31	MALUKU	0,324	0,318	0,314	0,301	0,288
32	MALUKU UTARA	0,312	0,308	0,300	0,279	0,300
33	PAPUA BARAT	0,386	0,382	0,380	0,370	0,370
34	PAPUA	0,394	0,392	0,397	0,406	0,386

NO	PROVINSI	Tren Kinerja Rasio Gini			
		2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
1	ACEH	Melambat	Melambat	Membaik	Membaik
2	SUMATERA UTARA	Stagnan	Stagnan	Stagnan	Stagnan
3	SUMATERA BARAT	Stagnan	Melambat	Membaik	Membaik
4	RIAU	Stagnan	Stagnan	Melambat	Stagnan
5	JAMBI	Stagnan	Melambat	Stagnan	Melambat
6	SUMATERA SELATAN	Melambat	Melambat	Stagnan	Stagnan
7	BENGKULU	Membaik	Membaik	Membaik	Melambat
8	LAMPUNG	Stagnan	Stagnan	Membaik	Melambat
9	KEP. BANGKA BELITUNG	Membaik	Membaik	Membaik	Melambat
10	KEP. RIAU	Stagnan	Melambat	Stagnan	Stagnan
11	DKI JAKARTA	Melambat	Melambat	Melambat	Melambat
12	JAWA BARAT	Melambat	Melambat	Melambat	Melambat
13	JAWA TENGAH	Melambat	Melambat	Melambat	Stagnan
14	DI YOGYAKARTA	Melambat	Melambat	Stagnan	Melambat
15	JAWA TIMUR	Stagnan	Melambat	Stagnan	Melambat
16	BANTEN	Stagnan	Melambat	Stagnan	Melambat
17	BALI	Melambat	Melambat	Membaik	Stagnan
18	NUSA TENGGARA BARAT	Stagnan	Melambat	Membaik	Melambat
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Stagnan	Membaik	Membaik	Membaik
20	KALIMANTAN BARAT	Membaik	Stagnan	Melambat	Melambat
21	KALIMANTAN TENGAH	Membaik	Membaik	Stagnan	Stagnan
22	KALIMANTAN SELATAN	Stagnan	Stagnan	Membaik	Stagnan
23	KALIMANTAN TIMUR	Stagnan	Melambat	Membaik	Membaik
24	KALIMANTAN UTARA	Stagnan	Melambat	Membaik	Melambat
25	SULAWESI UTARA	Melambat	Stagnan	Melambat	Melambat
26	SULAWESI TENGAH	Stagnan	Membaik	Membaik	Stagnan
27	SULAWESI SELATAN	Melambat	Membaik	Stagnan	Melambat
28	SULAWESI TENGGARA	Membaik	Melambat	Stagnan	Membaik
29	GORONTALO	Melambat	Melambat	Melambat	Stagnan
30	SULAWESI BARAT	Stagnan	Membaik	Melambat	Membaik
31	MALUKU	Membaik	Stagnan	Membaik	Membaik
32	MALUKU UTARA	Stagnan	Membaik	Membaik	Melambat
33	PAPUA BARAT	Stagnan	Stagnan	Membaik	Melambat
34	PAPUA	Stagnan	Melambat	Melambat	Membaik

Keterangan warna pada ***heatmap*** merupakan **perbandingan relatif antar daerah**

Keterangan Capaian Indikator Makro 2019-2023:

Sangat Kurang — Sangat Baik

Keterangan Tren Kinerja Indikator Makro 2019-2023:

: Tren Kinerja Membaik (tren >=15%)
: Tren Kinerja Stagnan (0<tren<15%)
: Tren Kinerja Melambat (<0%)

Ketimpangan di Wilayah Perkotaan Masih yang Tertinggi

Secara umum, capaian rasio gini di 34 Provinsi selama lima tahun terakhir cukup bervariasi antardaerah namun memiliki kecenderungan tren yang melambat. Provinsi Kep. Bangka Belitung memiliki rasio gini terendah, sementara Provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jawa Barat merupakan daerah dengan rasio gini tertinggi di level nasional. Ketiga daerah tersebut merupakan daerah yang sama-sama memiliki karakteristik wilayah perkotaan.

Mayoritas Masyarakat Masih Bekerja di Sektor Informal

Faktor penghambat penurunan capaian rasio gini di Provinsi DI Yogyakarta adalah dimana sebagian besar penduduk bekerja pada sektor informal dengan pendapatan yang relatif lebih rendah dibanding pekerja sektor formal, serta masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat perkotaan dibandingkan masyarakat perdesaan.

Perlunya Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat

Direkomendasikan adanya kebijakan untuk peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan kualitas, akses, dan kuantitas infrastruktur dasar, pembangunan dan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis *endowment* melalui peningkatan konektivitas antarwilayah.

Indeks Pembangunan Manusia di 34 Provinsi
Tahun 2019 - 2023

NO	PROVINSI	CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	ACEH	71,9	73,29	73,48	74,11	74,70
2	SUMATERA UTARA	71,74	73,62	73,84	74,51	75,13
3	SUMATERA BARAT	72,39	74,29	74,56	75,16	75,64
4	RIAU	73	73,67	73,89	74,45	74,95
5	JAMBI	71,26	72,29	72,62	73,11	73,73
6	SUMATERA SELATAN	70,02	71,62	71,83	72,48	73,18
7	BENGKULU	71,21	72,93	73,16	73,68	74,30
8	LAMPUNG	69,57	71,04	71,25	71,79	72,48
9	KEP. BANGKA BELITUNG	71,3	72,74	72,96	73,50	74,09
10	KEP. RIAU	75,48	77,69	77,87	78,48	79,08
11	DKI JAKARTA	80,76	81,92	82,25	82,77	83,55
12	JAWA BARAT	72,03	72,61	72,96	73,63	74,24
13	JAWA TENGAH	71,73	71,88	72,17	72,80	73,39
14	DI YOGYAKARTA	79,99	79,95	80,22	80,65	81,09
15	JAWA TIMUR	71,5	73,04	73,48	74,05	74,65
16	BANTEN	72,44	74,41	74,68	75,25	75,77
17	BALI	75,38	76,52	76,69	77,40	78,01
18	NUSA TENGGARA BARAT	68,14	70,46	70,86	71,65	72,37
19	NUSA TENGGARA TIMUR	65,23	66,93	67,02	67,63	68,40
20	KALIMANTAN BARAT	67,65	68,76	68,99	69,71	70,47
21	KALIMANTAN TENGAH	70,91	72,62	72,81	73,17	73,73
22	KALIMANTAN SELATAN	70,72	73,09	73,45	74,00	74,66
23	KALIMANTAN TIMUR	76,61	75,94	76,60	77,36	78,20
24	KALIMANTAN UTARA	71,15	71,00	71,57	72,21	72,88
25	SULAWESI UTARA	72,99	73,67	74,03	74,52	75,04
26	SULAWESI TENGAH	69,5	70,31	70,54	71,01	71,66
27	SULAWESI SELATAN	71,66	73,08	73,38	73,96	74,60
28	SULAWESI TENGGARA	71,2	71,61	71,82	72,38	72,94
29	GORONTALO	68,49	69,51	69,82	70,62	71,25
30	SULAWESI BARAT	65,73	68,40	68,64	69,19	69,80
31	MALUKU	69,45	71,34	71,55	72,04	72,75
32	MALUKU UTARA	68,7	69,30	69,56	70,26	70,98
33	PAPUA BARAT	64,7	65,94	66,11	66,72	67,47
34	PAPUA	60,84	61,22	61,40	62,16	63,01

NO	PROVINSI	TREN KINERJA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA			
		2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
1	ACEH	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
2	SUMATERA UTARA	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
3	SUMATERA BARAT	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
4	RIAU	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
5	JAMBI	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
6	SUMATERA SELATAN	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
7	BENGKULU	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
8	LAMPUNG	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
9	KEP. BANGKA BELITUNG	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
10	KEP. RIAU	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
11	DKI JAKARTA	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
12	JAWA BARAT	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
13	JAWA TENGAH	Stagnan	Membaik	Membaik	Membaik
14	DI YOGYAKARTA	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
15	JAWA TIMUR	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
16	BANTEN	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
17	BALI	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
18	NUSA TENGGARA BARAT	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Membaik	Stagnan	Membaik	Membaik
20	KALIMANTAN BARAT	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
21	KALIMANTAN TENGAH	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
22	KALIMANTAN SELATAN	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
23	KALIMANTAN TIMUR	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
24	KALIMANTAN UTARA	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
25	SULAWESI UTARA	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
26	SULAWESI TENGAH	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
27	SULAWESI SELATAN	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
28	SULAWESI TENGGARA	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
29	GORONTALO	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
30	SULAWESI BARAT	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
31	MALUKU	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
32	MALUKU UTARA	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
33	PAPUA BARAT	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
34	PAPUA	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik

Keterangan warna pada ***heatmap*** merupakan **perbandingan relatif antar daerah**

Keterangan Capaian Indikator Makro 2019-2023:

Sangat Kurang — Sangat Baik

Keterangan Tren Kinerja Indikator Makro 2019-2023:

: Tren Kinerja Membaik (tren >=15%)
: Tren Kinerja Stagnan (0<tren<15%)
: Tren Kinerja Melambat (<0%)

Pembangunan Manusia di Wilayah Papua Perlu Mendapatkan Perhatian

Secara umum, tren kinerja indikator IPM di 34 provinsi membaik selama periode 2019-2023. Capaian indikator IPM di Provinsi DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, dan Kep. Riau merupakan yang tertinggi. Sedangkan Provinsi Papua Barat dan Papua merupakan yang terendah.

Pemerataan Fasilitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan Menjadi Kunci

Capaian IPM terutama di Kawasan Timur Indonesia masih perlu mendapat perhatian. Beberapa faktor penghambat utama pencapaian indikator IPM antara lain: (1) Kualitas, kuantitas, serta distribusi tenaga pendidik dan kesehatan masih belum optimal; (2) Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; (3) Penyediaan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang belum merata; serta (4) Produktivitas SDM yang masih rendah akibat rendahnya tingkat pendidikan. Oleh karena itu, perlu ada strategi untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut salah satunya melalui pemerataan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan di Kawasan Timur Indonesia.

Pelaksanaan Intervensi di Daerah

Highlight Indikasi Intervensi Optimal

Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Masih Menjadi Tumpuan dalam Mendorong Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

1. Jalan tol trans Jawa dan Sumatra berperan penting dalam mendorong percepatan mobilitas barang dan jasa antardaerah.
2. Pelaksanaan Inpres Jalan memberikan manfaat dalam mempercepat dan meningkatkan kualitas/mantap jalan di daerah.

Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Menjadi Penopang dalam Upaya Penurunan Angka Kemiskinan di Daerah

1. Penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku membantu mendorong ketersediaan air baku di kawasan 3T maupun wilayah perkotaan.
2. Pelayanan air bersih dan sanitasi terintegrasi mendorong cakupan wilayah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi secara terintegrasi.
3. Pemberdayaan perumahan swadaya membantu fasilitasi dan peningkatan kualitas rumah swadaya

Peningkatan Sarpras Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Menjadi Salah Satu Kunci dalam Upaya Meningkatkan dan Mempercepat Pemerataan Kualitas SDM

Capaian Kondisi Mantap Jalan Tahun 2020

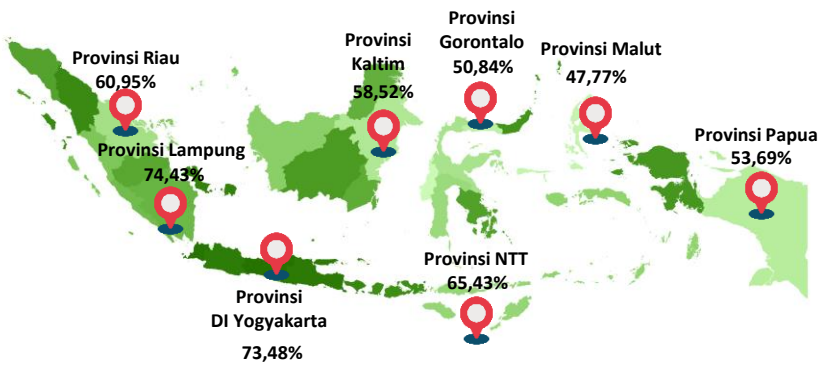

Capaian Kondisi Mantap Jalan Tahun 2023

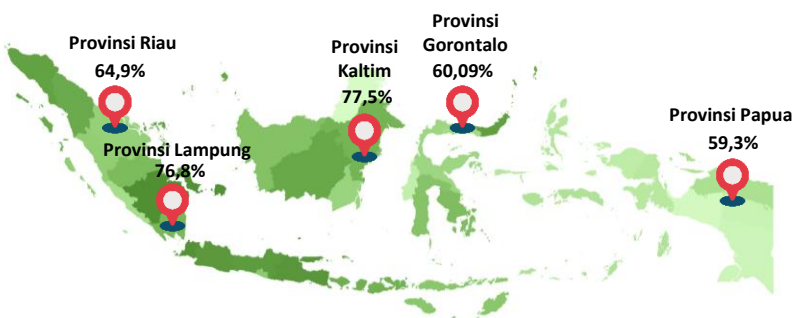

Pelaksanaan Intervensi di Daerah

Highlight Indikasi Intervensi Kurang Optimal

Intervensi Terkendala Pada Saat Pelaksanaan (*Output* dan *Outcome* Tidak Tercapai)

Kendala ini secara umum mencakup aspek teknis maupun administrasi seperti masalah infrastruktur, perizinan, kewenangan, atau alokasi anggaran yang terbatas dan tidak tepat waktu. Selain itu, kurangnya dukungan daerah dan kapabilitas pelaksana di daerah juga berkontribusi terhadap rendahnya realisasi. Contoh: Pembangunan beberapa proyek infrastruktur yang meliputi beberapa ruas tol yang pembangunannya terkendala permasalahan lahan dan mengakibatkan kemunduran penyelesaian proyek.

Pembangunan Bendungan belum terhubung dengan jaringan irigasi tersier dan lahan pertanian yang ada.

Kawasan Industri terbangun namun kurang termanfaatkan, karena tidak terhubung dengan akses konektivitas utama seperti jalan tol atau pelabuhan.

Bandara yang dibangun kurang termanfaatkan, karena lokasi dan aksesibilitas yang terbatas.

Intervensi *Output* Tercapai, Namun *Outcome* Belum Optimal

Kurangnya integrasi dengan program lain atau ketidaksesuaian antara intervensi pembangunan dengan kebutuhan spesifik daerah. Contoh: Pembangunan Kawasan Strategis eksisting (KEK/KI/Kawasan strategis lainnya) hampir seluruhnya belum optimal dalam mendorong kinerja pembangunan di daerah khususnya untuk pertumbuhan ekonomi dan TPT, yang disebabkan di antaranya kurangnya integrasi antara kawasan dengan akses utama, kurangnya *link and match* atau *supply* antara kebutuhan tenaga kerja di kawasan dengan SDM di daerah serta minimnya realisasi investasi yang masuk ke kawasan.

Pembangunan proyek jalan tol di beberapa ruas mengalami kendala penyelesaian *output* dari target waktu yang diharapkan sehingga operasionalisasi dan pemanfaatannya tidak tercapai.

Implementasi intervensi bantuan sosial yang masih kurang optimal, karena kurang tepat sasaran dan kurang termanfaatkannya data Regsosek dalam proses mekanisme penyalurannya.

Pengembangan lumbung pangan kurang memperhatikan kondisi ekologi dan kecocokan lahan dengan komoditas yang akan ditanam.

3.2 Evaluasi Kontribusi Tahun 2020 - 2023

Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi di 34 Provinsi
Tahun 2020 - 2023

Kontribusi Provinsi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Periode 2020-2023

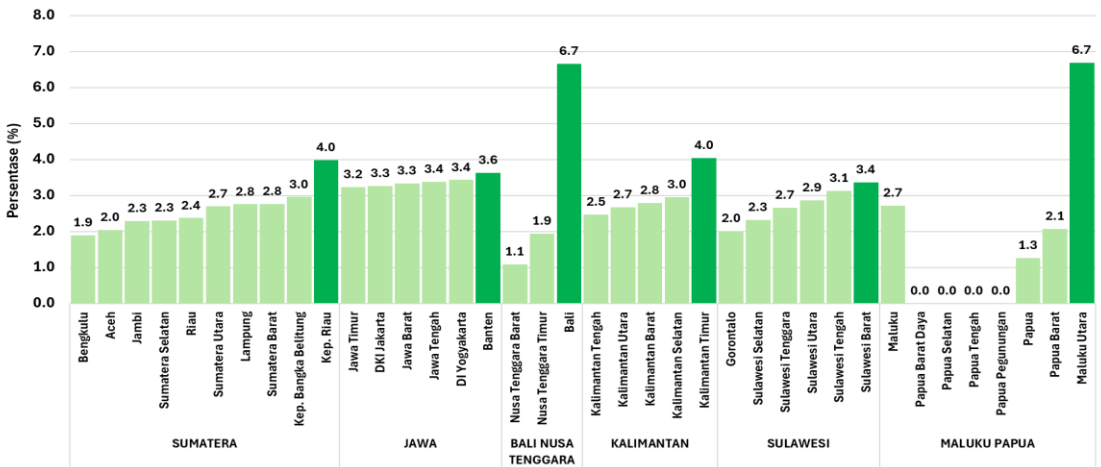

Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19 Ditopang oleh Pemulihan Ekonomi di Daerah

Kontribusi daerah terhadap capaian laju pertumbuhan ekonomi nasional periode 2020-2023 menunjukkan besaran yang bervariasi, mengingat masing-masing provinsi mengalami fase pemulihan yang berbeda-beda pasca terkena dampak pandemi global Covid-19. Secara umum, kondisi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik proyek pembangunan nasional yang dilaksanakan di masing-masing provinsi yang berfokus pada pengembangan pariwisata, pembangunan kawasan industri, serta pembangunan infrastruktur transportasi untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, ditambah dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk menarik investasi di sektor energi, tidak hanya telah memperkuat peran sejumlah provinsi sebagai pusat ekonomi regional, tetapi juga memperkuat posisi masing-masing provinsi dalam berkontribusi terhadap capaian laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Bali dan Maluku Utara Berkontribusi Paling Tinggi dalam Pertumbuhan Perekonomian Nasional Periode 2020 – 2023

Angka PDB Riil Nasional meningkat dari Rp10.722 triliun (2020) menjadi Rp12.301 triliun (2023) dengan rata-rata mencapai 4,68 persen per tahun selama periode 2020-2023. Provinsi Bali dan Maluku Utara menjadi provinsi dengan kontribusi paling tinggi dalam peningkatan LPE Nasional selama periode 2020 – 2023. Dari sisi kewilayahan, rata-rata provinsi yang berada di Wilayah Jawa memiliki kontribusi sebesar 3,4 persen dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional, diikuti oleh Wilayah Bali dan Nusa Tenggara (3,2 persen), Kalimantan (3,0 persen), Sulawesi (2,7 persen), Sumatra (2,6 persen), serta Maluku dan Papua (1,6 persen). Provinsi Bali, meskipun terkena dampak pandemi yang signifikan namun mulai pulih didukung oleh revitalisasi pariwisata dan infrastruktur seperti pengembangan kawasan wisata Nusa Dua serta bandara internasional. Sedangkan Provinsi Maluku Utara, selain dipengaruhi aktivitas hilirisasi pertambangan juga terjadi peningkatan konektivitas dan akses pasar melalui proyek pengembangan pelabuhan dan infrastruktur di Ternate yang turut berkontribusi mendukung pertumbuhan sektor perikanan dan pariwisata.

Kontribusi Tingkat Kemiskinan di 34 Provinsi
Tahun 2020 - 2023

Kontribusi Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan Nasional Periode 2020-2023

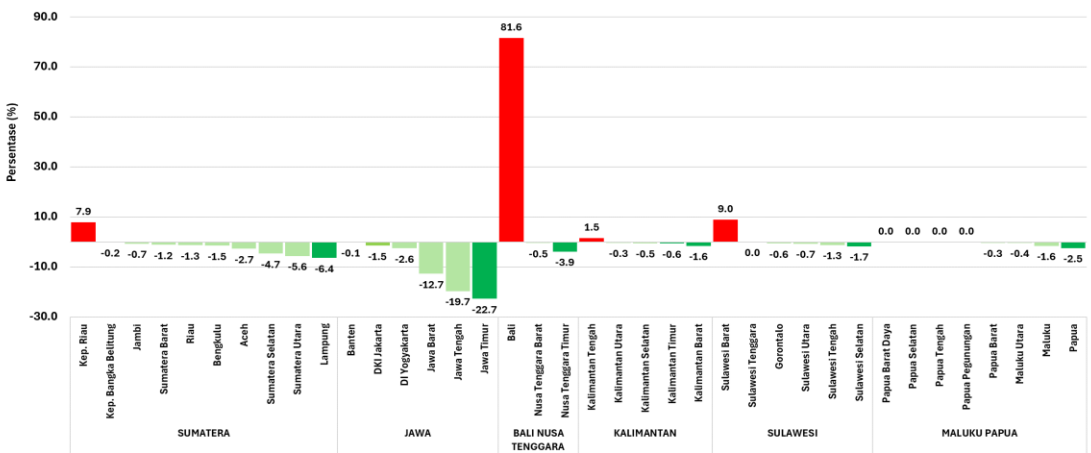

Perlinsos menjadi Faktor Penting Penurunan Tingkat Kemiskinan

Kontribusi daerah terhadap capaian penurunan angka kemiskinan nasional periode 2020-2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Pemulihan ekonomi pasca Covid-19 yang memungkinkan banyak sektor usaha dapat kembali beroperasi; (2) Program jaminan sosial dan bantuan sosial dari pemerintah membantu masyarakat yang terdampak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka; (3) Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan; (4) Program pelatihan dan pendampingan untuk pelaku UMKM guna meningkatkan kapasitas dan akses pasar; (5) Program pelatihan dan pendampingan bagi petani untuk meningkatkan hasil pertanian dan diversifikasi tanaman praktik pertanian yang ramah lingkungan; serta (6) Dampak sosial dari pengembangan infrastruktur desa dimana hal tersebut turut memperbaiki aksesibilitas dan memperluas kesempatan ekonomi masyarakat. Faktor-faktor di atas telah meningkatkan pendapatan dan akses terhadap layanan dasar pada sektor rumah tangga secara signifikan selama periode 2020-2023, sehingga sebagian besar masyarakat berangsur-angsur dapat keluar dari kemiskinan – khususnya di Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Jawa Timur Berkontribusi Paling Signifikan dalam Penurunan Kemiskinan Nasional Periode 2020 – 2023

Tingkat Kemiskinan Nasional menurun dari 10,19 persen (2020) menjadi 9,36 persen (2023) terhadap total populasi penduduk miskin, yang berarti bahwa tingkat kemiskinan nasional rata-rata berkurang 0,03% per tahun selama periode 2020-2023. Provinsi Jawa Timur berkontribusi sebesar 22,7 persen terhadap total penurunan tingkat kemiskinan nasional. Sebaliknya, Provinsi Bali berkontribusi sebesar 81,6 persen dalam perlambatan penurunan tingkat kemiskinan nasional. Secara kewilayahan, rata-rata provinsi di Wilayah Jawa memiliki kontribusi sebesar 9,9 persen dalam upaya menurunkan perubahan TK nasional selama periode 2020-2023, diikuti oleh provinsi-provinsi di Sumatra (1,6%), Maluku dan Papua (0,6%), serta Kalimantan (0,3%). Adapun Wilayah Bali-Nusa Tenggara dan Sulawesi justru berkontribusi meningkatkan perubahan TK nasional dalam periode yang sama, yakni masing-masing secara rata-rata sebesar 25,8 persen dan 0,8 persen. Ketergantungan Provinsi Bali pada sektor pariwisata yang terdampak parah oleh pandemi COVID-19 menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Meskipun selanjutnya terjadi pemulihan ekonomi, faktor ketidakpastian dan fluktuasi dalam kunjungan wisatawan turut memengaruhi ketersediaan lapangan kerja.

Kontribusi Tingkat Pengangguran Terbuka di 34 Provinsi
Tahun 2020 - 2023

Kontribusi Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional Periode 2020-2023

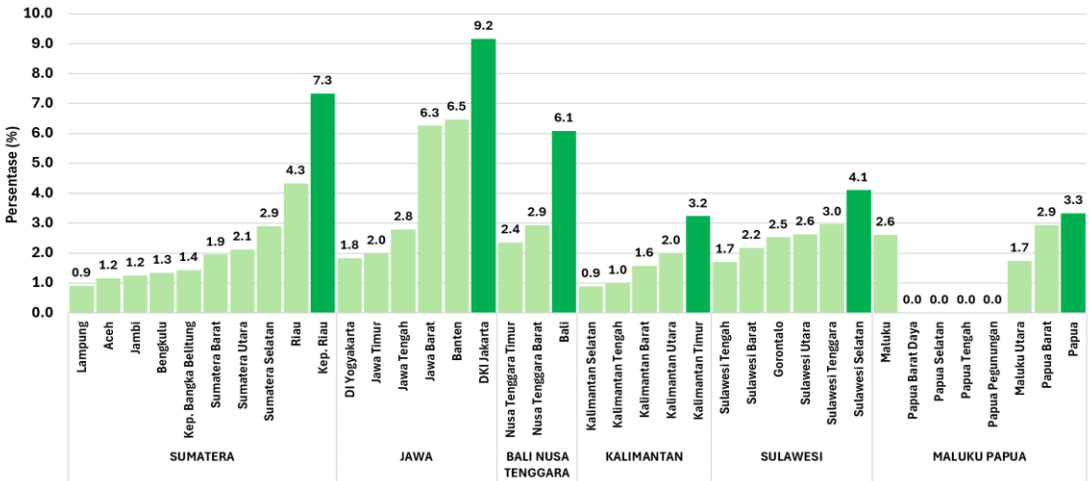

Pemulihan Sektor Pariwisata dan Perdagangan Pasca Covid-19 sebagai Faktor Pendukung Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Daerah

Kontribusi daerah terhadap capaian penurunan angka TPT nasional periode 2020-2023 menunjukkan besaran yang bervariasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seiring dengan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 di berbagai sektor ekonomi (misal, pariwisata dan perdagangan), lebih banyak lapangan kerja yang mulai tercipta berkat dukungan program pemerintah yang meliputi pelatihan kerja, bantuan subsidi upah, dan pengembangan kewirausahaan. Selain itu, terjadi pergeseran struktur ekonomi menuju tren digitalisasi yang membuat sektor-sektor ekonomi menjadi lebih produktif dalam menciptakan jenis pekerjaan baru. Di sisi lain, adanya tantangan dalam upaya mengurangi pengangguran berupa peningkatan jumlah angkatan kerja yang pesat terutama di kalangan generasi muda.

Jakarta dan Kep. Riau Berkontribusi Paling Signifikan dalam Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional Periode 2020 – 2023

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional menurun dari 7,07 persen (2020) menjadi 5,32 persen (2023) terhadap total angkatan kerja, yang berarti bahwa angka TPT nasional rata-rata berkurang 0,09 persen per tahun selama periode 2020-2023. Provinsi DKI Jakarta berkontribusi sebesar 9,2 persen dari total realisasi penurunan persentase angka TPT nasional, diikuti Provinsi Kep. Riau dengan kontribusi sebesar 7,3 persen. Rata-rata provinsi yang berada di Wilayah Jawa memiliki kontribusi sebesar 4,7 persen dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka nasional selama periode 2020-2023, diikuti oleh provinsi-provinsi di Bali dan Nusa Tenggara (3,8 persen), Sulawesi (2,7 persen), Sumatra (2,5 persen), Kalimantan (1,7 persen), serta Maluku dan Papua (1,3 persen). Pemulihan sektor pariwisata dan perdagangan pasca Covid-19 menjadi pendorong utama penurunan TPT di Provinsi Kep. Riau.

Kontribusi Rasio Gini di 34 Provinsi
Tahun 2020 - 2023

Kontribusi Provinsi Terhadap Rasio Gini Nasional Periode 2020-2023

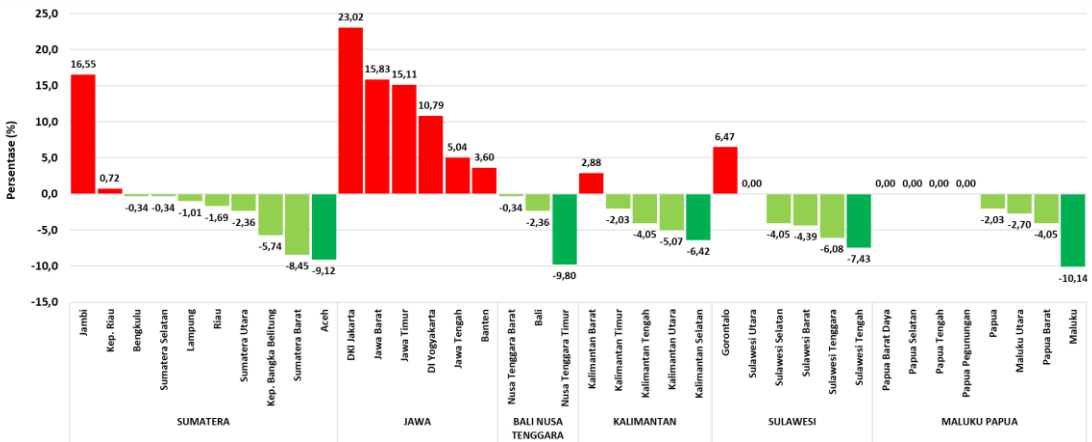

Wilayah Jawa Berkontribusi Paling Tinggi pada Kenaikan Ketimpangan Nasional Periode 2020 – 2023

Angka Ketimpangan Pendapatan yang diukur dengan Rasio Gini Nasional meningkat dari 0,381 (2020) menjadi 0,388 (2023), yang berarti bahwa angka Rasio Gini nasional rata-rata meningkat 0,002 poin per tahun selama periode 2020-2023. Provinsi DKI Jakarta berkontribusi sebesar 23,0 persen dari total penurunan poin indeks yang terjadi. Rata-rata provinsi yang berada di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara memiliki kontribusi sebesar 4,2 persen dalam upaya menurunkan perubahan Rasio Gini nasional selama periode 2020-2023, diikuti oleh Wilayah Kalimantan (2,9 persen), Sulawesi (2,6 persen), Maluku dan Papua (2,4 persen), serta Sumatra (1,2 persen). Adapun provinsi-provinsi yang berada di Wilayah Jawa justru berkontribusi dalam peningkatan Rasio Gini nasional dalam periode yang sama, yakni rata-rata sebesar 12,2 persen. Peningkatan ketimpangan pendapatan yang terjadi di Wilayah Jawa lebih banyak didorong oleh faktor urbanisasi dan belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja di sektor usaha formal yang mengakibatkan terdesaknya para pekerja ke dalam sektor informal dengan tawaran upah rendah.

Urbanisasi di Wilayah Perkotaan Tidak Diiringi Peningkatan Kesempatan Kerja

Kontribusi daerah terhadap capaian Rasio Gini nasional periode 2020-2023 menunjukkan besaran yang bervariasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Respons pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor perekonomian yang berakibat pada peningkatan ketimpangan dan relatif berlangsung lebih cepat bagi masyarakat kelompok berpendapatan tinggi daripada kelompok berpendapatan rendah; (2) Adanya lonjakan inflasi akibat dislokasi ekonomi dan ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi sektoral, gangguan rantai pasokan, kebijakan stimulus fiskal dan moneter yang diberikan oleh pemerintah dan bank sentral sebagai respons terhadap terkait pandemi COVID-19 yang memberikan tekanan lebih besar kepada kelompok berpendapatan rendah dan berujung pada berkurangnya daya beli; (3) Adanya perubahan kebijakan tarif dan insentif perpajakan yang mempengaruhi daya beli, tetapi tidak berpengaruh pada distribusi kekayaan kelompok pendapatan tertentu; dan (4) Faktor struktural seperti urbanisasi yang cepat dan meningkatnya biaya hidup di perkotaan, tetapi tidak diikuti oleh pembukaan kesempatan kerja dengan penawaran nilai upah yang lebih baik.

Kontribusi Indeks Pembangunan Manusia di 34 Provinsi
Tahun 2020 - 2023

Kontribusi Provinsi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Nasional Periode 2020-2023

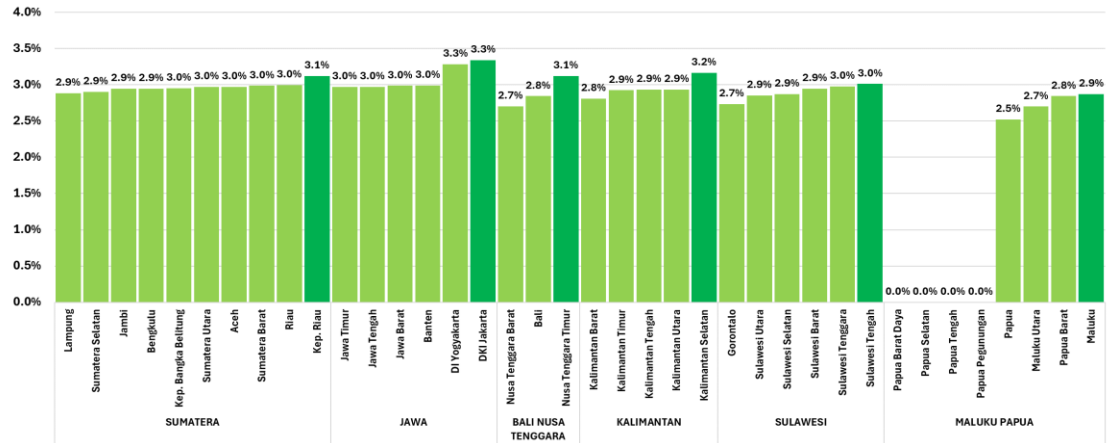

Pemulihan Ekonomi Pascapandemi Mengakselerasi Peningkatan Aspek Pengeluaran

Kontribusi daerah terhadap capaian peningkatan IPM nasional periode 2020-2023 menunjukkan besaran yang bervariasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor: (1) Pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 berperan penting dalam meningkatkan kembali pendapatan masyarakat; (2) Pelaksanaan program pemerintah yang berfokus pada perbaikan akses dan kualitas pelayanan kesehatan (misalnya, program vaksinasi) dimana hal tersebut berkontribusi pada peningkatan harapan hidup masyarakat; (3) Adanya peningkatan akses pendidikan melalui program beasiswa dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat; (4) Kebijakan ekonomi pemerintah – salah satunya investasi infrastruktur dasar – yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Jakarta Berkontribusi Paling Tinggi pada Kenaikan IPM Nasional Periode 2020 – 2023

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional meningkat dari 72,81 (2020) menjadi 74,39 (2023), yang berarti bahwa angka IPM nasional rata-rata bertambah 0,395 poin per tahun selama periode 2020-2023. Provinsi DKI Jakarta berkontribusi paling tinggi sebesar 3,3 persen dari total kenaikan poin indeks yang terjadi. Rata-rata provinsi yang berada di Pulau Jawa memiliki kontribusi sebesar 3,1 persen dalam upaya menaikkan angka IPM nasional selama periode 2020-2023, diikuti oleh provinsi-provinsi di Sumatera (3,0%), Kalimantan (3,0%), Bali dan Nusa tenggara (2,9%), Sulawesi (2,4%), serta Maluku dan Papua (1,4%). Peningkatan IPM di Jakarta didorong oleh penyediaan program-program pendidikan yang lebih inklusif, peningkatan layanan kesehatan, dan kebijakan pengembangan perkotaan berkelanjutan (misalnya, perumahan dan akses transportasi umum). Secara umum, seluruh provinsi di Indonesia mengalami tren peningkatan IPM dalam periode 2020-2023.

3.3 Evaluasi Kinerja Agenda Pembangunan di Daerah

Evaluasi Kinerja Agenda Pembangunan di Daerah

Agenda Pembangunan 1

Agenda Pembangunan (AP) 1 dalam RPJMN 2020 - 2024 yaitu **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.** Kinerja daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun AP 1 antara lain: (1) Pola Pangan Harapan; (2) Nilai Tukar Petani; (3) Nilai Tukar Nelayan; dan (4) Realisasi PMA & PMDN.

***Heatmap* Sasaran Agenda Pembangunan 1 di 34 Provinsi**

NO	PROVINSI	AGENDA PEMBANGUNAN 1			
		Skor Pola Pangan Harapan	Nilai Tukar Petani	Nilai Tukar Nelayan	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun)
1	ACEH				
2	SUMATERA UTARA				
3	SUMATERA BARAT				
4	RIAU				
5	JAMBI				
6	SUMATERA SELATAN				
7	BENGKULU				
8	LAMPUNG				
9	KEP. BANGKA BELITUNG				
10	KEP. RIAU				
11	DKI JAKARTA				
12	JAWA BARAT				
13	JAWA TENGAH				
14	DI YOGYAKARTA				
15	JAWA TIMUR				
16	BANTEN				
17	BALI				
18	NUSA TENGGARA BARAT				
19	NUSA TENGGARA TIMUR				
20	KALIMANTAN BARAT				
21	KALIMANTAN TENGAH				
22	KALIMANTAN SELATAN				
23	KALIMANTAN TIMUR				
24	KALIMANTAN UTARA				
25	SULAWESI UTARA				
26	SULAWESI TENGAH				
27	SULAWESI SELATAN				
28	SULAWESI TENGGARA				
29	GORONTALO				
30	SULAWESI BARAT				
31	MALUKU				
32	MALUKU UTARA				
33	PAPUA BARAT				
34	PAPUA				

Sumber: EPD, diolah

Capaian Agenda Pembangunan 1 di 34 Provinsi

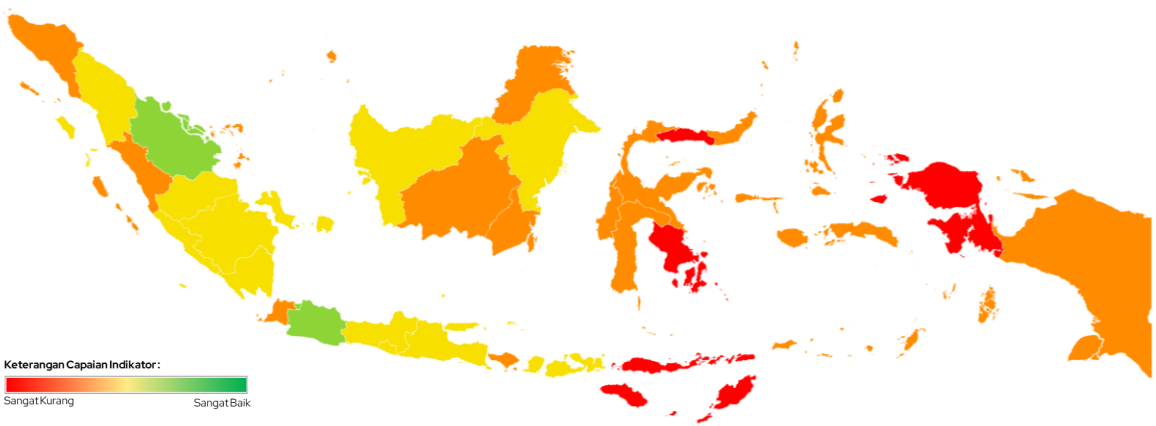

Masih Timpangnya Kualitas Konsumsi Pangan dan Aktivitas Investasi

Secara umum, hasil capaian kinerja menunjukkan rata-rata kinerja daerah masih kurang optimal. Untuk daerah dengan capaian kurang optimal mayoritas berada di wilayah Timur, sedangkan kinerja yang lebih baik dicapai oleh daerah-daerah yang berada di wilayah Barat. Jika melihat dengan lebih detail, daerah yang memiliki kinerja tertinggi dicapai oleh Provinsi Riau, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Di sisi lain, daerah dengan capaian yang masih sangat kurang adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Papua Barat. Kurang optimalnya kinerja ketiga provinsi tersebut utamanya dihambat oleh capaian Pola Pangan Harapan dan Nilai Realisasi PMA dan PMDN yang sangat rendah, terlebih lagi untuk Nusa Tenggara Timur yang semua capaian indikatornya masih sangat kurang optimal. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan diversifikasi dan distribusi pangan serta kegiatan penanaman modal, terutama di Kawasan Timur Indonesia.

Evaluasi Kinerja Agenda Pembangunan di Daerah

Agenda Pembangunan 1

Nilai Tukar Petani (Nilai)

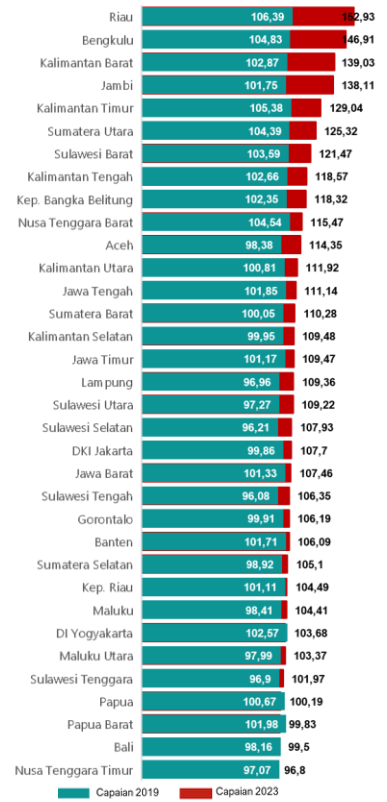

Sumber: Bappenas, diolah

Kebijakan Biosolar (B30 - B50) Meningkatkan Nilai Tukar Petani Cukup Signifikan

Di tahun 2023, Nilai Tukar Petani (NTP) tertinggi berhasil dicapai oleh Provinsi Riau yang diikuti oleh Bengkulu dan Kalimantan Barat. Tingginya NTP di Riau didorong kebijakan nasional Biosolar (B.30 - B.50). Sementara itu, capaian NTP terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Papua Barat yang memiliki NTP di bawah 100, yang berarti pendapatan petani lebih rendah dari pengeluaran untuk konsumsi di provinsi tersebut. Beberapa faktor penghambat utama capaian NTP yaitu terjadinya bencana iklim seperti *El Nino* dan Badai Seroja yang menyebabkan para petani mengalami gagal panen karena kondisi cuaca yang tidak pasti, serta faktor kemandirian petani yang masih bergantung pada bantuan pemerintah.

Nilai Tukar Nelayan (Nilai)

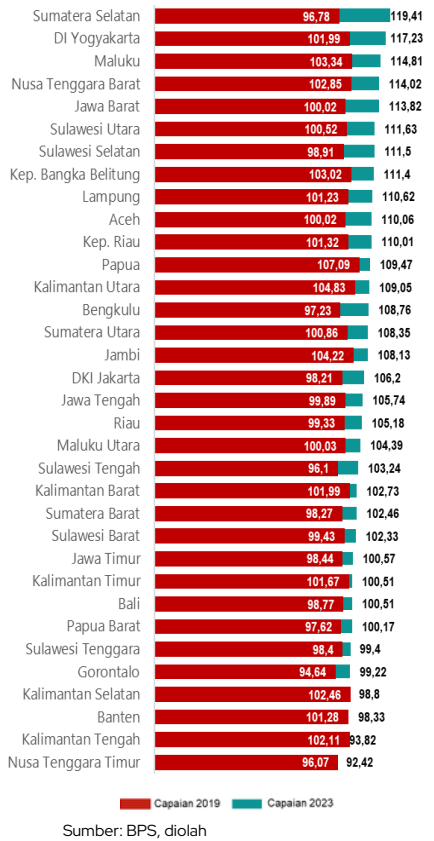

Sumber: BPS, diolah

Pentingnya Investasi Infrastruktur dan Teknologi Perikanan di Daerah

Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) tertinggi pada tahun 2023 dan meningkat cukup signifikan dalam empat tahun terakhir. Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan capaian NTN terendah dan capaiannya menurun dalam empat tahun terakhir. Faktor utama yang menghambat capaian NTN di Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain penurunan harga ikan (deflasi), kenaikan harga BBM, biaya produksi, faktor perubahan iklim, minimnya infrastruktur perikanan, serta rendahnya investasi teknologi. Permasalahan ini juga ditemukan di Provinsi Kalimantan Tengah dimana para pembudidaya dan nelayan mengalami kesulitan dalam melakukan alih pemahaman maupun alih teknologi, sehingga menyebabkan produksi perikanan masih kurang optimal.

Evaluasi Kinerja Agenda Pembangunan di Daerah

Agenda Pembangunan 1

Diversifikasi dan Distribusi Pangan menjadi Faktor Utama Rendahnya Pola Pangan Harapan

Provinsi dengan skor Pola Pangan Harapan tertinggi pada tahun 2023 adalah Provinsi DI Yogyakarta, sedangkan yang terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Faktor utama dari rendahnya skor pola pangan harapan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dari sisi distribusi. Akses distribusi pangan dan akses masyarakat pada sumber pangan utama masih sangat rendah dan mahal. Selain itu, terdapat juga kelemahan dalam pendistribusian bahan pangan di mana lembaga pemasaran yang ada belum menjalankan fungsinya secara baik, sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan di dalam pemasaran yang pada akhirnya menciptakan kondisi pemasaran yang kurang efisien. Distribusi pangan yang efektif sangat didukung oleh kelembagaan usaha ekonomi yang kuat sehingga akan berdampak pada tingkat harga bahan pangan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)

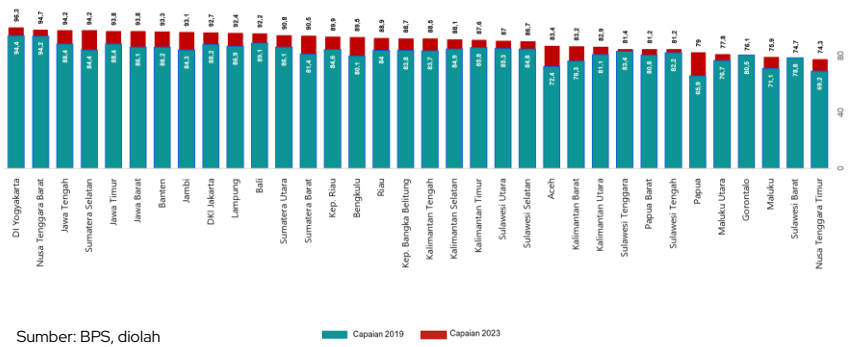

Sumber: BPS, diolah

Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun)

Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, diolah

Aktivitas Investasi Masih Terfokus di Kawasan Barat Indonesia Khususnya Pulau Jawa

Nilai Realisasi PMA dan PMDN tertinggi dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta di tahun 2023, lalu diikuti oleh Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian angka realisasi investasi di Provinsi DKI Jakarta antara lain dikembangkannya sistem pengajuan izin dan non izin secara *online*, pendirian Jakarta *Investment Center* (JIC), dan pengintegrasian Sistem JakEvo-AJIB untuk memudahkan perizinan secara *online*. Sementara itu, Provinsi Papua merupakan daerah dengan nilai realisasi yang terendah yang dipengaruhi ketidakstabilan keamanan dan politik di beberapa daerah serta terbatasnya ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antar daerah.

Evaluasi Kinerja Agenda Pembangunan di Daerah

Agenda Pembangunan 2

Agenda Pembangunan (AP) 2 dalam RPJMN 2020 - 2024 yaitu **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.** Kinerja daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun AP 2 antara lain: (1) Perkembangan Status Pembangunan Desa (Desa Mandiri dan Berkembang); serta (2) Persentase capaian penerapan SPM di daerah (%)

Heatmap **Sasaran Agenda Pembangunan 2 di 34 Provinsi**

NO	PROVINSI	AGENDA PEMBANGUNAN 2	
		Perkembangan status pembangunan desa (desa mandiri)	Persentase capaian penerapan SPM di daerah (%)
1	ACEH		
2	SUMATERA UTARA		
3	SUMATERA BARAT		
4	RIAU		
5	JAMBI		
6	SUMATERA SELATAN		
7	BENGKULU		
8	LAMPUNG		
9	KEP. BANGKA BELITUNG		
10	KEP. RIAU		
11	DKI JAKARTA		
12	JAWA BARAT		
13	JAWA TENGAH		
14	DI YOGYAKARTA		
15	JAWA TIMUR		
16	BANTEN		
17	BALI		
18	NUSA TENGGARA BARAT		
19	NUSA TENGGARA TIMUR		
20	KALIMANTAN BARAT		
21	KALIMANTAN TENGAH		
22	KALIMANTAN SELATAN		
23	KALIMANTAN TIMUR		
24	KALIMANTAN UTARA		
25	SULAWESI UTARA		
26	SULAWESI TENGAH		
27	SULAWESI SELATAN		
28	SULAWESI TENGGARA		
29	GORONTALO		
30	SULAWESI BARAT		
31	MALUKU		
32	MALUKU UTARA		
33	PAPUA BARAT		
34	PAPUA		

Sumber: EPD, diolah

Capaian Agenda Pembangunan 2 di 34 Provinsi

Perlunya Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan di Kawasan Timur Indonesia

Secara umum, hasil capaian kinerja menunjukkan rata-rata kinerja daerah masih kurang optimal. Untuk daerah dengan capaian kurang optimal mayoritas berada di wilayah Maluku dan Papua, sedangkan kinerja yang lebih baik dicapai oleh daerah-daerah yang berada di wilayah Jawa. Jika melihat dengan lebih detail, daerah yang memiliki kinerja tertinggi dicapai oleh Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Di sisi lain, daerah dengan capaian yang masih sangat kurang adalah Provinsi Maluku, Papua Barat, dan Papua. Kurang optimalnya kinerja ketiga provinsi tersebut utamanya dihambat oleh capaian perkembangan pembangunan desa dan persentase capaian penerapan SPM di daerah yang masih rendah, terlebih lagi untuk Papua Barat yang semua capaian indikatornya masih sangat kurang optimal. Hal ini menunjukkan perlunya penetapan prioritas pembangunan dana desa, pengembangan BUMDesa, dan fokus pembangunan pada sektor-sektor kebutuhan dasar masyarakat terutama di Kawasan Timur Indonesia.

Evaluasi Kinerja Agenda Pembangunan di Daerah

Agenda Pembangunan 2

Perkembangan Status Pembangunan Desa (Mandiri-Berkembang)

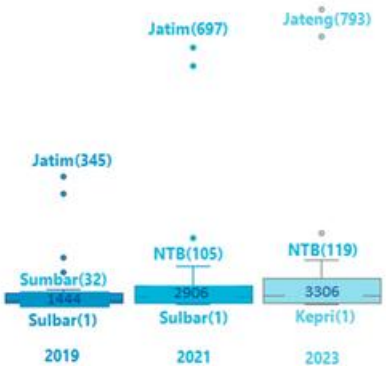

Sumber: Bappenas, diolah

Perlunya Peningkatan Kapasitas dan Kemandirian Desa di Kawasan Timur Indonesia

Provinsi dengan jumlah Desa Mandiri terbanyak terdapat di Pulau Jawa, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Hingga tahun 2023 masih terdapat beberapa provinsi yang tidak memiliki Desa Mandiri terutama di wilayah Indonesia Timur, antara lain Provinsi NTT, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Ke depan, pembangunan desa perlu terus didorong melalui internalisasi 18 tujuan SDGs desa ke dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; peningkatan pemenuhan layanan dasar (pendidikan dan kesehatan) terutama di desa tertinggal dan sangat tertinggal; peningkatan kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan di desa; serta peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki.

Persentase Capaian SPM di Daerah (%)

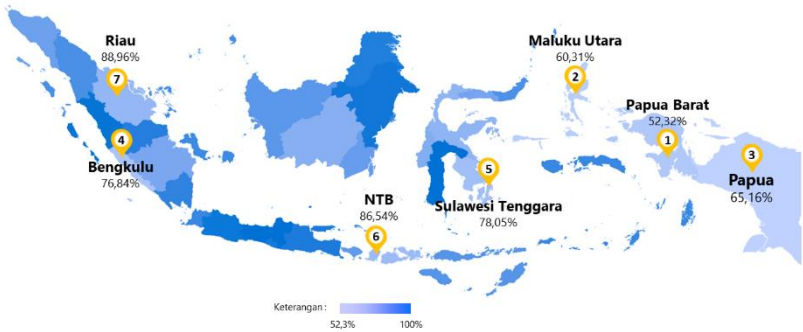

Sumber: Bappenas, diolah

Pemenuhan SPM Bergantung pada Orientasi Pembangunan Daerah

Capaian SPM 2023 tertinggi (100 persen) berada di Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Sedangkan yang perlu menjadi perhatian (capaian <90 persen) yaitu Provinsi Riau, Bengkulu, NTT, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Beberapa hambatan dalam pencapaian SPM antara lain keterbatasan anggaran, tantangan akses geografis, serta ketersediaan SDM pendukung. Penting bagi daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar masyarakat yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah.

Evaluasi Kinerja Agenda Pembangunan di Daerah

Agenda Pembangunan 3

Agenda Pembangunan (AP) 3 dalam RPJMN 2020 - 2024 yaitu **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.** Kinerja daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun AP 3 antara lain: (1) Cakupan Kepesertaan JKN; (2) Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12 - 23 bulan; (3) Prevelansi *stunting* pada balita; (4) Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar; (5) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas; (6) Indeks Pemberdayaan Gender; serta (7) Indeks Pembangunan Pemuda.

***Heatmap* Sasaran Agenda Pembangunan 3 di 34 Provinsi**

NO	PROVINSI	AGENDA PEMBANGUNAN 3						
		Cakupan kepesertaan JKN (%)	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pembangunan Pemuda
1	ACEH							
2	SUMATERA UTARA							
3	SUMATERA BARAT							
4	RIAU							
5	JAMBI							
6	SUMATERA SELATAN							
7	BENGKULU							
8	LAMPUNG							
9	KEP. BANGKA BELITUNG							
10	KEP. RIAU							
11	DKI JAKARTA							
12	JAWA BARAT							
13	JAWA TENGAH							
14	DI YOGYAKARTA							
15	JAWA TIMUR							
16	BANTEN							
17	BALI							
18	NUSA TENGGARA BARAT							
19	NUSA TENGGARA TIMUR							
20	KALIMANTAN BARAT							
21	KALIMANTAN TENGAH							
22	KALIMANTAN SELATAN							
23	KALIMANTAN TIMUR							
24	KALIMANTAN UTARA							
25	SULAWESI UTARA							
26	SULAWESI TENGAH							
27	SULAWESI SELATAN							
28	SULAWESI TENGGARA							
29	GORONTALO							
30	SULAWESI BARAT							
31	MALUKU							
32	MALUKU UTARA							
33	PAPUA BARAT							
34	PAPUA							

Sumber: EPD, diolah

Capaian Agenda Pembangunan 3 di 34 Provinsi

Masih adanya ketimpangan kualitas SDM berdaya saing

Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing masih cukup bervariasi antardaerah. Kualitas SDM di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Bali merupakan yang paling optimal dibandingkan daerah lainnya. Tantangan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas SDM yaitu (1) belum meratanya akses, kualitas, dan kuantitas layanan pendidikan dan kesehatan, (2) faktor kemiskinan yang membatasi akses terhadap makanan bergizi, (3) kurang optimalnya pemenuhan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi; (4) faktor keyakinan keagamaan dan budaya, kurangnya edukasi dan pemahaman tentang imunisasi, dan (5) tantangan geografis dan aksesibilitas yang terbatas.

Evaluasi Kinerja Agenda Pembangunan di Daerah

Agenda Pembangunan 3

Cakupan Kepesertaan JKN (%)

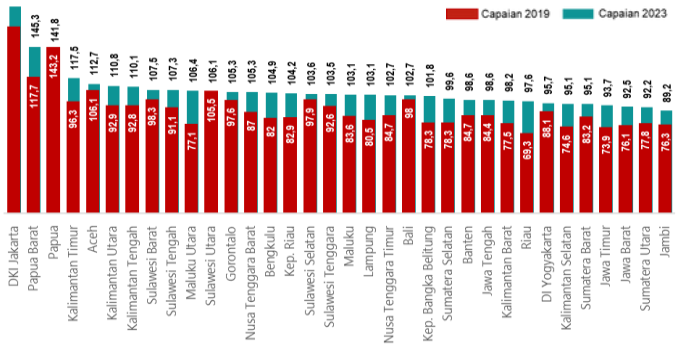

Sumber: Sismonev DJSN, diolah

Perlunya Kerjasama Pemerintah-Swasta dalam Dukungan JKN di Fasilitas Kesehatan Swasta

Selama periode tahun 2019 - 2023 cakupan kepesertaan JKN di seluruh daerah cenderung meningkat dimana peningkatan tertinggi berada di Provinsi Maluku Utara (29,30 persen), Riau (28,30 persen), dan Papua Barat (27,60 persen), sedangkan Provinsi Papua menjadi satu-satunya provinsi yang mengalami penurunan yaitu sebesar 1,4 persen. Pada tahun 2023, Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah yang memiliki cakupan kepesertaan JKN tertinggi sedangkan yang terendah adalah Provinsi Jambi. Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan kepesertaan JKN adalah kerjasama antara pemerintah dan swasta, khususnya dalam aspek tarif. Perlu adanya dukungan dari pemerintah terkait dukungan tarif JKN untuk fasilitas kesehatan swasta, dukungan untuk pemenuhan SDM, dan sebaran peserta JKN yang tidak hanya difokuskan di faskes milik pemerintah.

Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda di Kawasan Timur Indonesia Cukup Tinggi

Provinsi DI Yogyakarta merupakan daerah dengan Indeks Pembangunan Pemuda tertinggi, sementara provinsi dengan capaian terendah yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Papua meningkat cukup signifikan selama periode 2019 - 2023 dan menempati posisi kedua pada tahun 2023. Provinsi di Kawasan Timur Indonesia memiliki Indeks Pembangunan Pemuda domain partisipasi dan kepemimpinan dengan klasifikasi tinggi, sementara yang rendah berada di Wilayah Kalimantan.

Indeks Pembangunan Pemuda

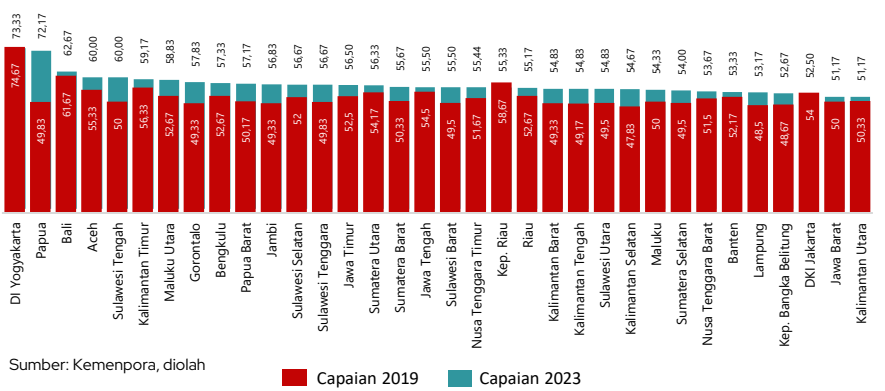

Sumber: Kemenpora, diolah

Evaluasi Kinerja Agenda Pembangunan di Daerah

Agenda Pembangunan 3

Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)

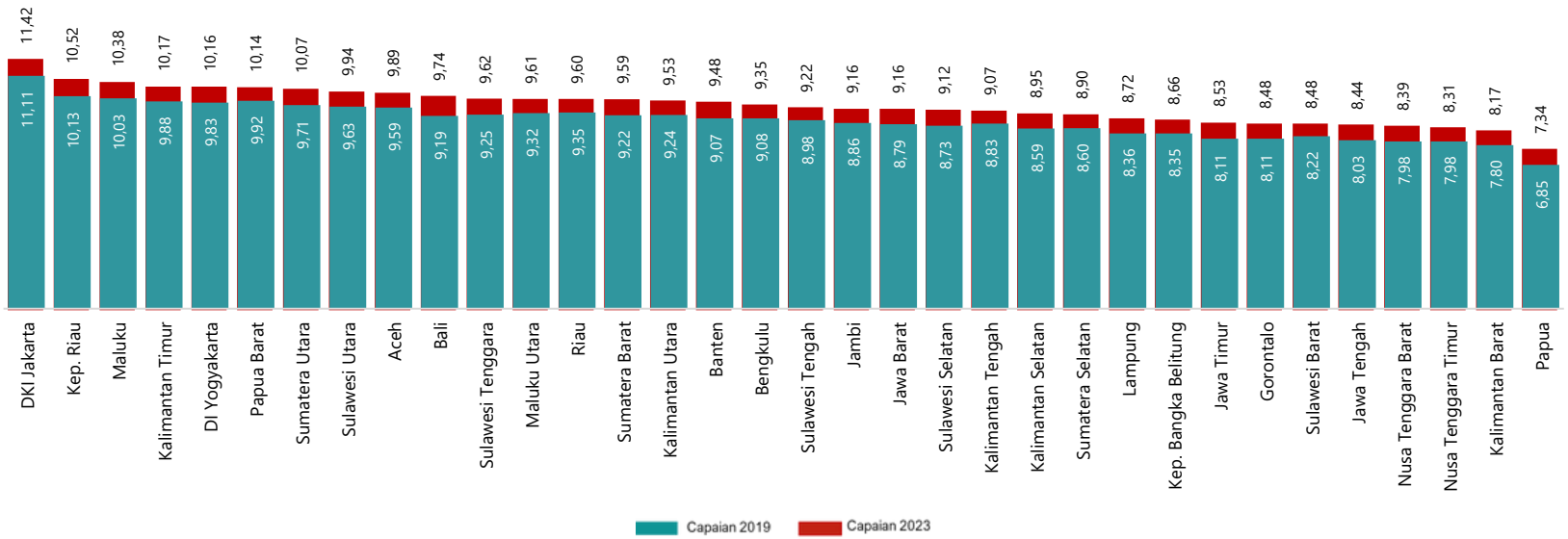

Sumber: BPS, diolah

Perlunya Sekolah Kecil Kampung dan Asrama Siswa di Daerah Terpencil dan 3T

Provinsi DKI Jakarta, Kep. Riau, dan Maluku merupakan daerah dengan rata-rata lama sekolah (RLS) tertinggi sedangkan Provinsi Papua, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur memiliki RLS terendah. Hal ini menggambarkan adanya kesenjangan antar provinsi yang salah satunya disebabkan oleh belum meratanya akses layanan pendidikan di seluruh provinsi. Untuk itu, perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses, kuantitas, dan kualitas layanan pendidikan baik sarana prasarana dan tenaga pendidik termasuk sekolah kecil kampung serta sekolah berbasis asrama siswa untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah terutama di daerah terpencil dan 3T.

Evaluasi Kinerja Agenda Pembangunan di Daerah

Agenda Pembangunan 3

Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada Usia 12-23 Bulan (%)

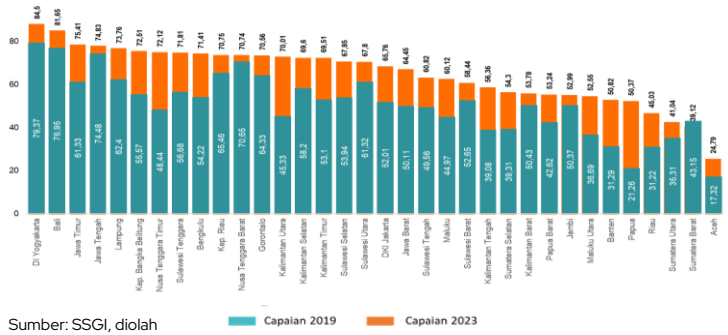

Sumber: SSGI, diolah

Faktor Budaya dan Tingkat Kepercayaan Masyarakat menjadi Penghambat Pemenuhan IDL di Daerah

Provinsi DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan capaian imunisasi dasar lengkap (IDL) anak usia 12-23 bulan tertinggi di tahun 2023, sedangkan Provinsi Aceh dan Sumatera Barat menjadi dua provinsi dengan IDL terendah. Beberapa faktor yang menghambat pemenuhan IDL di dua provinsi tersebut antara lain faktor keyakinan keagamaan dan budaya, kurangnya edukasi dan pemahaman tentang imunisasi, tantangan geografis dan aksesibilitas yang terbatas, serta keraguan terhadap kualitas vaksin yang digunakan dalam rangkaian imunisasi. Di Indonesia sendiri, berdasarkan UNICEF (2023), terdapat lebih dari setengah juta anak Indonesia yang belum pernah mendapatkan imunisasi rutin apapun atau berstatus *zero dose*. Hal tersebut ditindaklanjuti melalui upaya kolaborasi UNICEF dan pemerintah dalam menyusun strategi nasional yang berfokus pada daerah dengan cakupan imunisasi rendah serta pelibatan berbagai *stakeholders.*

Stunting Menjadi Isu Utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi Bali menjadi satu-satunya provinsi dengan kategori *stunting* rendah (kurang dari 10 persen) sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan prevalensi *stunting* tertinggi pada tahun 2023. Faktor penghambat tingginya prevalensi *stunting* di Nusa Tenggara Timur antara lain faktor kemiskinan yang tinggi yang membatasi akses terhadap makanan bergizi, terbatasnya akses layanan kesehatan terutama di daerah pedesaan dan terpencil, kurang optimalnya pemenuhan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi yang memperburuk kondisi lingkungan, serta faktor budaya yang memengaruhi pola asuh dan pola makan anak. Untuk itu, perlu kebijakan akselerasi penanganan *stunting* terutama untuk daerah-daerah dengan prevalensi tinggi seperti pemenuhan akses terhadap infrastruktur layanan dasar serta pemerataan akses terhadap layanan kesehatan terutama di daerah pedesaan dan daerah terpencil

Prevalensi *Stunting* (%)

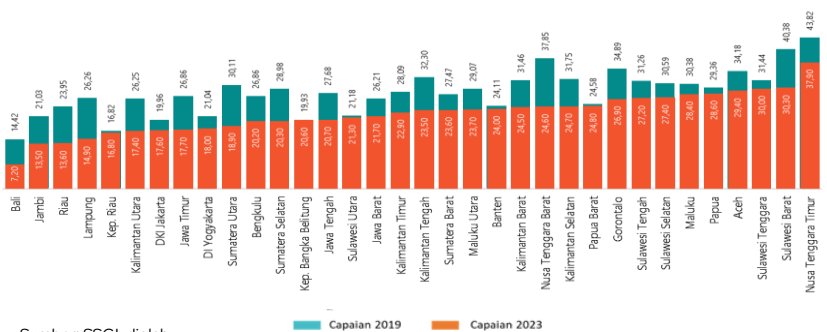

Sumber: SSGI, diolah

Evaluasi Kinerja Agenda Pembangunan di Daerah

Agenda Pembangunan 3

Indeks Pemberdayaan Gender

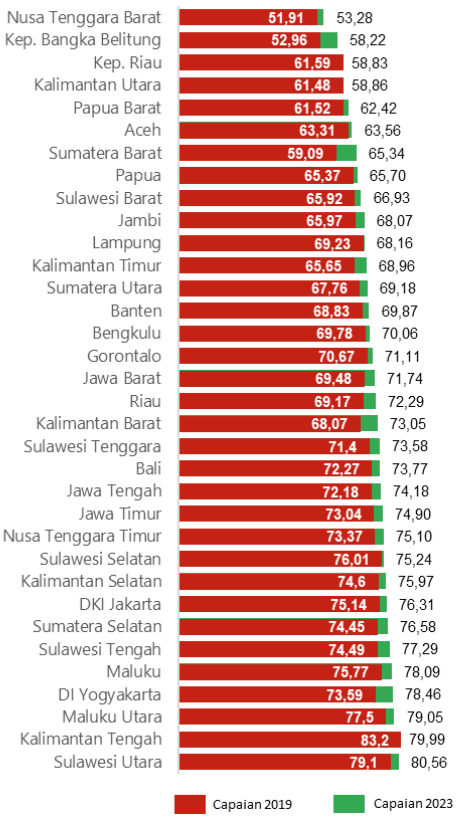

Sumber: BPS, diolah

Masih Terdapat Kesenjangan Pemberdayaan Gender Antarprovinsi

Provinsi Sulawesi Utara memiliki Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tertinggi sedangkan Provinsi NTB memiliki IDG terendah. Provinsi Sumatera Barat dan Kep. Bangka Belitung merupakan provinsi dengan peningkatan IDG tertinggi selama periode 2019 - 2023. Secara umum, IDG dalam lima tahun terakhir di seluruh provinsi cenderung meningkat. Namun, jika dibandingkan dengan nasional, terdapat 30 provinsi yang memiliki IDG di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemberdayaan gender sudah meningkat, namun masih belum merata di seluruh provinsi atau masih terdapat kesenjangan IDG antar provinsi.

Puskesmas dengan jenis nakes sesuai standar (%)

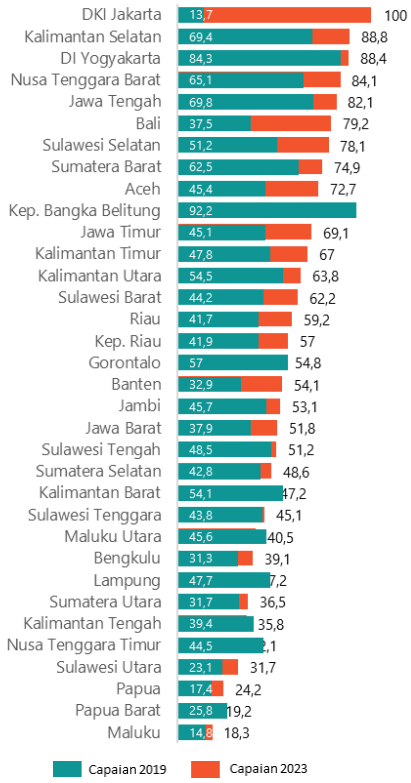

Sumber: SSGI, diolah

Tantangan Pemerataan Layanan Kesehatan di Kawasan Timur Indonesia

Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar mengalami peningkatan signifikan terutama di Provinsi DKI Jakarta yang mengalami peningkatan hingga 86,30 persen selama lima tahun terakhir. Sedangkan Provinsi Maluku menjadi provinsi dengan capaian terendah yang disebabkan oleh kondisi geografis berbentuk kepulauan sehingga aksesibilitas cukup terbatas. Selain itu, kendala pada penyediaan sarana prasarana kesehatan yang belum merata serta kualitas dan kuantitas layanan kesehatan yang belum optimal menjadi tantangan dalam pemenuhan capaian puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan yang sesuai standar di Kawasan Timur Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku.

Evaluasi Kinerja Agenda Pembangunan di Daerah

Agenda Pembangunan 4

Agenda Pembangunan (AP) 4 dalam RPJMN 2020 - 2024 yaitu **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.**
Kinerja daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun AP 4 antara lain: (1) Indeks Pembangunan Kebudayaan; (2) Indeks Kerukunan Umat Beragama; serta (3) Nilai Budaya Literasi.

Gambar. *Heatmap* Sasaran Agenda Pembangunan 4 di 34 Provinsi

NO	PROVINSI	AGENDA PEMBANGUNAN 4		
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai Budaya Literasi
1	ACEH			
2	SUMATERA UTARA			
3	SUMATERA BARAT			
4	RIAU			
5	JAMBI			
6	SUMATERA SELATAN			
7	BENGKULU			
8	LAMPUNG			
9	KEP. BANGKA BELITUNG			
10	KEP. RIAU			
11	DKI JAKARTA			
12	JAWA BARAT			
13	JAWA TENGAH			
14	DI YOGYAKARTA			
15	JAWA TIMUR			
16	BANTEN			
17	BALI			
18	NUSA TENGGARA BARAT			
19	NUSA TENGGARA TIMUR			
20	KALIMANTAN BARAT			
21	KALIMANTAN TENGAH			
22	KALIMANTAN SELATAN			
23	KALIMANTAN TIMUR			
24	KALIMANTAN UTARA			
25	SULAWESI UTARA			
26	SULAWESI TENGAH			
27	SULAWESI SELATAN			
28	SULAWESI TENGGARA			
29	GORONTALO			
30	SULAWESI BARAT			
31	MALUKU			
32	MALUKU UTARA			
33	PAPUA BARAT			
34	PAPUA			

Sumber: EPD, diolah

Capaian Agenda Pembangunan 4 di 34 Provinsi

Perlunya Pelestarian Budaya dan Literasi di Wilayah Timur

Secara umum, gambar di atas menunjukan capaian revolusi mental dan pembangunan kebudayaan cukup bervariasi antardaerah. Berdasarkan tren kinerja indikator penyusun Agenda Pembangunan 4 tahun 2019 hingga 2023, kinerja Provinsi Bali, Kepulauan Riau dan DI Yogyakarta sudah lebih optimal dibandingkan provinsi lainnya. Provinsi Bali merupakan provinsi yang paling optimal dalam mencapai kinerja indikator IPK dan IKUB di tahun 2023, hal ini menunjukan bahwa Provinsi Bali mampu menambah nilai ekonomi melalui aktivitas budaya yang dimiliki, serta menjaga toleransi, kerjasama dan kerukunan umat beragama. Sedangkan provinsi di wilayah timur memiliki kinerja yang belum optimal dalam meningkatkan revolusi mental dan membangun kebudayaan. Faktor yang menghambat kinerja tersebut disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran untuk melestarikan budaya dan masih minimnya minat literasi, sehingga dibutuhkan intervensi optimal untuk meningkatkan kualitas kebudayaan dan pendidikan di Kawasan Timur Indonesia.

Evaluasi Kinerja Agenda Pembangunan di Daerah

Agenda Pembangunan 4

Indeks Pembangunan Kebudayaan

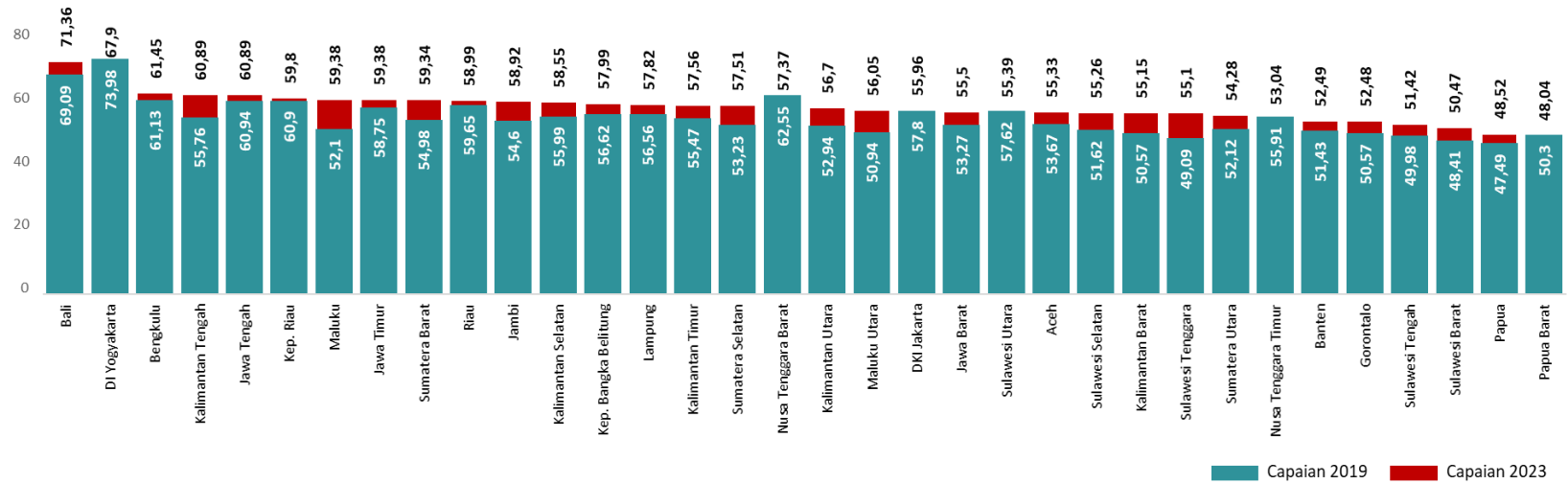

Sumber: Kemendikbudristek, diolah

Pemanfaatan Objek Budaya Berdampak pada Peningkatan Aktivitas Ekonomi

Provinsi dengan capaian kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tertinggi pada tahun 2023 adalah Provinsi Bali, DI Yogyakarta, dan Bengkulu. Sedangkan yang memiliki capaian terendah yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Papua dan Papua Barat. Namun, berdasarkan tren kinerja Provinsi DI Yogyakarta mengalami penurunan nilai IPK yang cukup signifikan sebesar minus 6,08 poin dari tahun 2019 hingga 2023. Perlambatan kinerja IPK Provinsi DI Yogyakarta disebabkan oleh penurunan pada aspek ekonomi budaya, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya dan literasi budaya, sedangkan hanya dimensi pendidikan dan gender yang mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukan bahwa kebudayaan Provinsi DI Yogyakarta tanpa disadari mulai tergeser oleh modernisasi.

Evaluasi Kinerja Agenda Pembangunan di Daerah

Agenda Pembangunan 4

Indeks Kerukunan Umat Beragama

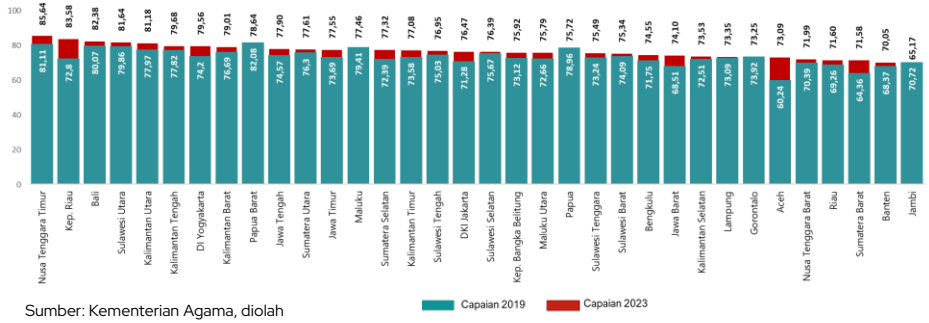

Sumber: Kementerian Agama, diolah

Beberapa Provinsi Mengalami Penurunan Kerukunan Umat Beragama

Provinsi Aceh dan Kep. Riau mengalami peningkatan nilai IKUB yang cukup signifikan, sementara itu terdapat beberapa provinsi yang mengalami perlambatan kinerja IKUB di antaranya yaitu Provinsi Gorontalo, Maluku, Papua, Papua Barat dan Jambi. Provinsi dengan capaian IKUB tertinggi yaitu Provinsi NTT sedangkan Provinsi Jambi menjadi yang terendah. Aspek kerja sama di Provinsi Jambi memiliki nilai terendah dibandingkan aspek toleransi dan kesetaraan.

Menurunnya Budaya Literasi di Beberapa Provinsi Akibat Arus Global dan Urbanisasi

Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan capaian budaya literasi tertinggi yang didorong oleh semakin meningkatnya media literasi melalui platform digital, namun secara kinerja cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Penurunan yang terjadi diindikasikan akibat dari tingginya arus global dan mobilitas masyarakat sehingga menurunkan nilai-nilai literasi budaya yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan Provinsi Papua merupakan provinsi dengan nilai budaya literasi terendah di tahun 2023. Untuk itu, direkomendasikan penajaman intervensi yang dapat meningkatkan nilai budaya literasi pada daerah-daerah yang capaiannya menurun dan belum optimal, melalui program intervensi yang menyasar dunia pendidikan.

Nilai Budaya Literasi

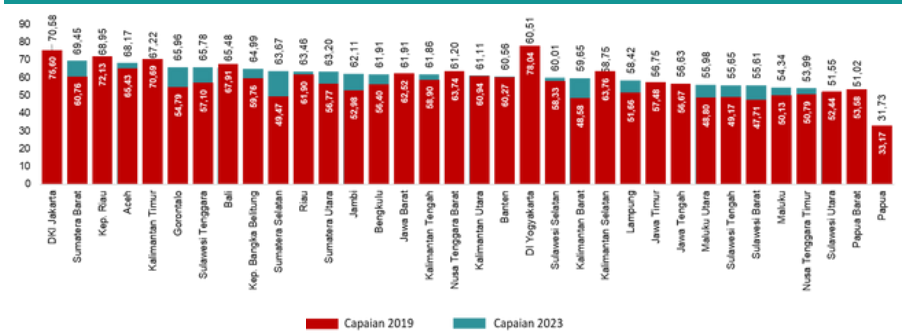

Sumber: Kemendikbudristek, diolah

Evaluasi Kinerja Agenda Pembangunan di Daerah

Agenda Pembangunan 5

Agenda Pembangunan (AP) 5 dalam RPJMN 2020 - 2024 yaitu **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.** Kinerja daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun AP 5 antara lain: (1) Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau; (2) Rasio elektrifikasi; serta (3) Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman.

Gambar. *Heatmap* Sasaran Agenda Pembangunan 5 di 34 Provinsi

NO	PROVINSI	AGENDA PEMBANGUNAN 5		
		Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	Rasio Elektrifikasi	Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan Aman (%)
1	ACEH			
2	SUMATERA UTARA			
3	SUMATERA BARAT			
4	RIAU			
5	JAMBI			
6	SUMATERA SELATAN			
7	BENGKULU			
8	LAMPUNG			
9	KEP. BANGKA BELITUNG			
10	KEP. RIAU			
11	DKI JAKARTA			
12	JAWA BARAT			
13	JAWA TENGAH			
14	DI YOGYAKARTA			
15	JAWA TIMUR			
16	BANTEN			
17	BALI			
18	NUSA TENGGARA BARAT			
19	NUSA TENGGARA TIMUR			
20	KALIMANTAN BARAT			
21	KALIMANTAN TENGAH			
22	KALIMANTAN SELATAN			
23	KALIMANTAN TIMUR			
24	KALIMANTAN UTARA			
25	SULAWESI UTARA			
26	SULAWESI TENGAH			
27	SULAWESI SELATAN			
28	SULAWESI TENGGARA			
29	GORONTALO			
30	SULAWESI BARAT			
31	MALUKU			
32	MALUKU UTARA			
33	PAPUA BARAT			
34	PAPUA			

Sumber: EPD, diolah

Capaian Agenda Pembangunan 5 di 34 Provinsi

Pentingnya Pemerataan Layanan Dasar di Daerah 3T dan Metropolitan

Secara keseluruhan, capaian AP 5 sudah baik di seluruh provinsi kecuali di Provinsi Papua, NTT, Maluku, dan Kalimantan Tengah. Capaian optimal didukung oleh rasio elektrifikasi yang meningkat di semua daerah. Meskipun rasio elektrifikasi meningkat, capaian mayoritas provinsi masih rendah pada indikator akses rumah tangga terhadap sanitasi serta hunian layak dan terjangkau. Tercatat bahwa daerah metropolitan DKI Jakarta memiliki persentase rumah layak huni terendah. Fenomena ini menandakan masih banyaknya permukiman kumuh di daerah perkotaan. Sedangkan untuk daerah di luar Pulau Jawa cenderung mengalami masalah yang menyeluruh, baik dari akses terhadap hunian layak dan terjangkau, akses sanitasi, serta elektrifikasi. Oleh karena itu, perlu adanya pemerataan infrastruktur secara keseluruhan di wilayah luar Pulau Jawa dan pengoptimalan akses hunian layak di kawasan metropolitan.

Evaluasi Kinerja Agenda Pembangunan di Daerah

Agenda Pembangunan 5

Rasio Elektrifikasi

Sumber: Bappenas, diolah

Perlunya Sumber Energi Alternatif agar Masyarakat Indonesia Dapat Sepenuhnya Menikmati Listrik

Sebagian besar provinsi memiliki capaian rasio elektrifikasi telah mendekati 100 persen. Hanya beberapa provinsi dengan rasio elektrifikasi belum mencapai 99 persen antara lain Provinsi Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Faktor keterbatasan akses dan jangkauan ketenagalistrikan, serta tantangan geografis (pegunungan dan kepulauan) menjadi hambatan dalam pemenuhan rasio elektrifikasi. Perlu inovasi sumber energi alternatif melalui pembangunan energi terbarukan yang disesuaikan dengan kondisi daerah terutama di daerah sulit akses.

Evaluasi Kinerja Agenda Pembangunan di Daerah

Agenda Pembangunan 5

Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak dan Terjangkau

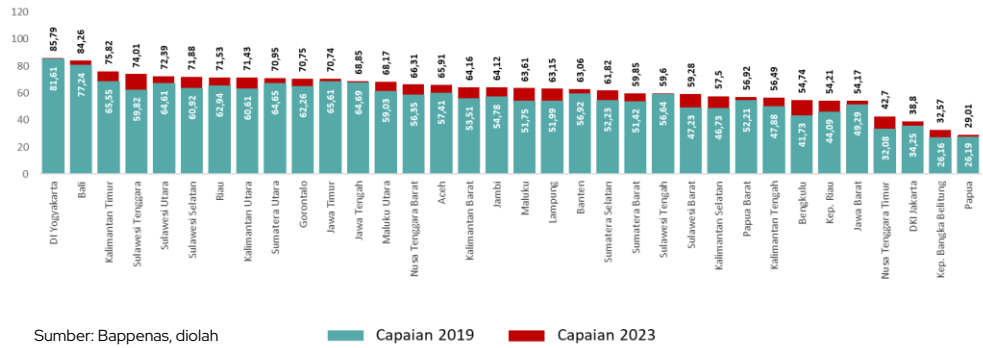

Sumber: Bappenas, diolah

Faktor Geografis dan Kepadatan Penduduk Berpengaruh Cukup Signifikan pada Rendahnya Pemenuhan Hunian Layak dan Terjangkau di Daerah

Terdapat empat provinsi dengan capain terendah yaitu Provinsi Papua, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Timur dengan capaian masih di bawah 50 persen. Beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya capaian di provinsi tersebut antara lain, kondisi geografis khususnya di wilayah pegunungan dan kepulauan, minimnya sarana prasarana pendukung, biaya konstruksi yang tinggi, faktor keragaman budaya, serta kondisi demografi dan kepadatan penduduk.

Kontribusi *Non-State Actor* dalam Pemenuhan Infrastruktur Sanitasi

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan kinerja terbaik secara nasional dibuktikan dengan peningkatan tertinggi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi yang meningkat hingga 11,12 persen dalam lima tahun terakhir. Hal ini tidak lepas dari upaya seluruh pihak, baik pusat maupun daerah termasuk kontribusi mitra pembangunan (*non-state actor*) dalam pemenuhan infrastruktur sanitasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi

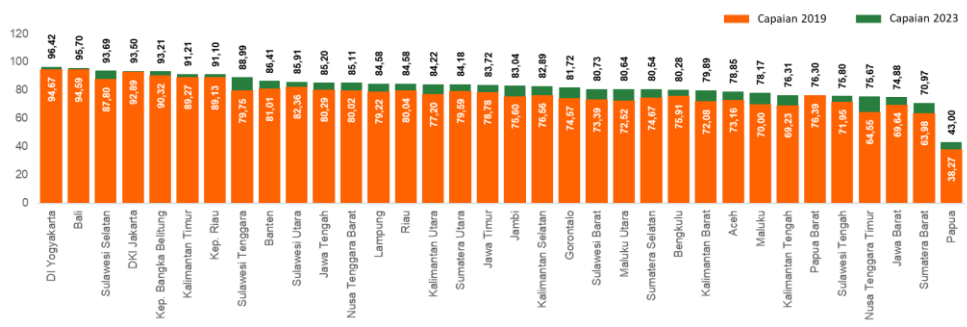

Sumber: Bappenas, diolah

Evaluasi Kinerja Agenda Pembangunan di Daerah

Agenda Pembangunan 6

Agenda Pembangunan (AP) 6 dalam RPJMN 2020 - 2024 yaitu **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.** Kinerja daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun AP 6 yaitu: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Gambar. *Heatmap* Sasaran Agenda Pembangunan 6 di 34 Provinsi

NO	PROVINSI	AGENDA PEMBANGUNAN 6
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
1	ACEH	
2	SUMATERA UTARA	
3	SUMATERA BARAT	
4	RIAU	
5	JAMBI	
6	SUMATERA SELATAN	
7	BENGKULU	
8	LAMPUNG	
9	KEP. BANGKA BELITUNG	
10	KEP. RIAU	
11	DKI JAKARTA	
12	JAWA BARAT	
13	JAWA TENGAH	
14	DI YOGYAKARTA	
15	JAWA TIMUR	
16	BANTEN	
17	BALI	
18	NUSA TENGGARA BARAT	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	
20	KALIMANTAN BARAT	
21	KALIMANTAN TENGAH	
22	KALIMANTAN SELATAN	
23	KALIMANTAN TIMUR	
24	KALIMANTAN UTARA	
25	SULAWESI UTARA	
26	SULAWESI TENGAH	
27	SULAWESI SELATAN	
28	SULAWESI TENGGARA	
29	GORONTALO	
30	SULAWESI BARAT	
31	MALUKU	
32	MALUKU UTARA	
33	PAPUA BARAT	
34	PAPUA	

Sumber: EPD, diolah

Capaian Agenda Pembangunan 6 di 34 Provinsi

Implementasi Ekonomi Hijau sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Ke Depan

Selama lima tahun terakhir, capaian pada Agenda Pembangunan (AP) 6 dalam RPJMN 2020-2024 menunjukan mayoritas daerah memiliki kinerja yang sudah cukup optimal terutama di wilayah Timur Indonesia seperti Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, dan Provinsi Kalimantan Utara. Sementara kinerja AP 6 wilayah Jawa menjadi daerah dengan rata-rata capaian terendah khususnya untuk Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Daya dukung lingkungan yang rendah, aktivitas ekonomi yang kurang ramah lingkungan dan eksternalitas negatif dari adanya fenomena *urban sprawl* memperburuk kondisi lingkungan di berbagai daerah tersebut.

Evaluasi Kinerja Agenda Pembangunan di Daerah

Agenda Pembangunan 6

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

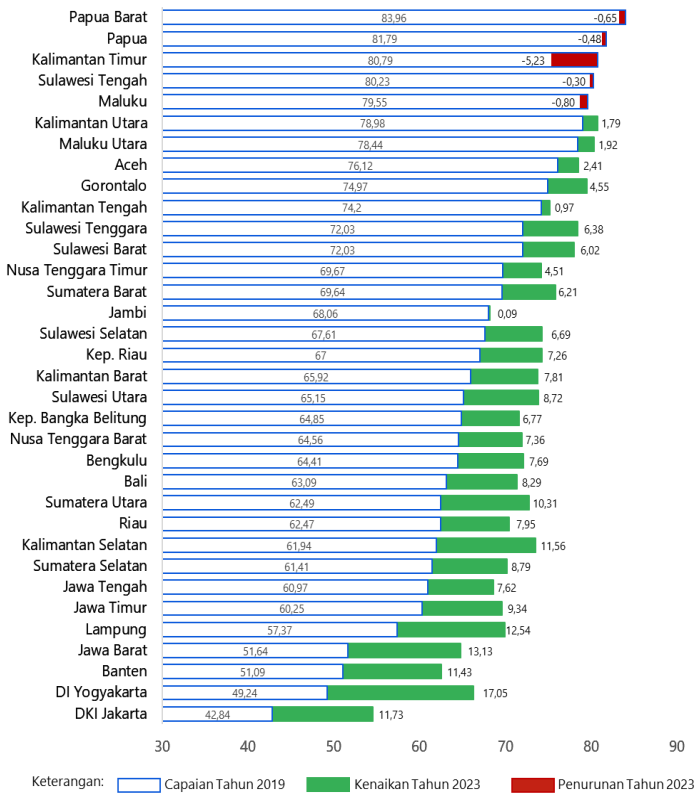

Sumber: Kementerian LHK, diolah

Kecenderungan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup di Daerah yang Capaiannya Tinggi

Berdasarkan tren lima tahun terakhir, peningkatan tertinggi IKLH provinsi adalah Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan Lampung. Namun, ketiga provinsi tersebut termasuk dalam lima provinsi dengan IKLH terendah di tahun 2019. Tingginya kenaikan IKLH didorong oleh pengendalian pencemaran lingkungan yang diperketat, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, serta kolaborasi antar *stakeholders* dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan.

Cukup berbanding terbalik dengan provinsi di atas, provinsi yang mengalami penurunan IKLH dalam lima tahun terakhir yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Maluku, Papua Barat, Papua, dan Sulawesi Tengah justru merupakan lima provinsi dengan IKLH tertinggi pada tahun 2019. Faktor yang memengaruhi penurunan IKLH di lima provinsi tersebut antara lain meningkatnya kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi daerah terutama pada sektor industri pengolahan, pertambangan, perdagangan, dan jasa.

Evaluasi Kinerja Agenda Pembangunan di Daerah

Agenda Pembangunan 7

Agenda Pembangunan (AP) 7 dalam RPJMN 2020 - 2024 yaitu **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.**
Kinerja daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun AP 7 yaitu: Indeks Demokrasi Provinsi.

Gambar. *Heatmap* Sasaran Agenda Pembangunan 7 di 34 Provinsi

NO	PROVINSI	AGENDA PEMBANGUNAN 7
		Indeks Demokrasi Provinsi
1	ACEH	
2	SUMATERA UTARA	
3	SUMATERA BARAT	
4	RIAU	
5	JAMBI	
6	SUMATERA SELATAN	
7	BENGKULU	
8	LAMPUNG	
9	KEP. BANGKA BELITUNG	
10	KEP. RIAU	
11	DKI JAKARTA	
12	JAWA BARAT	
13	JAWA TENGAH	
14	DI YOGYAKARTA	
15	JAWA TIMUR	
16	BANTEN	
17	BALI	
18	NUSA TENGGARA BARAT	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	
20	KALIMANTAN BARAT	
21	KALIMANTAN TENGAH	
22	KALIMANTAN SELATAN	
23	KALIMANTAN TIMUR	
24	KALIMANTAN UTARA	
25	SULAWESI UTARA	
26	SULAWESI TENGAH	
27	SULAWESI SELATAN	
28	SULAWESI TENGGARA	
29	GORONTALO	
30	SULAWESI BARAT	
31	MALUKU	
32	MALUKU UTARA	
33	PAPUA BARAT	
34	PAPUA	

Sumber: EPD, diolah

Capaian Agenda Pembangunan 7 di 34 Provinsi

Indeks Demokrasi Indonesia di Kawasan Timur Indonesia masih belum optimal

Pada tahun 2023, capaian IDI tertinggi berada pada Provinsi Bali, DKI Jakarta, dan D.I. Yogyakarta, sedangkan capaian terendah berada pada Provinsi di wilayah timur yaitu Papua Barat, Maluku Utara, Papua, dan Maluku. Dalam peningkatan IDI perlu terus dilakukan program kolaboratif dalam penguatan Pokja IDI Provinsi, koordinasi dan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun program-program penguatan dan konsolidasi demokrasi, serta peran Pokja IDI Provinsi saat sosialisasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Evaluasi Kinerja Agenda Pembangunan di Daerah

Agenda Pembangunan 7

Indeks Demokrasi Provinsi

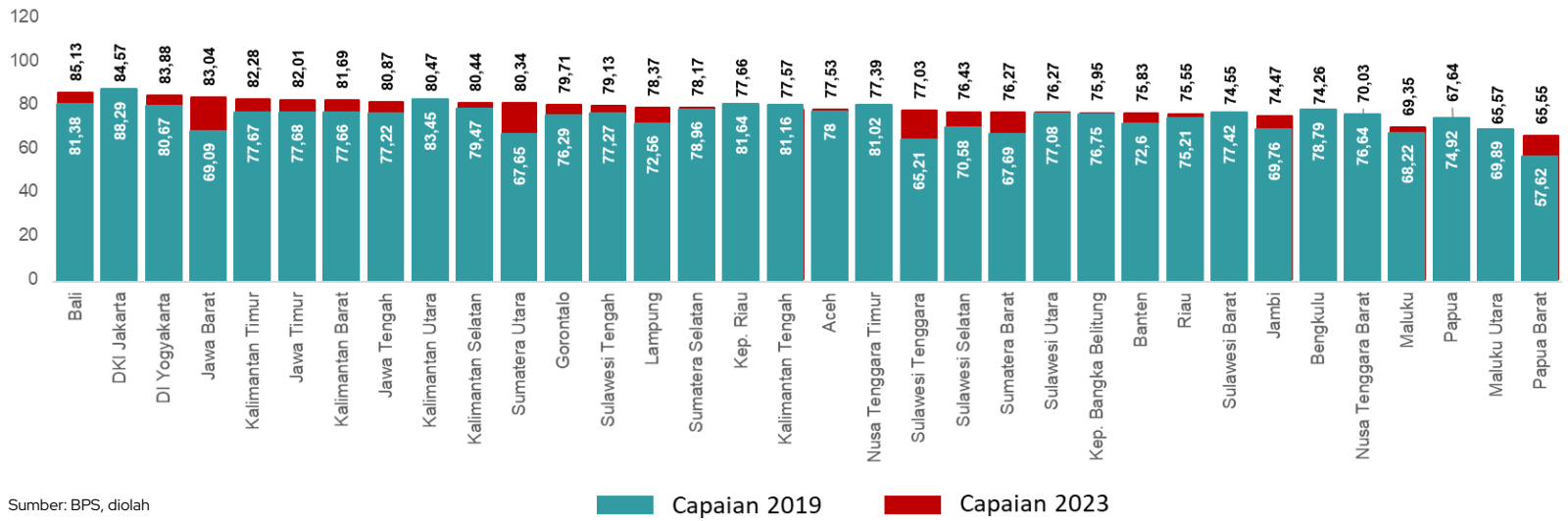

Sumber: BPS, diolah

Masifnya Penyebaran Hoaks dan Demokrasi Negatif di Beberapa Daerah Menjelang Pesta Demokrasi

Selama periode tahun 2019 - 2023, terdapat tiga provinsi yang mengalami penurunan tren indeks demokrasi yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menurun sebesar 6,61 poin, Provinsi Bengkulu sebesar 4,53 poin, dan Provinsi Maluku Utara sebesar 4,32 poin. Hal ini disebabkan oleh penyebaran hoaks yang masih marak dan masif, serta kemajuan perkembangan teknologi yang cukup cepat. Selain itu, isu demokrasi yang negatif ketika musim pemilu juga diindikasikan menjadi penyebab menurunnya tingkat indeks demokrasi di beberapa daerah.

04

Hasil Evaluasi RKP Tahun 2024

4.1 Evaluasi Kinerja Makro Daerah Tahun 2024

Skoring Kinerja Makro Tahun 2024

Provinsi	Skor Capaian vs Target RKP			Skor Capaian vs Target RKPD				
	LPE	TK	TPT	LPE	TK	TPT	Gini	IPM
ACEH								
SUMATERA UTARA								
SUMATERA BARAT								
RIAU								
JAMBI								
SUMATERA SELATAN								
BENGKULU								
LAMPUNG								
KEP. BANGKA BELITUNG								
KEP. RIAU								
DKI JAKARTA								
JAWA BARAT								
JAWA TENGAH								
DI YOGYAKARTA								
JAWA TIMUR								
BANTEN								
BALI								
NUSA TENGGARA BARAT								
NUSA TENGGARA TIMUR								
KALIMANTAN BARAT								
KALIMANTAN TENGAH								
KALIMANTAN SELATAN								
KALIMANTAN TIMUR								
KALIMANTAN UTARA								
SULAWESI UTARA								
SULAWESI TENGAH								
SULAWESI SELATAN								
SULAWESI TENGGARA								
GORONTALO								
SULAWESI BARAT								
MALUKU								
MALUKU UTARA								
PAPUA BARAT								
PAPUA								

Keterangan:

- Data LPE merupakan data per Triwulan IV 2024 (*c-to-c)*
- Data Tingkat Kemiskinan (TK) dan Rasio Gini (RG) merupakan data Maret 2024
- Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan data Agustus 2024
- Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan data tahun 2024

Keterangan Skor Capaian vs Target RKP dan Skor Capaian vs Target RKPD

Kriteria	Keterangan
Hijau (■)	Capaian ≥ 90% dari Target
Kuning (■)	Capaian antara ≥ 60% dan < 90% dari Target
Merah (■)	Capaian <60% dari Target

Target Sasaran Makro Setiap Daerah terhadap RKP Cenderung Belum Tercapai

Ketercapaian target RKP Tahun 2024 untuk indikator laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka cukup bervariasi di 34 provinsi. Provinsi Kep. Bangka Belitung masih perlu kerja keras untuk mencapai target RKP. Sementara itu pada indikator tingkat kemiskinan, sebagian besar daerah masih perlu kerja keras untuk mencapai target. Sedangkan pada indikator TPT, sebagian besar provinsi memiliki capaian >90% dari target..

Target Sasaran Makro Setiap Daerah terhadap RKPD Cenderung Tercapai

Berbanding terbalik dengan target RKP, ketercapaian target RKPD di 34 provinsi cenderung tercapai walaupun untuk indikator laju pertumbuhan ekonomi masih perlu dioptimalkan. Semua wilayah memiliki ketercapaian target RKPD yang baik untuk indikator tingkat kemiskinan, rasio gini, dan IPM. Masih banyak daerah yang perlu kerja untuk mencapai target RKPD khususnya indikator LPE. Dengan kata lain, target RKP kewilayahan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat lebih optimis dibandingkan target RKPD yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Skoring Kinerja Makro Tahun 2024

PROVINSI	Skor Rasio Realisasi 2024/2023					Skor Perbandingan Wilayah					Skor Perbandingan Nasional				
	LPE	TK	TPT	Gini	IPM	LPE	TK	TPT	Gini	IPM	LPE	TK	TPT	Gini	IPM
ACEH															
SUMATERA UTARA															
SUMATERA BARAT															
RIAU															
JAMBI															
SUMATERA SELATAN															
BENGKULU															
LAMPUNG															
KEP. BANGKA BELITUNG															
KEP. RIAU															
DKI JAKARTA															
JAWA BARAT															
JAWA TENGAH															
DI YOGYAKARTA															
JAWA TIMUR															
BANTEN															
BALI															
NUSA TENGGARA BARAT															
NUSA TENGGARA TIMUR															
KALIMANTAN BARAT															
KALIMANTAN TENGAH															
KALIMANTAN SELATAN															
KALIMANTAN TIMUR															
KALIMANTAN UTARA															
SULAWESI UTARA															
SULAWESI TENGAH															
SULAWESI SELATAN															
SULAWESI TENGGARA															
GORONTALO															
SULAWESI BARAT															
MALUKU															
MALUKU UTARA															
PAPUA BARAT															
PAPUA															

Keterangan:
- Data LPE merupakan data per Triwulan IV-2024 (*c-to-c*)
- Data Tingkat Kemiskinan (TK) dan Rasio Gini (RG) merupakan data Maret 2024
- Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan data Agustus 2024
- Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan data tahun 2024
- Data tahun 2024 Papua dan Papua Barat sebagai DOB

Keterangan Skor Rasio Realisasi 2024/2023 dan perbandingan Nasional

Kriteria	Keterangan
Hijau (■)	Capaian ≥ 0.5 x Positif Range
Kuning (■)	0 ≤ Capaian < 0.5 x Positif Range
Merah (■)	Capaian < 0

Keterangan Skor Perbandingan Wilayah

Kriteria	Keterangan
Hijau (■)	Capaian ≥ (max-(range/3))
Kuning (■)	(min+(range/3)) ≤ Capaian < (max-(range/3))
Merah (■)	Capaian < (min+(range/3))

Pertumbuhan Ekonomi Daerah mengalami Perlambatan

Berdasarkan skor rasio realisasi tahun 2024 dibandingkan 2023, seluruh daerah cenderung mengalami stagnasi kinerja makro kecuali pada indikator LPE yang justru cenderung mengalami penurunan kinerja.

Rata-Rata Capaian Daerah Terhadap Wilayah dan Nasional Cukup Bervariasi

Seluruh daerah memiliki capaian yang bervariasi terhadap wilayahnya. Begitupula capaian daerah terhadap nasional berdasarkan skor perbandingan nasional hasilnya juga cukup bervariasi.

4.2 Evaluasi Kontribusi

Evaluasi Kontribusi
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022-2023

Kontribusi Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi terhadap Perubahan Capaian Nasional Tahun 2022 – 2023

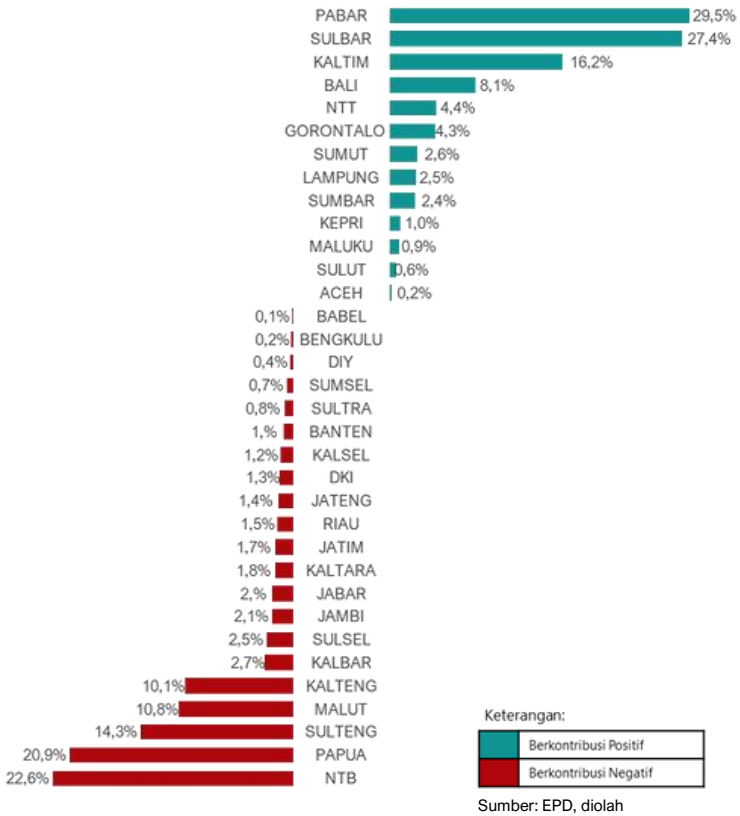

Sumber: EPD, diolah

Papua Barat dan Sulawesi Barat Berkontribusi Paling Tinggi pada Peningkatan LPE Nasional

Provinsi Papua Barat dan Sulawesi Barat merupakan dua daerah yang berkontribusi tertinggi terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi nasional yang mana kedua provinsi tersebut didorong oleh pertumbuhan di sektor industri pengolahan, pertambangan penggalian, serta ekspor terutama pada sektor migas khususnya komoditas *Liquefied Natural Gas* di Papua Barat. Sedangkan, tiga provinsi yang cukup signifikan menyumbang perlambatan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, yaitu Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Sulawesi Tengah yang disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan lapangan usaha utama, seperti pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan.

Evaluasi Kontribusi
Tingkat Kemiskinan Tahun 2022-2023

Kontribusi Capaian Tingkat Kemiskinan Provinsi terhadap Perubahan Capaian Nasional Tahun 2022 – 2023

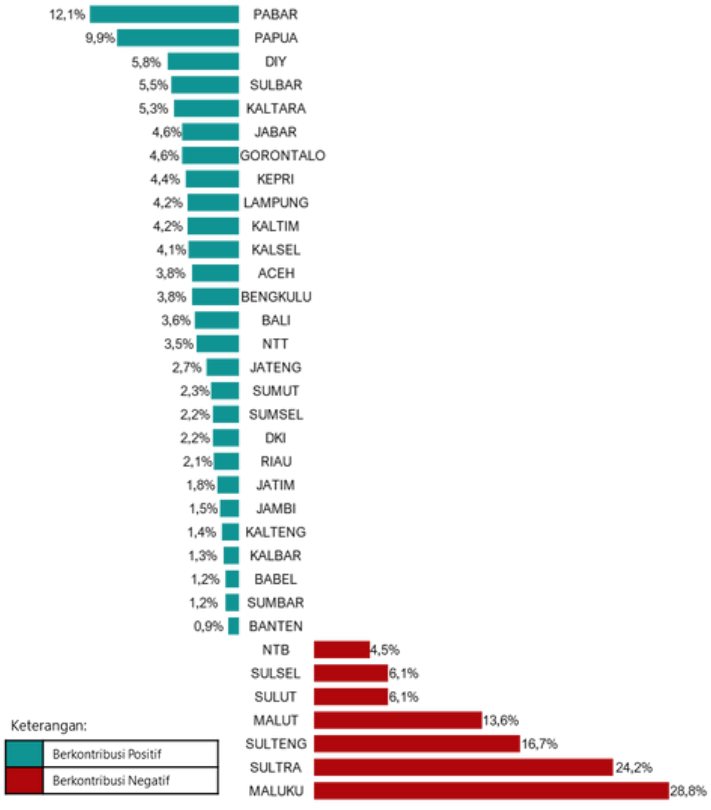

Sumber: EPD, diolah

Papua Barat dan Papua Berkontribusi Paling Tinggi pada Penurunan Tingkat Kemiskinan Nasional

Provinsi Papua Barat merupakan kontributor tertinggi dalam mendorong penurunan tingkat kemiskinan nasional tahun 2023. Faktor utama penurunan tingkat kemiskinan di Papua Barat salah satunya akibat dampak pertumbuhan sektor industri pengolahan, serta pertambangan dan penggalian yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun demikian, tingkat kemiskinan Papua Barat masih menjadi yang tertinggi kedua secara nasional dan penduduk miskinnya didominasi di perdesaan. Sementara itu, tiga provinsi yang cukup signifikan menghambat penurunan tingkat kemiskinan nasional tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, yaitu Maluku, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Pada tiga provinsi tersebut terdapat kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2023.

Sumber Gambar: Merdeka.com

Evaluasi Kontribusi
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022-2023

Kontribusi Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi terhadap Perubahan Capaian Nasional Tahun 2022 – 2023

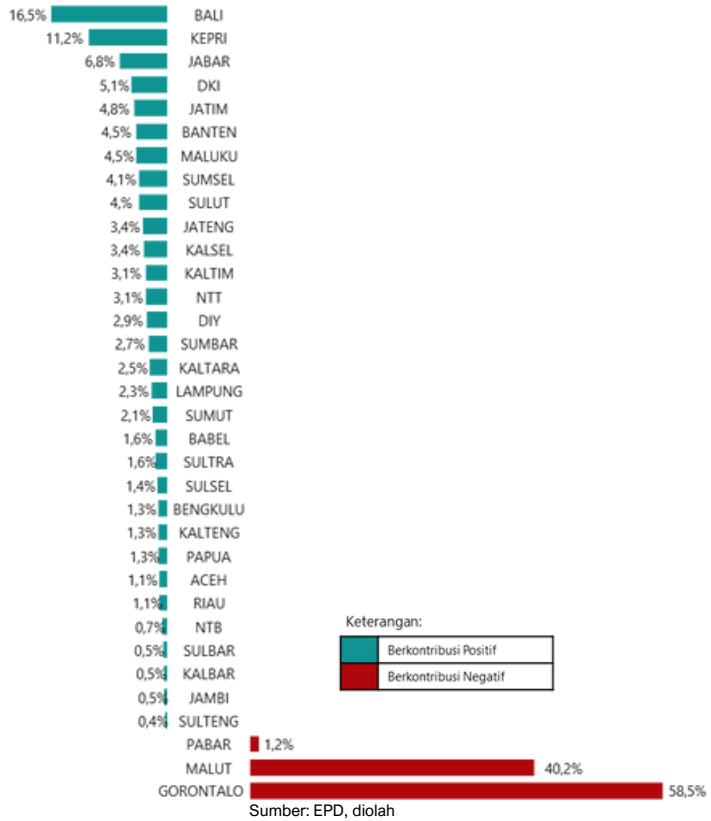

Sumber: EPD, diolah

Bali dan Kepulauan Riau Berkontribusi Paling Tinggi pada Penurunan TPT Nasional

Pada indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT), Provinsi Bali merupakan daerah yang berkontribusi paling tinggi dalam penurunan TPT nasional, diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang positif pada tahun 2023 berdampak pada penyerapan tenaga kerja khususnya di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum seiring pemulihan aktivitas pariwisata pascarelaksasi mobilitas dan *revenge tourism*. Namun, terdapat dua provinsi yang cukup signifikan menghambat penurunan TPT nasional tahun 2023, yaitu Provinsi Gorontalo dan Provinsi Maluku Utara.

Sumber Gambar: canva.com

Evaluasi Kontribusi
Rasio Gini Tahun 2022-2023

Kontribusi Capaian Rasio Gini Provinsi terhadap Perubahan Capaian Nasional Tahun 2022 – 2023

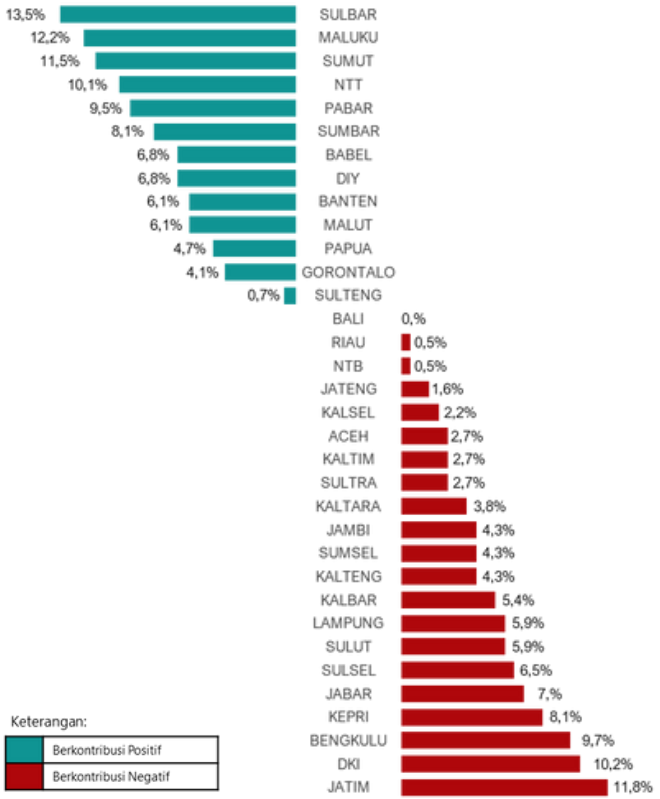

Sumber: EPD, diolah

Jawa Timur dan Jakarta Berkontribusi Paling Tinggi pada Kenaikan Rasio Gini Nasional

Provinsi Jawa Timur menjadi daerah yang berkontribusi paling tinggi pada peningkatan rasio gini nasional pada tahun 2023, diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Bengkulu. Capaian rasio gini Provinsi Jawa Timur dihambat oleh beberapa faktor, yaitu antara lain dampak pandemi Covid-19 yang masih memengaruhi aktivitas ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan, terutama masyarakat berpendapatan rendah masih belum bangkit optimal sedangkan pemulihan ekonomi golongan atas lebih cepat. Sementara itu, Provinsi Sulawesi Barat, Maluku, dan Sulawesi Utara merupakan tiga provinsi dengan kontribusi paling tinggi pada upaya penurunan rasio gini nasional.

Evaluasi Kontribusi
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022-2023

Kontribusi Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi terhadap Perubahan Capaian Nasional Tahun 2022 – 2023

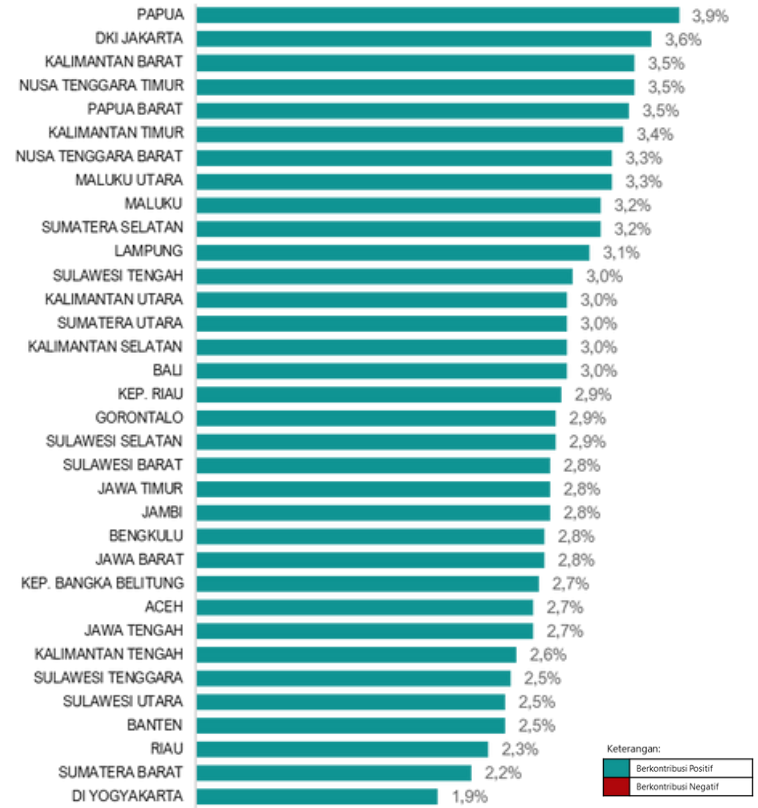

Sumber: EPD, diolah

Papua dan Jakarta Berkontribusi Paling Tinggi pada Kenaikan IPM Nasional

Tiga provinsi dengan kontribusi terbesar terhadap perubahan capaian IPM nasional yaitu Papua, DKI Jakarta, dan Kalimantan Barat. Sementara itu, tiga provinsi yang memiliki kontribusi terendah terhadap perubahan IPM nasional tahun 2022 - 2023 yaitu DI Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Riau. Peningkatan IPM nasional didukung oleh kontribusi positif semua provinsi/daerah terhadap IPM nasional.

4.3 Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional di Daerah

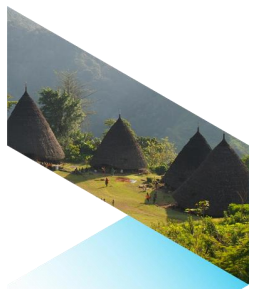

Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional di Daerah

Potret Capaian PN RKP Tahun 2024

PROVINSI	Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
ACEH							
SUMATERA UTARA							
SUMATERA BARAT							
RIAU							
JAMBI							
SUMATERA SELATAN							
BENGKULU							
LAMPUNG							
KEP. BANGKA BELITUNG							
KEP. RIAU							
DKI JAKARTA							
JAWA BARAT							
JAWA TENGAH							
DI YOGYAKARTA							
JAWA TIMUR							
BANTEN							
BALI							
NUSA TENGGARA BARAT							
NUSA TENGGARA TIMUR							
KALIMANTAN BARAT							
KALIMANTAN TENGAH							
KALIMANTAN SELATAN							
KALIMANTAN TIMUR							
KALIMANTAN UTARA							
SULAWESI UTARA							
SULAWESI TENGAH							
SULAWESI SELATAN							
SULAWESI TENGGARA							
GORONTALO							
SULAWESI BARAT							
MALUKU							
MALUKU UTARA							
PAPUA BARAT							
PAPUA							

Capaian PN RKP Wilayah Jawa – Bali Lebih Baik Dibandingkan Wilayah Lain.

Potret capaian Prioritas Nasional di 34 provinsi cukup bervariasi. Capaian Prioritas Nasional di Wilayah Jawa - Bali secara umum lebih baik dibandingkan wilayah lainnya, kecuali PN 6 dan PN 2. Sementara, capaian Prioritas Nasional secara umum di Wilayah Nusa Tenggara dan Wilayah Papua masih kurang dan perlu dioptimalkan jika dibandingkan wilayah lainnya.

Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional di Daerah

Prioritas Nasional 1

Prioritas Nasional (PN) 1 dalam RKP 2024 yaitu **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.** Oleh karena itu, kinerja daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun PN 1 antara lain: (1) Skor Pola Pangan Harapan; (2) Produksi Perikanan; (3) Pertumbuhan PDB Perikanan; (4) Penyediaan Lapangan Kerja per Tahun; (5) Rasio Kewirausahaan Provinsi; (6) Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif; (7) Kontribusi PDB Industri Pengolahan; serta (8) Pembentukan Modal Tetap Bruto.

Pola Pangan Harapan di Kawasan Timur Indonesia Perlu Dioptimalkan

Capaian skor PPH terlihat baik di Wilayah Jawa. Sementara di Wilayah Sulawesi, Wilayah Maluku, dan Wilayah Papua perlu dioptimalkan kembali.

Belum Optimalnya Kontribusi PDB Industri Pengolahan Wilayah Bali - Nusa Tenggara

Capaian kontribusi PDB industri pengolahan di Wilayah Bali-Nusa Tenggara menjadi yang terendah dibandingkan wilayah lain. Wilayah Jawa dan Wilayah Sumatra memiliki kontribusi yang cukup tinggi bersama dengan provinsi yang memiliki sektor industri pengolahan dominan seperti Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Industri Kreatif Masih Didominasi Wilayah Jawa

Capaian jumlah tenaga kerja industri kreatif di Wilayah Jawa lebih tinggi dibandingkan wilayah lain dikarenakan pesatnya pengembangan subsektor ekonomi kreatif di wilayah tersebut.

Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional di Daerah

Prioritas Nasional 2

Prioritas Nasional (PN) 2 dalam RKP 2024 yaitu **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.** Oleh karena itu, kinerja daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun PN 2 antara lain: (1) Indeks Pembangunan Manusia; (2) Rasio Gini; (3) Pertumbuhan Ekonomi; (4) Persentase Penduduk Miskin; (5) Tingkat Pengangguran Terbuka.

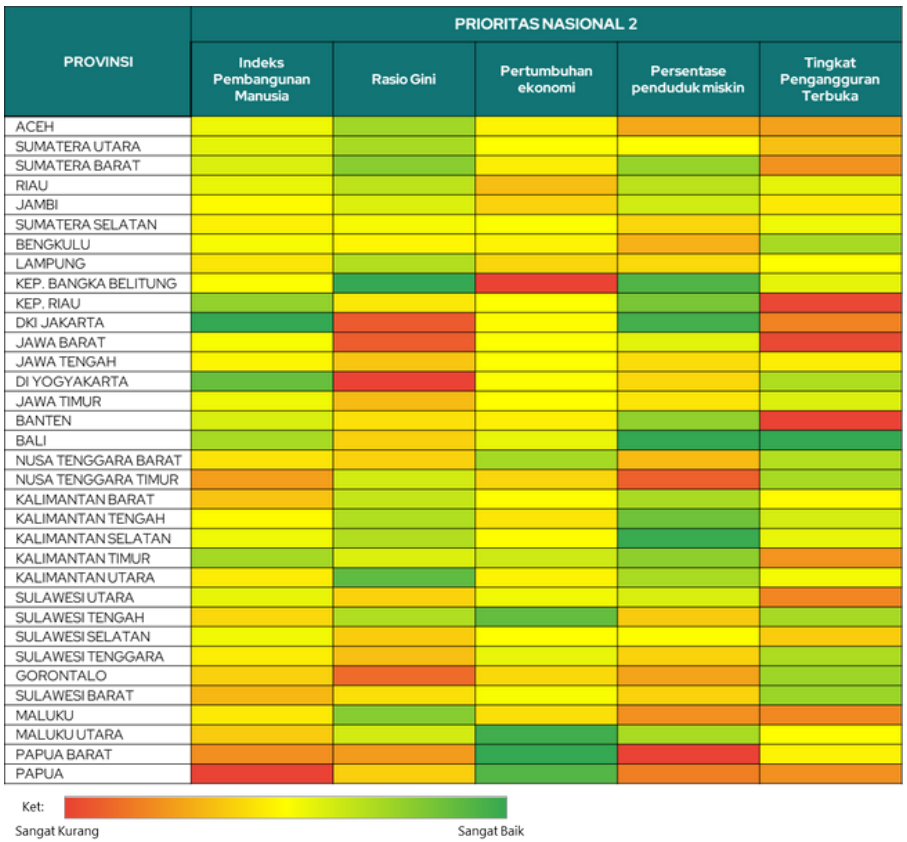

Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Kalimantan Menjadi yang Terendah

Capaian persentase penduduk miskin di Wilayah Kalimantan sudah cukup baik bersama dengan Provinsi Bali, DKI Jakarta, Kep. Bangka Belitung, dan Kep. Riau. Sementara itu, perlu dioptimalkan kembali capaian persentase penduduk miskin terutama di Kawasan Timur Indonesia.

Kesenjangan dan Pengangguran di Wilayah Jawa Masih Tinggi

Capaian rasio gini dan tingkat pengangguran terbuka Wilayah Jawa masih kurang dibandingkan dengan wilayah lain. Hal ini berbanding lurus dengan tingginya jumlah penduduk di Wilayah Jawa sehingga perlu dioptimalkan kembali.

Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sumatra dan Jawa Perlu Diakselerasi Lebih Optimal

Capaian pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sumatra dan Jawa masih lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain. Oleh karena itu, perlu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal di wilayah tersebut. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat sudah cukup optimal.

Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional di Daerah

Prioritas Nasional 3

Prioritas Nasional (PN) 3 dalam RKP 2024 yaitu **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.** Oleh karena itu, kinerja daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun PN 3 antara lain: (1) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi; (2) Prevalensi *Stunting*; (3) Prevalensi *Wasting;* (4) Indeks Ketimpangan Gender (IKG); (5) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan; dan (6) Indeks Pembangunan Pemuda.

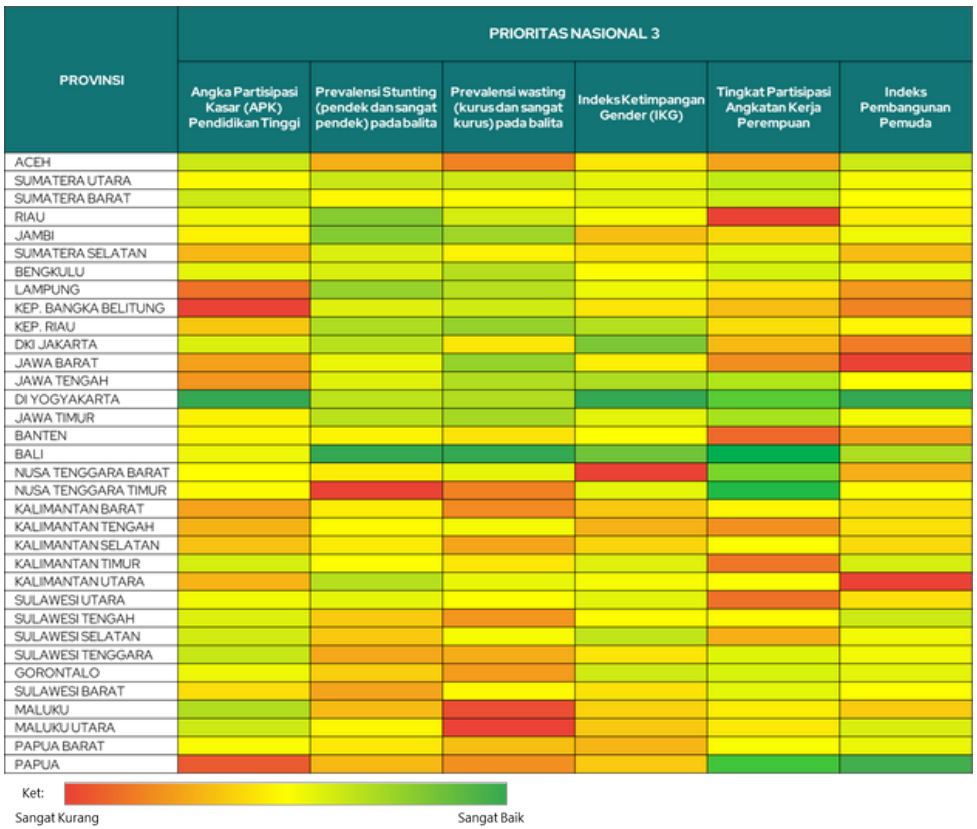

Stunting dan *Wasting* di Kawasan Timur Indonesia Perlu Menjadi Perhatian

Capaian prevalensi *stunting* dan *wasting* di Kawasan Timur Indonesia yang tinggi terutama di Provinsi NTT untuk *stunting* serta Provinsi Maluku dan Maluku Utara untuk *wasting* perlu menjadi perhatian bersama. Intervensi sensitif dan spesifik perlu segera dioptimalkan dan difokuskan untuk dapat menurunkan prevalensi *stunting* dan *wasting* di Kawasan Timur Indonesia.

TPAK Perempuan di Sumatra dan Kalimantan Cenderung Rendah

Capaian TPAK perempuan di Wilayah Sumatra terutama di Provinsi Riau menjadi yang terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Beberapa provinsi lainnya di Wilayah Sumatra dan Kalimantan seperti Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur juga memiliki TPAK Perempuan yang cenderung rendah dibandingkan dengan provinsi lain.

Pembangunan Pemuda Belum Merata

Capaian indeks pembangunan pemuda di Wilayah Timur Indonesia cenderung lebih baik dibandingkan wilayah barat. Indeks pembangunan pemuda masih kurang di Provinsi Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Untuk itu, perlu dioptimalkan kembali pembangunan pemuda melalui pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional di Daerah

Prioritas Nasional 4

Prioritas Nasional (PN) 4 dalam RKP 2024 yaitu **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.** Oleh karena itu, kinerja daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun PN 4 antara lain: (1) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK); dan (2) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).

PROVINSI	PRIORITAS NASIONAL 4	
	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
ACEH		
SUMATERA UTARA		
SUMATERA BARAT		
RIAU		
JAMBI		
SUMATERA SELATAN		
BENGKULU		
LAMPUNG		
KEP. BANGKA BELITUNG		
KEP. RIAU		
DKI JAKARTA		
JAWA BARAT		
JAWA TENGAH		
DI YOGYAKARTA		
JAWA TIMUR		
BANTEN		
BALI		
NUSA TENGGARA BARAT		
NUSA TENGGARA TIMUR		
KALIMANTAN BARAT		
KALIMANTAN TENGAH		
KALIMANTAN SELATAN		
KALIMANTAN TIMUR		
KALIMANTAN UTARA		
SULAWESI UTARA		
SULAWESI TENGAH		
SULAWESI SELATAN		
SULAWESI TENGGARA		
GORONTALO		
SULAWESI BARAT		
MALUKU		
MALUKU UTARA		
PAPUA BARAT		
PAPUA		

Pembangunan Kebudayaan di Kawasan Timur Indonesia Perlu Diakselerasi

Capaian indeks pembangunan kebudayaan di Provinsi DI Yogyakarta dan Bali sudah sangat baik. Sementara itu, di Kawasan Timur Indonesia seperti Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat masih perlu dioptimalkan.

Sikap Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama Menjadi Fondasi Kerukunan Umat Beragama

Indeks kerukunan umat beragama terdiri atas tiga indikator yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Capaian indeks kerukunan umat beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kep. Riau, dan Bali sudah baik. Sedangkan Provinsi Jambi, Banten, dan Sumatera Barat masih kurang dibandingkan provinsi lainnya, meskipun berdasarkan capaian IKUB masih dalam kategori rukun tinggi (60-80). Beberapa faktor yang memengaruhi IKUB meliputi sikap toleransi kebebasan beribadah dan mendirikan rumah ibadah, menerima pemimpin yang berasal dari agama apapun, serta partisipasi dalam organisasi dan dunia usaha jika terdapat anggota lain yang berbeda agama.

Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional di Daerah

Prioritas Nasional 5

Prioritas Nasional (PN) 5 dalam RKP 2024 yaitu **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.** Oleh karena itu, kinerja daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun PN 5 antara lain: (1) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan; (2) Persentase Kondisi Mantap Jalan; (3) Rasio Elektrifikasi; dan (4) Jumlah Produksi Listrik (GWh).

PROVINSI	PRIORITAS NASIONAL 5			
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota	Rasio Elektrifikasi	Jumlah Produksi Listrik (GwH)
ACEH				
SUMATERA UTARA				
SUMATERA BARAT				
RIAU				
JAMBI				
SUMATERA SELATAN				
BENGKULU				
LAMPUNG				
KEP. BANGKA BELITUNG				
KEP. RIAU				
DKI JAKARTA				
JAWA BARAT				
JAWA TENGAH				
DI YOGYAKARTA				
JAWA TIMUR				
BANTEN				
BALI				
NUSA TENGGARA BARAT				
NUSA TENGGARA TIMUR				
KALIMANTAN BARAT				
KALIMANTAN TENGAH				
KALIMANTAN SELATAN				
KALIMANTAN TIMUR				
KALIMANTAN UTARA				
SULAWESI UTARA				
SULAWESI TENGAH				
SULAWESI SELATAN				
SULAWESI TENGGARA				
GORONTALO				
SULAWESI BARAT				
MALUKU				
MALUKU UTARA				
PAPUA BARAT				
PAPUA				

Ket: Sangat Kurang — Sangat Baik

Akses Air Minum Jaringan Perpipaan di Beberapa Daerah Masih Belum Optimal

Hingga akhir tahun 2023, akses air minum perpipaan di Indonesia masih cukup jauh dari harapan. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan di Provinsi Riau dan Lampung masih perlu dioptimalkan jika dibandingkan dengan provinsi lain.

Kondisi Mantap Jalan di Kawasan Barat Indonesia Sudah Cukup Baik

Kondisi mantap jalan di Kawasan Barat Indonesia sudah lebih baik dibandingkan provinsi lainnya. Kondisi mantap jalan Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua perlu menjadi perhatian.

Tantangan Pemerataan Infrastruktur Ketenagalistrikan di Wilayah Kepulauan

Hampir seluruh provinsi memiliki rasio elektrifikasi yang cukup baik kecuali Provinsi NTT dan Maluku yang capaiannya belum lebih baik jika dibandingkan dengan provinsi lainnya walaupun capaiannya sudah di atas 92 persen. Dari sisi produksi listrik, Provinsi Jawa Tengah menjadi yang terbaik jika dibandingkan dengan provinsi lain, sehingga produksi listrik di provinsi lain perlu dioptimalkan terutama di Kawasan Timur Indonesia. Faktor penghambat utama masih rendahnya elektrifikasi dan produksi listrik terutama di Kawasan Timur Indonesia antara lain faktor geografis berupa kepulauan sehingga akses cukup menjadi tantangan terutama untuk PLN, serta belum tersedianya sumber energi alternatif di wilayah tersebut.

Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional di Daerah

Prioritas Nasional 6

Prioritas Nasional (PN) 6 dalam RKP 2024 yaitu **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.** Oleh karena itu, kinerja daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun PN 6 antara lain: (1) Indeks Kualitas Air (IKA); (2) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL); (3) Indeks Kualitas Udara (IKU); (4) Indeks Kualitas Lahan (IKL); dan (5) Penurunan Indeks Risiko Bencana.

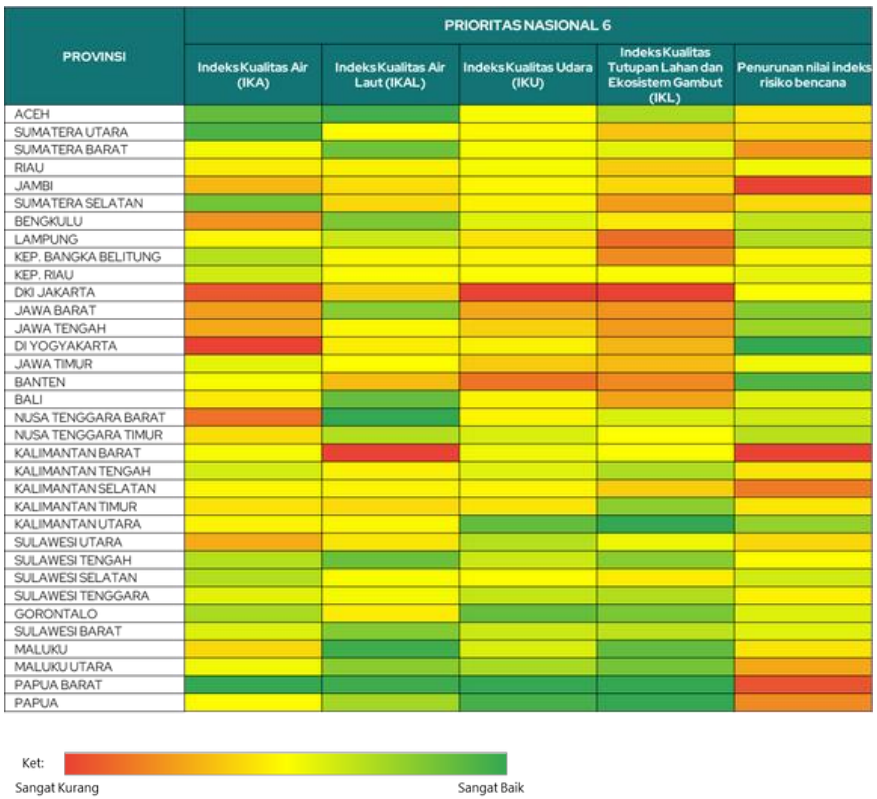

Indeks Kualitas Air, Udara, serta Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut di Wilayah Jawa Perlu Dioptimalkan

Capaian IKA, IKAL, IKU, dan IKL provinsi di Wilayah Sulawesi dan Papua lebih baik dibandingkan di Wilayah Jawa yang masih kurang dan perlu dioptimalkan kembali kualitas lingkungan hidupnya.

Risiko Bencana di DKI Jakarta dan Wilayah Maluku-Papua Perlu Menjadi Perhatian

Penurunan nilai indeks risiko bencana di Provinsi DKI Jakarta dan daerah di wilayah Pulau Maluku dan Papua masih kurang sehingga perlu menjadi perhatian, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah sudah lebih baik dibandingkan provinsi lainnya.

Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional di Daerah

Prioritas Nasional 7

Prioritas Nasional (PN) 7 dalam RKP 2024 yaitu **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.** Oleh karena itu, kinerja daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun PN 7 antara lain: (1) Indeks Demokrasi Provinsi; (2) Indeks Keterbukaan Informasi Publik; (3) Indeks Kemerdekaan Pers; (4) *Crime Rate*; (5) Indeks Pelayanan Publik; (6) Indeks SPBE; dan (7) Indeks Integritas Nasional.

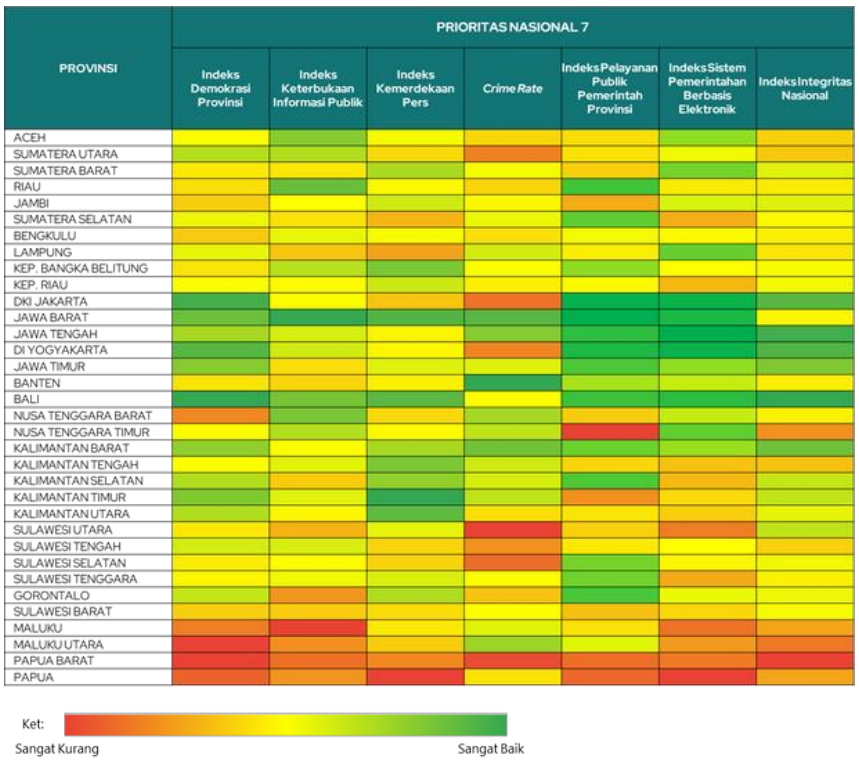

Perlu Upaya Lebih Untuk Memperkuat Stabilitas Polhukhankam di Kawasan Timur Indonesia

Capaian indeks demokrasi provinsi, indeks keterbukaan informasi publik dan indeks kemerdekaan pers di Wilayah Jawa-Bali-Kalimantan sudah cukup baik. Sedangkan capaian ketiga indikator tersebut di Wilayah Maluku dan Papua perlu menjadi perhatian.

Indikator *crime rate* Provinsi Banten dan Jawa Barat memiliki capaian yang baik, sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Utara dan Papua Barat masih perlu dioptimalkan.

Transformasi Pelayanan Publik di Kawasan Timur Indonesia Masih Perlu Dioptimalkan

Pada indikator indeks pelayanan publik, indeks sistem pemerintah berbasis elektronik dan indeks integritas provinsi di Wilayah Jawa umumnya sudah berwarna hijau atau capaian tertinggi. Sementara itu, capaian terendah masih tersebar di Wilayah Maluku dan Papua, sehingga perlu upaya lebih untuk meningkatkan capaian indeks.

4.4 *Baseline* Indikator Utama Pembangunan

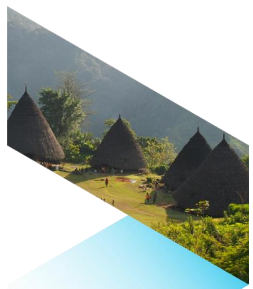

Baseline Indikator Utama Pembangunan

Sasaran Utama Visi

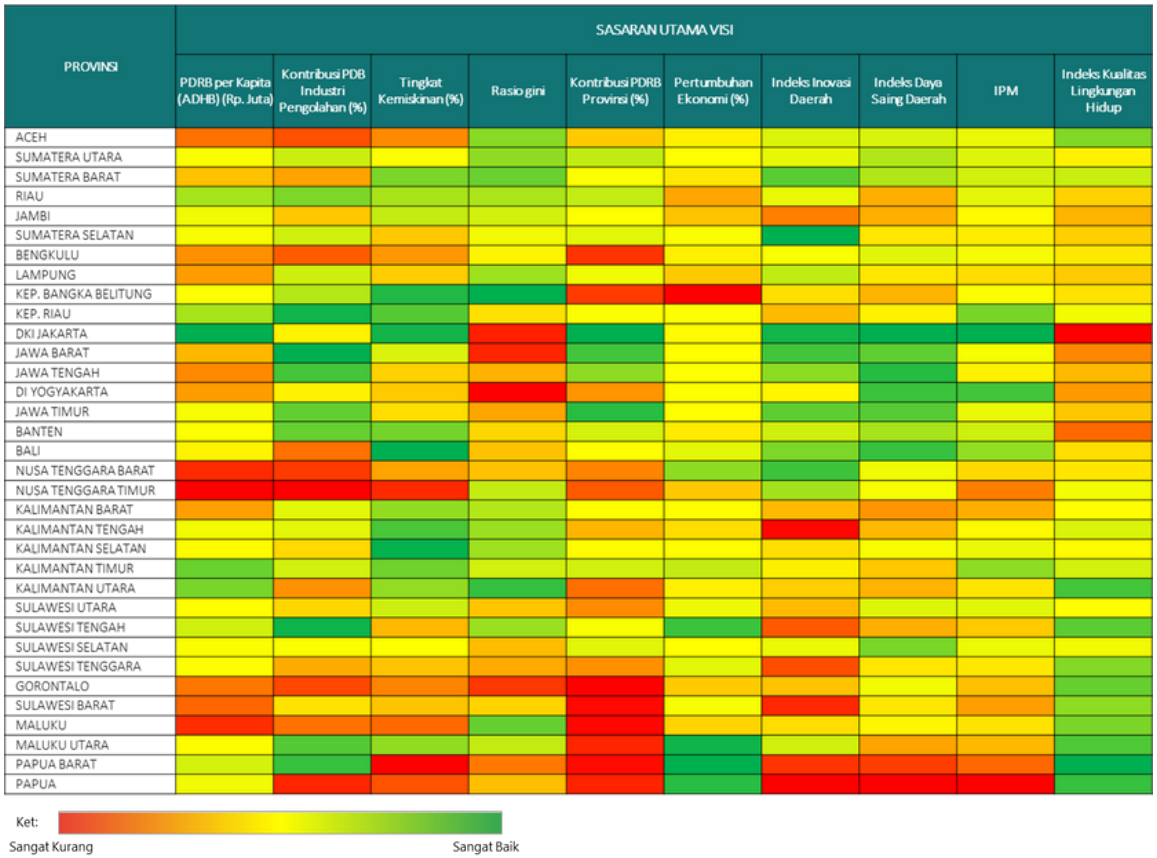

Ketimpangan Pembangunan Masih Cukup Tinggi

Salah satu indikasi adanya ketimpangan pembangunan yaitu perbandingan PDRB perkapita terendah dan tertinggi yang cukup ekstrem. PDRB perkapita terendah berada di Provinsi NTT sementara yang tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, tingkat ketimpangan pendapatan juga masih tinggi di Wilayah Jawa dibandingkan daerah lainnya. Kemudian, kontribusi PDRB Provinsi di Kawasan Barat Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan Kawasan Timur. Pembangunan manusia juga masih menunjukkan ketimpangan, dimana IPM daerah timur masih belum optimal.

Inovasi dan Daya Saing Masih Terkonsentrasi di Wilayah Jawa

Indeks inovasi daerah sudah cukup tinggi terutama di Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat sedangkan yang masih perlu dioptimalkan yaitu di Provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat.

Baseline Indikator Utama Pembangunan
Transformasi Sosial & Transformasi Ekonomi

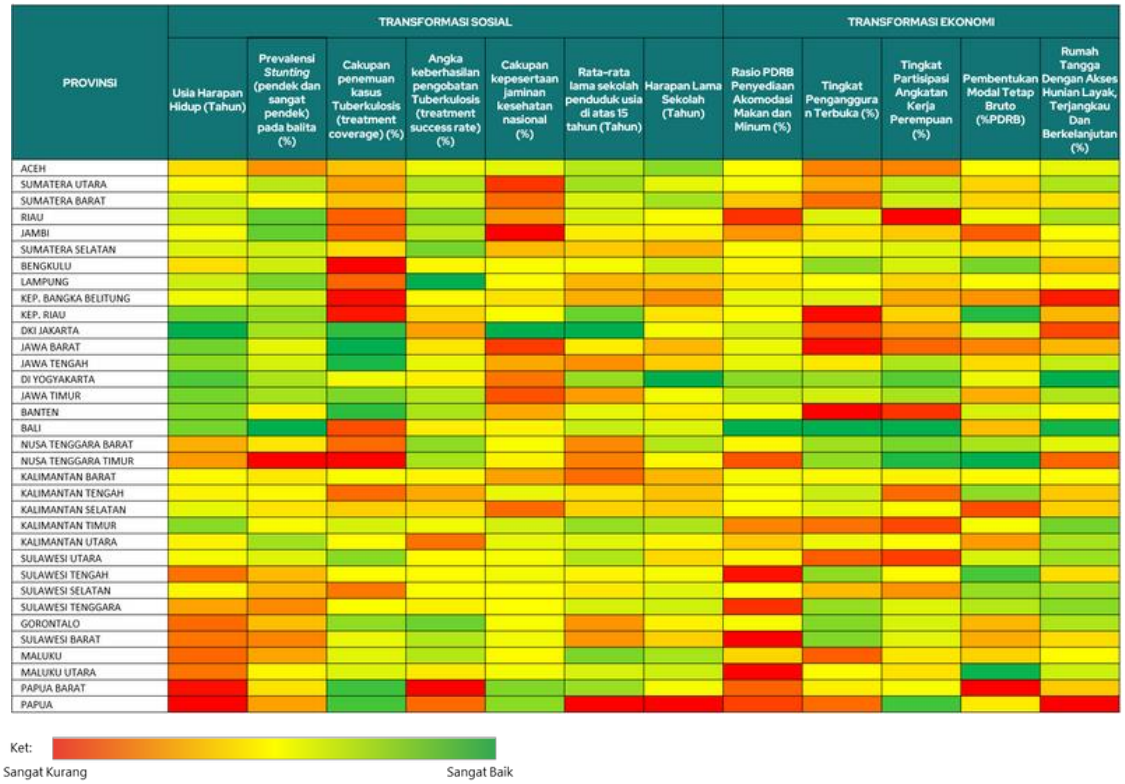

Treatment Coverage TBC di Wilayah Sumatra dan Bali-Nusra Belum Optimal

Cakupan penemuan kasus tuberkulosis di Wilayah Sumatra dan Bali-Nusra masih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Sedangkan Wilayah Jawa cakupan penemuan kasus tuberkulosisnya lebih tinggi dan sudah lebih baik dibandingkan wilayah lainnya.

Masih Rendahnya Harapan Hidup di Kawasan Timur Indonesia

Usia Harapan Hidup (UHH) tertinggi berada di DKI Jakarta diikuti DI Yogyakarta, sedangkan yang terendah berada di Papua dan Papua Barat. Faktor yang mempengaruhi UHH yaitu pelayanan kesehatan, perekonomian masyarakat, pendidikan, ketersediaan pangan, dan kondisi lingkungan. Sehingga, perlu dioptimalkan untuk Kawasan Timur Indonesia terutama peningkatan pelayanan dasar.

Perlunya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minuman masih belum optimal di seluruh daerah terutama di Kawasan Timur Indonesia, sedangkan Provinsi Bali memiliki capaian yang paling optimal. Sehingga perlu upaya yang lebih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

Baseline Indikator Utama Pembangunan

Transformasi Tata Kelola & Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

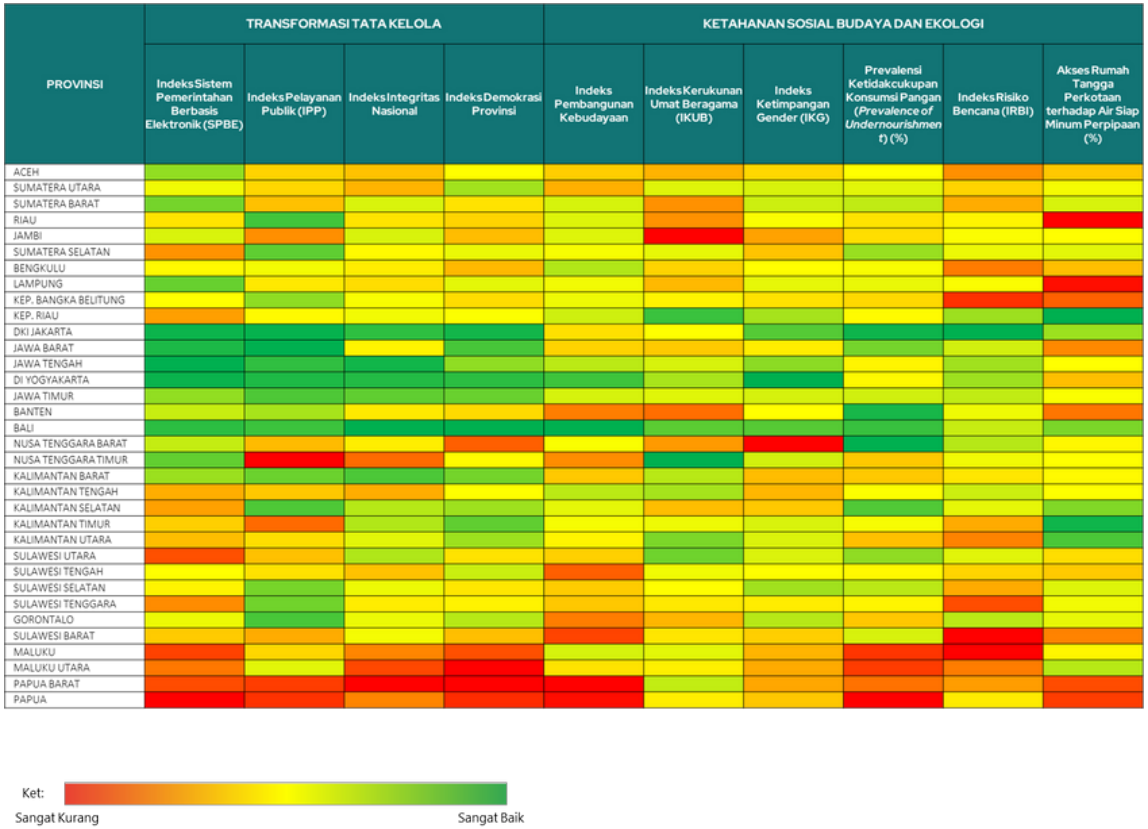

Tata Kelola Pelayanan Publik Wilayah Jawa Sudah Cukup Optimal

Pada indikator Indeks SPBE, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Integritas Provinsi, dan Indeks Demokrasi Provinsi di Pulau Jawa umumnya sudah berkinerja tinggi. Sementara itu, capaian terendah masih tersebar di Wilayah Maluku dan Papua, sehingga perlu upaya lebih untuk meningkatkan capaian indeks.

Ketahanan Sosial dan Budaya di Daerah Perlu Dipertahankan dan Diperjuangkan

Indeks Pembangunan Kebudayaan dan Indeks Ketimpangan Gender di Kawasan Timur Indonesia perlu untuk dioptimalkan. Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Wilayah Sumatra masih rendah, sehingga perlu upaya lebih untuk meningkatkan capaian IKUB.

Ketahanan Pangan di Wilayah Maluku-Papua Belum Optimal

Capaian prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Wilayah Maluku-Papua masih rendah, sehingga perlu upaya lebih untuk meningkatkan capaiannya.

05

Capaian Makro Kewilayahan Tahun 2014 - 2024

Capaian Makro Wilayah Sumatra

Sumber: BPS, diolah

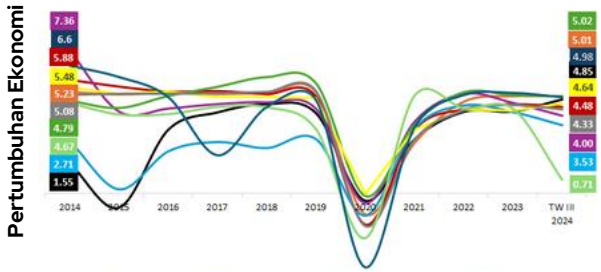

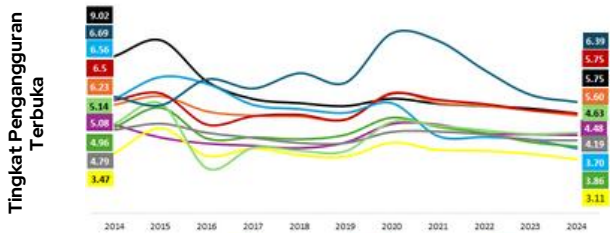

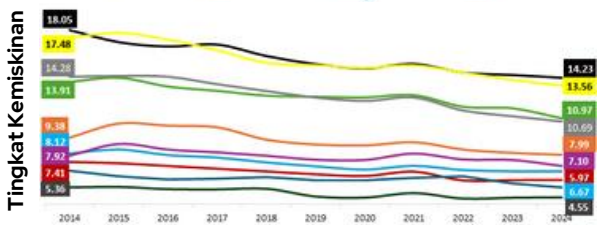

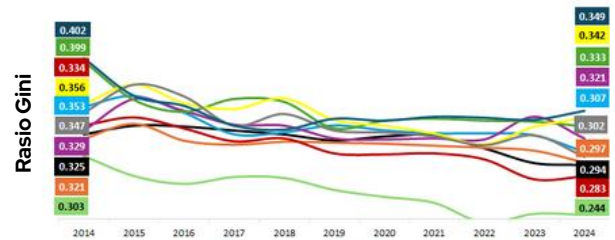

Capaian Makro Wilayah Sumatra dalam Satu Dekade

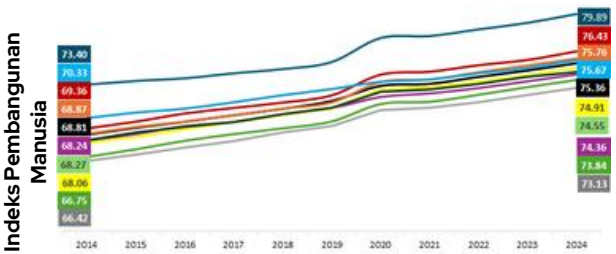

- Dalam 10 tahun terakhir, tren pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sumatra cukup fluktuatif. Pada tahun 2020, Provinsi Kep. Riau menjadi provinsi paling terdampak pandemi Covid-19, hal ini tidak terlepas dari karakteristik perekonomian daerah yang cukup terbuka. Sementara itu, pada triwulan III-2024 kontraksi pada sektor utama daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bangka Belitung menjadi yang terendah secara nasional dan wilayah. Sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi bagi hampir seluruh provinsi di wilayah Sumatra. Ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas SDA baik perkebunan dan pertambangan turut meningkatkan *vulnerability* perekonomian provinsi di Wilayah Sumatra yang salah satunya disebabkan oleh gejolak eksternal.
- Rata-rata penurunan tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di Wilayah Sumatra sebesar 2,15 persen. Provinsi Bengkulu menjadi daerah dengan tren tingkat penurunan kemiskinan tertinggi, diikuti Provinsi Aceh dan Provinsi Lampung. Walaupun menunjukan progres yang cukup baik, tetapi tiga daerah tersebut masih memiliki capaian tingkat kemiskinan di atas nasional.
- Tren penurunan tingkat pengangguran terbuka provinsi di Wilayah Sumatra sebesar 1,09 persen. Provinsi Aceh menjadi daerah dengan rata-rata tingkat penurunan TPT tertinggi di Wilayah Sumatra selama satu dekade terakhir, diikuti Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan.
- Capaian rasio gini di Wilayah Sumatra menunjukan adanya tren perbaikan. Provinsi Bangka Belitung menjadi daerah dengan capaian rasio gini terendah di Wilayah Sumatra bahkan nasional.
- Capaian IPM berbagai provinsi di Wilayah Sumatra sepanjang 10 tahun terakhir menunjukan tren yang terus meningkat. Sejak tahun 2014 hingga 2024, Provinsi Sumatera Selatan menjadi daerah dengan peningkatan IPM terbesar di Wilayah Sumatra atau sebesar 7,09 poin, diikuti Provinsi Sumatera Barat (7,07 poin) dan Provinsi Sumatera Utara (6,89 poin). Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 juga tidak menunjukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap perubahan capaian IPM pada provinsi-provinsi di wilayah Sumatra.

Pendalaman Makro Wilayah Sumatra: Provinsi Sumatera Utara

Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Rasio Gini (2014-2024)

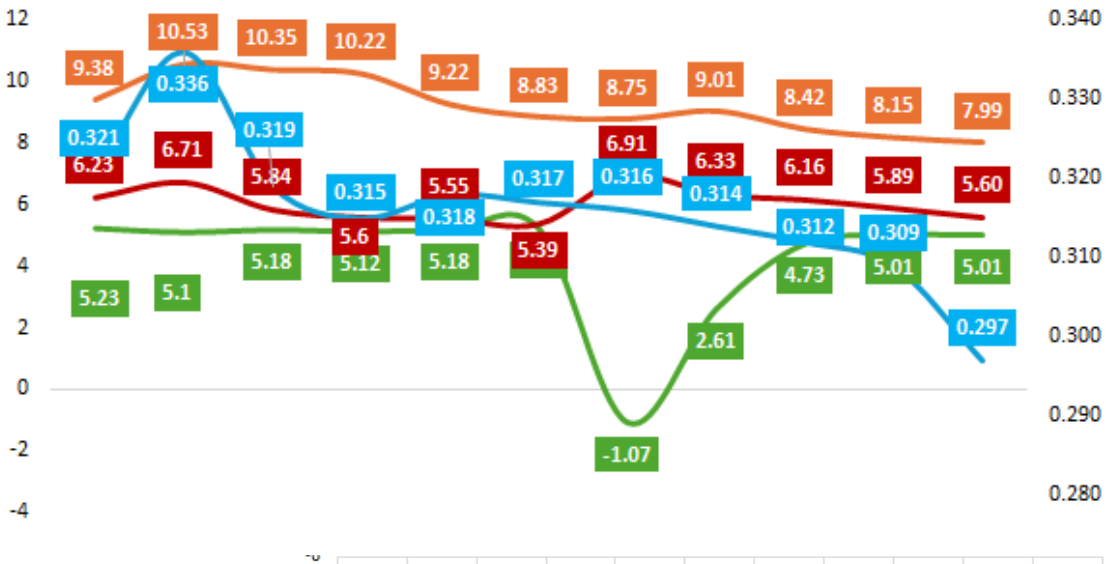

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.23	5.1	5.18	5.12	5.18	5.22	-1.07	2.61	4.73	5.01	5.01
Tingkat Kemiskinan	9.38	10.53	10.35	10.22	9.22	8.83	8.75	9.01	8.42	8.15	7.99
Tingkat Pengangguran Terbuka	6.23	6.71	5.84	5.6	5.55	5.39	6.91	6.33	6.16	5.89	5.60
Rasio Gini	0.321	0.336	0.319	0.315	0.318	0.317	0.316	0.314	0.312	0.309	0.297

Sumber: BPS, diolah

Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara merupakan kontributor perekonomian utama di Wilayah Sumatra dengan tren selama 10 tahun terakhir menunjukan kinerja yang relatif moderat. Meski sempat mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020, namun mampu *rebound* dan kembali tumbuh positif. Kinerja ekonomi Provinsi Sumatera Utara masih ditopang oleh sektor pertanian, industri pengolahan, serta perdagangan. Di sisi lain, membaiknya kinerja perekonomian pascapandemi Covid-19 turut memberikan efek positif bagi tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Adanya indikasi pemerataan pembangunan yang lebih baik juga memengaruhi penurunan rasio gini.

Meskipun menunjukkan tren positif, pertumbuhan ekonomi provinsi belum mampu tumbuh secara optimal terefleksi dari capaian yang berada pada rentang 5 persen. Dukungan berbagai proyek strategis baik nasional dan daerah serta keberadaan berbagai kawasan strategis (Industri dan Pariwisata) diharapkan memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian daerah yang lebih besar. Upaya peningkatan hilirisasi komoditas utama daerah dan efisiensi ekonomi daerah juga perlu terus didorong.

Capaian Makro Wilayah Jawa – Bali

Sumber: BPS, diolah

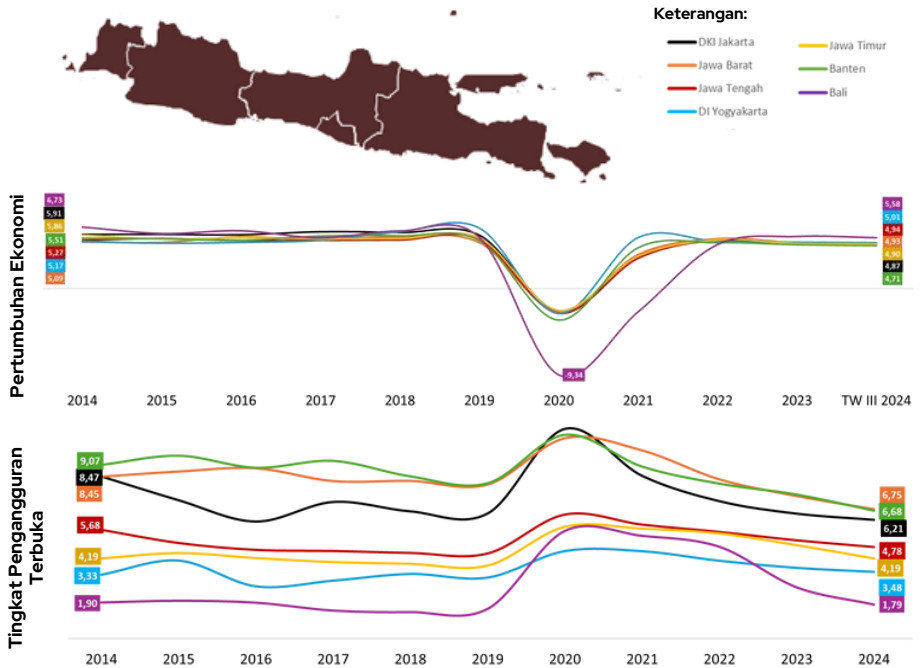

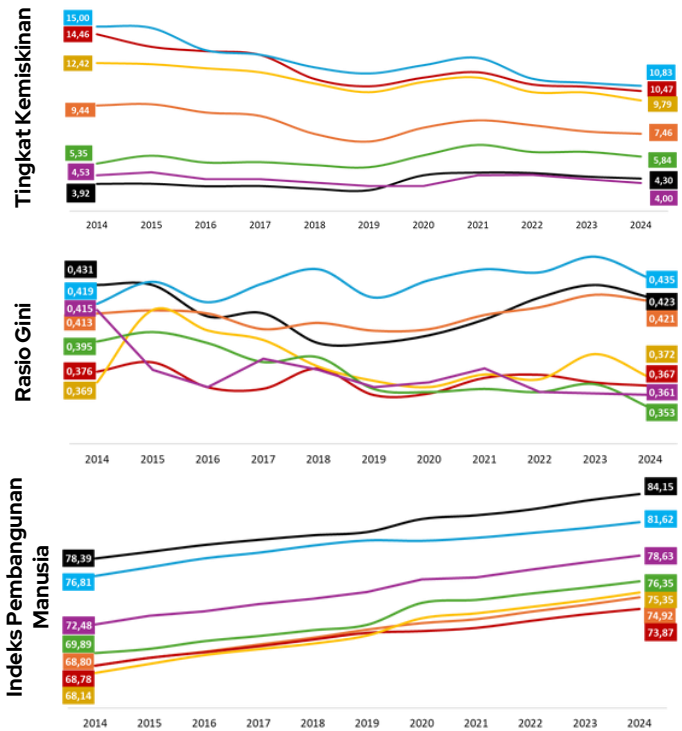

Capaian Makro Wilayah Jawa-Bali dalam Satu Dekade

- Dalam 10 tahun terakhir, capaian pertumbuhan ekonomi provinsi di Wilayah Jawa-Bali cukup fluktuatif. Provinsi Bali mengalami kontraksi paling signifikan hingga 9 persen pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19, namun perlahan *rebound* dan kembali menjadi yang tertinggi.
- Tingkat kemiskinan Provinsi DI Yogyakarta masih menjadi yang tertinggi di Wilayah Jawa-Bali meskipun telah menurunkan hingga 4 persen selama satu dekade terakhir. Sedangkan Provinsi DKI Jakarta dan Banten justru mengalami tren peningkatan.
- Pada indikator TPT, Provinsi Banten berhasil menurunkan hingga 2,39 persen dalam 10 tahun terakhir meskipun masih menjadi yang tertinggi kedua setelah Jawa Barat pada tahun 2024, sedangkan Provinsi DI Yogyakarta justru mengalami tren kenaikan.
- Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang ditunjukkan dengan tren rasio gini dalam 10 tahun terakhir di Wilayah Jawa-Bali cukup fluktuatif. Penurunan signifikan terjadi pada Provinsi Bali dan Banten, sementara untuk Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Barat justru mengalami tren peningkatan dan perlu dioptimalkan.
- Tren capaian IPM provinsi di Wilayah Jawa-Bali meningkat selama 10 tahun terakhir, Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan capaian sangat baik.

Pendalaman Makro Wilayah Jawa-Bali:
Provinsi Bali

Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Rasio Gini (2014-2024)

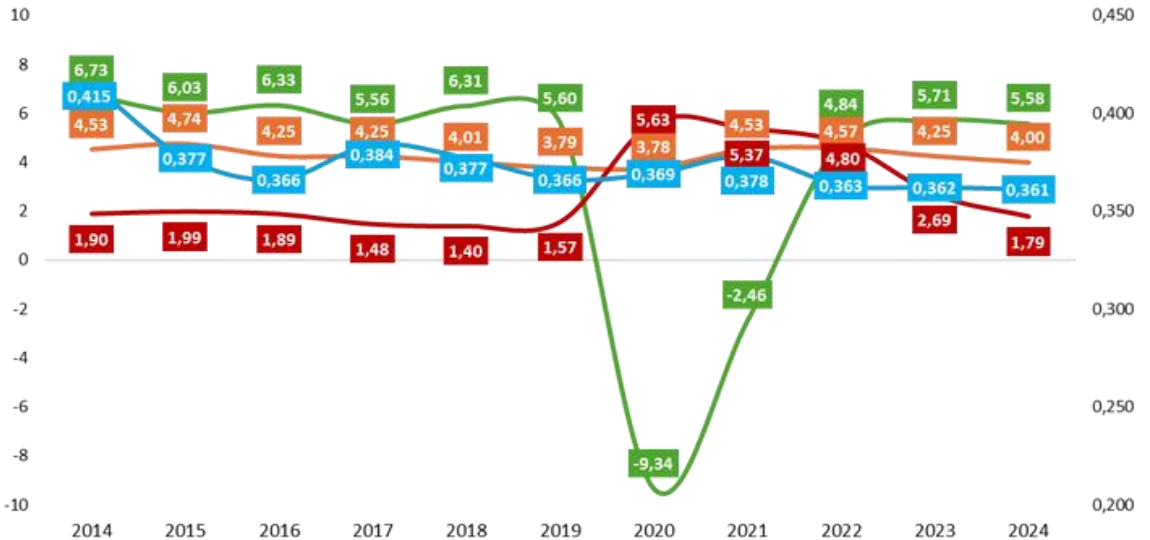

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,73	6,03	6,33	5,56	6,31	5,60	-9,34	-2,46	4,84	5,71	5,58
Tingkat Kemiskinan	4,53	4,74	4,25	4,25	4,01	3,79	3,78	4,53	4,57	4,25	4,00
Tingkat Pengangguran Terbuka	1,90	1,99	1,89	1,48	1,40	1,57	5,63	5,37	4,80	2,69	1,79
Rasio Gini	0,415	0,377	0,366	0,384	0,377	0,366	0,369	0,378	0,363	0,362	0,361

Sumber: BPS, diolah

Pentingnya Diversifikasi Ekonomi di Provinsi Bali

Dalam 10 tahun terakhir, capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali cukup fluktuatif. Meskipun sempat mengalami kontraksi hingga mencapai 9 persen pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19, Provinsi Bali dapat kembali berangsur pulih walaupun capaiannya masih belum setinggi sebelum terjadi pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi di Bali utamanya didorong oleh sektor pariwisata.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali sangat memengaruhi capaian indikator makro lainnya. Dapat terlihat saat pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi pada periode 2020-2021, baik TPT, tingkat kemiskinan, hingga rasio gini mengalami kenaikan. Hal ini tentu merupakan efek domino akibat dilakukannya kebijakan seperti PPKM maupun *lockdown* di level global saat pandemi yang memengaruhi kunjungan wisata ke Bali. Meskipun berangsur membaik, dari pandemi Covid-19 dapat menjadi refleksi untuk Provinsi Bali agar tidak hanya bergantung pada satu sektor saja untuk menghindari hal yang sama terulang kembali di masa depan.

Capaian Makro Wilayah Nusa Tenggara

Sumber: BPS, diolah

Capaian Makro Wilayah Nusa Tenggara dalam Satu Dekade

- Pertumbuhan ekonomi provinsi di Wilayah Nusa Tenggara cukup fluktuatif. Provinsi NTB memiliki capaian pertumbuhan ekonomi yang cukup fluktuatif dimana sektor penggerak utamanya yaitu sektor pertambangan dan penggalian serta pertanian. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT cukup stagnan di angka 5 persen, namun setelah pandemi COVID-19 masih berada di angka 4 persen.
- Tingkat Kemiskinan di Wilayah Nusa Tenggara masih cukup tinggi di atas 10 persen. Namun demikian, Provinsi NTB mampu menurunkan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan dibandingkan Provinsi NTT. Tingkat kemiskinan di Provinsi NTT masih perlu menjadi perhatian karena dalam 10 tahun terakhir hanya menurun kurang dari 1 persen.
- Sejalan dengan tingkat kemiskinan, Provinsi NTB juga mampu menurunkan TPT cukup signifikan. Sementara, TPT di Provinsi NTT terus menurun walaupun sempat meningkat pada 2020.
- Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang ditunjukkan dengan rasio gini di Wilayah Nusa Tenggara terus menurun. Penurunan signifikan terjadi pada Provinsi NTT, sementara untuk Provinsi NTB masih perlu dioptimalkan.
- Tren capaian Indeks Pembangunan Manusia provinsi di Wilayah Nusa Tenggara meningkat, namun untuk IPM di NTT perlu terus dioptimalkan.

Pendalaman Makro Wilayah Nusa Tenggara: Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Rasio Gini (2014-2024)

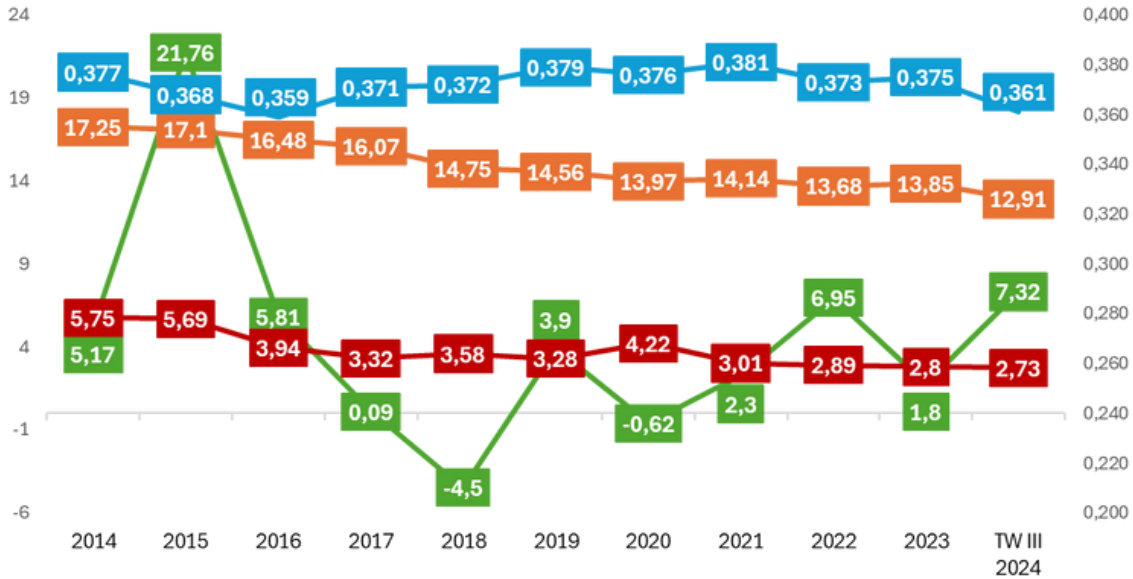

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TW III 2024
Pertumbuhan ekonomi	5,17	21,76	5,81	0,09	-4,5	3,9	-0,62	2,3	6,95	1,8	7,32
Tingkat kemiskinan	17,25	17,1	16,48	16,07	14,75	14,56	13,97	14,14	13,68	13,85	12,91
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,75	5,69	3,94	3,32	3,58	3,28	4,22	3,01	2,89	2,8	2,73
Rasio Gini	0,377	0,368	0,359	0,371	0,372	0,379	0,376	0,381	0,373	0,375	0,361

Sumber: BPS, diolah

Kualitas Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi NTB

Dalam 10 tahun terakhir, capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat fluktuatif. Pada triwulan III 2024 (*c-to-c*), NTB menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kelima di Indonesia, setelah Papua Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua.

Pertumbuhan yang cukup tinggi di NTB terjadi pada tahun 2015 didorong oleh tingginya kinerja sektor pertambangan sebagai dampak dari peningkatan ekspor konsentrat tembaga dan kebijakan relaksasi ekspor tembaga. Namun demikian, pertumbuhan yang tinggi di NTB pada tahun 2015 tersebut belum mampu mendorong penurunan tingkat kemiskinan, rasio gini secara signifikan.

Untuk itu, pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB masih perlu dioptimalkan kualitasnya agar lebih inklusif dan berkelanjutan.

Capaian Makro Wilayah Kalimantan

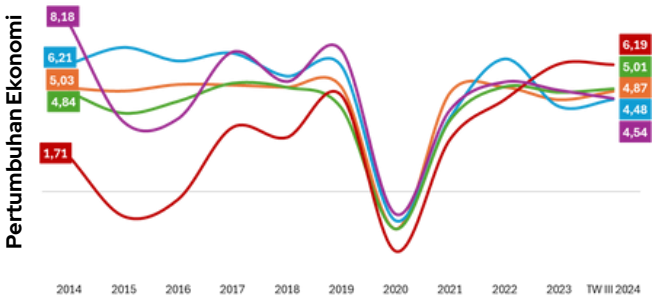

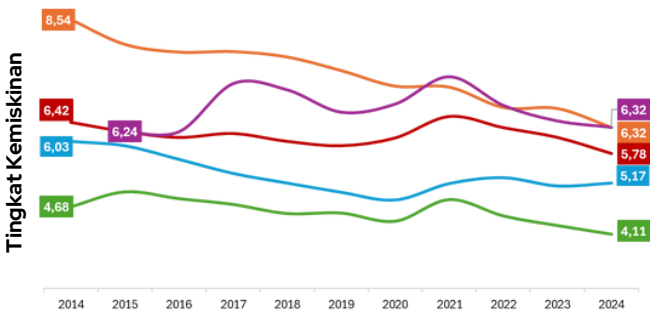

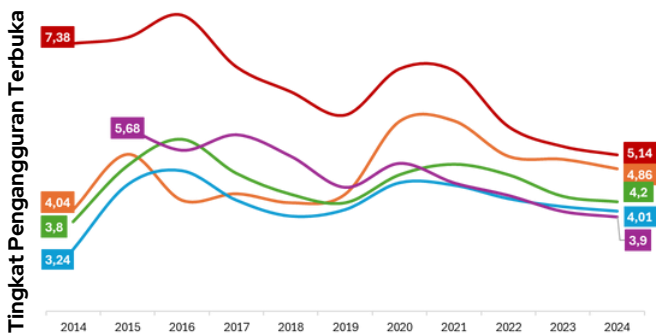

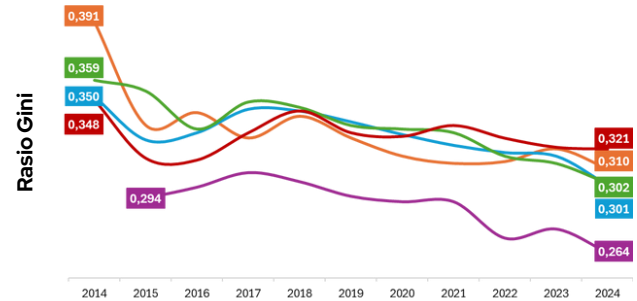

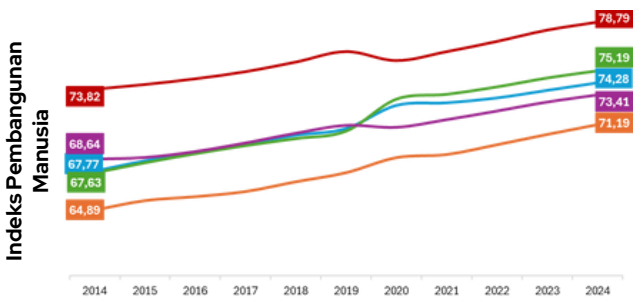

Capaian Makro Wilayah Kalimantan dalam Satu Dekade

- Pertumbuhan ekonomi di Wilayah Kalimantan cukup fluktuatif. Wilayah Kalimantan merupakan daerah yang kaya akan potensi sumber daya alam, baik pertambangan maupun pertanian dalam arti luas. Pertumbuhan ekonominya juga sangat bergantung pada harga komoditas.
- Tingkat Kemiskinan di Wilayah Kalimantan sudah cukup baik dan memiliki tren menurun kecuali Provinsi Kalimantan Utara, yang mengalami kenaikan. Provinsi Kalimantan Barat masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, sementara Kalimantan Selatan merupakan yang terendah.
- Tingkat pengangguran terbuka di Wilayah Kalimantan cukup fluktuatif dimana pada beberapa daerah mengalami peningkatan kecuali Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
- Rasio gini di Wilayah Kalimantan terus mengalami penurunan dimana Provinsi Kalimantan Utara memiliki rasio gini terendah di Wilayah Kalimantan.
- Tren IPM di Wilayah Kalimantan terus meningkat dengan Provinsi Kalimantan Timur merupakan yang tertinggi sementara Kalimantan Barat merupakan yang terendah.

Pendalaman Makro Wilayah Kalimantan:
Provinsi Kalimantan Utara

Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Rasio Gini (2014-2024)

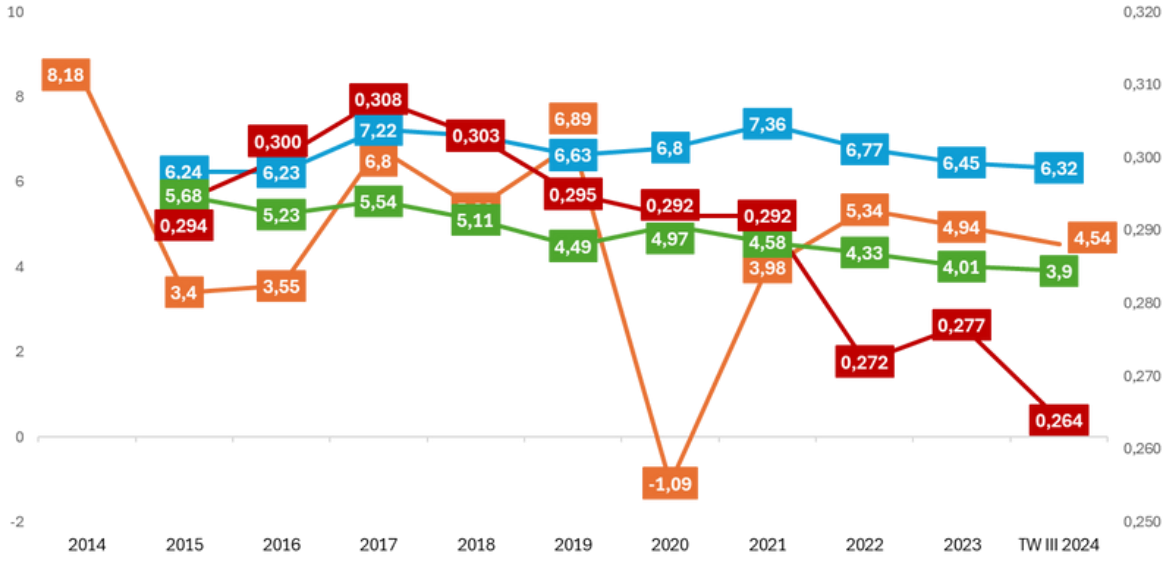

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TW III 2024
Pertumbuhan ekonomi	3,4	3,55	6,8	5,36	6,89	-1,09	3,98	5,34	4,94	4,54
Tingkat kemiskinan	6,24	6,23	7,22	7,09	6,63	6,8	7,36	6,77	6,45	6,32
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,68	5,23	5,54	5,11	4,49	4,97	4,58	4,33	4,01	3,9
Rasio Gini	0,294	0,300	0,308	0,303	0,295	0,292	0,292	0,272	0,277	0,264
IPM	68,76	69,20	69,84	70,56	71,15	71,00	71,57	72,21	72,88	73,41

Sumber: BPS, diolah

Kualitas Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara

Dalam 10 tahun terakhir, capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara sangat fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, perdagangan dan konstruksi. Kondisi tersebut ditengarai oleh fluktuasi harga batubara dan permintaan ekspor komoditas unggulan dan terbatasnya pertumbuhan sektor pertanian.

Kendati demikian, Kalimantan Utara mampu menurunkan rasio gini hingga menempati posisi terendah ke-dua di Indonesia. Namun, hal tersebut tidak terjadi pada indikator kemiskinan. Selama 10 tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara cukup fluktuatif dan cenderung meningkat. Berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Utara, penyebab permasalahan kemiskinan yaitu: (1) rendahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, (2) rendahnya keterjangkauan akses layanan infrastruktur dasar, dan (3) rendahnya pendapatan masyarakat.

Kondisi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Utara juga masih menjadi kedua terendah dibandingkan provinsi lain di Wilayah Kalimantan. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat masih perlu terus dioptimalkan kualitasnya agar lebih inklusif dan berkelanjutan.

Capaian Makro Wilayah Sulawesi

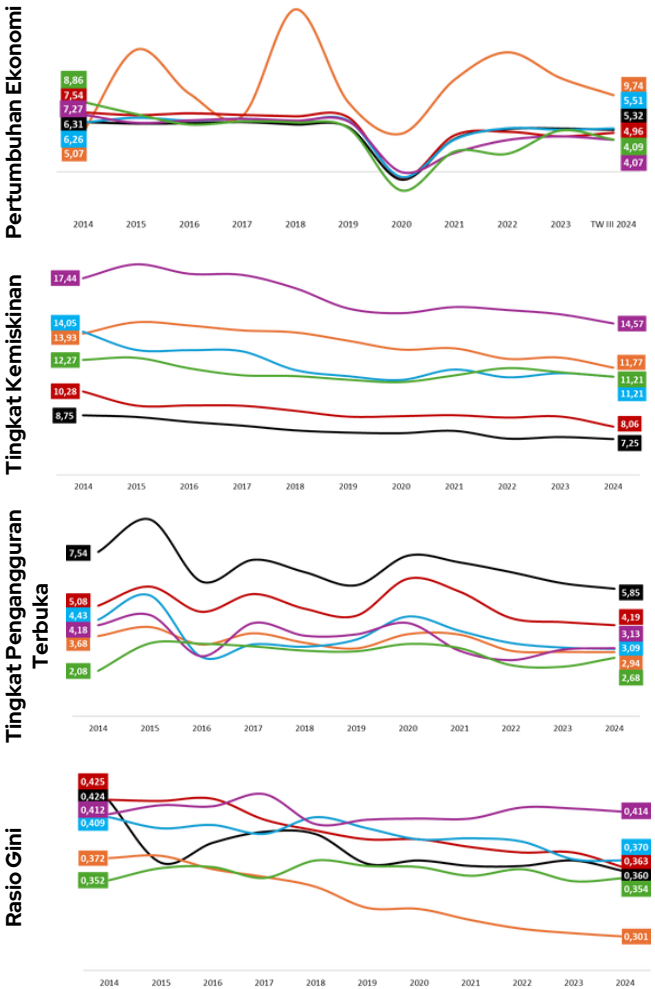

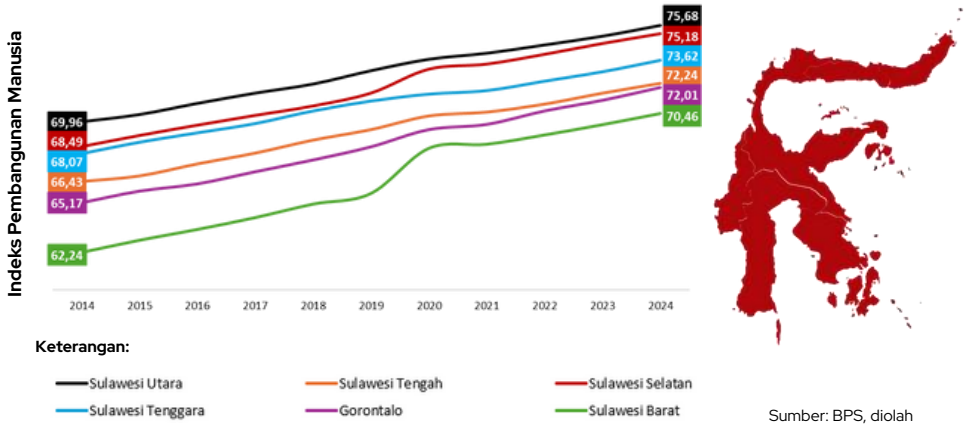

Sumber: BPS, diolah

Capaian Makro Wilayah Sulawesi dalam Satu Dekade

- Capaian pertumbuhan ekonomi provinsi di Wilayah Sulawesi cukup fluktuatif. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki capaian tertinggi di Wilayah Sulawesi. Sementara provinsi lainnya memiliki pertumbuhan yang cukup stagnan dari tahun 2014-2024.
- Tingkat Kemiskinan di Wilayah Sulawesi masih cukup tinggi di atas 10 persen kecuali Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Penurunan kemiskinan di Wilayah Sulawesi masih belum cukup signifikan.
- Provinsi Sulawesi Utara memiliki tingkat kemiskinan terendah di Wilayah Sulawesi, namun capaian Tingkat Pengangguran Terbuka nya merupakan yang tertinggi di Wilayah Sulawesi. Penurunan TPT di Wilayah Sulawesi juga masih belum cukup signifikan.
- Pada tahun 2024, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki capaian rasio gini terendah di Wilayah Sulawesi dengan tren menurun dari tahun 2014, sedangkan Provinsi Gorontalo memiliki capaian rasio gini tertinggi yaitu sebesar 0,414 dan memiliki tren meningkat dalam 5 tahun terakhir.
- Tren capaian Indeks Pembangunan Manusia provinsi di Wilayah Sulawesi meningkat selama 10 tahun terakhir. Provinsi Sulawesi Barat memiliki capaian IPM terendah di Wilayah Sulawesi.

Pendalaman Makro Wilayah Sulawesi:
Provinsi Sulawesi Tengah

Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Rasio Gini (2014-2024)

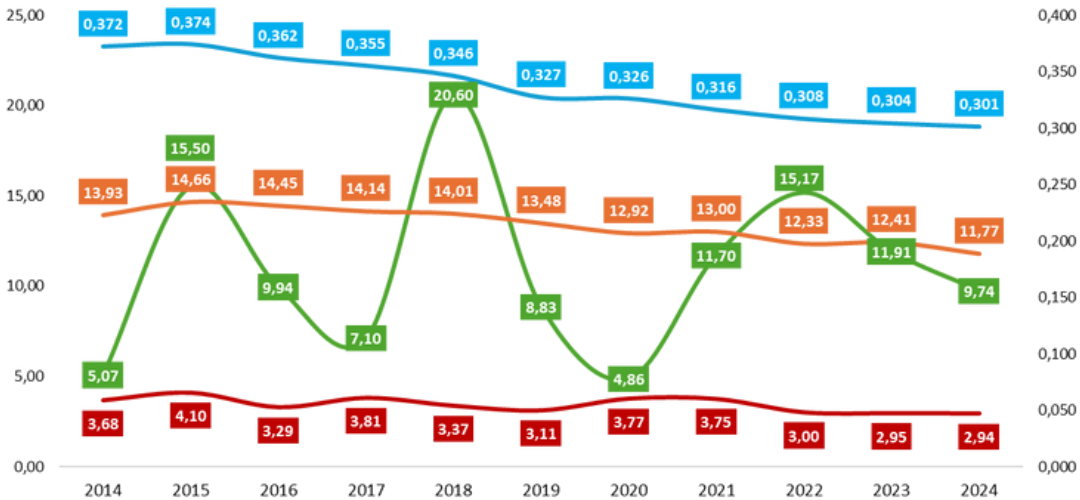

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,07	15,50	9,94	7,10	20,60	8,83	4,86	11,70	15,17	11,91	9,74
Tingkat Kemiskinan	13,93	14,66	14,45	14,14	14,01	13,48	12,92	13,00	12,33	12,41	11,77
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,68	4,10	3,29	3,81	3,37	3,11	3,77	3,75	3,00	2,95	2,94
Rasio Gini	0,372	0,374	0,362	0,355	0,346	0,327	0,326	0,316	0,308	0,304	0,301

Sumber: BPS, diolah

Inklusivitas dan Keberlanjutan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam 10 tahun terakhir, capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah sangat fluktuatif. Meskipun demikian, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi di Wilayah Sulawesi. Capaian tersebut utamanya didorong oleh kinerja lapangan usaha industri pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Kinerja lapangan usaha industri pengolahan menjadi katalis perekonomian Sulawesi Tengah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah mengalami titik puncak tahun 2015, 2018, dan 2022. Hal ini didorong oleh meningkatnya kontribusi dari sektor industri pengolahan seiring dengan beroperasinya industri pengolahan LNG dan *smelter* dan juga ditopang oleh meningkatnya hasil ekspor dan tingginya realisasi investasi skala besar. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian juga menjadi kontributor pertumbuhan Sulawesi Tengah dengan terjaganya permintaan dari negara mitra dagang atas LNG dan komoditas nikel beserta turunannya). Pada tahun 2024, terdapat rencana *commissioning* 20 lini *smelter* pirometalurgi untuk meningkatkan produksi *Nickel Pig Iron* (NPI) di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan tersebut nyatanya belum mampu secara signifikan menurunkan kemiskinan dan rasio gini sementara tingkat pengangguran terbuka juga cenderung memiliki tren yang stagnan. Sehingga pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah masih perlu ditingkatkan kualitasnya agar dapat lebih inklusif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Capaian Makro Wilayah Maluku

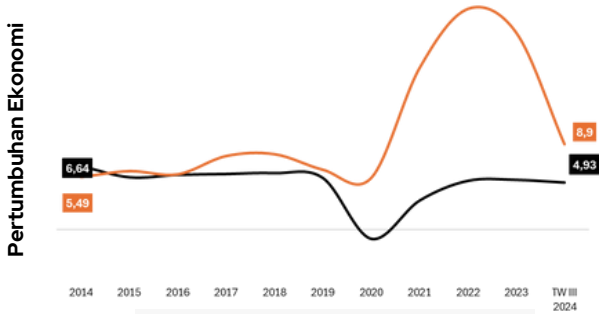

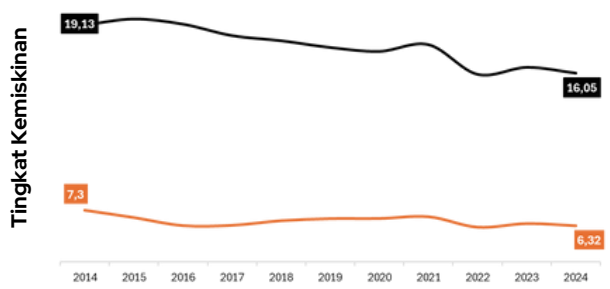

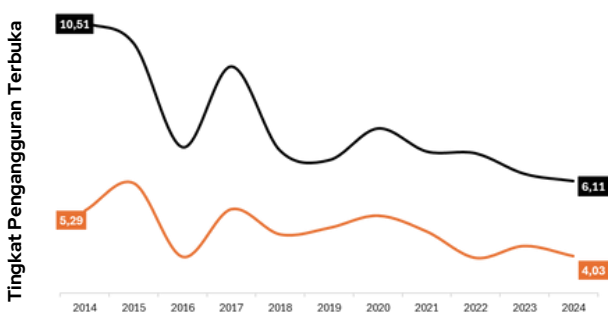

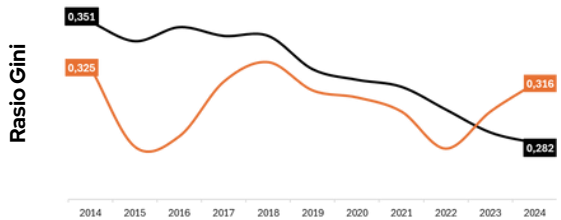

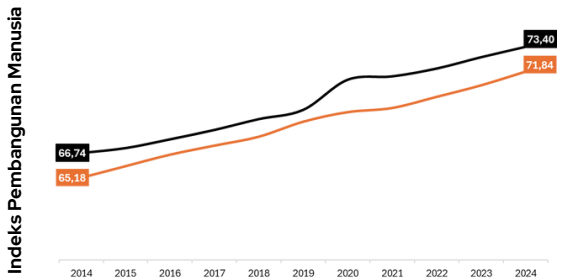

Sumber: BPS, diolah

Capaian Makro Wilayah Maluku dalam Satu Dekade

- Capaian pertumbuhan ekonomi di Wilayah Maluku cukup fluktuatif. Provinsi Maluku Utara memiliki capaian tertinggi dimana terjadi kenaikan yang signifikan akibat kinerja industri pengolahan terutama nikel.
- Tren tingkat kemiskinan di Wilayah Maluku terus menurun. Namun demikian, capaian Provinsi Maluku masih cukup tinggi di atas 10 persen.
- Tingkat pengangguran terbuka Wilayah Maluku tren menurun. Penurunan cukup signifikan terjadi di Provinsi Maluku.
- Rasio gini di Wilayah Maluku menunjukkan kondisi yang berbeda, dimana rasio gini di Provinsi Maluku terus menurun sementara Provinsi Maluku Utara cenderung meningkat.
- Tren capaian Indeks Pembangunan Manusia provinsi di Wilayah Maluku meningkat dengan IPM di Provinsi Maluku lebih tinggi dibandingkan Maluku Utara.

Pendalaman Makro Wilayah Maluku:
Provinsi Maluku Utara

Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Rasio Gini (2014-2024)

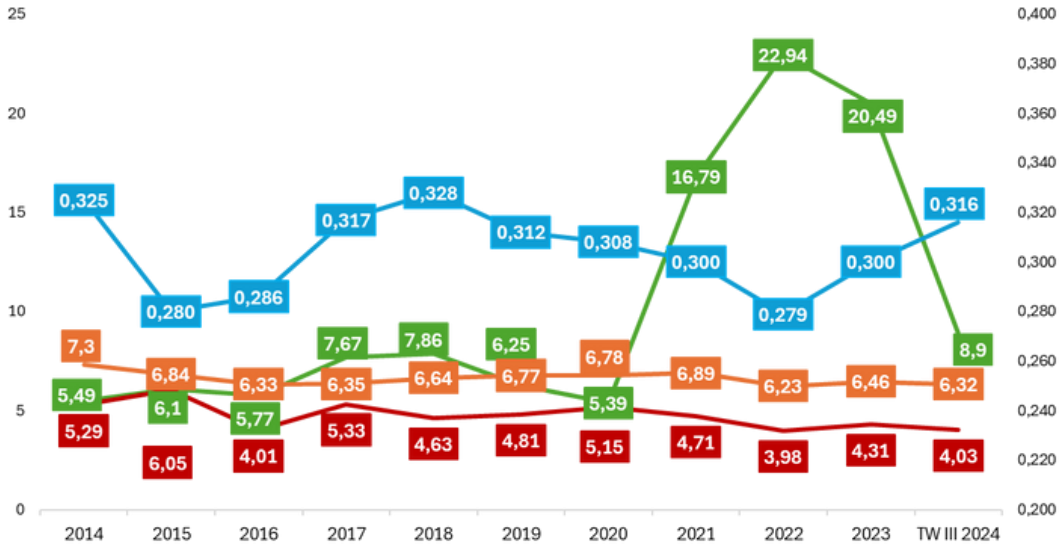

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TW III 2024
Pertumbuhan ekonomi	5,49	6,1	5,77	7,67	7,86	6,25	5,39	16,79	22,94	20,49	8,9
Tingkat kemiskinan	7,3	6,84	6,33	6,35	6,64	6,77	6,78	6,89	6,23	6,46	6,32
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,29	6,05	4,01	5,33	4,63	4,81	5,15	4,71	3,98	4,31	4,03
Rasio Gini	0,325	0,280	0,286	0,317	0,328	0,312	0,308	0,300	0,279	0,300	0,316

Sumber: BPS, diolah

Kualitas Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku Utara

Dalam 10 tahun terakhir, capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara cukup fluktuatif. Pertumbuhan yang cukup tinggi di Maluku Utara terjadi pada tahun 2022 didorong oleh realisasi ekspor produk olahan nikel yang masih mengalami peningkatan dipengaruhi oleh optimalisasi produksi smelter eksisting. Namun setelah itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara terus mengalami deselerasi hingga sampai dengan triwulan III-2024 capaiannya sebesar 8,9 persen dimana disebabkan oleh adanya penurunan kinerja yang cukup signifikan pada sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan.

Namun demikian, pertumbuhan yang tinggi di Maluku Utara belum mampu mendorong penurunan tingkat kemiskinan, rasio gini, dan tingkat pengangguran terbuka secara signifikan.

Ketimpangan pendapatan di Provinsi Maluku Utara cukup fluktuatif dan menunjukkan adanya tren peningkatan pada tiga tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Maluku Utara. Kenaikan rasio gini juga terjadi di wilayah perkotaan dan perdesaan. Kenaikan rasio gini diduga terjadi sejalan dengan kenaikan harga BBM yang naik per bulan September 2022 sehingga menyebabkan naiknya harga beberapa kebutuhan pokok/utama, sehingga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang menurun.

Untuk itu, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara masih perlu dioptimalkan kualitasnya agar lebih inklusif dan berkelanjutan termasuk mengurangi kesenjangan pendapatan penduduk.

Capaian Makro Wilayah Papua

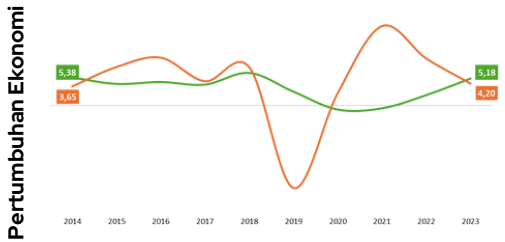

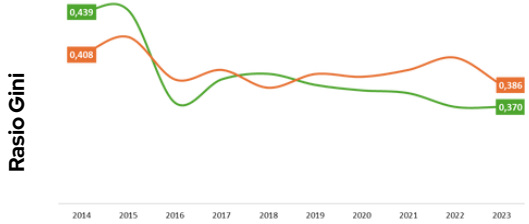

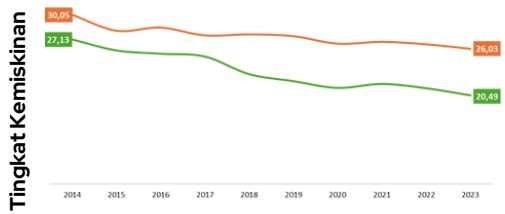

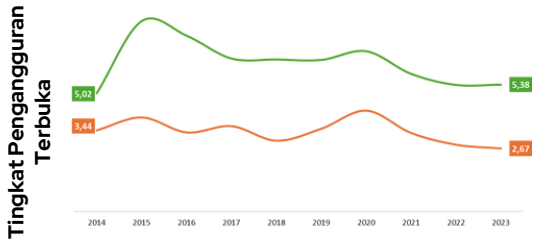

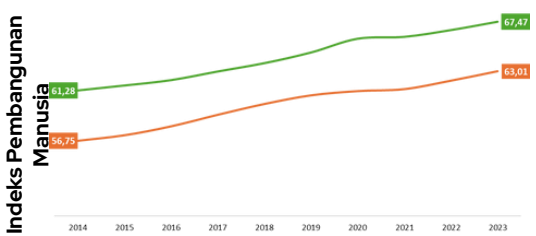

Sumber: BPS, diolah

Capaian Makro Wilayah Papua dalam Satu Dekade

- Capaian pertumbuhan ekonomi provinsi di Wilayah Papua cukup fluktuatif. Provinsi Papua Barat memiliki capaian tertinggi di Wilayah Papua dimana terjadi kenaikan yang signifikan akibat adanya pertumbuhan yang lebih tinggi terutama didorong realisasi *lifting* minyak dan gas alam untuk keperluan produksi LNG, sejalan dengan telah selesainya *maintenance* pada *Train* II Tangguh dan *unplanned outage Train* III Tangguh.
- Tingkat Kemiskinan di Wilayah Papua terus menurun namun penurunannya belum signifikan dan masih berada di atas 20 persen, terutama di Provinsi Papua yang masih sebesar 26,03 persen
- Rasio gini di Wilayah Papua terutama Provinsi Papua masih cukup tinggi yaitu sebesar 0,386
- TPT di Wilayah Papua memiliki tren yang fluktuatif, Provinsi Papua memiliki nilai TPT terendah di Wilayah Papua dan terendah kedua secara nasional yaitu sebesar 2,67 persen
- Tren IPM di Wilayah Papua meningkat dari tahun 2014-2023, namun IPM di Wilayah Papua masih dalam kategori sedang karena masih di bawah 70

Pendalaman Makro Wilayah Papua: Provinsi Papua Barat

Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Rasio Gini (2014-2023)

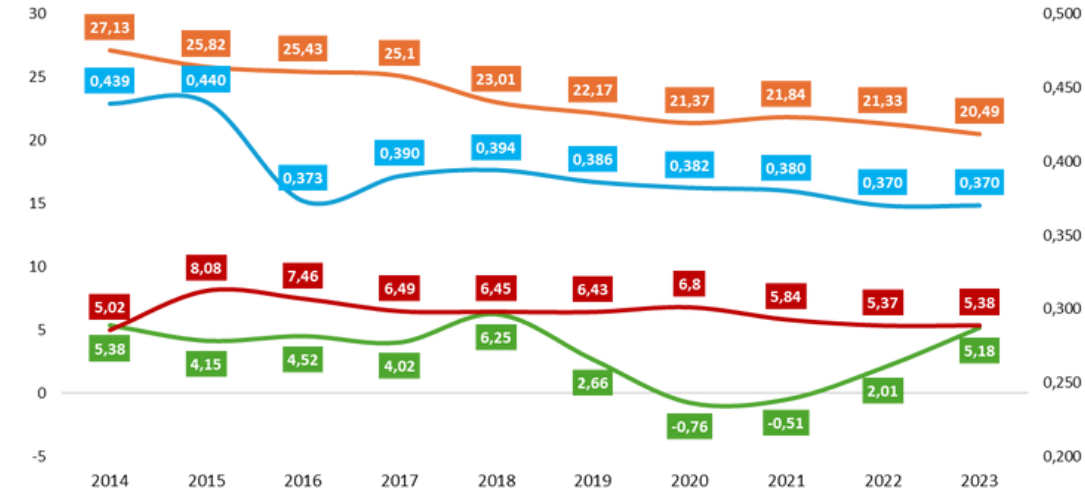

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,38	4,15	4,52	4,02	6,25	2,66	-0,76	-0,51	2,01	5,18
Tingkat Kemiskinan	27,13	25,82	25,43	25,1	23,01	22,17	21,37	21,84	21,33	20,49
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,02	8,08	7,46	6,49	6,45	6,43	6,8	5,84	5,37	5,38
Rasio Gini	0,439	0,440	0,373	0,390	0,394	0,386	0,382	0,380	0,370	0,370
IPM	27,13	25,82	25,43	25,1	23,01	22,17	21,37	21,84	21,33	20,49

Sumber: BPS, diolah

Efektivitas Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua Barat

Dalam 10 tahun terakhir, capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat sangat fluktuatif dengan tren meningkat pasca Covid-19. Provinsi Papua Barat memiliki capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi di Wilayah Papua. Capaian tersebut utamanya didorong oleh pertumbuhan yang lebih tinggi pada sektor pertambangan dan penggalian (sejalan dengan kenaikan produksi pertambangan minyak dan gas bumi) dan industri pengolahan, hal ini didorong oleh kenaikan produksi gas alam cair (*liquified natural gas*/LNG) *Train* 3 LNG Tangguh.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat yang cukup signifikan selama 10 tahun terakhir sudah cukup baik dalam menurunkan kemiskinan dan rasio gini meskipun capainnya hingga saat ini masih sangat tinggi sementara tingkat pengangguran terbuka cenderung memiliki tren yang stagnan.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat masih perlu ditingkatkan kualitasnya agar dapat lebih inklusif dan berkelanjutan.

06

Kesimpulan dan Rekomendasi

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan

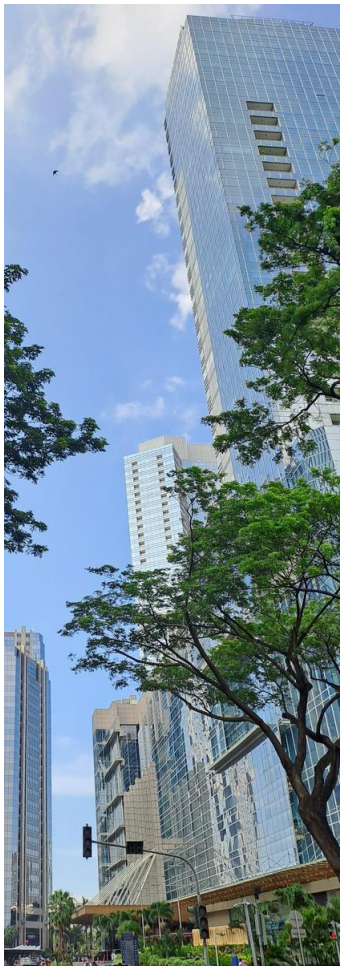

Pandemi COVID-19 Memberikan Pengaruh Besar dalam Pencapaian Pembangunan Daerah pada 5 Tahun Terakhir

Selama lima tahun terakhir (2019–2023), capaian indikator makro di 34 provinsi menunjukkan variasi yang signifikan, terutama dengan adanya dampak besar dari pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kontraksi ekonomi di hampir semua provinsi, terutama provinsi yang memiliki ketergantungan besar di sektor-sektor seperti pariwisata, perdagangan, dan industri pengolahan. Beberapa daerah mulai pulih dan tumbuh signifikan terutama bagi daerah yang ditopang oleh adanya aktivitas hilirisasi SDA. Namun demikian, selama satu tahun terakhir menunjukkan adanya perlambatan kinerja ekonomi di berbagai daerah. Tingkat kemiskinan di berbagai daerah menunjukan adanya tren yang terus menurun, terutama pascapandemi Covid-19. Walaupun telah menunjukkan adanya penurunan, namun tingkat kemiskinan di daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan tinggi akibat adanya aktivitas hilirisasi SDA justru menunjukkan adanya peningkatan selama satu tahun terakhir. Di sisi lain, sepanjang tahun 2019 hingga 2023 pembangunan kualitas SDM di 34 provinsi terus menunjukkan tren yang terus meningkat, meski masih adanya isu pemerataan kualitas SDM antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Isu Inklusivitas Perekonomian di Kawasan Timur Indonesia

Fenomena beberapa daerah terutama dengan sektor utama pertambangan dan hilirisasi SDA meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut cenderung masih rendah. Hal ini mengindikasikan belum inklusifnya pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut sehingga pertumbuhan yang terjadi hanya dinikmati oleh beberapa pihak tertentu saja. Di sisi lain, beberapa daerah dengan tingkat pengangguran yang rendah namun memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi masih dapat ditemukan di beberapa daerah terutama di Kawasan Timur Indonesia. Hal ini mengindikasikan beberapa daerah tersebut memiliki produktivitas perekonomian yang masih rendah, sehingga meskipun mayoritas masyarakatnya sudah bekerja namun belum dapat memenuhi kebutuhan dasar.

Isu Infrastruktur dan Layanan Dasar Masih menjadi Permasalahan Utama di Daerah

Isu strategis kewilayahan cukup beragam di masing-masing wilayah. Isu wilayah yang sering muncul di berbagai wilayah antara lain: (1) masih terbatasnya akses, kuantitas, kualitas infrastruktur konektivitas; (2) masih belum meratanya akses, kuantitas, dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan terutama di wilayah 3T; (3) belum optimalnya kualitas dan daya saing SDM; (4) belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan daerah; serta (5) belum optimalnya mitigasi bencana dan penanganan degradasi lingkungan di daerah.

6.2 Rekomendasi Umum berdasarkan Agenda Pembangunan

Rekomendasi Umum

Agenda Pembangunan 1

- Mendorong peningkatan dan pemerataan infrastruktur konektivitas antardaerah dan infrastruktur penunjang ekonomi terutama di kawasan kepulauan dan daerah 3T seperti Provinsi NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua
- Mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing sektor agromaritim melalui stimulan bagi para petani, peternak, dan nelayan yang difokuskan di Provinsi NTT, Jambi, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Wilayah Maluku, dan Wilayah Papua
- Meningkatkan realisasi investasi melalui kemudahan perizinan, reformasi birokrasi, harmonisasi regulasi, serta peningkatan stabilitas keamanan, ekonomi, dan politik terutama di Kawasan Timur Indonesia seperti Wilayah Papua

Agenda Pembangunan 2

- Mendorong peningkatan kemandirian desa di Kawasan Timur Indonesia yang difokuskan di Provinsi NTT, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, dan Papua
- Mendorong pemerataan infrastruktur layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, konektivitas, air bersih, sanitasi, dan hunian layak terutama di Kawasan Timur Indonesia dan daerah 3T seperti Papua, Papua Barat, NTT, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Maluku Utara, dan Gorontalo
- Mendorong penurunan kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta meminimalkan wilayah kantong kemiskinan di seluruh provinsi

Agenda Pembangunan 3

- Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan perlindungan jaminan sosial
- Mendorong akselerasi penurunan *stunting* dan *wasting* melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif terutama di daerah dengan prevalensi tinggi seperti Provinsi NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Aceh, Papua, dan Maluku
- Mendorong akselerasi pemenuhan imunisasi dasar lengkap yang difokuskan di daerah yang capaiannya belum optimal antara lain Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Papua, Banten, Maluku Utara, dan Jambi
- Meningkatkan akses layanan pendidikan yang berkualitas melalui beasiswa pendidikan, sekolah kecil kampung, serta asrama pendidikan untuk kawasan kepulauan dan daerah 3T seperti Wilayah Kalimantan, Bali-Nusra, Maluku, dan Papua
- Meningkatkan pemberdayaan gender dan pembangunan pemuda melalui kemudahan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, serta keterlibatan dalam pembangunan di seluruh provinsi

Rekomendasi Umum

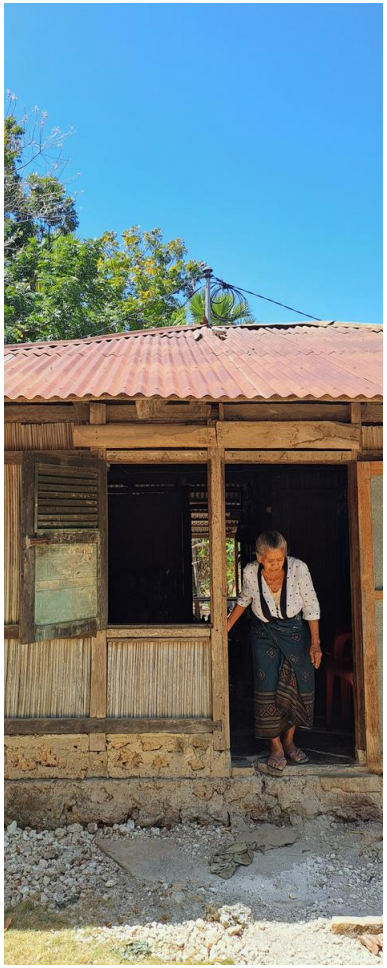

Agenda Pembangunan 4

- Mendorong peningkatan pelestarian nilai budaya pada aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan terutama di Provinsi Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Banten, dan Nusa Tenggara Timur
- Mendorong peningkatan toleransi, kerja sama, kesetaraan, kerukunan, dan keikutsertaan dalam kegiatan lintas suku, budaya dan agama yang difokuskan pada Provinsi Jambi, Banten, Sumatera Barat, dan Riau
- Mendorong peningkatan budaya literasi yang difokuskan di Provinsi Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, NTT, dan Maluku

Agenda Pembangunan 5

- Mengoptimalkan penggunaan sumber energi alternatif di daerah *blankspot* yang disesuaikan dengan kondisi daerah dalam upaya pemenuhan rasio elektrifikasi terutama di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, NTT, dan Kalimantan Tengah
- Mendorong pemerataan infrastruktur layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, konektivitas, air bersih, sanitasi, dan hunian layak terutama di Kawasan Timur Indonesia dan daerah 3T seperti Papua, Papua Barat, NTT, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, dan Gorontalo
- Mendorong peningkatan dan pemerataan infrastruktur konektivitas antardaerah dan infrastruktur penunjang ekonomi terutama di kawasan kepulauan dan daerah 3T seperti Provinsi NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua
- Meningkatkan akses hunian layak dan penanganan kawasan kumuh di wilayah metropolitan seperti Wilayah Metropolitan Jakarta, Jawa Barat, dan Kep. Riau

Agenda Pembangunan 6

- Mendorong pembangunan berkelanjutan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berorientasi kelestarian lingkungan, ketahanan bencana, dan perubahan iklim di seluruh provinsi
- Mendorong pengendalian pembangunan pada intervensi yang memerlukan pembukaan lahan dan eksplorasi lingkungan, seperti program ketahanan pangan dan hilirisasi industri, agar mempertimbangkan daya dukung lingkungan, keberlanjutan hutan lindung, dan dampak-dampak lain yang diakibatkan oleh pembangunan terutama di Wilayah Papua

Agenda Pembangunan 7

- Memperkuat transformasi tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik di seluruh provinsi
- Memperkuat kapasitas kelembagaan demokrasi di daerah terutama di Kawasan Timur Indonesia seperti Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT

6.3 Rekomendasi berdasarkan Kewilayahan

Isu Strategis dan Rekomendasi Arah Kebijakan Kewilayahan
Wilayah Sumatra

1 Belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan wilayah sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Pengembangan dan pemerataan kawasan strategis nasional, pusat pertumbuhan ekonomi, dan dukungan sarana prasarana.
- Optimalisasi hilirisasi industri sektor unggulan: (1) perkebunan: kelapa sawit, karet, & hutan tanaman industri; dan (2) pertambangan: batubara, minyak bumi, gas, bauksit, pasir kuarsa, dan timah.
- Peningkatan produktivitas dan nilai tambah *high-value commodity* seperti kelapa sawit, karet, kopi, kakao, dll.
- Penguatan logistik dan pemasaran produk unggulan pertanian dan perikanan.

2 Belum optimalnya kualitas SDM dimana mayoritas tenaga kerja didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Peningkatan akses, sarana prasarana, serta kualitas pendidikan dan kesehatan di wilayah perdesaan dan daerah afirmasi 3T.
- Penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan untuk mendukung industri kreatif dan ekonomi lokal.
- Penguatan kebijakan *link and match* dunia pendidikan dan dunia industri/dunia usaha melalui pendidikan vokasi berbasis sumber daya lokal.
- Meningkatkan kapasitas calon tenaga kerja dan kemampuan digital dalam berusaha.
- Memperbanyak kebijakan nasional dan daerah terkait upaya kemudahan membuka lapangan usaha baru.

3 Degradasi lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, abrasi, dan penurunan luas lahan pertanian pangan karena aktivitas perkebunan kelapa sawit, alih fungsi lahan, serta pertambangan

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Penguatan penegakan hukum lingkungan hidup dalam rangka keberlanjutan pembangunan di Wilayah Sumatra dan pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan.
- Pemulihan terhadap daerah yang terdampak degradasi lingkungan.
- Identifikasi dan penetapan area preservasi termasuk pengelolaan dan pengamanan area wilayah hutan yang bernilai konservasi tinggi.

4 Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar terutama fasilitas dan tenaga kesehatan dan pendidikan terutama di daerah 3T

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Penyusunan satu sistem pendataan yang terintegrasi dan sistem jaminan sosial dengan cakupan universal (UHC).
- Verifikasi dan validasi data kemiskinan.
- Peningkatan kebijakan jaminan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, dan subsidi untuk masyarakat miskin.
- Peningkatan akses, kualitas, dan pemerataan pelayanan kesehatan.
- Penyediaan penyuluh tentang pola konsumsi, gizi, dan pola asuh anak.
- Diversifikasi konsumsi pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta mempermudah akses pangan.
- Peningkatan akses dan sarpras, serta pemerataan kualitas pendidikan di wilayah perdesaan dan daerah afirmasi 3T.
- Peningkatan akses TIK di wilayah perdesaan dan daerah afirmasi 3T.

5 Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas infrastruktur, khususnya konektivitas antarwilayah, infrastruktur ekonomi, infrastruktur dasar, dll.

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Pembangunan dan pengembangan infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara dalam konteks integrasi Wilayah Sumatra.
- Penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatra yang menghubungkan provinsi-provinsi di Pulau Sumatra.
- Pembangunan dan pengembangan layanan pelabuhan utama, serta peningkatan kualitas layanan bandara.
- Peningkatan aksesibilitas transportasi publik, khususnya di wilayah perkotaan dan perdesaan untuk mendukung distribusi ekonomi dan pariwisata.
- Peningkatan konektivitas jalan tol antar provinsi di Wilayah Barat Sumatra.

6 Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana di Wilayah Sumatra terutama di pesisir barat

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Penguatan ketahanan bencana dan perencanaan penanggulangan bencana.
- Pelaksanaan edukasi masyarakat terkait mitigasi bencana, terutama bencana gempa bumi dan tsunami.
- Pembangunan sarana prasarana penunjang mitigasi bencana.

7 Maraknya kriminalitas (*human trafficking*, narkoba) di daerah perbatasan negara dan pulau-pulau terpencil serta terluar

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Penguatan pengamanan lintas batas antarnegara dan antardaerah.
- Edukasi untuk masyarakat khususnya di daerah perbatasan.

Rekomendasi

Intervensi K/L untuk Wilayah Sumatra

Mendukung Sasaran:

- Pertumbuhan Ekonomi
- Penurunan Kemiskinan
- Peningkatan Kualitas SDM

Pertumbuhan Ekonomi

Kementerian Perindustrian	• Pengembangan hilirisasi industri yang sesuai dengan potensi daerah • Penyiapan regulasi untuk mendorong peningkatan hilirisasi di daerah
Kemen PU, Kemenhub	• Pembangunan infrastruktur dan konektivitas pendukung kegiatan ekonomi
BKPM	• PMA dan PMDN bernilai tinggi dan berorientasi ekspor
Kemenpar, Kemenekraf	• Penyiapan regulasi dan pembangunan ekosistem industri dan pariwisata • Pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital
Kemendag	• Pemasaran produk lintas daerah
BRIN	• Pengembangan riset dan teknologi
Kemenkop, KemenUMKM	• Pemberian bantuan permodalan UMKM

Penurunan Kemiskinan

KemenPU, KemenPKP	• Penanganan kawasan kumuh • Pembangunan SPAM dan SPAL-D • Pembangunan bendungan dan irigasi
KemenLH, Kemenhut	• Penguatan regulasi *carbon trading*
Kemendes PDT	• Pemberian dana desa untuk pengentasan kemiskinan
Kemenko pangan	• Pemberian bantuan pangan
Bappenas, BPS, Kemensos, Kemenko Ekon	• Keterpaduan data kemiskinan (Regsosek, DTKS, P3KE)
Kemensos	• Pengembangan inpres pengentasan kemiskinan
Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek	• Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan masyarakat miskin
Kemenkop, KemenUMKM	• Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan masyarakat miskin

Peningkatan Kualitas SDM

Kemenkes	• Perluasan PMT bergizi bagi keluarga berisiko *stunting* • Revitalisasi posyandu
Kemnaker	• Penyiapan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri
BKKBN	• Peningkatan peran pendamping keluarga
Kemenkop, KemenUMKM	• Pelatihan kewirausahaan
Kemendik Dasmen, Kemenag	• Program guru terbang dan pendidikan jarak jauh untuk daerah 3T • Peningkatan kualitas guru di daerah 3T • Tunjangan khusus untuk guru dan tenaga pendidik di daerah terpencil • Pembangunan sekolah unggul terintegrasi • Peningkatan kapasitas pendidikan vokasi

Isu Strategis dan Rekomendasi Arah Kebijakan Kewilayahan
Wilayah Jawa

1 Masih tingginya kesenjangan pembangunan antarwilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara Utara dan Selatan, Barat, dan daerah kepulauan

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Pembangunan dan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis *endownment* melalui peningkatan konektivitas antarwilayah
- Peningkatan kepatuhan terhadap RTRW sebagai upaya pengendalian pembangunan dan penyeimbangan investasi, terutama di Wilayah Selatan Jawa
- Penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana kawasan permukiman
- Pemerataan sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan telekomunikasi di wilayah *blankspot*

2 Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti banjir rob di daerah pesisir utara Pulau Jawa, gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir selatan Pulau Jawa

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Perlunya pengembangan manajemen pengolahan persampahan dan limbah
- Peningkatan kapasitas SDM melalui edukasi masyarakat terkait kebencanaan
- Penguatan mitigasi dan deteksi dini bencana melalui pembangunan tanggul laut untuk pengamanan banjir rob di Kawasan Pantura serta pembangunan infrastruktur digital untuk meningkatkan keamanan *cyber*

3 Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Pengendalian alih fungsi lahan produktif, penambangan liar, dan pencemaran lingkungan di kawasan sungai
- Peningkatan rasio Ruang Terbuka Hijau melalui optimalisasi pemanfaatan bangunan vertikal
- Penurunan Emisi GRK 30 persen di tahun 2030 dan NZE di tahun 2050
- Pengendalian dan peningkatan kualitas air dan udara yang terintegrasi antarwilayah

4 Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor primer, industri, dan UMKM

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan pemanfaatan dan diversifikasi teknologi pertanian (alsintan)
- Perbaikan rantai pasok (*supply chain*) dan manajemen cadangan (*stock*) pangan
- Peningkatan kualitas SDM melalui perubahan *mindset* masyarakat agraris ke industri

5 Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya *mismatch* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Peningkatan akses pendidikan di semua jenjang melalui bantuan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin
- Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan
- Penguatan pendidikan vokasi berbasis potensi lokal dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)
- Peningkatan kapasitas tenaga pendidik serta sarana dan prasarana pendidikan vokasi
- Penyiapan kapasitas SDM untuk menghadapi dunia modern dan *artificial intelligence* (AI)

6 Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta *scarring effect* akibat pandemi Covid-19

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Optimalisasi tata kelola kelembagaan dalam manajemen data kemiskinan terpadu
- Konvergensi program pemerintah melalui integrasi data dan perencanaan partisipatif lintas sektor
- Sinkronisasi penetapan sasaran program bantuan sosial
- Pemerataan kapasitas, kualitas, dan kuantitas pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan perlindungan sosial adaptif dan inklusif di kantong kemiskinan berdasarkan *spatial based policy*

Rekomendasi
Intervensi K/L untuk Wilayah Jawa

Mendukung Sasaran:

- Pertumbuhan Ekonomi
- Penurunan Kemiskinan
- Peningkatan Kualitas SDM

Kementerian PU	• Pembangunan embung di daerah rawan kekeringan • Pembangunan infrastruktur konektivitas lintas wilayah • Pembangunan bendungan untuk air baku industri
Kemenperin	• Hilirisasi produk turunan industri
Kemenperin, Kemendik dasmen	• Pembangunan Politeknik di sekitar Kawasan Industri (KI)
Kemenperin, Kementan, BRIN	• Penguatan *Research and Development* di sektor pertanian dan industri
Kementan	• Percepatan intensifikasi pertanian melalui inovasi teknologi pertanian
Kementerian Komdigi	• Pengembangan jaringan *fixed broadband and mobile broadband*
Kemenekraf	• Penguatan ekonomi kreatif melalui inkubasi bisnis dan jejaring kemitraan
Kemkum, POLRI, Pol-PP	• Peningkatan ketenteraman, keamanan, dan ketertiban umum

Bappenas, BPS, Kemensos, Kemenko Ekon	• Keterpaduan data kemiskinan (Regsosek, DTKS, P3KE)
Kemensos	• Pemberian BLT dan subsidi yang tepat sasaran
KemenPU, KemenPKP	• Pembangunan SPAM Regional • Penyediaan rumah layak huni tanpa stimulan
Kementerian ESDM, PLN	• Sambungan listrik RT miskin beserta subsidi listrik
Kemenkop, KemenUMKM	• Pemberdayaan ekonomi masyarakat ultramikro
Kemnaker	• Jaminan sosial ketenagakerjaan untuk tenaga kerja informal
Kemendes PDT	• Pemberdayaan BUMDes

Kemendik Dasmen, Kemendik tisaintek, Kemenag	• Pemerataan fasilitas pendidikan di wilayah *blankspot* • Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis TIK • Bantuan pendidikan tinggi gratis di universitas negeri • Pelatihan dan penambahan jumlah tenaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas SDM pendidikan
Kementerian Kesehatan	• Pelatihan dan penambahan jumlah tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas SDM kesehatan • Pemerataan fasilitas kesehatan puskesmas pembantu di wilayah *blankspot* • Pembangunan rumah sakit kesehatan di wilayah afirmasi

Isu Strategis dan Rekomendasi Arah Kebijakan Kewilayahan
Wilayah Bali – Nusa Tenggara

1 Sektor pariwisata belum inklusif, terintegrasi, dan berkualitas karena belum optimalnya pengembangan konsep *quality tourism* serta masih rendahnya kompetensi SDM pariwisata

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Penguatan Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) eksisting dan Kawasan Pariwisata Rintisan
- Pengembangan kota pariwisata melalui peningkatan sarana prasarana pelayanan dasar perkotaan
- Mengembangkan CBT (*Community Based Tourism*) di wilayah pedesaan melalui desa wisata hijau
- Mengintegrasikan pariwisata di lingkup Bali – Nusa Tenggara
- Membangun inisiasi kerjasama antara institusi bisnis pariwisata dan institusi pendukung lainnya melalui skema model bisnis (*business model*)
- Peningkatan pariwisata budaya lokal dan lingkungan sebagai bagian dari pengembangan pariwisata yang berkelanjutan

2 Belum meratanya akses, kualitas, dan kuantitas pelayanan dasar seperti fasilitas dan SDM kesehatan serta pendidikan

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi
- Peningkatan pelayanan kesehatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif melalui penguatan posyandu dan fasilitas kesehatan yang berkelanjutan dan terstandardisasi
- Meningkatkan kualitas data sasaran *by name by address*
- Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)
- Perkuatan pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dan pendidikan

3 Kualitas dan daya saing SDM masih rendah

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Mendorong keterampilan SDM melalui pengembangan program pelatihan bergerak (*mobile training unit*) bagi bidang keahlian kerajinan, pertanian, dan pengolahan yang masif sampai tingkat desa
- Peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan inovasi

4 Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja akibat rendahnya *link and match* dengan lapangan kerja

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Mengembangkan pendidikan non-formal dan vokasi sebagai langkah penciptaan SDM yang kompeten dan berdaya saing
- Perluasan kesempatan kerja berbasis komoditas unggulan daerah
- Peningkatan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri

5 Rendahnya diversifikasi ekonomi dan belum optimalnya pengembangan sektor unggulan dan potensi daerah beserta hilirisasinya

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Penyiapan pengembangan ekosistem sentra berbasis komoditas unggulan
- Penguatan pangan lokal dan KSPP/*Food Estate*
- Meningkatkan diversifikasi ekonomi dan keterkaitan antar sektor perekonomian (*backward and forward linkage)*
- Mendorong hilirisasi/industrialisasi produk agromaritim untuk meningkatkan nilai tambah dengan pendekatan ekonomi biru, hijau, dan sirkular
- Mengembangkan kerja sama antar daerah melalui spesialisasi sektor dengan keunggulan komparatif dan kompetitif, serta bersifat inklusif

6 Belum optimalnya infrastruktur dasar, transportasi, dan telekomunikasi dalam mendukung konektivitas antarwilayah dan antarpulau

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Mendorong pengembangan fasilitas interkonektivitas antarwilayah (Jawa Timur-Bali-Nusa Tenggara Barat-Nusa Tenggara Timur-Sulawesi Selatan)
- Mengembangkan bisnis pariwisata dan sektor utama pendukung dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*waste management, energy efficiency, green energy/renewable energy, social & environment protection*)
- Pemenuhan sarana dan prasarana dasar permukiman seperti rumah layak huni, air minum, dan sanitasi aman, serta pengelolaan persampahan

Rekomendasi

Intervensi K/L untuk Wilayah Bali – Nusa Tenggara

Mendukung Sasaran:

- Pertumbuhan Ekonomi
- Penurunan Kemiskinan
- Peningkatan Kualitas SDM

KemenPU, Kemenhub	• Perbaikan aksesibilitas dan konektivitas antarpulau	**Kementerian Perindustrian**	• Pengembangan industri turunan smelter • Peningkatan kapasitas produksi hingga skala ekspor
Kemenhub	• Peningkatan kapasitas pelabuhan dan dermaga • Pengendalian harga pesawat menuju dan di dalam Wilayah Bali-Nusra	**Kementan**	• Pembangunan *ranch* peternakan • Pembangunan industri pakan ternak (bahan baku jagung dan sorgum) • Pengendalian harga pupuk
Kemenperin, Kemen KKP	• Pengembangan kawasan segitiga Sape – Labuan Bajo – Sumba untuk kawasan pariwisata dan peternakan • Pembangunan industri produksi rumput laut dan pengolahan ikan	**KemenLH**	• Pengolahan sampah menjadi energi untuk penguatan ekonomi sirkular
Bappenas, BPS, Kemensos, Kemenko Ekon	• Keterpaduan data kemiskinan (Regsosek, DTKS, P3KE)	**KemenPU, KemenPKP**	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar • Pembangunan dan pemerataan infrastruktur sumber daya air
Kementerian Sosial	• Pemberian BLT dan subsidi yang tepat • Penguatan TNP2K • Program bantuan & pendampingan sosial • Program perlindungan dan jaminan sosial	**Kemenkes, BKKBN**	• Pemberian makanan bergizi untuk mencegah *stunting* dan menekan beban pengeluaran keluarga miskin
Kementerian Kesehatan	• Peningkatan standar fasilitas umum kesehatan • Eliminasi penyakit malaria, penyakit terlupakan, dan lainnya • Peningkatan kapasitas, kuantitas, dan kualitas tenaga kesehatan	**Kemendik Dasmen, Kemenag**	• Pengoptimalan sinergitas program pendidikan antar kewenangan • Peningkatan kapasitas, kuantitas, dan kualitas tenaga pendidik • Pemerataan akses fasilitas pendidikan • Keterpaduan data pendidikan

Isu Strategis dan Rekomendasi Arah Kebijakan Kewilayahan

Wilayah Kalimantan

1 Masih terbatasnya kapasitas, kuantitas, dan kualitas konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar

Rekomendasi Arah Kebijakan:

- Pembangunan konektivitas dengan mengintegrasikan antarmoda antara IKN dengan provinsi di sekitarnya (laut, darat, udara) agar terhubung jalur logistik antar provinsi dan antarnegara di Pulau Kalimantan
- Percepatan penyelesaian revisi rencana tata ruang Pulau Kalimantan (penyesuaian dengan IKN)
- Memprioritaskan penyediaan moda transportasi murah dan massal (kereta api)
- Pemerataan dan peningkatan konektivitas infrastruktur komunikasi dan ketenagalistrikan
- Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi dan infrastruktur dasar (air baku, sanitasi, listrik, SPAM)
- Formulasi regulasi penyediaan infrastruktur menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan Pulau Kalimantan

2 Minimnya hilirisasi industri dan diversifikasi produk turunan

Rekomendasi Arah Kebijakan:

- Mendorong pembangunan dan pengembangan hilirisasi industri antara lain melalui peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan penyediaan air baku
- Peningkatan diversifikasi produk turunan yang berbasis sumber daya alam dan non ekstraktif
- Pembangunan dan pengembangan industri berbasis teknologi tinggi
- Optimalisasi pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif serta kelembagaan ekonomi rakyat (BUMDes, koperasi, dll)
- Pengembangan *blue and green economy*, serta ekonomi sirkular
- Kerjasama regional dan bilateral dalam mendorong hilirisasi industri
- Insentif dan kemudahan investasi di kawasan industri

3 Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM

Rekomendasi Arah Kebijakan:

- Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur terhadap pendidikan dan kesehatan
- Peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan melalui balai pelatihan
- Pemerataan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan
- Pengembangan pola pembelajaran yang adaptif, pendidikan formal dan informal
- Pembukaan sekolah vokasi (menengah, atas, dan akademi) berbasis hilirisasi industri
- Penguatan riset dan inovasi hilirisasi komoditas unggulan spesifik daerah

4 Belum optimalnya pengelolaan terkait kebencanaan

Rekomendasi Arah Kebijakan:

- Pembangunan bangunan penampung air dan kanal untuk dimanfaatkan pada saat kemarau/banjir dengan regulasi terhadap konsesi dalam penyediaan embung
- Peningkatan upaya mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana dan pemenuhan infrastuktur berketahanan bencana
- Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- Penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam (tambang, hutan, kelautan dan perikanan) yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- Pengendalian dan pengamanan lingkungan hidup melalui penurunan laju deforestasi, pemulihan DAS, dan rehabilitasi lahan

5 Belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah

Rekomendasi Arah Kebijakan:

- Peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis digital
- Penataan daerah melalui pemekaran wilayah
- Kajian ulang terkait kewenangan (contoh pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, dll)

6 Masih rentannya ketahanan air, energi, dan pangan

Rekomendasi Arah Kebijakan:

- Mendorong ketersediaan pangan di Pulau Kalimantan..
- Penegakkan regulasi terhadap alih fungsi lahan dan pengamanan LP2B
- Mendorong regenerasi pelaku usaha pertanian (petani, pekebun, peternak, dan nelayan)
- Peningkatan diversifikasi energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih berkelanjutan (PLTA dan PLTN)
- Mendorong pengembangan modernisasi pertanian
- Peningkatan kerja sama antardaerah dalam penyediaan energi - pangan
- Peningkatan kapasitas infrastruktur air baku

7 Degradasi lingkungan

Rekomendasi Arah Kebijakan:

- Mendorong keterlibatan masyarakat dan *stakeholders* secara partisipatif sesuai kearifan lokal dalam mencegah kerusakan lingkungan dan mendapat manfaat dari pengelolaan lingkungan
- Pengkajian kembali regulasi dan kewenangan (pusat dan daerah) dalam perizinan lingkungan, pengendalian, dan evaluasi. Contohnya pengendalian perizinan sesuai daya dukung dan daya tampung
- Peningkatan efektivitas Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA)
- Penguatan terwujudnya *good mining practice* dan tata kelola berkelanjutan
- Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan

8 Belum optimalnya pembangunan daerah perbatasan, pedalaman, dan terluar

Rekomendasi Arah Kebijakan:

- Penguatan peran dan regulasi pengelolaan daerah perbatasan negara
- Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat perbatasan, pedalaman, dan terluar dengan meningkatkan kerja sama antardaerah
- Afirmasi dukungan sumber pembiayaan (DAK, insentif fiskal, dll) dalam pembangunan daerah pedalaman dan terluar
- Percepatan pembangunan kawasan ekonomi di perbatasan negara di Pulau Kalimantan

9 Pemanfaatan peluang Kalimantan sebagai superhub ekonomi Nusantara

Rekomendasi Arah Kebijakan:

- Penguatan kapasitas daerah sebagai mitra IKN di seluruh Wilayah Kalimantan
- Pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi IKN melalui aktivitas maju dan berdaya saing
- Penguatan pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional

Rekomendasi

Intervensi K/L untuk Wilayah Kalimantan

Mendukung Sasaran:

- Pertumbuhan Ekonomi
- Penurunan Kemiskinan
- Peningkatan Kualitas SDM

Pertumbuhan Ekonomi

KemenPU, KemenLH	• Pembangunan jembatan dan konektivitas penghubung antar provinsi • Pembangunan dan peningkatan jalan nasional menuju standar • Penyediaan sarana pengolahan limbah	**Kemenperin, Kemen PU, BKPM**	• Pengembangan kawasan industri dan konektivitas • Pembentukan regulasi percepatan hilirisasi industri
Kemenhub	• Peningkatan konektivitas udara dan laut antarwilayah • Pembangunan jalan kereta api dan tol	**Kemen ESDM**	• Pembangunan EBT PLTA dan PLTN
Bappenas	• Kajian peran dan fungsi provinsi mitra IKN Wilayah Kalimantan dan Sulawesi	**Kemenkeu**	• Dana insentif khusus bagi provinsi mitra IKN untuk percepatan pembangunan
Kemenpar	• Pengembangan destinasi pariwisata prioritas nasional di Pulau Kalimantan	**Kemenkeu, BKPM**	• Pemberian insentif investasi (kemudahan penetapan KI, insentif pajak, dan akses pembiayaan)

Penurunan Kemiskinan

Bappenas, BPS, Kemensos, Kemenko Ekon	• Keterpaduan data kemiskinan (Regsosek, DTKS, P3KE)	**Kemenkop, KemenUMKM**	• Pembiayaan mikro tanpa agunan dan tanpa bunga
Kemenaker	• Peningkatan skala usaha dan kepastian pasar produk olahan bagi masyarakat miskin	**Kemendik dasmen**	• Beasiswa afirmasi untuk peserta didik kurang mampu, miskin, dan korban bencana
KemenPU, Kemenkes Kemendik dasmen	• Percepatan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan terutama di daerah 3T	**KemenPU, KemenLH**	• Pembangunan SPAM Regional • Pemenuhan dan pemerataan infrastruktur layanan dasar bagi masyarakat miskin

Peningkatan Kualitas SDM

Kemenkes	• Pencegahan dan penanganan PTM dan menular • Peningkatan upaya promotif - preventif kesehatan • Optimalisasi pemberian vaksin pada balita • Peningkatan fasilitas kesehatan • Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan	**Kemendik dasmen, Kemenag**	• Pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan (penyediaan asrama untuk daerah 3T), serta pendidikan vokasi • Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik

Isu Strategis dan Rekomendasi Arah Kebijakan Kewilayahan
Wilayah Sulawesi

1 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Hilirisasi industri SDA dan peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan serta peningkatan nilai tambah sektor pariwisata yang berkelanjutan
- Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan dan kompleksitas sektor industri berbasis sumber daya alam sampai dengan produk akhir
- Penguatan jaringan logistik untuk mendukung rantai pasok domestik
- Peningkatan iklim investasi dan akses pelayanan keuangan bagi koperasi, UMKM, dan UMI
- Pengembangan ekonomi sirkular, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- Optimalisasi peran pusat-pusat pertumbuhan
- Pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi

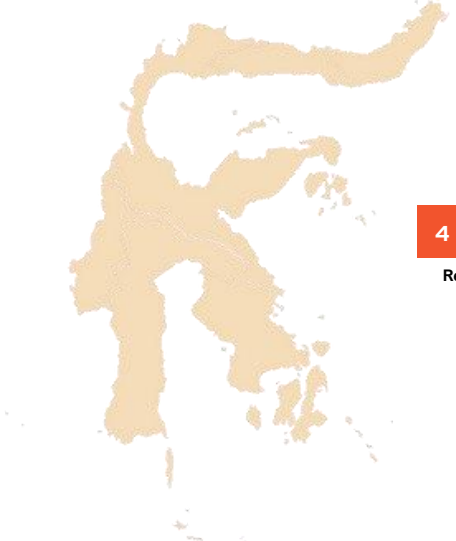

2 Belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja salah satunya karena *mismatch* antara tenaga kerja dan lapangan pekerjaan

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Pembagian tenaga kerja lokal dan tenaga kerja luar daerah
- Peningkatan produktivitas serta *up-skilling* dan *re-skilling* tenaga kerja di industri pengolahan dan pertambangan
- Perlu adanya pendirian lembaga sertifikasi di daerah yang merupakan kewenangan pusat
- Kerjasama dengan perguruan tinggi
- Peningkatan investasi infrastruktur dan digital
- Peningkatan kesempatan kerja
- Peningkatan riset dan inovasi untuk meningkatkan indeks daya saing
- Pemantapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi
- Peningkatan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja

3 Masih rendahnya akses, mutu, serta tenaga bidang pendidikan dan kesehatan

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga medis dan pendidikan terutama di daerah afirmasi dan kepulauan
- Pemerataan kualitas dan kuantitas antar satuan pendidikan dan antardaerah
- Peningkatan kegiatan promotif dan preventif untuk gerakan masyarakat sehat
- Pemberian program beasiswa retrieval
- Penguatan perguruan tinggi lokal

4 Tingginya ketimpangan antar kelompok dan wilayah akibat belum meratanya infrastruktur antardaerah

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan kepulauan
- Pemenuhan sarana dan prasarana dasar permukiman, air minum, sanitasi, dan persampahan
- Pemerataan infrastruktur ketenagalistrikan dan peningkatan pemanfaatan EBT khususnya di wilayah kepulauan
- Pembangunan pusat-pusat ekonomi baru di Kawasan Timur Indonesia
- Pemenuhan akses digital
- Penyediaan jaringan khususnya daerah yang masih dalam titik *blankspot*
- Peningkatan investasi sektor pertanian dan pariwisata yang berkualitas

5 Masih tingginya tingkat kemiskinan

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Pemutakhiran rutin dan pemanfaatan data Regsosek
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat
- Memastikan perlindungan sosial yang berkeadilan
- Pengurangan beban, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan
- Pemberian asuransi pertanian dan BPJS Tenaga Kerja
- Pemberian bantuan untuk petani dalam bentuk pupuk dan benih

6 Potensi bencana alam yang masih tinggi dan ancaman degradasi lingkungan

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Penguatan resiliensi terhadap perubahan iklim
- Penguatan manajemen bencana dengan penguatan teknologi serta pembangunan infrastruktur tanggap bencana dengan memperhatikan kearifan lokal
- Peningkatan kualitas air, udara, serta pengelolaan limbah

7 Tata kelola pemerintah yang berkualitas belum sepenuhnya terwujud

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik
- Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi
- Diversifikasi sumber pendapatan daerah dan belanja daerah dalam mendukung kemandirian fiskal
- Peningkatan kerja sama antardaerah, antar stakeholders, dan pelaku usaha
- Pengawasan proses pengembangan kompetensi ASN
- Pengembangan *smart government*
- Pembangunan dan pengembangan *big data* serta harmonisasi regulasi

8 Rendahnya daya saing sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perikanan, dan pariwisata
- Pengembangan sektor pariwisata sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru
- Pengendalian alih fungsi lahan pertanian
- Pengembangan sektor unggulan
- Pengembangan komoditas unggulan pangan di wilayah daratan, pesisir, dan lautan berbasis klaster keunggulan wilayah
- Regenerasi petani

Rekomendasi

Intervensi K/L untuk Wilayah Sulawesi

Mendukung Sasaran:

- Pertumbuhan Ekonomi
- Penurunan Kemiskinan
- Peningkatan Kualitas SDM

KemenPU	• Pembangunan Jalan Tol Gorontalo-Manado, Jalan Tol Bitung-Gorontalo-Palu-Makassar (mengikuti konsep KAI dari Provinsi Sulawesi Utara ke Sulawesi Selatan) • Pembangunan Jalan Tol dan Pelabuhan Tambu Kasemba • Pembangunan Jalan Buol-Parigi melewati Tambu Kasemba • Pembangunan *bypass* Jalur Palu-Parigi • Peningkatan efisiensi dan efektivitas jalur logistik • Pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi	**Kemenhub**	• Pembangunan sarana dan prasarana transportasi kereta api
		Kementerian Pertanian	• Hilirisasi produk unggulan (pertanian, perkebunan dan perikanan) • Penguatan kelembagaan kelompok petani
		Kemenkop UMKM	• Penguatan akses pasar untuk UMKM di pasar domestik dan global, termasuk pemanfaatan platform digital
Bappenas, BPS, Kemensos, Kemenko Ekon	• Pemutakhiran data regsosek • Penggunaan basis data terpadu untuk penurunan kemiskinan • Pembagian peran antara pusat dan daerah dalam penanganan kemiskinan	**Kemen ESDM**	• Pengembangan jaringan listrik terisolasi (*isolated grid*) kepulauan
		Kementerian Sosial	• Penyaluran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas
KemenPU, KemenPKP	• Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah • Penyediaan rumah bagi masyarakat miskin	**Kemenkop UMKM**	• Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
KemenPU, Kemenkes Kemendik dasmen, Kemenag	• Pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan dan kesehatan • Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan • Penguatan kerjasama antardaerah dan *stakeholders* terkait pengembangan dan peningkatan kualitas SDM pendidikan dan kesehatan	**Kemendik dasmen, Kemendikti saintek**	• Beasiswa pendidikan dasar, menengah dan tinggi bagi keluarga tidak mampu • Pembangunan Asrama Siswa khususnya di daerah kepulauan dan sulit akses
		Kemenkes	• Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Kesehatan) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB)

Isu Strategis dan Rekomendasi Arah Kebijakan Kewilayahan
Wilayah Maluku

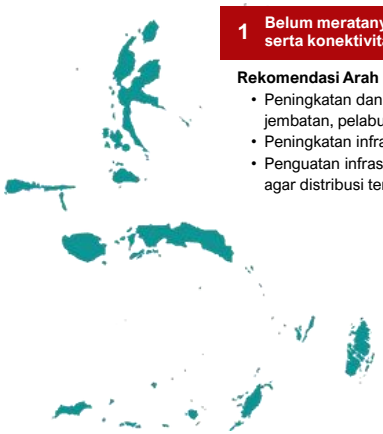

1 Belum meratanya infrastruktur transportasi, telekomunikasi, serta konektivitas dalam dan antarpulau

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Peningkatan dan pembangunan infrastruktur konektivitas (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara)
- Peningkatan infrastruktur telekomuniasi terutama di daerah 3T
- Penguatan infrastruktur transportasi (darat, laut, udara) antarpulau agar distribusi terhadap barang dan jasa dapat lebih baik

2 Masih tingginya kesenjangan antarwilayah

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Percepatan pemenuhan infrastruktur konektivitas yang menjangkau intra dan antarwilayah berbasis gugus pulau
- Percepatan pemenuhan infrastruktur layanan dasar yang menjangkau seluruh wilayah perkotaan dan perdesaan

3 Tingginya angka kemiskinan dan prevalensi *stunting*

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Peningkatan pemenuhan dan perluasan cakupan jaminan kesehatan
- Peningkatan upaya kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif terutama upaya deteksi dini, peningkatan literasi kesehatan, dan peningkatan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat
- Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan
- Pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal
- Pengembangan inovasi kebijakan dan perlindungan sosial terutama untuk kelompok rentan (penyandang disabilitas, pekerja informal, dan lansia)
- Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap kepemilikan dokumen kependudukan
- Peningkatan akses terhadap pekerjaan dan penyediaan infrastruktur dasar
- Pengembangan sistem data terintegrasi yang dapat mencakup semua penduduk melalui *single database* yang mutakhir serta pembaruan terus-menerus melalui sinergitas pihak-pihak terkait
- Optimalisasi data Regsosek
- Peningkatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan UMI

4 Belum meratanya akses, kuantitas, kualitas pendidikan dan layanan kesehatan (tenaga pendidik dan kesehatan, serta sarana dan prasarana)

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (*Mobile Health Service*) dan sistem *telemedicine* berbasis gugus pulau
- Pengadaan sekolah berpola asrama dan penguatan sistem pembelajaran jarak jauh
- Pendidikan berbasis gugus pulau untuk SD, SMP, SMA, dan pendidikan khusus
- Pembangunan fasilitas kesehatan (rumah sakit) di pesisir pantai atau di daerah yang dapat dijangkau oleh mayoritas masyarakat pesisir
- Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik
- Peningkatan proporsi dosen S3 dengan menempatkan prioritas pada PT penyelenggaran prodi STEAM
- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan vokasi berbasis industri, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata (pembangunan pendidikan tinggi vokasi)

5 Risiko bencana yang cukup tinggi, ancaman perubahan iklim, dan kapasitas penanggulangan dan edukasi bencana yang terbatas

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Penguatan mitigasi risiko bencana daerah
- Peningkatan pengawasan dan pengendalian kebijakan tata ruang yang berwawasan lingkungan
- Penguatan strategi khusus adaptasi perubahan iklim diantaranya *sea level rise* di wilayah pesisir dan gelombang laut tinggi melalui penguatan sarpras dan penerapan tata kelola risiko
- Penguatan sistem peringatan dini kebencanaan melalui penerapan secara konsisten kebijakan risiko bencana yang terintegrasi termasuk langkah-langkah konkret untuk mengurangi risiko bencana dan perubahan iklim
- Peningkatan sistem peringatan dini bencana
- Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan bekas tambang

6 Pembangunan ekonomi yang belum inklusif dan berkelanjutan

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Mendorong pembangunan ekosistem sentra berbasis komoditas unggulan seperti perikanan, perkebunan, dan pariwisata
- Percepatan pemanfaatan gas bumi untuk industri di Wilayah Maluku
- Pengembangan produk lokal melalui UMKM dan UMI
- Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru
- Pengembangan Ibukota Sofifi
- Penguatan kawasan industri nikel

7 Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan belum optimal

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Revitalisasi tata kelola pemerintahan dan peningkatan mutu layanan publik
- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mutu layanan publik
- Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan pelaksanaan audit sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk penguatan aspek pemerintahan digital
- Pengawasan proses pengembangan karier promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi
- Penguatan manajemen talenta untuk meningkatkan manajemen ASN dan lembaganya
- Penguatan monitoring program pembangunan melalui manajemen risiko terkait dampaknya kepada masyarakat sebagai *end user*.

8 Kualitas dan daya saing SDM masih terbatas

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (*Mobile Health Service*) dan sistem *telemedicine* berbasis gugus pulau
- Pengadaan sekolah berpola asrama dan penguatan sistem pembelajaran jarak jauh
- Pendidikan berbasis gugus pulau untuk SD, SMP, SMA, dan pendidikan khusus
- Pembangunan fasilitas kesehatan (rumah sakit) di pesisir pantai atau di daerah yang dapat dijangkau oleh mayoritas masyarakat pesisir
- Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik
- Peningkatan proporsi dosen S3 dengan menempatkan prioritas pada PT penyelenggaran prodi STEAM
- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan vokasi berbasis industri, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan dan pariwisata (pembangunan pendidikan tinggi vokasi)

Rekomendasi

Intervensi K/L untuk Wilayah Maluku

Mendukung Sasaran:

- Pertumbuhan Ekonomi
- Penurunan Kemiskinan
- Peningkatan Kualitas SDM

Kementerian Komdigi	• Peningkatan akses komunikasi, teknologi dan informasi di Pulau Taliabu, Kab. Maluku Barat Daya, dan Kab. Maluku Tenggara Barat	**BNPP**	• Pengembangan Kawasan perbatasan negara Kab. Morotai, Kab. Halmahera Timur, Kab. Halmahera Tengah, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Maluku Tenggara Barat, dan Kab. Kepulauan Aru
Kementerian KKP	• Pengembangan sentra industri perikanan komoditas ikan tongkol dan tuna di Kab. Halmahera Selatan	**Kemenkop, KemenUMKM**	• Digitalisasi dan pembangunan ekosistem UMKM pada wilayah *blankspot* • Pemberian permodalan UMKM
Kemen ESDM	• Pengembangan Energi Baru Terbarukan		
Kemenhub	• Pembangunan sarana dan prasarana transportasi		

Kementerian PU	• Pembangunan SPAL-D di Pulau Kei • Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih, Desa Tumbur, Kab. Kepulauan Tanimbar dan Desa Wahayum, Kab. Kep. Aru • Pembangunan SPAM Desa Marlasi, Kep. Aru; Desa Waimulang, Kab. Buru; Desa Nambrole, Kab. Buru Selatan; Desa Wear Baruluk, Kab. Maluku Tenggara; Desa Wear Efu, Kab. Maluku Tenggara; Kec. Sir Sir dan Kec. Aru Tengah Selatan, Kab. Kep. Aru • Pembangunan rumah layak huni • Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan, Desa Wear Baluruk dan Desa Wear Evu, Kab. Maluku Tenggara	**Bappenas, Kemensos, Kemenko Ekon, BPS**	• Keterpaduan data kemiskinan (Regsosek, DTKS, P3KE)
		Kemenko Perekonomian	• Peningkatan pemanfaatan akses dan edukasi KUR masyarakat miskin
		Kementerian Sosial	• Pembangunan panti rehabilitasi sosial untuk gelandangan dan disabilitas

Kementerian Kesehatan	• Pelayanan kesehatan dan *telemedicine* berbasis gugus pulau • Penanggulangan *stunting* dan PTM (Penyakit Tidak Menular) seperti malaria dan HIV • Penyediaan tenaga kesehatan • Pengembangan sarana dan prasana kesehatan	**Kemendik dasmen, Kemenag**	• Pemenuhan sarana dan prasana pendidikan • Pemerataan akses dan kualitas pendidikan • Pendidikan dan pelatihan vokasi
		Kemenkop, KemenUMKM	• Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

Isu Strategis dan Rekomendasi Arah Kebijakan Kewilayahan
Wilayah Papua

1 Masih minimnya ketersediaan sarana prasarana pelayanan dasar di daerah 3T

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Penguatan ketersediaan sarana prasarana pelayanan dasar di daerah 3T
- Percepatan aksesibilitas dan sarana prasarana kewilayahan

2 Terbatasnya ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antardaerah

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Penguatan ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antardaerah

3 Belum optimalnya akses, kualitas, dan tata kelola pendidikan

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Peningkatan akses, kualitas, dan tata kelola pendidikan
- Pemerataan guru dan sarpras pendidikan
- Penguatan sekolah komunitas

4 Tingginya kerawanan pangan

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Penguatan ketahanan pangan berbasis potensi wilayah
- Hilirisasi komoditas unggulan berbasis pertanian dalam arti luas
- Mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam

5 Rendahnya keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dan masyarakat dalam memberikan masukan kebijakan

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Penguatan partisipasi OAP dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan

6 Tingginya kerentanan sosial masyarakat

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Sinkronisasi perencanaan dan pengendalian implementasi perencanaan

7 Masih tingginya angka kemiskinan ekstrem, angka kematian ibu dan bayi, serta prevalensi *stunting*

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Pengentasan kemiskinan ekstrem, prevalensi *stunting,* dan pengangguran terbuka
- Upaya penanganan kemiskinan ekstrem dan *stunting*
- Mendorong Kab/Kota untuk menyusun rencana penanggulangan kemiskinan ekstrem

8 Rendahnya daya saing tenaga kerja dalam perekonomian wilayah

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Rendahnya daya saing tenaga kerja dalam perekonomian wilayah
- Penguatan Pendidikan vokasi dan optimalisasi Balai Pelatihan Kerja di Kab/Kota berbasis potensi lokal
- Penguatan penerapan teknologi dan inovasi dalam berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing daerah

9 Belum optimalnya penanganan terhadap penyelesaian masalah keamanan, ketenteraman dan ketertiban, dan perlindungan

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Optimalisasi penanganan permasalahan keamanan, ketenteraman dan ketertiban, dan perlindungan
- Penguatan kelembagaan adat dan agama
- Penguatan pemenuhan hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat dalam proses pembangunan termasuk pengakuan terhadap budaya dan kearifan lokal

10 Masih rendahnya penguatan nilai tambah dari sektor unggulan perekonomian daerah

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Peningkatan penguatan nilai tambah dari sektor unggulan perekonomian daerah seperti sektor pertanian
- Mendorong pertumbuhan berbasis luas (selain pertambangan dan penggalian)
- Hilirisasi komoditas unggulan berbasis pertanian dalam arti luas
- Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, termasuk UMKM, pertanian, dan pariwisata dengan dukungan akses modal dan pelatihan

11 Belum merata dan memadainya akses dan mutu pelayanan kesehatan

Rekomendasi Arah Kebijakan:
- Pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan
- Pemerataan dokter dan sarpras kesehatan
- Adanya kebijakan jaminan kesehatan dan jangkauan pelayanan kesehatan yang lebih luas

Rekomendasi
Intervensi K/L untuk Wilayah Papua

Mendukung Sasaran:

Pertumbuhan Ekonomi

Kementerian Keuangan	• Pemberian insentif fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah di Pulau Numfoor, Kab Merauke, Kota Jayapura dan Kab. Biak • Evaluasi pelaksanaan pemberian Dana Otonomi Khusus	**Kementerian PU, Kemenhub**	• Pembangunan konektivitas akses laut Distrik Agats, Kabupaten Asmat • Pembangunan jalan dan jembatan dari kampung ke kecamatan
Kementerian Perhubungan	• Pengembangan akses pasar dan subsidi logistik kapal • Peningkatan sarana dan prasana pelabuhan laut Kab. Waropen dan pelabuhan ekspor Kab. Biak • Pembangunan *Coastal Shipping* poros Nabire – Teluk Etna, Kaimana – Kapiraya – Poumako, Mimika – Asmat	**Kementerian Pertanian**	• Pemerataan pembangunan Balai Benih Induk padi wilayah Papua (Kab. Sarmi, Kab. Keerom, dan Kab. Mamberamo) • Pembangunan ekonomi sektor pangan, perikanan, perkebunan, dan peternakan berbasis sumber daya lokal

Penurunan Kemiskinan

Kemendes PDT	• Pembinaan dan pengelolaan Dana Desa melalui Program RESPEK (Rencana Strategis Pembangunan Kampung) kembali melalui mekanisme *block grant*	**Kementerian ESDM**	• Kebijakan penyediaan energi suplai listrik di industri pengolahan (memasukan rencana pembangunan PLTA Wilayah Papua dalam RUEN (Rencana Umum Energi Nasional)

Peningkatan Kualitas SDM

Kemendik fasmen, Kemenag	• Pengembangan pendidikan sekolah berpola asrama di Ibukota Provinsi • Pembangunan sekolah kecil kampung untuk peningkatan partisipasi sekolah	**Kementerian Kesehatan**	• Pembangunan rumah singgah ibu hamil dari kampung di kecamatan
		Kemenkop, KemenUMKM	• Pelatihan peningkatan kapasitas OAP dalam pengembangan ekonomi

6.4 Rekomendasi berdasarkan Provinsi

1. Aceh

Highlight EPD Provinsi Aceh

Capaian Optimal

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Faktor Pendukung:

- Perbaikan kinerja ekspor luar negeri didukung oleh peningkatan produksi dan harga batubara sebagai komoditas ekspor utama Aceh serta diikuti komoditas kopi dan rempah-rempah
- Potensi cadangan SDA migas serta potensi laut dan perikanan yang besar
- Peningkatan Perdagangan Antar Wilayah terutama komoditas kopi dan kelapa sawit
- Dukungan pengembangan infrastruktur strategis sebagai upaya peningkatan daya saing daerah (pengembangan jalan strategis, bendungan, tol, dan irigasi)
- Pelaksanaan PON Aceh & Sumut Tahun 2024

Pertumbuhan PDB Perikanan

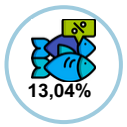

Faktor Pendukung:

- Potensi SDA laut dan perikanan, dimana Aceh memiliki wilayah perairan yang sangat luas dan kaya akan sumber daya alam perikanan, baik di laut lepas maupun di perairan air tawar.
- Peningkatan kuantitas produksi serta kualitas perikanan khususnya hasil laut seperti ikan tuna, udang, dan rumput laut, ke berbagai pasar internasional.

Rasio Gini

Faktor Pendukung:

- Peningkatan pemerataan pendapatan penduduk di Provinsi Aceh, khususnya masyarakat yang berusaha di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan
- Perkembangan positif sektor-sektor ekonomi baru seperti pariwisata, ekonomi kreatif yang turut mendorong perbaikan pendapatan masyarakat.
- Perbaikan dalam akses dan sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi kelompok miskin
- Pembangunan infrastruktur yang lebih merata khususnya di wilayah perdesaan

Rekomendasi

- Penguatan Lembaga Keuangan daerah terutama dari sisi permodalan seperti Koperasi dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta membentuk Badan Jaminan Kredit Daerah dalam rangka penyaluran pembiayaan bagi kelompok dunia usaha dan dunia industri di seluruh Provinsi Aceh. **(Bappeda, DiskopUKM, BPKA, BPD, Kemkeu, OJK, KemenkopUKM, BI)**
- Memperluas kerjasama dan akses pasar dengan negara atau daerah lain dalam rangka meningkatkan pangsa pasar komoditas unggulan daerah seperti pada sektor migas dan perkebunan (kopi dan rempah-rempah) yang difokuskan di Kab. Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tamiang (Migas), Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues (Kopi), Aceh Selatan, Simeulue (rempah-rempah) **(Disperindag, Distan, DisESDM, DPMPTSP, BPMA, KADIN, Kemenkoekon, Kemendag, Kementan, KemenESDM, BPKPM, ASKI, AEKI, Ritel F&B Kopi Nasional, Perusahaan Migas)**
- Mendorong promosi investasi dan pemberian insentif fiskal atau non fiskal khususnya untuk pengembangan atau eksplorasi baru sektor sumber daya mineral (migas dan batubara) terutama untuk perusahaan migas atau pertambagan yang telah menerapkan prinsip ESG di seluruh Provinsi Aceh **(Dinas ESDM, DPMPTSP, BPMA, KADIN, KemenESDM, Kemenkeu, BPKPM, KemenLH, Perusahaan Migas dan Batubara, APMI, Aspermigas, APBI)**
- Pengembangan kapasitas kelompok petani dan nelayan melalui pemberdayaan ekonomi dan pemberian bantuan modal untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan yang difokuskan di Kab. Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Utara, serta Kota Banda Aceh **(Distan, DisKP, Kelompok Petani dan Nelayan, KADIN, Kementan, KemenKP)**
- Mendorong optimalisasi pemanfaatan infrastruktur strategis melalui dukungan daerah seperti prasarana dan regulasi pendukung dalam rangka mengintegrasikan antara infrastruktur nasional dan daerah yang difokuskan di Kab. Aceh Utara, Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Selatan, serta Kota Banda Aceh **(Bappeda, DinasPU, DinasESDM, Dishub, Bappenas, KemenPU, KemenESDM, Kemenhub, Kemenkeu)**
- Mendorong keberlanjutan pemanfaatan fasilitas sarana prasarana olahraga eks-PON melalui pergelaran event lokal dan internasional yang dilaksanakan secara rutin maupun penggunaan secara komersial lainnya yang difokuskan di Kab. Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Kota Banda Aceh dan Sabang **(Dispora, Pemda Kab/Kota)**
- Meningkatkan upaya pengendalian inflasi khususnya terhadap harga-harga kebutuhan pokok (pangan) melalui penguatan ketersediaan pasokan dan perbaikan tata kelola logistik daerah di seluruh Provinsi Aceh **(TPID, Kemendag, Kementan, BPS, BI)**
- Penyediaan pelatihan literasi keuangan yang terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi lokal, seperti koperasi atau UMKM yang difokuskan di Kab. Aceh Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, Pidie, Aceh Selatan, dan Kota Banda Aceh **(DiskopUKM, Disperindag, BPD, BI, OJK)**
- Memfokuskan pembangunan jalan dan jembatan di daerah terpencil yang sulit dijangkau, terutama untuk desa-desa penghasil komoditas unggulan seperti kopi, kelapa sawit, dan hasil laut yang diantaranya dapat melalui pemanfaatan dana Inpres Jalan yang difokuskan di Kab. Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Timur, Simeulue **(Bappeda, DinasPU, Dishub, Bappenas, KemenPU, Kemenhub)**

Highlight EPD Provinsi Aceh

Capaian Optimal

Indeks Pembangunan Manusia

74.7

Faktor Pendukung:

- Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan di Aceh diantaranya adalah pembangunan dan pengembangan RS Regional.
- Peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
- Peningkatan angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
- Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan formal serta perbaikan kondisi perekonomian masyarakat yang mendorong peningkatan akses dan partisipasi terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun

9.89
Tahun

Faktor Pendukung:

- Kondisi dan keberadaan sarana prasarana layanan pendidikan (sekolah) dasar dan menengah eksisting yang sudah cukup memadai
- Dukungan program pembangunan dan peningkatan aksesibilitas fasilitas pendidikan di daerah perdesaan dan daerah terpencil di Aceh
- Dukungan program subsidi pendidikan seperti beasiswa dan bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu.

Harapan Lama Sekolah

14.38
Tahun

Faktor Pendukung:

- Pengembangan dan revitalisasi sarana prasarana layanan pendidikan khususnya bagi pendidikan menengah dan tinggi
- Peningkatan aksesibilitas pendidikan di daerah perdesaan dan daerah terpencil di Aceh
- Dukungan program subsidi pendidikan seperti beasiswa dan bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu.
- Peningkatan kualitas pembelajaran

Rekomendasi

- Mendorong percepatan realisasi pengembangan RS Regional di Provinsi Aceh serta meningkatkan layanan kesehatan di faskes tingkat I di setiap wilayah kabupaten/kota melalui penambahan alat kesehatan, tenaga medis, dan keberadaan dokter spesialis yang difokuskan di Kab. Aceh Selatan, Aceh Tengah, Biereun, Aceh Barat, Langsa **(Bappeda, Dinkes, Pemkab/Kota, Bappenas, Kemenkes)**
- Peningkatan IPM melalui strategi optimalisasi capaian RLS dan HLS di seluruh Provinsi Aceh **(Bappeda, Disdik, Pemkab/Kota, Bappenas, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek)**
- Pengembangan *Community Learning and Development Center* (CLDC) dalam rangka penyediaan layanan pendidikan nonformal, pemeriksaan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam satu lokasi yang dikelola secara terintegrasi di seluruh Provinsi Aceh **(*Multistakeholders*)**
- Mendorong pemerataan jumlah dan kualitas sekolah dan tenaga pendidik khususnya di wilayah perdesaan atau terpencil terutama di Kab. Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Jaya, Bener Meriah, Aceh Singkil, Gayo Lues, Nagan Raya, Simeulue **(Bappeda, Disdik, Pemkab/Kota, Bappenas, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek)**
- Meningkatkan jumlah insentif pendidikan bagi seluruh kelompok masyarakat untuk mengurangi *out of pocket* biaya pendidikan yang tinggi di seluruh Provinsi Aceh **(Bappeda, Disdik, Pemkab/Kota, Bappenas, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek)**
- Menjamin adanya upah layak bagi atau tenaga pendidik khususnya melalui program subsidi upah untuk daerah terpencil serta mendorong rekrutmen guru honorer melalui mekanisme Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) seluruh Provinsi Aceh **(Bappeda, Disdik, Pemkab/Kota, Bappenas, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek)**
- Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana serta daya saing pendidikan tinggi salah satunya melalui penerapan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) dan pengembangan program pendidikan jarak jauh yang difokuskan di Kota Banda Aceh, Kota Lhoksumawe, Kab. Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Simeulue **(Bappeda, Disdik, Pemkab/Kota, Bappenas, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek)**
- Mendorong implementasi program wajib belajar 12 tahun menjadi 13 tahun dalam rangka implementasi Peta Jalan Pendidikan 2025-2045 di seluruh Provinsi Aceh **(Bappeda, Disdik, Pemkab/Kota, Bappenas, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek)**
- Menambah jumlah bantuan beasiswa afirmasi untuk pendidikan tinggi yang difokuskan di daerah afirmasi **(Bappeda, Disdik, Pemkab/kot, Bappenas, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek)**
- Mendorong penerapan pendidikan jarak jauh yang lebih *accesible* dengan memanfaatkan IT melalui dukungan infrastruktur digital yang memadai di seluruh Provinsi Aceh **(Bappeda, Disdik, Diskominfo, Pemkab/kota, Bappenas, Kemendikdasemn, Kemendiktisaintek, Kemenkomdigi)**
- Penguatan lembaga pendidikan Islam melalui modernisasi kurikulum, integrasi pendidikan karakter dan nilai lokal, serta penguatan pendidikan vokasional Islami di seluruh Provinsi Aceh **(Bappeda, Disdik, Pemkab/Kota, Bappenas, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek)**

Highlight EPD Provinsi Aceh

Capaian Optimal

Persentase Kondisi Mantap Jalan

97.84%

Faktor Pendukung:

- Dukungan pengembangan infrastruktur strategis sebagai upaya pengurangan beban jalan eksisting (pengembangan jalan strategis, jembatan, dan jalan tol Trans Sumatra)
- Kualitas teknis infrastruktur jalan eksisting (terutama eks pembangunan jalan saat Rehabilitasi Tsunami Aceh)
- Dukungan pelaksanaan pembangunan jalan melalui Program Inpres Jalan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

78.53

Faktor Pendukung:

- Kegiatan eksplorasi dari ekonomi ekstraktif seperti pertambangan khususnya migas dan batubara yang masih terbatas di Provinsi Aceh
- Relatif masih minimnya kegiatan industrialisasi berat di Provinsi Aceh, sehingga pencemaran lingkungan dari aktivitas industri relatif rendah.
- Penentapan kawasan konservasi diberbagai wilayah di Provinsi Aceh termasuk di wilayah hijau dan perairan.
- Persentase tutupan hutan yang masih tinggi diatas rata-rata nasional, terutama luas hutan lahan mineral dan rawa gambut yang tersebar di bagian barat dan selatan Aceh.

Indeks SPBE

3.62

Faktor Pendukung:

- Peningkatan konektivitas Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD) di seluruh kabupaten/kota, pemanfaatan Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) oleh Dinas Pangan dan Dinas Kesehatan
- Pengembangan *platform* Gampong.id oleh Tim SIAT-Dev Diskominfosandi yang mencakup 4.967 gampong.
- Pelatihan aparatur sipil negara (ASN) dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN dalam mengelola aplikasi dan sistem berbasis SPBE

Rekomendasi

- Mendorong optimalisasi pemanfaatan infrastruktur strategis melalui dukungan daerah seperti prasarana dan regulasi pendukung dalam rangka mengintegrasikan antara infrastruktur nasional dan daerah yang difokuskan di Aceh Utara, Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Selatan, Banda Aceh **(Bappeda, DinasPU, Dishub, Bappenas, KemenPU, Kemenhub)**
- Mendorong percepatan realisasi lanjutan pengembangan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera di wilayah Aceh dalam rangka mengurangi beban jalan eksisting dan peningkatan konektivitas wilayah yang difokuskan di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Kota Lhoksumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang **(Bappeda, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Pemkab/Kota, Bappenas, Kemen PU, Kemenhub, Kemenkeu)**
- Meningkatkan pengawasan dan pemiliharaan terhadap infrastruktur jalan eksisting di antaranya melalui penguatan pengawasan beban kendaraan, rambu lalu lintas, regulasi khusus angkutan barang komoditas besar dan logistik serta preservasi dan peningkatan kapasitas mutu jalan di seluruh Provinsi Aceh **(Bappeda, Dinas PU, Dishub, Pemkab/Kota, Bappenas, Kemen PU, Kemenhub)**
- Memfokuskan pembangunan jalan dan jembatan di daerah terpencil yang sulit dijangkau, terutama untuk desa-desa penghasil komoditas unggulan seperti kopi, kelapa sawit, dan hasil laut yang di antaranya dapat melalui pemanfaatan dana Inpres Jalan yang difokuskan di Kab. Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Timur, Simeulue **(Bappeda, DinasPU, Dinhub, Bappenas, KemenPU, Kemenhub)**
- Pemberian insentif fiskal dan non fiskal khususnya untuk pelaku usaha terutama untuk perusahaan migas atau pertambagan dan industri pengolahan yang telah menerapkan prinsip ESG di seluruh Provinsi Aceh **(Dinas LH, DinasESDM, Disperindag, DPMPTSP, BPMA, KADIN, KemenLH, Kemen ESDM, Kemenkeu, BPKPM, Perusahaan Migas dan Batubara, Asosiasi Usaha)**
- Mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dalam rangka mengurangi eksplorasi dan pemanfaatan pembangkit listrik bertenaga fosil (batubara) di seluruh Provinsi Aceh **(Bappeda, DLH, DinasESDM, Bappenas, KemenLH, KemenESDM, Kemenhut, KemenKP)**
- Penguatan pengawasan terhadap area konservasi hutan dan perairan sebagai upaya perlindungan kawasan terutama TN Gunung Lauser terutama di Kab. Aceh Jaya, Aceh Selatan, dan Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, dan Aceh Barat Daya **(Bappeda, DLH, DinasESDM, Bappenas, Kemen LH, Kemen ESDM, Kemen Kehutanan, KKP)**
- Mendorong pembentukan pemanfaatan sistem pelayanan publik berbasis digital yang efisien melalui peningkatan infrastruktur teknologi informasi di seluruh Kab/Kota di Provinsi Aceh **(Bappeda, Diskominfo, BPS, OPD pengampu data dan pelayanan publik, Kemenkomdigi, BSSN)**
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola SPBE secara kontinu/berkelanjutan di seluruh kab/kota di Provinsi Aceh **(Bappeda, Diskominfo, BPS, OPD pengampu data dan pelayanan publik, Kemenkomdigi, BSSN)**

Highlight EPD Provinsi Aceh

Capaian Kurang Optimal

Tingkat Kemiskinan

14.23%

Faktor Penghambat:

- Tingkat kemiskinan yang masih tinggi akibat dampak dari konflik keamanan masa lalu dan bencana alam gempa bumi dan tsunami Aceh tahun 2004
- Ketergantungan pendapatan masyarakat pada sektor pertanian yang relatif masih tradisional yang cukup tinggi, dimana karakteristik sektor memiliki produktivitas relatif rendah & musiman
- Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perkebunan yang belum optimal serta tingkat kepemilikan luas lahan pertanian rakyat yang minim
- Penurunan produksi padi yang terefleksi dari penurunan luas panen padi akibat alih fungsi lahan dan perubahan iklim yang menyebabkan adanya gagal panen

Tingkat Pengangguran Terbuka

5.75%

Faktor Penghambat:

- Minimnya jumlah investasi di sektor-sektor dengan nilai tambah besar (industri manufaktur/jasa) yang dicerminkan juga oleh kurang optimalnya serapan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru di Kawasan Strategis (KEK dan KI) maupun di luar kawasan
- *Link and match* antara lulusan SMK dengan dunia usaha dan dunia industri yang rendah
- Kualitas SDM yang belum merata antar kabupaten/kota

Rekomendasi

- Menjaga kondusivitas dan kestabilan keamanan serta ketertiban wilayah melalui penguatan kolaborasi dan sinergitas pembangunan dengan seluruh unsur Forkompida, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya di seluruh Provinsi Aceh **(Forkopimda, Tokoh Masyarakat, Bappeda, POLRI)**
- Mendorong kebijakan intensifikasi lahan pertanian melalui sistem pertanian terpadu, penyediaan bibit dan pupuk berkualitas, serta pembentukan *cooperative farming* dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian khususnya untuk tanaman pangan maupun non pangan (perkebunan) yang difokuskan di Kab. Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Aceh Timur, Bireuen, Nagan Raya, Simeulue **(Distan, Kementan)**
- Meningkatkan kapasitas kelompok petani dan nelayan melalui pemberdayaan ekonomi dan bantuan modal terutama di Kab. Aceh Utara, Bireuen, dan Aceh Timur yang daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, serta populasi petani dan nelayan besar **(Distan, Dinas Perikanan, Dinsperindag, DiskopUKM, Kementan, KemenKP, Kemendag, Kemenkop, KemenUKM)**
- Menambah pemberian insentif terhadap program Asuransi Pertanian untuk memperluas cakupan kepesertaan dalam rangka mengurangi risiko gagal panen akibat perubahan cuaca yang tidak menentu khususnya di daerah lumbung pangan dan perkebunan kopi dan kelapa sawit terutama di Kab.Aceh Utara dan Bireuen, Gayo Lues dan Aceh Tengah, Aceh Barat **(Distan, Kementan, PT Jasindo)**
- Mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dengan DUDI untuk pemberdayaan IMK dan kelompok UKM dalam rangka peningkatan kualitas produk dan kapasitas produksi dengan tujuan menjadi bagian dalam rantai pasok industri besar ke depan yang difokuskan di Kab. Aceh Besar dan Kota Banda Aceh (Ekraf), Bireuen dan Aceh Utara (pangan/agroindustri), Aceh Barat dan Nagan Raya (CPO), Gayo Lues dan Aceh Tengah (komoditas kopi) **(Distan, Disperindag, DiskopUKM, Disnaker, Kementan, Kemenperin, Kemendag, Kemenkop, KemenUKM, Kemenaker)**
- Mendukung percepatan pengembangan daya saing Kawasan Strategis (KI/KEK/Kawasan Pariwisata Daerah) melalui pembangunan sarana prasarana pendukung kawasan dan pemberian insentif fiskal dan non fiskal terhadap investor, serta meningkatkan promosi investasi DN & LN yang difokuskan di Kawasan Industri Aceh Lhokseumawe (KIA), KEK Arun Lhokseumawe, Kawasan Wisata Sabang dan Banda Aceh, Aceh Tengah dan Gayo Lues (ekowisata dan kopi), Nagan Raya dan Aceh Barat (kelapa sawit dan EBT) **(Bappeda, Disperindag, Disparbud, Dinas Pertanian, DPMPTSP, Pemkab/Kota Bappenas, Kemenkoekon, Dewan KEK, Kemenpar, Kemenperin, BKPM)**
- Memperluas kemitraan institusi pendidikan dengan DUDI khususnya dengan perusahaan besar di sektor strategis seperti migas dan perkebunan melalui pendanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka meningkatkan fasilitasi Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) kewirausahaan dan pekerja mandiri khususnya bagi lulusan SMA/SMK yang difokuskan di Kab. Aceh Utara dan Lhokseumawe (PT Perta Arun Gas), Nagan Raya dan Aceh Barat (CPO), Banda Aceh dan Sabang (ekraf) **(Bappeda, Disperindag, Disparbud, Dinas Pertanian, DPMPTSP, Disnaker | Bappenas, , Kemenpar, Kemenperin, Kemenaker)**
- Peningkatan kualitas SDM melalui strategi optimalisasi capaian IPM di seluruh Provinsi Aceh **(Dinas Pendidikan, Pemkab/kota, Bappenas, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek)**

Highlight EPD Provinsi Aceh

Capaian Kurang Optimal

Kontribusi PDB Industri Pengolahan

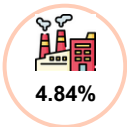

4.84%

Faktor Penghambat:

- Minimnya jumlah investasi di sektor nilai tambah (industri manufaktur) yang dicerminkan oleh kurang optimalnya serapan investasi di Kawasan Strategis (KEK dan KI)
- Belum optimalnya penyaluran pembiayaan dari Lembaga Keuangan terutama perbankan bagi pelaku industri khususnya kelompok IMK
- Masih minimnya jumlah pendirian industri lokal baru

PDRB per Kapita

41,42 Juta

Faktor Penghambat:

- Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perkebunan yang belum optimal serta tingkat kepemilikan luas lahan pertanian rakyat yang minim
- Ketergantungan pendapatan masyarakat pada sektor pertanian yang relatif tradisional yang tinggi, dimana karakteristik sektor memiliki produktivitas relatif rendah & musiman
- Terbatasnya perusahaan (sektor jasa) atau industri baru yang berinvestasi dalam mendukung penciptaan lapangan kerja khususnya tenaga kerja formal

Rekomendasi

- Mendukung percepatan pengembangan daya saing Kawasan Strategis (KI/KEK/Kawasan Pariwisata Daerah) melalui pembangunan sarana prasarana pendukung Kawasan dan pemberian insentif fiskal dan non fiskal terhadap investor, serta meningkatkan promosi investasi DN & LN yang difokuskan di Kawasan Industri Aceh Lhokseumawe (KIA), KEK Arun Lhokseumawe, Kawasan Wisata Sabang dan Banda Aceh, Aceh Tengah dan Gayo Lues (ekowisata dan kopi), Nagan Raya dan Aceh Barat (kelapa sawit dan EBT) **(Bappeda, Disperindag, Disparbud, Distan, DPMPTSP, Pemkab/kota, Bappenas, Kemenkoekon, Dewan KEK, Kemenpar, Kemenperin, BKPM)**
- Penguatan Lembaga Keuangan daerah terutama dari sisi permodalan seperti Koperasi dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta membentuk Badan Jaminan Kredit Daerah dalam rangka penyaluran pembiayaan bagi kelompok dunia usaha dan dunia industri di seluruh Provinsi Aceh **(Bappeda, Diskop UKM, Disperindag, BPD, Kemendagri, Kemenperin, Kemendag, Kemenkeu, OJK, Bank Indonesia)**
- Mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan modal atau investasi untuk sektor produtif khususnya terhadap Industri Kecil Menengah (IMK), kelompok petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang dapat memberikan nilai tambah terhadap potensi unggulan prioritas daerah (kab/kota) terutama bagi sektor atau komoditas yang memiliki serapan tenaga kerja besar dengan mempertimbangkan potensi *backward dan forward linkage* yang tinggi, serta memiliki keunggulan komparatif difokuskan di Kab. Aceh Utara, Bireuen, dan Aceh Timur, Sabang, Banda Aceh, dan Aceh Besar, Gayo Lues dan Aceh Tengah **(Distan, Dinas Perikanan, Dinsperindag, Diskop UKM, Kementan, KemenKP, Kemendag, Kemenkop, KemenUKM)**
- Mengembangkan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) berbasis potensi lokal terutama di Kab. Aceh Tengah dan Gayo Lues (kopi), Aceh Besar dan Simeulue (tuna dan lobster), Bener Meriah (kakao, madu), Pidie (rempah-rempah) **(Distan, Dinas Perikanan, Dinsperindag, Diskop UKM, Kementan, KemenKP, Kemendag, Kemenkop, KemenUKM)**
- Mendorong kebijakan intensifikasi lahan pertanian melalui sistem pertanian terpadu, penyediaan bibit dan pupuk berkualitas, serta pembentukan *cooperative farming* dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian khususnya untuk tanaman pangan maupun non pangan (perkebunan) yang difokuskan di Kab. Aceh Utara dan Aceh Timur (tanaman pangan), Bireuen dan Pidie Jaya (hortikultura), Aceh Tengah dan Bener Meriah (kopi), Aceh Selatan dan Subulussalam (kelapa sawit dan kakao) **(Bappeda, Distan, Dinsperindag, DiskopUKM, Bappenas, Kementan, Kemendag, Kemenkop, KemenUKM)**
- Mendorong promosi investasi dan pemberian insentif fiskal atau non fiskal untuk pelaku usaha yang mendirikan industri baru di wilayah dengan potensi bahan baku tinggi yang difokuskan di Kab. Aceh Barat (hilirisasi kelapa sawit), Gayo Lues (hiliriasi kopi), Pidie dan Bireuen (hortikultura) **(Bappeda, Distan, Dinsperindag, DiskopUKM, DPMPTSP, Pemkab/kota, Bappenas, Kementan, Kemendag, Kemenkop, KemenUKM, BKPM)**

Highlight EPD Provinsi Aceh

Capaian Kurang Optimal	Faktor Penghambat:	Rekomendasi
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 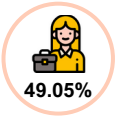 **49.05%**	• Masih adanya norma-norma sosial yang membatasi perempuan dalam kegiatan ekonomi	Mendorong adanya pendidikan moderasi agama yang lebih inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat khususnya bagi kelompok perempuan yang difokuskan di Kab. Aceh Barat, Pidie, Bireuen, Kota Banda Aceh **(Dinas PPPA, Dinasdik, KemenPPPA, Kemendikdasmen, Kemenag)**
	• Tingkat pendidikan kelompok perempuan yang masih terbatas dan belum merata	Menyediakan beasiswa penuh bagi perempuan dari keluarga miskin, terutama di tingkat SMA/SMK dan pendidikan tinggi, dengan fokus pada keahlian kerja seperti teknologi, pertanian, atau perikanan yang difokuskan di Kab. Aceh Utara, Bener Meriah, Simeulue, Aceh Selatan **(Dinas PPPA, Dinasdik, KemenPPPA, Kemendikdasmen, Kemenag)**
	• Tingkat kesehjateraan (kondisi finansial) keluarga yang masih terbatas	Menyediakan kredit mikro tanpa agunan dengan bunga rendah melalui kerja sama dengan Bank Aceh atau lembaga keuangan daerah untuk kelompok perempuan yang memulai usaha mikro seperti kuliner, kerajinan, atau perdagangan terutama di Kab. Aceh Utara, Pidie, Bireuen, Aceh Barat, Kota Banda Aceh **(Dinas PPPA, Dinasdik, KemenPPPA, Kemendikdasmen, Kemenag)**
Prevalensi *Stunting* 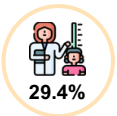 **29.4%**	• Masih rendahnya tingkat kunjungan bagi ibu hamil ke faskes (Puskesmas dan RS) serta Posyandu	Mendorong inisiasi program layanan intervensi *stunting* (layanan kesehatan dan pemberian bantuan pangan bergizi) melalui mekanisme jemput bola bagi ibu hamil dan ibu pasca melahirkan yang difokuskan di Kab. Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Timur, Pidie Jaya **(Bappeda, Dinkes, Dinsos, Distan, Dishanpang, DinasPPPA, Kemenkes, Kemensos, Kemenkopangan, KemenPPPA)**
	• Angka kelahiran yang tinggi (jarak waktu antar kelahiran yang tidak lama) bagi seorang ibu	Memperkuat kolabroasi dan pengawasan antara tenaga kesehatan dengan kelompok dasawisma dan PKK dalam sosialisasi terkait edukasi Keluarga Berencana, pra kehamilan, kehamilan, dan pasca kehamilan terutama di Kab. Aceh Tengah, Bireuen, Aceh Barat, Banda Aceh **(Bappeda, Dinkes, Dinsos, DinasPPPA, Kemenkes, Kemensos, KemenPPPA, BKKBN)**
	• Tingkat pendidikan kelompok perempuan khususnya bagi calon ibu yang masih terbatas dan belum merata	
	• Kekurangan gizi akibat rendahnya akses pangan bergizi	Pengembangan Program Ketahanan Pangan Lokal melalui penanaman pangan bergizi tinggi berbasis komunitas dan desa serta pengembangan akses air bersih dan sanitasi yang dapat difokuskan di Kab. Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, Aceh Barat, Aceh Tengah, Gayo Lues, Pidie, Aceh Barat Daya, Simeulue **(Bappeda, Dinkes, Dinsos, Distan, Dishanpang, DinasPU, Kemenkes, Kemensos, KemenPU, KemenPKP, Kementan, Badan Gizi Nasional)**
	• Akses air bersih dan sanitasi layak yang masih terbatas	
	• Integrasi program penanganan *stunting* yang kurang optimal	Mendorong penguatan kolaborasi dan pembagian peran multisektor dalam integrasi program penurunan *stunting* multisektor yang dikoordinir langsung oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan integrasi program penurunan *stunting* di seluruh Provinsi Aceh **(Bappeda, Dinkes, Dinsos, Distan, Dishanpang, DinasPU, Kemenkes, Kemensos, KemenPU, KemenPKP, Kementan, Badan Gizi Nasional)**
Indeks Risiko Bencana (IRBI) **146.9**	• Tingkat risiko bencana alam yang tinggi seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor yang tersebar terutama di wilayah-wilayah pesisir barat	Mendorong pengembangan ketahanan wilayah pesisir Aceh terhadap ancaman bencana alam, seperti tsunami, abrasi, kenaikan permukaan air laut, dan badai tropis, melalui pembangunan infrastruktur kebencanaan yang berkelanjutan dan berbasis risiko, diantaranya melalui pengembangan konservasi bakau, pembangunan pemecah ombak/tanggul laut, peningkatan sistem peringatan dini bencana, shelter perlindungan, serta penguatan struktur bangunan fasilitas publik terutama di Kota Sabang, Banda Aceh, Aceh Jaya, Simeulue, dan Aceh Besar **(Bappeda, Dinas PU, BPBD, Bappenas, KemenPU, BNPB)**
	• Keterbatasan infrastruktur dan kapasitas penanggulangan bencana daerah	
	• Perubahan iklim dan alih fungsi lahan berpotensi memperburuk risiko bencana, seperti banjir dan tanah longsor.	

2. Sumatera Utara

Highlight EPD Provinsi Sumatera Utara

Capaian Optimal

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Faktor Pendukung:

- Sumberdaya Alam
  - Sektor Unggulan Perkebunan (Kelapa Sawit dan Karet)
  - Sektor Pertanian (Pangan dan Holtikultura)
  - Sektor Peternakan (Produksi Daging)
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM dan kewirausahaan
- Meningkatnya investasi PMA pada sektor industri kelapa sawit
- Peningkatan ekspor CPO industri pengolahan kelapa sawit

Kontribusi PDB Industri Pengolahan

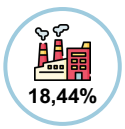

Faktor Pendukung:

- Peningkatan ekspor CPO industri pengolahan kelapa sawit
- Meningkatnya investasi PMA pada sektor industri kelapa sawit

Rekomendasi

- Percepatan intensifikasi sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan melalui peningkatan SDM, inovasi teknologi, peningkatan mutu dan varietas benih, pengendalian penyakit dan hama, penyediaan sarana pascapanen, peningkatan kualitas rumah potong, serta fasilitasi pemasaran dan sertifikasi produk pertanian **(Kementan, Dintan, dan Disbunak)**
- Peningkatan infrastruktur irigasi, air bersih, konektivitas, transportasi, dan pergudangan sebagai upaya optimalisasi sektor unggulan dan potensi daerah **(KemenPU, Kemenhub, dan Dintan)**
- Peningkatan sektor pariwisata melalui *community based tourism,* diversifikasi atraksi wisata, standarisasi destinasi, peningkatan infrastruktur transportasi dan akomodasi, peningkatan SDM pelaku wisata, serta promosi wisata melalui media digital **(BPODT, Disbudparekraf, Dinas PUPR)**
- Mendorong perluasan akses keuangan dan permodalan serta pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah **(Disbudparekraf, DPMPTSP, serta Lembaga Keuangan: Bank Daerah dan BUMN)**
- Mendorong percepatan kinerja Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), *Food Estate,* dan KSPN Danau Toba melalui:
  1. Peningkatan infrastruktur penunjang, seperti konektivitas, pergudangan dan transportasi
  2. Peningkatan kapasitas SDM melalui BLK dan peningkatan mutu vokasi
  3. Peningkatan daya saing kawasan melalui peningkatan manajemen kawasan, konsentrasi pengembangan komoditas, dan diverisifikasi produk

  (Kemenkoekon, Kemenaker, dan BPODT)
- Peningkatan diversifikasi produk turunan kelapa sawit yang bernilai tambah tinggi, seperti bahan pangan (*shortening* atau mentega putih), produk non-pangan (sabun, kosmetik, dan bahan baku *bio-lubricant*), dan bahan baku industri farmasi atau kimia **(Kementan, Dintan, dan DPPESDM)**
- Memperkuat dan meningkatkan iklim investasi melalui kemudahan perizinan, reformasi birokrasi, pemberian kepastian hukum, dan stabilitas kebijakan **(BKPM dan DPMPTSP)**

Highlight EPD Provinsi Sumatera Utara

Capaian Optimal

Indeks Pembangunan Manusia

75,76

Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun: 10,07 tahun

Faktor Pendukung:

- Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar (akses air bersih dan sanitasi) untuk masyarakat
- Peningkatan pendapatan masyakat
  - Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM dan kewirausahaan
  - Kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Bantuan sosial bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan dan kesehatan
- Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi perempuan

Rasio Gini

0,297

Faktor Pendukung:

- Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar (akses air bersih dan sanitasi) untuk masyarakat
- Peningkatan pendapatan masyarakat
  - Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM dan kewirausahaan
  - Kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Bantuan sosial bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan dan kesehatan

Indeks Ketimpangan Gender

0,442

Faktor Pendukung:

- Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi perempuan
- Peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja melalui Program Kelapa Muda (Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya)

Rekomendasi

Mendorong pemerataan infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, listrik, telekomunikasi, dan infrastruktur konektivitas):
1. Skema kerja sama dengan *non state actor*
2. Bantuan sambungan listrik, air bersih, dan sanitasi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Daerah 3T

(KemendesPDT, KemenPU, dan PLN)

Mendorong perluasan akses keuangan dan permodalan serta pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah **(Disbudparekraf, DPMPTSP, serta Lembaga Keuangan: Bank Daerah dan BUMN)**

Mendorong pemberian upah oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan UMP melalui kepastian hukum, kebijakan zonasi UMP, pemberian insentif bagi pelaku usaha, penerapan UMP secara bertahap, dan fokus pada sektor-sektor prioritas **(Kemenaker, Disnaker, dan Pelaku Usaha)**

Peningkatan akses masyarakat ke layanan pendidikan melalui:
1. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan distribusi infrastruktur serta SDM
2. Bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa prestasi, kurang mampu, dan afirmasi untuk Daerah 3T

(Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan Disdik)

Peningkatan akses kesehatan melalui:
1. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan distribusi infrastruktur dan SDM
2. Bantuan jaminan sosial bagi masyrakat berpenghasilan rendah (MBR

(Kemenkes, Kemensos, dan Dinkes, Dinsos)

Memperkuat Program Kelapa Muda (Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya) melalui pendampingan dan peningkatan kapasitas. **(Dinas P3AP2KB)**

Highlight EPD Provinsi Sumatera Utara

Capaian Kurang Optimal

Tingkat Pengangguran Terbuka

Faktor Penghambat:

- Kualitas pendidikan vokasi dan pelatihan belum memadai
  - *Mismatch* kurikulum dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)
  - Belum meratanya layanan pendidikan (sarana dan prasarana, SDM, dan biaya), khususnya di daerah terpencil (Kepulauan Nias)
- Masyarakat miskin terutama daerah pedesaan memiliki akses terbatas terhadap permodalan dan kredit
- Ketergantungan pada sektor informal
  - Keterbatasan lapangan pekerjaan
  - Kualitas tenaga kerja belum memadai

Tingkat Kemiskinan

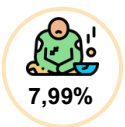

Faktor Penghambat:

- Ketergantungan pada sektor informal
  - Keterbatasan lapangan pekerjaan
  - Kualitas tenaga kerja belum memadai
- Belum meratanya layanan pendidikan dan kesehatan (sarana-prasarana, SDM, dan biaya), khususnya di daerah terpencil (Kepulauan Nias)
- Pemberian bantuan sosial belum optimal
  - Belum terpadunya data kemiskinan (Regsosek - DTKS - P3KE) sehingga bansos belum tepat sasaran
  - Bantuan sosial bersifat konsumtif

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

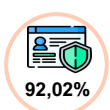

Faktor Penghambat:

- Ketergantungan pada sektor informal
  - Keterbatasan lapangan pekerjaan
  - Kualitas tenaga kerja belum memadai
- Belum optimalnya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Rekomendasi

- Pengembangan kurikulum vokasi dan pelatihan berbasis kompetensi dilengkapi dengan integrasi penggunaan teknologi dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) **(Kemendiktisaintek, Kemenaker, dan Disnaker)**
- Mendorong terjalinnya kemitraan antara lembaga pendidikan, pelatihan, dan DUDI melalui program magang, sertifikasi peserta didik, *train of trainers*, dan program penempatan tenaga kerja yang terintegrasi dengan kebutuhan industri **(Kemendiktisaintek, Kemenaker, dan Disnaker)**
- Pemerataan akses (sarana dan prasarana, serta biaya) dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, terutama di Daerah 3T (Kepulauan Nias) **(Kemenkes, Kemensos, dan Disdik)**
- Pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan, khususnya di Daerah 3T melalui pemberian insentif khusus dan afirmasi pendidikan bagi masyarakat lokal hingga jenjang pendidikan tinggi **(Kemendikdasmen, Kemenkes, dan Pemerintah Daerah)**
- Percepatan implementasi intervensi *central mapper* dan pemanfaatan data kemiskinan Regsosek sebagai upaya penurunan kemiskinan **(Bappenas, Kemensos, dan Dinsos)**
- Diversifikasi bantuan sosial yang tidak bersifat konsumtif seperti, program bantuan modal usaha, pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, bantuan pendidikan dan kesehatan, serta akses keungan mikro melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) **(Kemensos, Disnaker, dan Dinsos)**
- Meningkatkan kinerja program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan melalui perluasan cakupan peserta, pengembangan skema jaminan yang adaptif, pemberian insentif bagi perusahaan, dan penyederhanaan layanan **(Kemenaker, BPJS, dan Disnaker)**

Highlight EPD Provinsi Sumatera Utara

Capaian Kurang Optimal

Crime Rate

Faktor Penghambat:

- Tingginya angka pencurian, penggelapan, penipuan, dan penganiayaan
- Daerah dengan jumlah penyalahgunaan obatan terlarang tertinggi di Indonesia
  - Rute perdagangan ilegal (Selat Malaka)
  - Wilayah yang dekat dengan negara lain sehingga sering menjadi pintu masuk narkoba
- Permasalahan ekonomi
  - Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang cukup tinggi

Indeks Pembangunan Kebudayaan

Faktor Penghambat:

- Minimnya pengembangan sektor ekonomi berbasis budaya
- Keterlibatan masyarakat dalam ekspresi budaya, seperti kegiatan ekonomi budaya, penyelenggaraan upacara adat, dan keterlibatan dalam organisasi budaya

Rekomendasi

Penguatan dan peningkatan keamanan melalui:
1. Kerja sama antar pihak keamanan dalam upaya meningkatkan kemanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat
2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum di jalur masuk Sumatera Utara (pelabuhuan, bandara, wilayah perbatasan, dan jalur ilegal)

(KemenkoH2IP, POLRI, dan Satpol PP)

Peningkatan dan optimalisasi tindakan preventif penyalahgunaan narkoba melalui Program Kampung Bersinar (Bersih Narkoba) dan sosialisasi di semua jenjang pendidikan, pusat-pusat pelayanan umum, dan ruang publik **(BNNP, Disdik, dan Dinas Kesehatan)**

Akselerasi layanan rehabilitasi melalui peluasan akses layanan dan program pemulihan berbasis komunitas **(BNN dan BNNP)**

Percepatan implementasi intervensi *central mapper* dan pemanfaatan data kemiskinan Regsosek sebagai upaya penurunan kemiskinan **(Bappenas, Kemensos, dan Dinsos)**

Diversifikasi bantuan sosial yang tidak bersifat konsumtif seperti, program bantuan modal usaha, pelaltihan dan sertifikasi kerja, bantuan pendidikan dan kesehatan, serta akses keungan mikro melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). **(Kemensos, Kemenaker, dan Lembaga Keuangan: Bank Daerah dan BUMN)**

Peningkatan sektor pariwisata melalui penyediaan paket wisata yang lebih beragam, pengadaan *event* budaya, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana-prasarana penunjang pariwisata, dan promosi melalui media digital. **(Kemenpar, BPODT, Disparbudparekraf)**

3. Sumatera Barat

Highlight EPD Provinsi Sumatera Barat

Capaian Optimal

Tingkat Kemiskinan

Faktor Pendukung:

- Adanya dukungan program pengentasan kemiskinan ekstrem, salah satunya dengan penyaluran komoditas pangan bagi kelompok masyarakat miskin
- Adanya program pengentasan kemiskinan ekstrem melalui optimalisasi zakat dengan menjalin kerjasama antar dunia industri dengan badan/lembaga zakat
- Adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam komitmen menekan angka kemiskinan esktrem dan peran aktif Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
- Perbaikan kinerja sektor pertanian seiring peningkatan produksi padi dan hortikultura dan pergeseran masa panen sehingga kesejahteraan petani meningkat

Rasio Gini

Faktor Pendukung:

- Adanya program pemberdayaan di berbagai bidang seperti enterpreneur, pertanian, dan pariwisata
- Peningkatan infrastruktur dasar
- Perbaikan kinerja sektor pertanian seiring peningkatan produksi padi dan hortikultura dan pergeseran masa panen sehingga kesejahteraan petani meningkat

Rekomendasi

- Perluasan dan peningkatan kualitas program pengentasan kemiskinan esktrem **(Dinsos)**
- Penggunaan data yang akurat dan terintegasi untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin ekstrem melalui Satu Data Kemiskinan **(Dinsos, Kemensos, Bappenas)**
- Peningkatan kolaborasi antara dunia industri dengan lembaga zakat dengan membentuk kerjasama yang lebih formal untuk mengalokasikan sebagian dana zakat ke program-program kemiskinan **(Dinsos, Baznas)**
- Mengoptimalkan peran TKPK dalam mengkoordinasikan semua program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga non-pemerintah **(Bappeda, LSM, sektor swasta)**
- Penguatan sektor pertanian dan UMKM melalui penyaluran alat mesin pertanian dan peningkatan teknologi pertanian, pembangunan pusat distribusi hasil tani, serta pelatihan dan bantuan pembiayaan mikro bagi UMKM berbasis produk lokal **(Kementan, Kemen UMKM, Distanbunhor, Dinas KUKM)**
- Mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi lokal, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, dengan fokus pada pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Pemerintah daerah dapat memberikan pelatihan keterampilan dan akses ke modal usaha.**(Distanburhor, Dinas KUKM, Dispar)**
- Memperluas dan memperkuat program bantuan sosial (bansos) serta intervensi sosial lainnya yang berfokus pada masyarakat berpendapatan rendah. Program ini dapat berbentuk bantuan langsung tunai, bantuan pangan, atau bantuan untuk pendidikan dan kesehatan **(Dinsos, Disdik, Dinkes, Kemensos)**
- Meningkatkan investasi dalam infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan di daerah tertinggal dan perdesaan. Selain itu, perlu ada upaya untuk memperbaiki akses pendidikan dan pelatihan keterampilan **(DPMPTSP, Dinas SDA, Dinkes, Kemendes PDT)**
- Memperkuat sistem layanan kesehatan di daerah-daerah yang tertinggal dan miskin, termasuk fasilitas kesehatan primer di desa-desa **(Dinkes, Kemenkes, Kemendes PDT)**
- Memperluas akses pendidikan berkualitas di seluruh wilayah, dengan fokus pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang tinggi. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja **(Disdik)**
- Mengembangkan sektor pertanian melalui teknologi tepat guna dan sistem pertanian berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan petani. Program subsidi untuk bibit, pupuk, dan akses pasar bisa diberikan untuk membantu petani lokal **(Distanbunhor, Kementan)**

Highlight EPD Provinsi Sumatera Barat

Capaian Optimal

Indeks Pembangunan Manusia

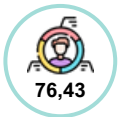

76,43

Faktor Pendukung:

- Perbaikan pada seluruh indikator pendukung terutama pengeluaran riil per kapita masyarakat
- Perbaikan kondisi ekonomi masyarakat
- Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah di berbagai daerah
- Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah akibat dapat ditekannya angka putus sekolah melalui bantuan dari berbagai lembaga

Indeks Inovasi Daerah

71,99

Faktor Pendukung:

- Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan inovasi sejak 2018
- Pengembangan inovasi unggulan
- Inovasi yang ada fokus pada pelayanan publik dan efisiensi

Rekomendasi

Peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dengan memperluas sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti manufaktur, teknologi, dan sektor kreatif serta menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok, termasuk pangan, bahan bakar, dan kebutuhan dasar lainnya **(Disnakertrans, Tim Pengendali Inflasi Daerah)**

Perluasan kualitas dan akses pendidikan terutama di daerah-daerah terpencil **(Disdik, Kemendikdasmen)**

Menyediakan program pendidikan alternatif atau pendidikan kejar paket yang bisa diikuti oleh anak-anak yang telah putus sekolah, dengan sistem pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan, baik untuk mendapatkan sertifikat setara dengan ujian nasional atau memperoleh keterampilan vokasi **(Disdik, Kemendikdasmen)**

Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan **(Disdik, Disnakertrans, Kemendiktisaintek, Kemendikdasmen)**

- Program beasiswa khusus untuk keluarga miskin & di daerah 3T
- Peningkatan kualitas pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal
- Pelatihan keterampilan berbasis permintaan pasar, seperti teknologi digital, untuk generasi muda

Meningkatkan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah **(Bappeda, Seluruh OPD)**

- Pelatihan & Pendampingan: Pelatihan inovasi berbasis teknologi kepada OPD untuk mengembangkan solusi layanan publik.
- Kompetisi Internal: Mendorong setiap OPD menghasilkan minimal satu inovasi per tahun melalui mekanisme penghargaan

Perbaikan Sistem Pelayanan Kesehatan **(Dinkes, Kemenkes)**

- Program layanan kesehatan gratis atau bersubsidi bagi masyarakat miskin.
- Penyediaan layanan kesehatan bergerak di daerah terpencil

Berfokus pada pelayanan publik dan efisiensi **(Bappeda, Seluruh OPD)**

- Digitalisasi Proses Layanan Publik: Mengembangkan aplikasi berbasis web atau mobile untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah.
- Pengelolaan Data Terintegrasi: Menggunakan sistem data terpadu untuk merancang inovasi yang sesuai kebutuhan masyarakat

Highlight EPD Provinsi Sumatera Barat

Capaian Kurang Optimal

Laju Pertumbuhan Ekonomi

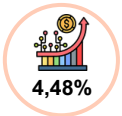

Faktor Penghambat:

- Pertanian sebagai sektor pendukung utama perekonomian dihadapkan pada permasalahan mendasar yaitu keterbatasan lahan dan modal yang dimiliki oleh petani, dan harga jual hasil tani yang cenderung tidak stabil serta sistem pertanian yang masih tradisional
- Masih terbatasnya dukungan infrastruktur menunjang potensi investasi serta masih terdapat regulasi kebijakan di daerah belum sepenuhnya mendukung potensi investasi
- Perlambatan kinerja PTMB ditengah berbagai tantangan global dan domestik
- Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata karena aksesibilitas dan sarana prasarana pendukung yang masih terbatas
- Kinerja ekspor terutama CPO dan karet yang menurun akibat pelemahan permintaan global

Rekomendasi

- Mendorong diversifikasi usaha pertanian dengan mengembangkan komoditas non-pangan (seperti hortikultura, perikanan, atau peternakan) serta produk turunan hasil pertanian, seperti olahan makanan dan produk berbasis pertanian lainnya **(Distanbunhor)**
- Menyediakan skema pembiayaan yang mudah diakses oleh petani, termasuk melalui kredit mikro pertanian dengan bunga rendah, pembiayaan berbasis kelompok tani, serta subsidi untuk pembelian peralatan pertanian modern **(Perbankan, Dinas KUKM)**
- Menggalakkan penggunaan teknologi pertanian yang ramah lingkungan dan efisien, seperti penggunaan mesin pertanian, irigasi tetes, dan aplikasi pertanian berbasis data (*precision farming*) **(Distanbunhor, Kementan)**
- Membangun infrastruktur pasar yang lebih baik, termasuk pasar tani terintegrasi, dan memfasilitasi hubungan langsung antara petani dan konsumen atau industri pengolahan untuk mengurangi perantara. Pemerintah dapat mengembangkan platform digital untuk menghubungkan petani dengan pembeli secara langsung, serta memperbaiki sistem distribusi dan pengolahan pasca-panen **(Kementan, Kemendag, Distanbunhor, Disperindag)**
- Mempercepat dan menyederhanakan prosedur perizinan untuk investasi, dengan menggunakan sistem perizinan elektronik yang terintegrasi dan transparan **(DPMPTSP)**
- Membangun dan memperbaiki infrastruktur transportasi yang menghubungkan daerah tujuan wisata dengan pusat-pusat ekonomi utama, seperti pembangunan dan peningkatan kualitas bandara, pelabuhan, jalan raya, dan jalur kereta api. Selain itu, mempermudah akses transportasi umum dari dan menuju lokasi wisata melalui peningkatan konektivitas antar daerah **(Kemenhub, KemenPU, Dinas Bina Marga, Dishub)**
- Memperbaiki dan mengembangkan fasilitas pendukung pariwisata seperti akomodasi (hotel, *homestay*, dll.), restoran, pusat informasi wisata, toilet umum, serta tempat parkir yang memadai di lokasi-lokasi wisata. Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek kebersihan dan kenyamanan pengunjung **(Kemenpar, Dispar)**
- Mendorong pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi, yaitu menggabungkan berbagai jenis atraksi wisata dalam satu kawasan yang saling mendukung, seperti wisata alam, budaya, dan sejarah. Pemerintah dapat mendorong pengembangan wisata berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat lokal **(Dispar)**
- Meningkatkan pelatihan dan pendidikan untuk tenaga kerja di sektor pariwisata, termasuk pelatihan hospitality, pengelolaan destinasi wisata, pemandu wisata, serta pelatihan bahasa asing untuk melayani wisatawan internasional **(Dispar, Disnakertrans)**
- Mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan memprioritaskan aspek pelestarian lingkungan, penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, serta mendukung komunitas lokal dalam pengelolaan destinasi wisata **(Kemenpar, Dispar)**
- Mendorong industri hilir yang memproses CPO dan karet menjadi produk olahan bernilai tambah lebih tinggi, seperti biodiesel dari CPO dan produk karet olahan seperti ban atau barang-barang konsumen lainnya **(Disperindag, Kemenperin)**
- Menyusun kebijakan untuk mendorong penggunaan CPO dan karet di sektor industri domestik, seperti di sektor energi terbarukan (biodiesel), otomotif (ban), atau bahan baku produk konsumen (kosmetik, makanan, dan obat-obatan) **(Disperindag, Balitbang, Kemenperin)**

Highlight EPD Provinsi Sumatera Barat

Capaian Kurang Optimal

Tingkat Pengangguran Terbuka

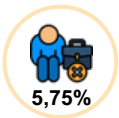

5,75%

Faktor Penghambat:

- Sebagian besar pekerja di Sumatera Barat masih bersifat informal
- Masih terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan tenaga kerja yang ada
- Kualitas tenaga kerja masih rendah dimana penduduk bekerja di Sumbar masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah
- Produktivitas tenaga kerja yang rendah
- Sektor pertanian yang paling banyak menyerap tenaga kerja terutama di perdesaan, sementara angka pengangguran di perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan perdesaan

Rekomendasi

Menyediakan program pelatihan keterampilan bagi pekerja informal untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, yang bisa meningkatkan pendapatan dan daya saing di pasar kerja. Program ini dapat meliputi pelatihan keterampilan teknis, kewirausahaan, serta keahlian *soft skills* **(Disnakertrans)**

Memberikan akses lebih mudah kepada pekerja informal untuk memperoleh modal usaha, baik melalui skema pinjaman mikro, dana hibah, atau melalui kemitraan dengan lembaga keuangan yang dapat menyediakan pinjaman dengan bunga rendah **(Dinas KUKM, Perbankan)**

Melakukan program pemberdayaan sektor informal, termasuk pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan mikro, serta peningkatan kapasitas kerja bagi pekerja di sektor informal, seperti pedagang kecil, petani, atau pekerja rumah tangga **(Dinas KUKM, Disnakertrans, Distanbunhor)**

Mengintegrasikan pelatihan keterampilan vokasi dengan kurikulum pendidikan formal, serta meningkatkan kolaborasi antara sekolah, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk memastikan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja **(Kemendiktisaintek, Disdik, Kemnaker, Disnakertrans)**

Mendorong dan menyediakan fasilitas untuk pelatihan berkelanjutan bagi pekerja yang sudah terlibat dalam pasar kerja. Hal ini bisa dilakukan melalui program pelatihan keterampilan lanjutan (*upskilling*) dan peningkatan keterampilan (*reskilling*) yang didukung oleh pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pelatihan **(Disnakertrans, Kemenaker)**

Mendorong diversifikasi usaha pertanian dengan mengembangkan komoditas non-pangan (seperti hortikultura, perikanan, atau peternakan) serta produk turunan hasil pertanian, seperti olahan makanan dan produk berbasis pertanian lainnya **(Distanbunhor)**

4. Riau

Highlight EPD Provinsi Riau

Capaian Optimal

Tingkat Pengangguran Terbuka

Faktor Pendukung:

- Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis wirausaha dan UMKM
- Meningkatnya Peluang Kerja
  - Pelaksanaan *Job Fair*
  - Peningkatan keahlian melalui Balai Diklat Ketenagakerjaan
  - Padat karya produktif
  - Program pemagangan dalam dan luar negeri
- Pengembangan Kawasan Industri Dumai

Rasio Kewirausahaan Provinsi

Kontribusi PDB Industri Pengolahan

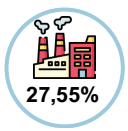

Faktor Pendukung:

- Pengembangan Industri
  - Kawasan Industri Dumai
  - Produksi Tandan Buah segar (TBS) Kelapa Sawit
  - Industri Kertas dan Percetakan
  - Industri Makan dan Minum
- Peningkatan konektivitas antarprovinsi melalui pembangunan Tol Sumatera
- Meningkatnya investasi pada industri pengolahan

Rasio Gini

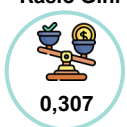

PDRB per Kapita

Faktor Pendukung:

- Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis wirausaha dan UMKM
- Meningkatnya Peluang Kerja
  - Pelaksanaan *Job Fair*
  - Peningkatan keahlian melalui Balai Diklat Ketenagakerjaan
  - Padat karya produktif
  - Program pemagangan dalam dan luar negeri
- Pengembangan industri pengolahan kertas dan percetakan
  - Operasional pabrik kertas kemasan baru (PT. Riau Andalan *Paperboard* Internasional)

Rekomendasi

Mendorong optimalisasi kemandirian ekonomi masyarakat melalui:
1. Peningkatan kualitas SDM melalui penguatan pendidikan formal dan non-formal, seperti pelatihan keterampilan, teknologi, dan edukasi keuangan
2. Kemudahan akses terhadap permodalan
3. Penguatan kelembagaan koperasi dan BUMDes sebagai wadah pemasaran produk UMKM
4. Dukungan kebijakan pemerintah dalam perizinan serta perlindungan UMKM

(Kemenkop, KemenUMKM, dan Disperindagkopukm)

Perluasan jangkauan peluang kerja melalui:
1. Peningkatan pelaksanaan *event job fair* melalui peningkatan skala dan kualitas *job fair* (perluasan jangkauan dan kemitraan, serta adanya segmentasi sektor kerja)
2. Mendorong kemitraan antara lembaga pendidikan dan pelatihan dengan DUDI untuk program magang dan penempatan tenaga kerja

(Disnaker, Disdik, dan Swasta)

Peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui:
1. Pengembangan kurikulum pendidikan vokasi dan lembaga pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
2. Sertifikasi peserta didik dan *train of trainers* sesuai dengan standar industri

(Kemendikdasmen, Kemenaker, dan Swasta)

Perbaikan kondisi dan peningkatan kapasitas jalan kabupaten/kota di dalam Provinsi Riau sebagai prasarana penunjang Tol Sumatera dan meningkatkan aksesibilitas di dalam wilayah Riau **(KemenPU dan Dinas PUPRPKPP)**

Optimalisasi pengembangan industri pengolahan melalui:
1. Kawasan Industri Dumai disertai dengan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang (infrastruktur konektivitas, transportasi, dan utilitas)
2. Penguatan penetapan harga TBS mitra swadaya dan mitra plasma
3. Memperkuat dan meningkatkan iklim investasi melalui kemudahan perizinan, reformasi birokrasi, peningkatan kepastian hukum, dan stabilitas kebijakan.

(Kemenperin, Disperindagkopukm, dan DPMPTSP)

Highlight EPD Provinsi Riau

Capaian Optimal

Indeks Pembangunan Manusia

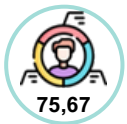

Prevalensi *Stunting*

Angka Keberhasilan Pengobatan TBC

Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun

Faktor Pendukung:

- Peningkatan Pendapatan Masyarakat:
  - Kemandirian ekonomi masyarakat (wirausaha dan UMKM)
  - Meningkatnya peluang kerja (pengembangan industri pengolahan, *job fair,* peningkatan keahlian, padat karya produktif, dan program magang)
- Perbaikan Derajat Kesehatan Masyarakat:
  - Pemenuhan *universal health coverage* (UHC)
  - *Sharing budget* JKN PBI antara Pemprov (55%) dengan Pemkab/Pemkot (45%)
- Peningkatan Pengelolaan Pendidikan:
  - Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
  - Program Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Gratis
  - Beasiswa Perguruan Tinggi
  - SMA Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

Tingkat Kemiskinan

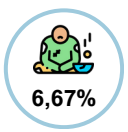

Faktor Pendukung:

- Peningkatan Pendapatan Masyarakat:
  - Kemandirian ekonomi masyarakat (wirausaha dan UMKM)
  - Meningkatnya peluang kerja (perkembangan industri pengolahan, *job fair*, peningkatan keahlian, padat karya produktif, dan program magang)
- Pengurangan Beban Masyarakat Miskin
  - Bantuan sosial dan jaminan sosial untuk akses layanan kesehatan dan pendidikan
  - Operasi pasar murah
- Perlindungan tenaga kerja rentan
- Pengelolaan zakat ASN bersama BAZNAS

Rekomendasi

- Perluasan jangkauan peluang kerja melalui optimalisasi pelaksanaan *job fair* dan kemitraan antara lembaga pendidikan dan pelatihan dengan DUDI **(Disnaker, Disdik, dan Swasta)**
- Peningkatan kemandirian perekonomian masyarakat melalui kemudahan akses terhadap permodalan, kepastian pemasaran, dan kebijakan pemerintah terkait perlindungan UMKM **(Kemenkop, KemenUMKM, dan Disperindagkopukm)**
- Peningkatan dan pemerataan akses serta kualitas layanan kesehatan melalui penguatan fasilitas kesehatan, *telemedicine*, optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta sosialisasi gaya hidup sehat **(Kemenkes dan Dinkes)**
- Peningkatan kualitas SDM pengajar dan kesehatan melalui pelatihan dan sertifikasi, serta pemerataan distribusi SDM ke Kepulauan Meranti melalui pemberian insentif khusus **(Kemendiktisaintek, Kemenkes, dan Dinkes)**
- Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan melalui penguatan fasilitas pendidikan, optimalisasi pendidikan jarak jauh (penguatan infrastruktur teknologi, akses internet, peningkatan kompetensi pengajar dalam dunia digital, serta pengembangan materi pembelajaran yang interaktif) **(Kemendikdasmen, Disdik, dan Diskominfotik)**
- Akselerasi penurunan kemiskinan di kantong kemiskinan melalui:
  1. Percepatan implementasi intervensi *central mapper* dan pemanfaatan data Regsosek untuk integrasi dan akurasi program kemiskinan
  2. Pemenuhan infrastruktur dasar (air, sanitasi, listrik, konektivitas) dan hunian layak
  3. Peningkatan akses dan konektivitas intermoda antar dan intra daerah (perbaikan jalan) dan pulau terluar (pengadaan jalan poros, jembatan dan tranportasi laut)

  (Bappenas, Kemensos, dan Dinsos)
- Peningkatan dan optimalisasi upaya pengurangan beban masyarakat melalui optimalisasi dan perluasan jangkauan operasi pasar murah, peningkatan pengelolaan zakat ASN, serta perluasan jangkauan perlindungan tenaga kerja rentan **(BAZNAS, Dinsos, Disperindagkopukm)**

Highlight EPD Provinsi Riau

Capaian Kurang Optimal

Laju Pertumbuhan Ekonomi

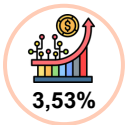

Faktor Penghambat:

- Belum optimalnya operasional KI Tenayan Raya dan KI Tanjung Buton
  - Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang
  - Minat investor kurang karena keterbatasan infrastruktur industri
- Penurunan kinerja investasi
- Penurunan permintaan ekspor dari negara mitra (migas - Singapura, Malaysia, Thailand, Bangladesh, dan Guam, serta non migas - Amerika Serikat, Singapura, Australia, dan Tiongkok)
- Ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu (lapangan usaha pertambangan, komoditas kelapa, kelapa sawit, dan karet)
- Belum optimalnya hilirisasi sektor komoditas unggulan
- Pengelolaan sektor pariwisata belum optimal

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Penyediaan Lapangan Kerja per Tahun

Faktor Penghambat:

- Perlambatan kinerja perekonomian
  - Penurunan kinerja investasi
  - Penurunan permintaan ekspor
- Rencana ketenagakerjaan pemerintah tidak terintegrasi dengan rencana kerja dunia usaha dan dunia industri (DUDI)
- Kurikulum pendidikan vokasi dan pelatihan belum sesuai dengan kebutuhan DUDI
- Terbatasnya akses kesempatan kerja yang responsif gender
- Pergeseran pola kerja
  - Masyarakat cenderung berwirausaha (kemandirian ekonomi masyarakat)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Rekomendasi

Mendorong beroperasinya KI Tenayan Raya dan KI Tanjung Buton melalui penyediaan infrastruktur pendukung industri, seperti transportasi dan pergudangan, pasokan energi, serta jaringan air bersih. **(Kemenperin, KemenPU, dan Disperindagkopukm)**

Peningkatan kinerja investasi melalui:
1. Penyediaan infrastruktur yang memadai
2. Pemberian insentif untuk investor yang melakukan investasi di sektor ekonomi produktif, terutama sektor non tambang
3. Kemudahan perizinan, reformasi birokrasi, peningkatan kepastian hukum, dan stabilitas kebijakan.

(BKPM, Disperindagkopukm, dan DPMPTSP)

Mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu melalui:
1. Diversifikasi kegiatan ekonomi melalui pengembangan sektor potensial, seperti komoditas pertanian, perdagangan, penyediaan jasa, pariwisata, ekonomi kreatif, dan industri pengolahan
2. Optimalisasi hilirisasi SDA serta upaya pemasaran dengan memanfaatkan teknologi.

(Disperindagkopukm, DPTPH, dan Disnaker)

Perluasan jangkauan peluang kerja melalui:
1. Penyelarasan rencana ketenagakerjaan dan kurikulum (pendidikan dan pelatihan) dengan kebutuhan DUDI, serta mendorong kemitraan anatara lembaga pendidikan dan pelatihan dengan DUDI
2. Peningkatan pelaksanaan *event job fair* melalui peningkatan skala dan kualitas (perluasan jangkauan dan kemitraan, serta adanya segmentasi sektor kerja)

(Disnaker, Disdik, dan Swasta)

Mendorong optimalisasi kemandirian ekonomi masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM, dukungan kewirausahaan perempuan, dukungan kebijakan dalam akses permodalan, penguatan kelembagaan, dan perlindungan UMKM **(Kemenhub, KemenPU, dan Dinas PUPRPKPP)**

Highlight EPD Provinsi Riau

Capaian Kurang Optimal

Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan

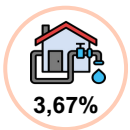

Faktor Penghambat:

- Cakupan infrastruktur yang terbatas
  - Fokus akses air pada daerah dengan prevalensi *stunting* tinggi
- Ketergantungan pada sumber air alternatif, seperti sumur, air permukaan, dan air hujan
- Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh
  - Penanganan tidak berdasarkan tingkat kekumuhan kawasan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Faktor Penghambat:

- Degradasi Lingkungan
  - Pencemaran air
  - Penurunan kualitas tutupan lahan
- Alih Fungsi Lahan
  - Deforestasi
  - Kebakaran lahan dan hutan

Rekomendasi

- Pemenuhan infrastruktur layanan dasar (air bersih, sanitasi, ketenagalistrikan, dan konektivitas) secara merata, terutama di daerah minim layanan dasar dan kantong kemiskinan dan pemberian subsidi untuk MBR **(KemenPKP, Dinas PUPRPKPP, dan Dinsos)**
- Skema kerja sama dengan swasta untuk pemenuhan infrastruktur air bersih dan sanitasi melalui skema *private public policy* atau *corporate social responsibility* (CSR) **(Bappelitbang dan Pihak Swasta)**
- Pemanfaatan sumber air alternatif melalui instalasi penampung air hujan yang diiringi dengan pengembangan teknologi filtrasi air dan pengecekan kualitas air secara berkala **(PDAM)**
- Akselerasi penanganan kawasan kumuh melalui prioritas dan pemfokusan penanganan berdasarkan tingkat kekumuhan kawasan **(KemenPKP dan Dinas PUPRPKPP)**
- Pengendalian pencemaran lingkungan melalui skema insentif dan disinsentif untuk sektor usaha yang melakukan upaya pelestarian lingkungan, meminimalisir pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang masif, serta pengolahan limbah mandiri **(KemenLH, DPMPTSP, dan DISLHK)**
- Upaya pelestarian kembali lingkungan melalui:
  1. Rehabilitasi hutan dan lahan dengan cara penanaman kembali pohon
  2. Pengendalian alih fungsi lahan melalui penguatan RTRW, RDTR, AMDAL, dan pemberian sanksi tegas terhadap individu maupun koorporasi yang melakukan pelanggaran
  3. Deteksi titik api melalui patroli rutin oleh polisi hutan dan penggunaan teknologi seperti *drone*
  4. Penguatan kebijakan agroforestri (Demplot Sawit Meranti, Agroforestri Paludikultur, dan Pengelolaan Konflik Manusia-Gajah) serta ekspansi kebijakan agroforestri ke individu maupun koorporasi kelapa sawit dan karet

  (KemenLH, Kemenhut, dan Pihak Swasta)

Highlight EPD Provinsi Riau

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi

Indeks Kerukunan Umat Beragama
71,6
	Faktor Penghambat:
	• Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) belum optimal
	  ○ Minimnya deteksi dini potensi konflik antar umat agama
	  ○ Dialog antar umat agama
		Peningkatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam:
		1. Dialog kerukunan antar umat agama di lingkup pendidikan, pemerintahan, dan masyarakat
		2. Pendidikan multikultural di semua jenjang pendidikan
		3. Pencegahan radikalisme melalui deteksi dini potensi konflik
		(Kemenag Provinsi Riau, Disdik, dan Seluruh OPD)

	• Komposisi masyarakat yang heterogen (Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Khonghucu, lainnya, dan Hindu)	
Indeks Daya Saing Daerah 3,25	**Faktor Penghambat:** • Belum optimalnya digitalisasi layanan publik	Peningkatan efektivitas layanan digital melalui simplifikasi sistem atau aplikasi pelayanan publik **(Diskominfo)**

	• Daya Saing Ekonomi Daerah
	  ○ Penurunan kinerja investasi
	  ○ Penurunan permintaan ekspor
	  ○ Belum optimalnya hilirisasi produk
		Peningkatan daya saing ekonomi daerah melalui:
		1. Diversifikasi kegiatan ekonomi melalui pengembangan sektor potensial
		2. Optimalisasi pengembangan industri pengolahan yang disertai dengan penyediaan infrastruktur penunjang
		3. Memperkuat dan meningkatkan iklim investasi melalui kemudahan perizinan, reformasi birokrasi, peningatan kepastian hukum, dan stabilitas kebijakan
		(Disperindagkopukm, DPTPH, dan DPMPTSP)

	• Ketersediaan Infrastruktur
	  ○ Minimnya rumah tangga dengan akses air minum dan jaringan perpipaan
	  ○ 35,06% jalan intra daerah mengalami kerusakan
		Penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas:
		1. Infrastruktur dasar: air bersih, sanitasi, ketenagalistrikan
		2. Perbaikan kondisi dan peningkatan kapasitas jalan kabupaten/kota di dalam Provinsi Riau
		(KemenPU dan Dinas PUPRPKPP)

5. Jambi

Highlight EPD Provinsi Jambi

Capaian Optimal		Rekomendasi
Tingkat Kemiskinan **7,10%**	**Faktor Pendukung:** • Sinergi program penurunan kemiskinan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	Optimalisasi dan perluasan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam berbagai bidang **(Bappenas dan Bappeda Prov. Jambi)**
	• Program DUMISAKE Pemerintah Provinsi Jambi	Penguatan dan pengembangan program DUMISAKE yang menyentuh berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat **(Dinsosdukcapil, Disdik, dan Dinkes Prov. Jambi)**
	• Belanja Bantuan Sosial Pemerintah	Optimalisasi bantuan sosial dan penanganan kemiskinan lainnya agar semakin tepat sasaran melalui sinergi antar *stakeholder* dan pemanfaatan satu data kemiskinan **(Bappenas, Kemensos, dan Dinsosdukcapil Prov. Jambi)**
Prevalensi *Stunting* 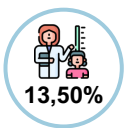 **13,50%**	**Faktor Pendukung:** • Meningkatnya kesadaran kesehatan masyarakat	Perluasan cakupan peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat pada berbagai bidang kesehatan di seluruh wilayah melalui penguatan sinergi pemerintah dan masyrakat **(Kemenkes dan Dinkes Prov. Jambi)**
	• Pemenuhan gizi seimbang pada ibu hamil dan menyusui yang optimal	Penguatan dan perluasan cakupan keberhasilan penurunan *stunting* melaui optimalisasi peran posyandu di berbagai daerah pada pelayanan ibu hamil dan menyusui **(Kemenkes dan Dinkes Prov. Jambi)**

Highlight EPD Provinsi Jambi

Capaian Optimal		Rekomendasi
Skor Pola Pangan Harapan **93,1**	**Faktor Pendukung:** • Upaya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat yang optimal	Penguatan pengawasan dan pengendalian ketersedian dan diversifikasi pangan daerah melalui perbaikan produksi komoditas unggulan daerah **(Dishanpan dan Disbun Prov. Jambi)**
	• Pengembangan desa mandiri pangan	Perluasan pengembangan desa mandiri pangan terutama di daerah yang produksi pangannya terbatas **(Dishanpan dan Disbun Prov. Jambi)**
	• Adanya penyediaan benih varietas unggul baru	Perluasan dan peningkatan penyediaan benih unggul varietas baru di berbagai bagian daerah Provinsi Jambi **(Dishanpan dan Disbun Prov. Jambi)**
PDRB per Kapita 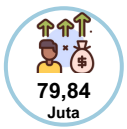 **79,84 Juta**	**Faktor Pendukung:** • Sektor Perkebunan dan Perikanan yang prima (kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, dan perikanan budidaya).	Pengembangan hilirisasi SDA terutama pada bidang perkebunan dan perikanan (kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, dan perikanan budidaya) **(BKPM, Kemendag, DPMPTSP, Disbun, DisKP Provinsi Jambi)**
	• Aktivitas pertambangan masih berkontribusi signifikan pada perekonomian daerah dan pendapatan penduduk.	Optimalisasi dampak aktivitas pertambangan terhadap perekonomian daerah, lingkungan alam, dan lingkungan sosial melalui: • Evaluasi menyeluruh bagi usaha pertambangan • Pengawasan Intensif dan Komprehensif terhadap Izin pertambangan Batubara dan Perkebunan Kepala Sawit • Kajian menyeluruh terhadap perkembangan pertambangan Provisni Jambi ke depan **(KemenLH, KemenESDM, DinasLH, dan Dinas ESDM Prov. Jambi)**
Indeks Pembangunan Kebudayaan **58,92**	**Faktor Pendukung:** • Terfasilitasinya kegiatan pelaku budaya melalui program-program pertunjukan kebudayaan	Penguatan pelesetarian nilai dan wujud-wujud kebudayaan Provinsi Jambi pada kehidupan masyarakat dan lembaga pemerintahan melalui: • Optimalisasi jumlah dan kualitas sarana dan prasana kebudayaan daerah • Pelibatan pelaku budaya dalam berbagai forum pembangunan terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat • Penguatan muatan lokal dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran **(Kemenbud dan Disbupar Prov. Jambi)**
	• Masih aktifnya kegiatan seni budaya yang ada di masyarakat terutama dalam kegiatan adat	

Highlight EPD Provinsi Jambi

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,00%	**Faktor Penghambat:** • Minimnya hilirisasi dan diversifikasi produk turunan berbasis SDA • Harga komuditas unggulan daerah fluktuatif dan cenderung stagnan • Dampak perubahan iklim (kemarau panjang) • Konektivitas antar wilayah yang belum merata dan *Debottlenecking* Logistik	Pengembangan hilirisasi SDA terutama pada bidang perkebunan dan perikanan (kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, dan perikanan budidaya). **(BKPM, Kemendag, DPMPTSP, Disbun, DisKP Provinsi Jambi)** Pengawasan dan pengendalian ketersediaan dan diversifikasi pangan daerah melalui perbaikan produksi komoditas unggulan daerah **(Dishanpan dan Disbun Prov. Jambi)** Pengembangan infrastruktur dan teknologi produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan yang adaptif terhadap perubahan iklim **(KemenPU dan DinasPUPR Prov. Jambi)**
Rasio Gini 0,321	**Faktor Penghambat:** • Dominasi lapangan kerja sektor primer (terutama perorangan) belum signifikan meningkatkan kesejahteraan • Tingkat pendidikan yang masih rendah menyebabkan tingkat pekerjaan dan pendapatan belum signifikan meningkatkan kesejahteraan	Pengembangan infrastruktur konektivitas dan pemenuhan infrastruktur dasar serta logistik: • Lanjutan pembangunan pelabuhan Ujung Jabung • Pembangunan tol ruas Jambi-Rengat • Pembangunan Sumatra *railway,* dll **(Kemenhub dan KemenPUPR)**
Tingkat Pengangguran Terbuka 4,48%	**Faktor Penghambat:** • Minimnya invetasi yang menyerap tenaga kerja • Tingkat pendidikan yang masih rendah menempatkan masyarakat pada pekerjaan yang rentan dan tidak stabil • Masih rendahnya *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia usaha/dunia industri	Peningkatan tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat melalui: • Peningkatan kualitas ekosistem pendidikan masyarakat terutama mendorong motivasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan • Peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas dan SDM pendidikan yang memadai **(Kemendikdasmen dan Disdikbud Prov. Jambi)** Penguatan kebijakan *link and match* dunia pendidikan dengan DUDI melalui: • Optimalisasi perencanaan pendidikan formal dan non formal terutama melakukan pemetaan dan pengembangan minat, bakat, dan jenjang karir peserta didik • Optimalisasi sistem informasi lapangan pekerjaan dan pelatihan kerja • Pengembangan fasilitas pelatihan dan tenaga pengajar tenaga kerja yang memadai **(Disdikbud dan Disnaker Prov. Jambi)**
Pembentuk Modal Tetap Bruto 21,90% PDRB	**Faktor Penghambat:** • Infrastruktur perkotaan dan konektivitas antar kab/kota belum optimal • Kompetensi tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan investasi • Sistem informasi komprehensif pengelolaan data penanaman modal yang belum tersedia • Belum optimalnya promosi penanaman modal karena terbatasnya anggaran	Peningkatan kualitas sistem pengelolaan penanaman modal melalui: • Pengembangan sistem informasi penanaman modal yang memadai • Pengembangan kualitas SDM penanaman modal • Optimalisasi penganggaran terutama untuk kegiatan promosi **(BKPM dan DPMPTSP Prov. Jambi)**

Highlight EPD Provinsi Jambi

Capaian Kurang Optimal

Indeks Pembangunan Manusia

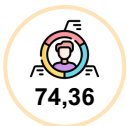

Faktor Penghambat:

1. Dimensi Kesehatan

- Jumlah dan kualitas sarana dan prasana kesehatan belum optimal
- Kompentesi tenaga kesehatan/medis masih memerlukan perhatian
- Rendahnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional

2. Dimensi Pengetahuan

- Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum merata,
- Kualitas dan jumlah sarana dan prasarana pendidikan belum merata, serta distribusi jenis pendidikan (SMA dan SMK) belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan minat bakat siswa

3. Dimensi Standar Hidup Layak

- Rendahnya pendapatan masyarakat terutama di daerah perdesaan

Rekomendasi

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui:
- Peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan
- Peningkatan jumlah dan kualitas SDM kesehatan
- Peningkatan kebijakan subsidi dan pelayanan kesehatan gratis
- Akselerasi cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional

(Kemenkes dan Dinkes Prov. Jambi)

Peningkatan tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat melalui:
- Optimalisasi perencanaan pendidikan formal dan non formal terutama melakukan pemetaan dan pengembangan minat, bakat, dan jenjang karir peserta didik
- Peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas dan SDM pendidikan yang memadai

(Kemendikdasmen dan Disdikbud Prov. Jambi)

Penguatan kebijakan pemberdayaan SDM lokal dalam pembangunan daerah **(Bappeda Litbang dan Disnaker Prov. Jambi)**

Highlight EPD Provinsi Jambi

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Indeks Pelayanan Publik 3,70	**Faktor Penghambat:** • Waktu pelayanan administrasi belum optimal • Prestasi kerja belum sepenuhnya digunakan dalam pemberian *reward and punishment*	Peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik melalui: • Peningkatan kualitas SDM aparatur pelayanan publik di daerah (penerapan *merit system*, pelatihan, dan penerapan *reward and punishment*) • Perbaikan sistem pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien (pengembangan fasilitas dan perbaikan skema pelayanan) **(Inspektorat dan OPD Prov. Jambi)**
Indeks Inovasi Daerah 37,91	**Faktor Penghambat:** • Perencanaan implementasi inovasi yang belum optimal • Waktu pelaksanaan riset yang tidak sesuai jadwal • Hasil riset belum sepenuhnya dijadikan dasar kebijakan	Peningkatan kualitas perencanaan dan *output* pada lembaga riset dan inovasi daerah melalui: • Optimalisasi pemilihan tema/topik riset dan inovasi pembangunan yang lebih ter*update* dan strategis • Peningkatan kualitas SDM riset dan inovasi (penerapan *merit system*, pelatihan, dan penerapan *reward and punishment*) • Penguatan pengendalian pelaksanaan program riset dan inovasi melaui pendekatan (empat) pilar *Balance Score Card* (BSC) yang meliputi *customer perspective*, *internal process*, *financial perspective*, dan *learning and growth perspective*. **(Balitbangda Prov. Jambi)**
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 68,15	**Faktor Penghambat:** • Degradasi lingkungan akibat aktivitas ekonomi (pertambangan ilegal) dan rumah tangga • Tata kelola pengelolaan lingkungan hidup belum optimal (SDM, koordinasi, dan kebijakan) • Sistem informasi penglolaan lingkungan hidup belum optimal	Penguatan pengendalain pemanfaatan ruang terutama pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan pertanian, perkebunan, dan perikanan. **(KemenATR/BPN)** Peningkatan kualitas tata kelola lingkungan hidup melalui: • Peningkatan kualitas SDM pengelola lingkungan hidup (penerapan *merit system*, pelatihan, dan penerapan *reward and punishment*) • Perbaikan manajemen *internal* dan *external* (sinergi antar *stakeholder*) • Pengembangan sistem informasi dan fasilitas pengelolaan lingkungan hidup **(KemenLH dan Dinas LH Prov. Jambi)**
Indeks Kerukunan Umat Beragama 65,17	**Faktor Penghambat:** • Belum optimlanya forum lintas umat beragama	Optimalisasi dan perluasan cakupan wilayah pada program kerukanan umat beragama yang lebih komprehensif di semua aspek kerukunan melalui pengoptimalan peran forum lintas umat beragama. **(Kanwil Kemenag Prov. Jambi)**

6. Sumatera Selatan

Highlight EPD Provinsi Sumatera Selatan

Capaian Optimal

Tingkat Pengangguran Terbuka

Faktor Pendukung:

- Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja
- Pendidikan vokasi berbasis potensi sumber daya
- Penyelenggaraan *Job Fair*

Rasio Gini

Faktor Pendukung:

- Pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin dan rentan
- Bantuan Pasang Baru Listrik Rumah Tangga Tidak Mampu
- Gerakan Bedah Rumah Secara Serentak se-Sumatera Selatan (GBRSS)
- Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi warga miskin
- Gerakan Pangan Murah

Rekomendasi

- Peningkatan SDM yang berkualitas berbasis kompetensi **(Kemnaker, Kemendikdasmen, Disnakertrans, Dinas Pendidikan)**
- Penguatan kebijakan *link and match* dunia pendidikan dan Dunia Usaha Dunia Industri melalui pendidikan vokasi berbasis sumber daya lokal **(Kemnaker, Kemendikdasmen, Disnakertrans, Dinas Pendidikan)**
- Optimalisasi keterlibatan dan kerjasama perusahaan/swasta dalam pelaksanaan *Job Fair* **(Kemnaker, KemenBUMN, Kemenperin, Bappeda, Disnakertrans, Disperindag, KADIN)**
- Penyesuaian kurikulum serta sarana prasarana di Balai Latihan Kerja yang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan DUDI **(Kemnaker, Kemendikdasmen, Disnakertrans, Dinas Pendidikan)**
- Optimalisasi pembangunan dan pemenuhan infrastrutur dasar (sanitasi, air bersih, air minum, rumah layak huni, dan listrik) bagi masyarakat miskin dan rentan **(KemenPKP, Kemenkomdigi, Kemensos, Dinas Perkim, Dinas ESDM, Dinsos)**
- Pemberian bantuan yang bersifat pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan pendapatan **(KemendesPDT, Kemensos, Dinas PMD, Dinsos)**
- Stabilisasi pasokan dan harga pangan **(Kementan, Kemenperin, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Disperin, BSIP)**

Highlight EPD Provinsi Sumatera Selatan

Capaian Optimal

Skor Pola Pangan Harapan

Faktor Pendukung:

- Potensi sektor pertanian sebagai sektor unggulan dan lumbung pangan nasional
- Gerakan Pangan Murah
- Adanya Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)

Kondisi Jalan Mantap

Faktor Pendukung:

- Penyelesaian PSN dan infrastruktur nasional dan daerah (jalan, tol, bendungan)
- Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra

Indeks Inovasi Daerah

Faktor Pendukung:

- Terselenggaranya berbagai inovasi dalam mendukung pembangunan di Sumsel, diantaranya:
  - Gerakan Bedah Rumah Secara Serentak se-Sumatera Selatan (GBRSS)
  - Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)
  - Gerakan Pangan Murah

Rekomendasi

- Pendekatan pengembangan pertanian *holistic closed loop model* dengan pengelolaan *system integrated farm management* yang modern dan *digitalized* **(Kementan, KemendesPDT, DistanTPH, Dinas Perkebunan)**
- Stabilisasi pasokan dan harga pangan **(Kementan, Kemenperin, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Disperin, BSIP)**
- Peningkatan akses terhadap pangan bergizi **(Kementan, Kemenkes, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinkes)**
- Pemberdayaan UMKM dan Industri Pengolahan Pangan Lokal **(Kementan, KemenUMKM, Kemenperin, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas KUKM, Disperin)**
- Peningkatan dan pemerataan infrastruktur konektivitas (tol, pelabuhan, jalan) **(KemenPU, Kemenhub, Dinas PU-BMTR, Dishub)**
- Penyelesaian proyek infrastruktur konektivitas secara lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan **(KemenPU, Kemenhub, Dinas PU-BMTR, Dishub)**
- Penguatan ekosistem inovasi dengan membangun kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk mengembangkan solusi inovatif berbasis kebutuhan daerah dan potensi lokal **(Kemendagri, Bappenas, Bappeda)**
- Optimalisasi dukungan kebijakan dan regulasi **(Kemendagri, Bappenas, Bappeda)**
- Pengembangan kapasitas SDM untuk mendorong masyarakat menciptakan solusi atas permasalahan daerah **(Kemendagri, Bappenas, Kemnaker, KemendesPDT, Bappeda, Disnakertrans, Dinas PMD)**

Highlight EPD Provinsi Sumatera Selatan

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,02%	**Faktor Penghambat:** • Belum optimalnya hilirisasi pertambangan, pertanian, dan perkebunan	Optimalisasi hilirisasi sektor unggulan daerah (pertambangan, pertanian, perkebunan) **(KemenESDM, Kementan, Dinas ESDM, DistanTPH)**
	• Ekspor Sumsel masih didominasi bahan mentah SDA yang berisiko rentan terhadap gejolak global	Optimalisasi hilirisasi komoditas unggulan dengan mendorong pembangunan Kawasan Industri Tanjung Enim dan *New Palembang Port* **(KemenESDM, Kementan, KemenPU, Kemenhub, Dinas ESDM, DistanTPH, Dinas PU-BMTR, Dishub)**
	• Dependensi ekspor Sumsel ke Tiongkok sehingga kondisi perekonomian Tiongkok memengaruhi kinerja ekspor komoditas unggulan Sumsel	Diversifikasi pasar melalui eksplorasi pasar baru ke negara lain serta membangun kerja sama perdagangan (FTA) **(Kemenkoekon, Kemendag, Kemenlu, Kemenperin, BKPM, Disdag, Disperin, Dinas KUKM, DPMPTSP)**
	• Biaya logistik yang cukup tinggi akibat pendangkalan Sungai Musi dan pembatasan jam operasional kapal di jembatan sepanjang Sungai Musi.	Pelaksanaan evaluasi aturan pembatasan kapal dan mendorong pengerukan sungai Musi secara berkala **(KemenPU, Kemenhub, KemenLH, Dinas PU-BMTR, Dishub, Dinas LH dan Pertanahan)**
Tingkat Kemiskinan 10,97%	**Faktor Penghambat:** • Kondisi geografis yang mempengaruhi akses terhadap pelayanan dasar dan ekonomi	Peningkatan dan pemerataan infrastruktur konektivitas (tol, pelabuhan, jalan) **(KemenPU, Kemenhub, Dinas PU-BMTR, Dishub)**
	• Program/kegiatan yang belum sinergis baik antar perangkat daerah di Provinsi maupun di Kab/Kota	Penguatan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang terintegrasi dengan didukung penyusunan program/kegiatan berbasis data dan pemetaan **(Bappenas, Kemensos, Bappeda, Dinsos)**
	• Program/kegiatan bersifat tidak fokus, tidak berkelanjutan (temporer) dan sporadis	Pemutakhiran dan pemanfaatan data Regsosek dalam mendukung verifikasi dan validasi data kemiskinan **(Bappenas, Kemensos, BPS, Bappeda, Dinsos)**
	• Bansos dan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak sesuai kebutuhan serta tidak tepat sasaran	
	• Pemanfaatan dana dena untuk kemiskinan tidak optimal	Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan **(Bappenas, KemendesPDT, Kemenkeu, Kemendagri, Kemensos, Bappeda, Dinas PMD, Dinsos)**

Highlight EPD Provinsi Sumatera Selatan

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Indeks Pembangunan Manusia **73,84**	**Faktor Penghambat:** • Konektivitas dan aksesbilitas yang belum merata. Jarak antar desa dan permukiman yang masih jarang penduduk menyebabkan pelayanan kesehatan dan pendidikan kurang terlayani dengan baik	Optimalisasi pemerataan akses, kualitas dan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan **(Kemendikdasmen, Kemenkes, KemenPU, Dinas Pendidikan, Dinkes, Dinas PU-BMTR)**
	• Belum optimalnya pengembangan pelayanan Kesehatan rujukan yang masih dominan di Kawasan Perkotaan	Pengembangan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di desa-desa **(Kemenkes, Dinkes)**
	• Rendahnya persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum	Peningkatan kualitas dan persebaran tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan termasuk pengembangan pendidikan vokasi dan non formal **(Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Dinas Pendidikan)**
	• Perekonomian yang masih bergantung pada sektor unggulan primer (pertambangan, pertanian, perkebunan)	Optimalisasi hilirisasi sektor unggulan daerah (pertambangan, pertanian, perkebunan) **(KemenESDM, Kementan, Dinas ESDM, DistanTPH)**
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi **27,26%**	**Faktor Penghambat:** • Rendahnya jumlah pekerja berpendidikan tinggi dan bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Optimalisasi keterlibatan dan kerjasama perusahaan/swasta dalam pelaksanaan *Job Fair* **(Kemnaker, Disnakertrans)**
		Penyesuaian kurikulum serta sarana prasarana bidang pendidikan yang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan DUDI **(Kemnaker, Kemendikdasmen, Disnakertrans, Dinas Pendidikan)**
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup **70,20**	**Faktor Penghambat:** • Masih tingginya kejadian bencana di Sumsel meliputi banjir, kebakaran hutan dan lahan terutama pada kawasan gambut, tanah longsor dan puting beliung	Pengelolaan SDA yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan **(KemenESDM, KemenLH, Dinas ESDM, Dinas LH)**
		Peningkatan upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir serta tanah longsor **(Kemenhut, KemenLH, BNPB, Dishut, Dinas LH)**
		Perencanaan adaptasi krisis iklim melalui pengembangan energi terbarukan dan transisi energi **(KemenESDM, KemenLH, Dinas ESDM, Dinas LH)**
Indeks SPBE **2,62**	**Faktor Penghambat:** • Tata kelola dan kapabilitas birokrasi masih belum optimal	Penguatan digitalisasi tata kelola kinerja pemerintahan daerah **(Kemendagri, Kominfo, KemenPANRB)**

7. Bengkulu

Highlight EPD Provinsi Bengkulu

Capaian Optimal

Tingkat Pengangguran Terbuka

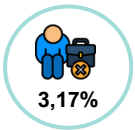

Faktor Pendukung:

- Pelaksanaan *job fair* dan *job matching* pendidikan vokasi
- Meningkatanya kualifikasi sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan
- Peningkatan investasi yang mendorong terciptanya lapangan kerja baru melalui Aksi Padu Investasi

Indeks Pembangunan Manusia

Faktor Pendukung:

- Meningkatnya edukasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
- Pembangunan sekolah di setiap desa melalui Bengkulu Cerdas program OSOS (One Subdistrict One School)

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Faktor Pendukung:

- Peningkatan nilai investasi dan jumlah investor
- Semakin membaiknya konektivitas jalan Tol Trans Sumatera yang dapat mendorong kemudahan aktivitas investasi dan perpindahan barang dan jasa
- Pelayanan perizinan yang semakin mudah melalui Aksi Padu Investasi

Rekomendasi

Meningkatkan daya saing melalui pelatihan teknis dan vokasional yang sesuai dengan pasar kerja dan kebutuhan dunia usaha dunia industri, terutama di sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor pertanian. **(Kemnaker, Kemendag, Kementan, Kemenperin, Disnakertrans, Disperindag)**

Penguatan kerjasama dengan industri untuk memastikan kurikulum berbasis keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. **(Kemnaker, Kemenperin, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Disnakertrans, Disperindag, Disdikbud)**

Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas jalan jembatan, jalur pelabuhan, air baku, dan jaringan irigasi sebagai upaya optimalisasi sektor industri dan potensi sektor unggulan lainnya **(KemenPU, Kemenhub, DisPUPR, Dishub)**

Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan optimalisasi distribusi tenaga pendidik terutama untuk daerah afirmatif **(Kemendiksaintek, Kemendikdasmen, Disdikbud)**

Mendorong pemerataan infrastruktur pendidikan yang memadai untuk meningkatkan inklusifitas pendidikan **(KemenPU, Kemendikbudsaintek, Kemendikdasmen, DisPUPR, Disdikbud)**

Peningkatan upaya promotif yang kreatif guna menjangkau calon-calon investor. **(BKPM, DPMPTSP)**

Penguatan jaminan keamanan dan kenyamanan investasi supaya terjalin kerjasama yang nyaman dan optimal. **(BKPM, DPMPTSP)**

Memperkuat iklim investasi melalui optimalisasi pelayanan perizinan, reformasi birokrasi, serta peningkatan transparansi agar membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan memacu akselerasi ekonomi. **(BKPM, DPMPTSP, Bapenda)**

Highlight EPD Provinsi Bengkulu

Capaian Optimal

Prevalensi *Wasting*

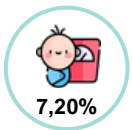

7,20%

Faktor Pendukung:

- Edukasi gizi keluarga melalui pemberdayaan pangan lokal dan pemberian makanan tambahan
- Peningkatkan penyediaan, distribusi dan sosialisasi tablet penambah darah kepada siswa SMP dan SMA
- Pemberian konseling terpadu kepada calon pengantin di puskesmas sebagai syarat menikah

Indeks Pembangunan Kebudayaan

61,45

Faktor Pendukung:

- Peningkatan revitalisasi objek wisata sejarah
- Potensi pesona wisata sejarah, alam, dan budaya seperti
  - *Land of Rafflesia*
  - Tanah Kelahiran *First Lady* Fatmawati Soekarno Sang Perajut Merah Putih
  - Kebudayaan Tabut

Rekomendasi

- Mendorong edukasi peningkatan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan pemberian ASI eksklusif kepada calon pengantin dan ibu hamil **(Kemenkes, Dinkes)**
- Pemantauan berat badan pertumbuhan balita dan status gizi keluarga secara teratur di posyandu **(Kemenkes, BKKBN, Dinkes)**
- Peningkatan akses fasilitas puskesmas dan kualitas pelayanan kesehatan *mobile* ibu dan anak di daerah afirmatif **(Kemenkes, KemenPU, Dinkes)**
- Percepatan pemerataan tenaga kesehatan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan **(Kemenkes, Dinkes)**
- Pengembangam rute wisata berbasis tema seperti wisata sejarah, seni tradisional, wisata alam, atau arsitektur lokal yang terhubung antar kota atau daerah **(Kemenpar, Dispar)**
- Pengembangan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) pada kawasan wisata KPPN Bengkulu Kota dan KPPN Pantai Panjang **(Kemenpar, Kemenekraf, Dispar)**
- Peningkatan pemasaran digital untuk promosi pariwisata dan sarana prasarana seperti pusat informasi wisata, tempat parkir, dan ruang terbuka untuk beristirahat yang nyaman bagi wisatawan **(Kemenpar, Kemenekraf, Dispar)**
- Mendorong pelatihan bagi pemandu wisata lokal tentang sejarah, seni, dan tradisi lokal agar dapat memberikan penjelasan yang mendalam dan informatif kepada pengunjung **(Kemenpar, Kemenekraf, Dispar)**

Highlight EPD Provinsi Bengkulu

Capaian Kurang Optimal

Laju Pertumbuhan Ekonomi

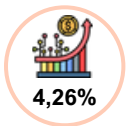

4,26%

Faktor Penghambat:

- Rendahnya pembangunan kapasitas infrastruktur sarana prasarana fasilitas pelabuhan dan bandara
- Sinergi kebijakan dan kerjasama antara pusat dan daerah belum optimal
- Belum optimalnya diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan sektor tertentu seperti sektor pariwisata dan industri

Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

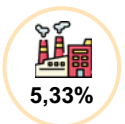

5,33%

Faktor Penghambat:

- Belum optimalnya pembangunan Pelabuhan Pulai Baai sebagai pusat pertumbuhan industri dan distribusi logistik
- Belum optimalnya pengembangan agroindustri sebagai sektor potensial

Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif

81036 orang

Faktor Penghambat:

- Belum optimalnya pengembangan UMKM
- Masih minimnya pengembangan kapasitas pelaku ekonomi

Rekomendasi

- Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas transportasi jalan tol, jembatan, jalur kereta api, pelabuhan dan bandara untuk mempermudah aktivitas distribusi logistik sektor perdagangan dan meningkatkan minat investor **(KemenPU, Kemenhub, DisPUPR, Dishub)**
- Peningkatan pelayanan Pelabuhan Pulau Baai yang terintegrasi dengan Kawasan Indsutri **(Kemenhub, Kemenperin, Dishub, Disperindag)**
- Mendorong pembangunan infrastruktur ekonomi pada aktivitas industri unggulan dengan jenis industri pakan dan pangan serta agroindsutri **(KemenPU, Kemenperin, Kementan, DisPUPR, Disperindag, DTPHP, DTP)**
- Optimalisasi hilirisasi sektor unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan **(Kementan, KemenKP, DTPHP, Disnakeswan, Dinas KP)**
- Pendekatan pertanian holistik *closed loop model* dan optimalisasi penyediaan irigasi presisi/*smart irrigation* yang sesuai dengan kebutuhan komoditas **(Kementan, KemenPU, DTPHP, DisPUPR)**
- Pengembangan destinasi pariwisata yang holistik guna mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional **(Kemenpar, Dispar)**
- Peningkatan MICE dan pemberdayaan ekonomi kreatif pada sekitar kawasan pariwisata potensial seperti pantai panjang. **(Kemenpar, Kemenekraf, KemenUMKM, Dispar, DisKUKM)**
- Mendorong pelatihan digitalisasi bisnis dan pemasaran produk, serta pemberdayaan UMKM dengan kemitraan seperti supplier, distributor, atau UMKM lain untuk berbagi pengalaman dan memperluas jaringan bisnis. **(Kemenpar, Kemenekraf, KemenUMKM, Dispar, DisKUKM)**

Highlight EPD Provinsi Bengkulu

Capaian Kurang Optimal

Tingkat Kemiskinan

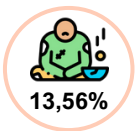

Faktor Penghambat:

- Akurasi dan validitas data kemiskinan dari berbagai sumber data kemiskinan belum terintegrasi sehingga pemberian bantuan belum tepat sasaran
- Belum optimalnya rumah tangga dengan akses air minum layak dan akses sanitasi kayak
- Ketimpangan distribusi pendapatan yang menimbulkan kesenjangan sehingga mempengaruhi proporsi penduduk miskin

Rasio Gini

Faktor Penghambat:

- Konektivitas antarwilayah dan infrastruktur untuk pembangunan daerah 3T masih rendah
- Masih banyak puskesmas dengan status Akreditasi Dasar dan sarana prasarana yang belum merata
- Distribusi kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan belum merata

Indeks Risiko Bencana

Faktor Penghambat:

- Pengelolaan sumber daya alam yang belum efisien dan efektif
- Pelayanan informasi rawan bencana provinsi belum optimal
- Wilayah rawan bencana gempa bumi dengan skala intensitasnya berkisar V-VII Skala MMI (*Modified Mercalli Intensity*)

Rekomendasi

- Mendorong peningkatan validasi dan intergasi data Regsosek, DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), dan P3KE (Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi). **(BPS, Kemensos, KemenkoPMK, Dinsos, Dinas Dukcapil)**
- Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah afirmatif prioritas di Pulau Enggano. **(KemendesPDT, KemenPU, KemenPKP, DisPUPR, Dishub, DPPKP)**
- Peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan, air minum layak dan sanitasi layak, dan rumah layak huni. **(KemenPKP, DPPKP)**
- Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan kelas rumah sakit regional dan puskesmas. **(Kemenkes, Dinkes)**
- Peningkatan pelatihan kompetensi dan optimalisasi distribusi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik. **(Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemendiksaintek, Dinkes, Disdikbud)**
- Peningkatan ketahanan energi hijau melalui optimalisasi potensi EBT (Energi Baru Terbarukan), pengembangan PLTA Kepahiang, PLTP Huluasi, dan PLTU Mulutambang. **(KemenESDM, Dinas ESDM)**
- Pengelolaan sumber daya alam yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. **(KemenLH, Dinas LHK)**
- Pembangunan infrastruktur rawan pengendali banjir dan pengamanan pantai. **(KemenPU, BNPB, DisPUPR, BPBD)**
- Penguatan Sistem Peringatan Dini, pemantauan seismik, pembentukan Tim Tanggap Darurat, dan penyusunan zonasi bencana untuk mengatur pembanguan infrastruktur penting di area yang rawan gempa. **(BNPB, BPBD)**

8. Lampung

Highlight EPD Provinsi Lampung

Capaian Optimal		Rekomendasi
Rasio Gini **0,302**	**Faktor Pendukung:** • Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan yang prima (padi, jagung, tebu, kopi, karet, kakao, kelapa, udang)	Pengembangan hilirisasi SDA terutama pada bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan (padi, jagung, tebu, kopi, karet, kakao, kelapa, udang, dll). **(BKPM, Kementan, KemenKP, dan Kemendag)**
	• Bantuan sosial pemerintah	Optimalisasi bantuan sosial dan penanganan kemiskinan lainnya agar semakin tepat sasaran melalui peningkatan sinergi antar *stakeholder* dan pemanfaatan satu data kemiskinan **(Bappenas, Kemensos, Bappeda, dan Dinsos Prov. Lampung)**
	• Kebijakan pembangunan berbasis perdesaan	Penguatan dan perluasan pembangunan berbasis perdesaan yang mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat **(Bappeda Provinsi Lampung)**
Prevalensi *Stunting* **14,90%**	**Faktor Pendukung:** • Meningkatnya kesadaran kesehatan masyarakat	Perluasan cakupan peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat pada berbagai bidang kesehatan di seluruh wilayah melalui penguatan sinergi pemerintah dan masyrakat **(Kemenkes dan Dinkes Prov. Lampung)**
	• Aksi konvergen penurunan *stunting*	Penguatan dan perluasan cakupan keberhasilan penurunan *stunting* melaui optimalisasi peran posyandu di berbagai daerah pada pelayanan balita, ibu hamil, dan menyusui **(Kemenkes dan Dinkes Prov. Lampung)**
	• Jumlah tenaga kesehatan yang memadai	

Highlight EPD Provinsi Lampung

Capaian Optimal		Rekomendasi
Angka Keberhasilan Pengobatan TBC **96,80%**	**Faktor Pendukung:** • Jumlah tenaga kesehatan yang memadai • Pendampingan pengawasan minum obat pasien yang optimal • Layanan pengobatan TB gratis	Peningkatan cakupan penemuan kasus TB yang saat ini masih belum optimal melalui deteksi dini dan sosialisasi terutama pada daerah dan kelompok rentan. **(Kemenkes dan Dinkes Prov. Lampung)** Optimalisasi layanan kesehatan di berbagai tingkatan melalui: • Optimalisasi jumlah dan kualitas fasilitas dan SDM kesehatan yang memadai • Optimalisasi kebijakan subsidi dan pelayanan kesehatan gratis **(Kemenkes dan Dinkes Prov. Lampung)**
Indeks Inovasi Daerah **58,70**	**Faktor Pendukung:** • Pengembangan riset dan inovasi yang terfasilitasi, baik regulasi maupun anggaran	Pengembangan riset dan inovasi yang lebih luas di berbagai sektor, terutama pada kualitas SDM, hilirisasi SDA, dan penarikan investasi melalui: • Optimalisasi pemilihan tema/topik riset dan inovasi pembangunan yang lebih ter*update* dan strategis • Peningkatan kualitas SDM riset dan inovasi (penerapan *merit system*, pelatihan, dan penerapan *reward and punishment*) • Penguatan pengendalian pelaksanaan program riset dan inovasi melaui pendekatan (empat) pilar *Balance Score Card* (BSC) yang meliputi *customer perspective*, *internal process*, *financial perspective*, dan *learning and growth perspective*. **(Balitbangda Provinsi Lampung)**
Indeks SPBE **3,81**	**Faktor Pendukung:** • Pembangunan berbasis digital sebagai salah satu prioritas pembangunan	Penguatan pembangunan daerah berbasis digitial melalui: • Peningkatan kualitas SDM digital di berbagai perangkat daerah (Penerapan *merit system,* pelatihan, dan penerapan *reward and punishment*) • Peningkatan fasilitas teknologi digital bidang pemerintahan • Penguatan evaluasi dan audit penyelenggaran SPBE **(KemenPANRB, Komdigi, Diskominfotik Prov. Lampung)**

Highlight EPD Provinsi Lampung

Capaian Kurang Optimal

Laju Pertumbuhan Ekonomi & PDRB per Kapita

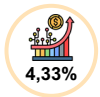

Faktor Penghambat:

- Minimnya hilirisasi dan diversifikasi produk turunan berbasis SDA
- Infrastruktur konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang belum optimal
- Minimnya investasi skala besar dan rendahnya realisasi investasi
- Posisi geostrategis belum termanfaatkan secara optimal (sektor pariwisata, perikanan, dan jalur logistik)

Tingkat Pengangguran Terbuka

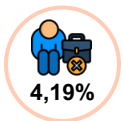

Faktor Penghambat:

- Minimnya investasi yang meciptakan lapang kerja
- Penyediaan informasi dan pelatihan kerja yang belum optimal
- Tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih rendah menempatkan masyarakat pada pekerjaan yang rentan dan tidak stabil
- Masih rendahnya *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia usaha/dunia industri

Tingkat Kemiskinan

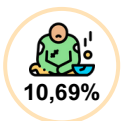

Faktor Penghambat:

- Dominasi lapangan kerja sektor primer (terutama perorangan) belum signifikan memenuhi standar hidup layak
- Infrastruktur dasar yang masih terbatas terutama pada daerah 3T
- Minimnya intergrasi penanganan kemiskinan antar *stakeholder*
- Terdapat bantuan sosial yang tidak tepat sasaran

Rekomendasi

Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang terutama pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan infrastruktur konektivitas:

- KI Katibung, KI Terpadu Pesawaran, KI Way Pisang, KI Tanggamus
- Pembangunan jalur kereta api Sumatera Selatan-Bakauheni
- Jalan lintas tengah Lampung: Terbanggi Besar-Bukit Kemuning
- Jalan Tol Trans Sumatra : Tol Lematang-Pelabuhan Panjang
- Pengembangan Pelabuhan Panjang sebagai HUB logistik Sumbagsel

(Kemenperin, Kemenhub, KemenPU, dan Dinas BMBK Prov. Lampung)

Pengembangan hilirisasi SDA terutama pada bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan (padi, jagung, tebu, kopi, karet, kakao, kelapa, udang, dll) **(BKPM, Kementan, KemenKP, dan Kemendag)**

Optimalisasi promosi dan pengelolaan tindak lanjut penanaman modal melalui:

- Pelatihan SDM penanaman modal dan perencanaan daerah
- Perbaikan manajemen lembaga penanaman modal dan perencanaan daerah

(BKPM, DPMTPSP, dan Beppeda Prov. Lampung)

Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas dan SDM yang sadar terhadap pengelolaan pariwisata dan kawasan pesisir berkelanjutan **(Kemenpar, KemenKP, Disparekraf, dan DisKP Prov. Lampung)**

Penguatan kebijakan *link and match* dunia pendidikan dengan DUDI melalui:

- Optimalisasi perencanaan pendidikan formal dan non formal terutama melakukan pemetaan dan pengembangan minat, bakat, dan jenjang karir peserta didik
- Optimalisasi sistem informasi lapangan pekerjaan dan pelatihan kerja (aplikasi Sigajah)
- Pengembangan fasilitas pelatihan dan tenaga pengajar tenaga kerja yang memadai

(Disdikbud dan Disnaker Prov. Lampung)

Pengembangan infrastruktur dasar seperti rumah layak huni, sanitasi, air minum, dan persampahan terutama di daerah 3T dan kawasan perkotaan **(KemenPKP, Dinas Perkim, dan Dinas BMBK Prov. Lampung)**

Optimalisasi bantuan sosial dan penanganan kemiskinan lainnya agar semakin tepat sasaran melalui peningkatan sinergi antar *stakeholder* dan pemanfaatan satu data kemiskinan. **(Bappenas, Kemensos, Bappeda, dan Dinsos Prov. Lampung)**

Highlight EPD Provinsi Lampung

Capaian Kurang Optimal

Indeks Pembangunan Manusia

&

Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun

Faktor Penghambat:

1. Dimensi Kesehatan

- Belum meratanya ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan
- Masih terbatasnya infrastruktur dasar (sanitasi aman dan air bersih) di daerah 3T
- Belum optimalnya transportasi publik menuju fasilitas kesehatan

2. Dimensi Pengetahuan

- Belum optimalnya transportasi publik menuju fasilitas pendidikan
- Terbatasnya fasilitas dan tenaga pendidikan yang memadai terutama di daerah 3T
- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan
- Terbatasnya akses ekonomi masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan
- Konsistensi kurikulum pendidikan

3. Dimensi Standar Hidup Layak

- Rendahnya pendapatan masyarakat

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

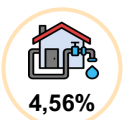

Faktor Penghambat:

- Masih digunakannya air tanah yang kondisinya relatif baik
- Masih terdapat unit penyedia air minum dalam kondisi kurang sehat dan sakit
- Minimnya penambahan sambungan air minum perpipaan

Rekomendasi

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui: **(Kemenkes dan Dinkes Prov. Lampung)**
- Penguatan dan perluasan cakupan masyarakat terhadap kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat
- Peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas dan SDM kesehatan yang memadai
- Optimalisasi kebijakan subsidi dan pelayanan kesehatan gratis

Pemenuhan infrastruktur dasar (sanitasi aman dan air bersih) terutama di daerah 3T **(KemenPKP dan Disperkim Prov. Lampung)**

Pengembangan infrastruktur transportasi terutama di daerah 3T berupa:
- Pengembangan akses jalan yang memadai dan terhubung dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan
- Pengembangan transportasi publik yang memadai

(KemenPU, Kemenhub, Dinas BKBM, Dishub Provinsi Lampung)

Peningkatan tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat melalui:
- Peningkatan kualitas ekosistem pendidikan masyarakat terutama mendorong motivasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan
- Pemetaan dan pengembangan minat, bakat, dan jenjang karir peserta didik
- Peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas dan SDM pendidikan yang memadai
- Biaya pendidikan yang gratis sepenuhnya

(Kemendikdasmen dan Disdikbud Prov. Lampung)

Kajian konsistensi dan kualitas kebijakan kurikulum pendidikan **(Kemendikdasmen)**

Penguatan kebijakan pemberdayaan SDM lokal dalam pembangunan daerah **(Bappeda dan Disnaker Prov. Lampung)**

Pengembangan kebijakan terkait penggunaan air tanah terutama di daerah perkotaan **(Dinas PSDA Prov. Lampung)**

Peningaktan kinerja BUMD Air Minum melalui peningkatan kompetensi SDM dan perbaikan manajeman tata kelola **(BUMD Provinsi Lampung)**

Penambahan cakupan pelayanan air minum melalui penambahan sambungan layanan dan pembangunan SPAM baru **(Dinas PSDA dan BUMD Provinsi Lampung)**

9. Kep. Bangka Belitung

Highlight EPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Capaian Optimal		Rekomendasi
Tingkat Kemiskinan **4,52%**	**Faktor Pendukung:** • Membaiknya tata kelola DTKS dan P3KE sebagai basis data penanggulangan kemiskinan	Penguatan sistem DTKS dan P3KE serta data sosial ekonomi terpadu lainnya sebagai salah satu basis perencanaan dan implementasi pembangunan berbagai sektor terkait **(Bappenas, Kemensos, Bappeda, dan Dinsos PMD)**
	• Program bantuan sosial untuk penghapusan kemiskinan ekstrem yang tepat sasaran	Optimalisasi bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan terintegrasi dengan program-program pembangunan lainnya **(Kemensos, Bappeda, dan DinsosPMD)**
	• Fleksibilitas pemanfaatan dana desa melalui program BLT dana desa bagi penduduk miskin	Optimaliasi pemanfaatan dana Desa melalui: • Pengembangan aktivitas ekonomi unggulan pedesaan, • Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di perdesaan. **(Kemendes PDT, Dinas PMD)**
	• Penyediaan rumah layak huni	Perluasan penyediaan rumah layak huni di berbagai bagian daerah **(Dinas PUPRPRKP)**
Indeks Pembangunan Manusia **74,09**	**Faktor Pendukung:** • Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat	Penguatan dan perluasan cakupan masyarakat terhadap kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat **(Kemenkes, Dinkes)**
	• Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan	Penguatan dan perluasan cakupan masyarakat terhadap kesadaran pentingnya pendidikan **(Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Disdik)**
	• Pembangunan pendidikan direncanakan secara komprehensif	Peningkatan kualitas perencanaan yang mencakup proyeksi siswa setelah lulus dari sekolah (*link and match* dengan DUDI) **(KemenPU, KemenPKP, Dinas PUPRPRKP)**
Indeks Pelayanan Publik **4,40**	**Faktor Pendukung:** • Meningkatnya indikator dari tahun ke tahun dengan kategori pelayanan A	Optimalisasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik **(Semua Dinas)**

Highlight EPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Capaian Optimal		Rekomendasi
PDB Industri Pengolahan 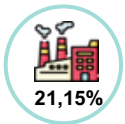 **21,15%**	**Faktor Pendukung:** • Potensi perkebunan semusim dan tahunan seperti lada, kelapa sawit, dan karet • Potensi sentra perikanan dan bahari • Jalur perdagangan internasional • Potensi cadangan timah terbesar se-Indonesia	Optimalisasi hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai ekonomi komoditas unggulan (sektor pertanian, perkebunan dan kelautan) **(KemenKP, Kementan, Dinas Perikanan)** Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah (tol, bandara, jalan, dan pelabuhan) **(KemenPU, Kemenhub, Dinas PUPRKP)** Pemantauan dan pengawasan industri terutama industri besar terkait limbah buangan yang berpotensi mencemari lingkungan alam **(KemenPU, Kemenperin, Disperindag, Dinas PUPRKP)**
Rasio Gini **0,245**	**Faktor Pendukung:** • Penyediaan jaminan sosial bagi masyarakat miskin • Telah optimalnya Kredit Usaha Rakyat • Bantuan permodalan untuk badan usaha milik desa	Menciptakan sumber-sumber pendapatan masyarakat berasal dari aktifitas ekonomi yang non- ekstraktif **(Bappeda, Bappenas)** Perluasan jenis bantuan kepada BUMDES seperti bantuan sarana produksi untuk usaha rumah tangga (mikro) **(KemenUMKM, Dinas KUKM)**
Tingkat Pengangguran Terbuka **4,56%**	**Faktor Pendukung:** • Upah buruh sektor pertambangan yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya • Keterlibatan dunia industri dalam membuka lapangan pekerjaan • Program pendidikan dan pelatihan keterampilan	Peningkatan pelatihan dan keterampilan (*up-skilling and re-skilling*) berupa pelatihan vokasional, kerja sama dengan industri dan pelatihan digital **(Kemenaker, Disnaker, Kemendikdasmen)** Perluasan cakupan pendidikan dan pelatihan seperti pada pengelolaan pariwisata dan kawasan pesisir yang berkelanjutan **(Kemenpar, Dispar)** Peningkatan kualitas pendidikan formal **(Kemendikdasmen, Kemenag, Dinas Pendidikan)**

Highlight EPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Laju Pertumbuhan Ekonomi **0,71%**	**Faktor Penghambat:** • Ekspor sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah mengalami terkontraksi -22,69 persen akibat penutupan sementara blok-blok smelter	Regulasi yang mendukung Bangka Belitung sebagai pusat hilirisasi timah, komoditas utama pertanian dan produk perikanan (**Kemenperin, Kemenkum**)
		Meningkatkan daya saing daerah untuk menciptakan iklim investasi daerah **(BKPM, DPMPTSP)**
	• Belum maksimalnya kontribusi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang terhadap aktifitas ekonomi daerah	Percepatan implementasi Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) **(Kemenkoekon, Kemenpar, Dispar)**
	• Belum maksimalnya kontribusi kawasan industri Sadai	
	• Belum optimalnya infrastruktur pendukung sistem logistik dan rantai pasok di daerah	Percepatan pembangunan multi-infrastruktur pendukung sistem logistik dan rantai pasok di daerah **(KemenPU, Kemenhub, Dinas PUPRKP)**
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup **71,62**	**Faktor Penghambat:** • Masih rendahnya tata kelola pengelolaan sumber daya alam	Perbaikan regulasi dan tata kelola pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan (**KemenLH, Dinas LH**)
	• Aktivitas pertambangan timah di laut dan di darat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air laut, kerusakan ekosistem terumbu karang, dan penyebaran penyakit di masyarakat pesisir	Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tambang **(KemenESDM, Kemenkum)**
		Melakukan rehabilitasi lahan bekas tambang dengan menanam pohon, memperbaiki kualitas air kolong, dan menerapkan sistem pertanian terintegrasi **(KemenLH, Dinas LH)**
	• Pertambangan dan perluasan perkebunan menyebabkan perubahan tutupan lahan, sehingga menurunkan daya dukung lingkungan.	Mendorong diversifikasi ekonomi masyarakat, misalnya dengan mengembangkan sektor pariwisata berbasis lingkungan dan pertanian organik (**Kementan, Bappeda**)

Highlight EPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Capaian Kurang Optimal

Produksi Perikanan

Faktor Penghambat:

- Belum optimalnya diversifikasi ekonomi karena ketergantungan pada sektor pertambangan
- Belum optimalnya aktivitas bahari
- Belum berjalan baik untuk komoditas perikanan tambak dan produksi udang Vanname
- Tingginya harga input produksi, baik untuk perikanan tangkap yang meliputi bahan bakar, kapal, dan alat tangkap, maupun perikanan budidaya yang meliputi pakan, benih, dan pencetakan tambak
- Sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan seperti pelabuhan perikanan, sarana pasca panen, dan balai benih yang ada belum memadai
- Faktor alam seperti gelombang tinggi, angin kencang (angin puting beliung)

Indeks Risiko Bencana

Faktor Penghambat:

- Bencana banjir, angin puting beliung, karhutla
- Alih fungsi lahan terbuka hijau dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung terjadinya bencana kekeringan

Rekomendasi

- Meningkatkan hilirisasi sumber daya alam untuk diversifikasi dan meningkatkan nilai ekonomi komoditas unggulan (sektor pertanian, perkebunan dan kelautan) **(BKPM, DPMPTSP)**
- Memperluas jangkauan program solar untuk koperasi nelayan dan pembudidaya ikan serta (**KemenKP, Dinas KP)**
- Pemberian bantuan alat penangkapan dan budidaya ikan (**kemenKP, Dinas KP)**
- Peningkatan jumlah dan kualitas saranan dan prasarana usaha perikanan seperti pelabuhan perikanan, saranan pasca panen, dan balai benih ikan (KemenKP, Dinas Perikanan
- Penguatan mitigasi bencana dengan menguatkan *early warning system*. **(BMKG, BNPB, Basarnas)**
- Melakukan pelatihan atau sekolah aman bencana serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat **(BMKG, BNPB, Basarnas)**
- Peningaktan kualitas tata ruang dan bangunan yang mampu beradaptasi dan tahan terhadap bencana alam **(KemenATR/BPN, KemenPU, KemenPKP, dan BNPB)**

10. Kep. Riau

Highlight EPD Provinsi Kepulauan Riau

Capaian Optimal

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Faktor Pendukung:

- Peningkatan pada PMA Kep. Riau yang didorong oleh masuknya investasi besar di sektor manufaktur dan kawasan industri, seperti di Kawasan Industri Wiraraja Batam.
- Kontribusi sektor industri pengolahan yang memberikan andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan produksi, terutama di sektor elektronik. Hal ini didorong oleh permintaan yang kuat dari pasar internasional, khususnya Amerika Serikat.
- Pertumbuhan positif pada sektor konstruksi yang didukung oleh pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur prioritas yang berlanjut diantaranya seperti pengembangan proyek pelabuhan dan jalan strategis di Batam dan Tanjungpinang, serta terminal kargo di Batam.
- Inflasi yang terkendali menjadi faktor pendukung daya beli masyarakat.
- Peningkatan aktivitas perdagangan, terutama didorong oleh belanja masyarakat selama liburan tahun ajaran baru dan kegiatan pariwisata.

Tingkat Kemiskinan

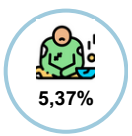

Faktor Pendukung:

- Implementasi program pembangunan infrastruktur, realisasi investasi, dan pemberdayaan ekonomi lokal yang menciptakan peluang kerja bagi masyarakat terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
- Peningkatan akses infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih yang turut membantu mengurangi biaya hidup rumah tangga berpendapatan rendah.
- Kondisi perekonomian yang stabil yang didukung terutama oleh pertumbuhan lapangan usaha seperti industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.
- Inflasi yang terkendali yang membantu dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama pada kebutuhan pokok seperti makanan.
- Realisasi belanja dan peningkatan efektivitas penyaluran bantuan sosial mencakup bantuan untuk subsidi pangan dan non pangan.

Rekomendasi

- Memperkuat iklim investasi daerah melalui penguatan sistem perizinan yang efisien, penyediaan insetif investasi, pengembangan infrastruktur pendukung terutama energi dan logistik, serta memperkuat kapasitas SDM lokal. (**DPMPTSP; Disperindag; DinasPU; Dishub; Disdik; Disnaker; Kemenaker; Kemenperin; Kemenhub; Kemendikdasmen; Kemenaker; BKPM**)
- Mendorong penguatan ekosistem industri diantaranya melalui:
  - Pengembangan kemitraan antara perusahaan industri besar dengan Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai upaya memperkuat rantai pasok industri di Kep. Riau. **(Disperindag; Kemenperin)**
  - Menginisiasi pemberian subsidi atau insentif tambahan kepada perusahaan manufaktur yang mengadopsi teknologi Industry 4.0 seperti otomasi, AI, dan IoT untuk meningkatkan efisiensi produksi serta bagi industri yang menerapakan industri hijau. (**Bappeda; Disperindag; Kemenperin; Kemenkeu**)
  - Penyediaan insentif bagi industri berorientasi ekspor diantaranya melalui pembebasan pajak ekspor untuk produk manufaktur tertentu dan keringanan bea masuk bahan baku yang digunakan untuk barang ekspor. (**Bappeda; Disperindag; Kemenperin; Kemenkeu**)
  - Penyediaan subsidi energi untuk industri ekspor, khususnya yang bergantung pada listrik dan gas. (**Kemenperin; KemenESDM**)
  - Mendorong perluasan pasar ekspor melalui kerja sama perdagangan internasional baru dan mengikuti pameran dagang internasional. (**Disperindag; Kemenperin; BKPM; Kemenlu)**
- Memperkuat pelibatan unsur stakeholders maupun elemen lokal dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis di daerah seperti aturan terkait keterlibatan tenaga kerja lokal, kerjasama dengan perusahaan lokal, maupun penggunaan bahan baku lokal. (**Bappeda; DinasPU; Disnaker; Kemenaker; KemenPU; BUMN**)
- Menyusun strategi optimalisasi pemanfaatan dan integrasi proyek strategis di daerah pasca terbangun (**Bappeda; DinasPU; KemenPU; BUMN**)
- Mengembangkan potensi pariwisata lokal serta memperkuat branding pariwisata lokal melalui kerjasama dengan pihak swasta (**Dispar; Kemenpar**)
- Mendorong pelaksanaan event promosi produk-produk lokal daerah seperti Festival Belanja Tematik/Pasar/Bazar Rakyat dan UMKM serta memperluas kolaborasi antara pedagang lokal dengan dengan e-commerce dan toko fisik/retail modern. (**Bappeda; DinasPU; KemenPU; BUMN**)
- Penguatan sistem logistik dan distribusi antarpulau melalui perbaikan infrtasruktur pelabuhan dan pemberian subsidi tranportasi untuk kebutuhan pokok serta memperkuat cadangan dan stok bahan pokok diantaranya melalui pembangunan gudang penyimpanan. (**Dishub; Disperindag; Kemenhub; Kemendag; BULOG**)
- Meningkatkan kualitas basis data penerima bantuan sosial melalui pemanfaatan data Regsosek dan mengefektifkan penyaluran bantuan sosial melalui pemanfaatan kebijakan *Central Mapper*. (**Bappeda; Dinsos; Dukcapil; Bappenas; Kemensos; Kemenkeu; Kemendagri**)

Highlight EPD Provinsi Kepulauan Riau

Capaian Optimal

Kontribusi PDB Industri Pengolahan

Faktor Pendukung:

- Peningkatan produksi industri elektronik seiring dengan permintaan global, terutama dari negara mitra seperti Amerika Serikat.
- Dukungan kebijakan strategis untuk mendukung industri melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus di Batam, termasuk penyederhanaan perizinan dan insentif fiskal
- Peningkatan infrastruktur pelabuhan di Kepri dalam rangka mendukung efisiensi logistik, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor industri pengolahan
- Keberadaan tenaga kerja terampil di kawasan industri di Batam menjadi pilar utama yang mendukung keberlanjutan industri pengolahan di Kepri
- Realisasi investasi, terutama pada pengembangan kapasitas produksi di Batam, menjadi faktor utama penggerak pertumbuhan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto

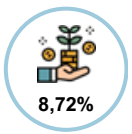

Faktor Pendukung:

- Penanaman Modal Asing (PMA) tumbuh signifikan, khususnya di kawasan industri seperti Wiraraja Batam.
- Realisasi belanja modal yang cukup tinggi, terutama untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan jaringan utilitas.
- Pelaksanaan proyek infrastruktur besar, termasuk kawasan ekonomi khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran.

Persentase Kondisi Mantap Jalan

Faktor Pendukung:

- Pembangunan proyek jalan strategis, seperti di kawasan Batam, Bintan, dan Natuna, yang dirancang untuk mendukung konektivitas antardaerah.
- Dukungan pembangunan infrastruktur jalan yang signifikan, termasuk dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
- Dukungan pemeliharaan dan perbaikan jalan eksisting dalam rangka mempertahankan kualitas konektivitas.

Rekomendasi

Mendorong penguatan ekosistem industri diantaranya melalui:

- Pengembangan kemitraan antara perusahaan industri besar dengan Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai upaya memperkuat rantai pasok industri di Kep. Riau. **(Disperindag; Kemenperin)**
- Menginisiasi pemberian subsidi atau insentif tambahan kepada perusahaan manufaktur yang mengadopsi teknologi Industry 4.0 seperti otomasi, AI, dan IoT untuk meningkatkan efisiensi produksi serta bagi industri yang menerapakan industri hijau. (**Bappeda; Disperindag; Kemenperin; Kemenkeu**)
- Penyediaan insentif bagi industri berorientasi ekspor diantaranya melalui pembebasan pajak ekspor untuk produk manufaktur tertentu dan keringanan bea masuk bahan baku yang digunakan untuk barang ekspor. (**Bappeda; Disperindag; Kemenperin; Kemenkeu**)
- Penyediaan subsidi energi untuk industri ekspor, khususnya yang bergantung pada listrik dan gas. (**Kemenperin; KemenESDM**)
- Mendorong perluasan pasar ekspor melalui kerja sama perdagangan internasional baru dan mengikuti pameran dagang internasional. (**Disperindag; Kemenperin; BKPM; Kemenlu)**
- Pengembangan sarana prasarana pelabuhan peti kemas Batu Ampar dan pelabuhan pendukung logistik di Kepri lainnya melalui kerjasama dengan mitra swasta nasional dan internasional dalam mendukung efisiensi logistik. (**Bappeda; Dishub; Bappenas; Kemenhub; BUMN**)
- Memperkuat kolaborasi antara Pemerintah, DUDI, dan Institusi Pendidikan dalam rangka meninkatkan kualitas kurikulum/materi pelatihan di sekolah vokasi, perluasan kuota program magang, sertifikasi, dan penempatan pasca sekolah. (**Disdik; Disperindag; Disnaker; Kemendikdasmen; Kemenperin; Kemenaker**)

Memperkuat iklim investasi daerah melalui penguatan sistem perizinan yang efisien, penyediaan insetif investasi, pengembangan infrastruktur pendukung terutama energi dan logistik, serta memperkuat kapasitas SDM lokal. (**DPMPTSP; Disperindag; DinasPU; Dishub; Disdik; Disnaker; Disnaker; Kemenperin; Kemenhub; Kemendikdasmen; Kemenaker; BKPM**)

Memperkuat pelibatan unsur stakeholders maupun elemen lokal dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis di daerah seperti aturan terkait keterlibatan tenaga kerja lokal, kerjasama dengan perusahaan lokal, maupun penggunaan bahan baku lokal. (**Bappeda; DinasPU; Disnaker; Kemenaker; KemenPU; BUMN**)

Mendorong optimalisasi pemanfaatan infrastruktur strategis melalui dukungan daerah seperti prasarana dan regulasi pendukung dalam rangka mengintegrasikan antara infrastruktur nasional dan daerah **(Bappeda, DinasPU, Dishub, Bappenas, KemenPU, Kemenhub)**

Mendorong percepatan realisasi lanjutan pengembangan dan pemerataan infrastruktur konektivitas terutama di wilayah kepulauan terluar dan terpencil **(Bappeda, Dinas PU, Dishub, Pemkab/Kota, Bappenas, Kemen PU, Kemenhub)**

Meningkatkan pengawasan dan pemiliharaan terhadap infrastruktur jalan eksisting di antaranya melalui penguatan pengawasan beban kendaraan, rambu lalu lintas, regulasi khusus angkutan barang komoditas besar dan logistik serta preservasi dan peningkatan kapasitas mutu jalan **(Bappeda, Dinas PU, Dishub, Pemkab/Kota, Bappenas, Kemen PU, Kemenhub)**

Highlight EPD Provinsi Kepulauan Riau

Capaian Optimal

Indeks Pembangunan Manusia

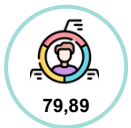

79,89

Faktor Pendukung:

- Program layanan kesehatan gratis bagi masyarakat di daerah terpencil, untuk memastikan akses layanan kesehatan merata.
- Peningkatan anggaran kesehatan pada tahun 2024 melalui dukungan pemerintah Provinsi Kepri untuk alokasi belanja sektor kesehatan sebesar 11 persen.
- Program pembangunan rumah singgah di Jakarta dan Batam sebagai fasilitas penginapan gratis bagi masyarakat Kepri yang menjalani pengobatan rujukan.
- Perbaikan akses layanan kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik, termasuk keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai di wilayah perkotaan seperti Batam dan Tanjungpinang.
- Peningkatan layanan kesehatan melalui layanan pemasangan ring jantung di RSUP Raja Ahmad Thabib
- Program peningkatan kualitas pendidikan melalui insentif untuk tenaga pendidik di daerah terpencil seperti Anambas dan Lingga serta mendorong program penerapan digitalisasi pendidikan
- Peningkatan fasilitas pendidikan tinggi di Batam yang didirong menjadi pusat pendidikan regional.
- Peningkatan pendapatan masyarakat seiring peningkatan aktivitas sektor industri pengolahan dan pariwisata terutama di Batam dan Bintan
- Kota-kota besar seperti Batam dan Tanjungpinang menjadi pusat ekonomi yang menarik migrasi tenaga kerja berketerampilan

Skor Pola Pangan Harapan

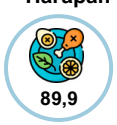

89,9

Faktor Pendukung:

- Pemerintah daerah mendorong pengembangan pangan lokal, seperti sagu, ikan laut, dan hasil pertanian khas daerah Kepri untuk mendukung konsumsi pangan beragam.
- Optimalisasi sistem distribusi pangan, terutama ke wilayah terpencil, melalui kerja sama dengan dinas terkait dan swasta.
- Penyaluran bantuan kepada keluarga kurang mampu dengan fokus pada bahan pangan bergizi seperti telur, sayuran, dan ikan serta sosialisasi konsumsi B2SA.

Rekomendasi

- Peningkatan insentif finansial dan non finansial bagi tenaga medis dan dokter di pulau terpencil dan terluar **(Dinkes, Pemkab/Kota, Kemenkes)**
- Pengembangan dan pemerataan RS terstandar di setiap kab/kota serta meningkatkan layanan kesehatan di faskes tingkat I di setiap wilayah kepulauan melalui penambahan alat kesehatan, tenaga medis, dan keberadaan dokter **(Bappeda, Dinkes, Pemkab/Kota, Bappenas, Kemenkes)**
- Mendorong penerapan *telemedicine* untuk meningkatkan layanan kesehatan jarak jauh di wilayah terpencil dan terluar **(Dinkes, Pemkab/Kota, Kemenkes)**
- Mengembangkan layanan kesehatan di RSU utama provinsi baik penguatan sarana prasarana, perluasan layanan, dan penambahan dokter spesialis. **(Bappeda, Dinkes, Pemkab/Kota, Bappenas, Kemenkes)**
- Mendorong pemerataan jumlah dan kualitas sekolah dan tenaga pendidik khususnya di wilayah perdesaan atau terpencil melalui pembangunan dan rehabilitasi sekolah, Program sekolah berbasis komunitas khususnya di wilayah terpencil yang dikelola dengan partisipasi masyarakat lokal, program pemanfaatan fasilitas pendidikan bersama (laboratorium, perpustakaan, ruang TIK, dll), peningkatan insentif finasial dan non finansial bagi guru di wilayah 3TP, penerapan pendidikan jarak jauh dengan pemanfaatan TIK **(Disdik, Pemkab/Kota, Kemendikdasmen)**
- Menjamin adanya upah layak bagi atau tenaga pendidik khususnya melalui program subsidi upah untuk daerah terpencil serta mendorong rekrutmen guru honorer melalui mekanisme Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) **(Bappeda, Disdik, Pemkab/Kota, Bappenas, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek)**
- Meningkatkan jumlah insentif pendidikan bagi seluruh kelompok masyarakat untuk mengurangi *out of pocket* biaya pendidikan yang tinggi **(Disdik, Pemkab/Kota, Bappenas, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek)**
- Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana serta daya saing pendidikan tinggi salah satunya melalui penerapan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) dan pengembangan program pendidikan jarak jauh **(Bappeda, Disdik, Pemkab/Kota, Bappenas, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek)**
- Menambah jumlah bantuan beasiswa afirmasi untuk pendidikan tinggi yang difokuskan di daerah afirmasi **(Bappeda, Disdik, Pemkab/kot, Bappenas, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek)**
- Pengembangan *Community Learning and Development Center* (CLDC) dalam rangka penyediaan layanan pendidikan nonformal, pemeriksaan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam satu lokasi yang dikelola secara terintegrasi **(*Multistakeholders*)**
- Membangun sarana pasca panen atau pusat pengolahan pangan lokal agar dapat dijadikan produk siap konsumsi **(Distan, Disperindag, Kementan)**
- Membangun sfasilitas penyimpanan dingin (cold storage) untuk memastikan hasil pangan lokal dapat dikirim ke pasar lokal dan luar daerah dengan kualitas terjaga. **(Distan, DisKKP, Kementan, KKP)**
- Memperluas kerjasama dalam hal pengadaaan pangan lokal bergizi terutama dengan petani, peternak, dan nelayan lokal serta pelaku usaha lokal lainnya. **(Distan, DisKKP, Diskop UKM, Kementan, KKP)**

Highlight EPD Provinsi Kepulauan Riau

Capaian Optimal

Prevalensi *Stunting*

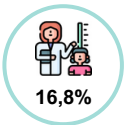

16,8%

Faktor Pendukung:

- Pelaksanaan berbagai program intervensi spesifik dan sensitif secara terpadu meliputi Program ini mencakup pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita, suplementasi zat besi, imunisasi lengkap, serta edukasi mengenai pola asuh dan gizi seimbang.
- Program edukasi, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya gizi seimbang, pola asuh yang baik, dan pencegahan pernikahan dini.
- Pendampingan ibu hamil dengan menempelkan stiker khusus di depan rumah yang terdapat ibu hamil, untuk memantau perkembangan kehamilan dan memastikan intervensi gizi yang tepat.
- Program peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.
- Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) difokuskan pada penyediaan makanan sehat dan bergizi bagi keluarga berisiko stunting.
- Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan, termasuk penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga medis terlatih, telah memastikan bahwa ibu hamil dan anak balita mendapatkan perawatan yang diperlukan.

Persentase RT dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan

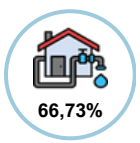

66,73%

Faktor Pendukung:

- Percepatan pembangunan SPAM regional di Pulau Bintan dalam rangka memperbaiki jaringan infrastruktur perpipaan, sumber air baku, dan instalasi unit produksi layanan air bersih.
- Investasi besar dalam rangka membangun proyek pipanisasi baru dan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di Pulau Bintan.
- Perbaikan jaringan perpipaan oleh PDAM Tirta Kepri
- Pelaksanaan program Pamsimas III dalam rangka meningkatkan jumlah fasilitas air minum dan sanitasi bagi masyarakat di 65 desa di seluruh Kepri

Rekomendasi

- Perluasan distribusi PMT melalui Puskesmas dan Posyandu terapung bagi wilayah pulau terluar dengan pelibatan perangkat desa dan kader PKK lokal serta mendorong pemanfaatan hasil pertanian dan perikanan lokal (seperti ikan, sagu, dan kelapa) sebagai bahan utama PMT **(Dinas PMD, Dinkes, Distan)**
- Penyediaan suplai yang berkelanjutan melalui koordinasi antara dinas kesehatan dengan pemkab/pemkot untuk memastikan suplai obat/vitamin/vaksin tidak terputus, meskipun ada kendala logistik di daerah terpencil. **(Dinas PMD, Dinkes, Dishub)**
- Mendorong edukasi berbasis komunitas melalui pembentukan kelompok diskusi kecil di tingkat desa yang melibatkan ibu-ibu dan keluarga untuk mensosialisasikan pola asuh, pendidikan seksual sejak dini dan gizi. **(Dinas PMD, Dinkes, Dinas PPPA)**
- Kerja sama antara Dinas Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial untuk menyelaraskan program PMT dengan edukasi gizi di sekolah. **(Disdik, Dinkes, Dinsos)**
- Pengembangan infrastruktur air bersih di wilayah kepulauan melalui pengembangan teknologi desalinasi air laut, embung, sistem distribusi berbasis modular, dan pembuatan sumur bor dangkal dan air tanah serta memperluas cakupan pembangunan toilet umum dan septic tank komunal melalui Program *Community-Led Total Sanitation*/CLTS **(DinasPU, Dinkes, Dinas PMD)**
- Pendirian sentra DASHAT di pulau strategis seperti Batam, Tanjung Pinang, Karimun, dan Bintan serta mengembangkan sistem dapur bergilir di rumah-rumah warga atau posyandu dengan dukungan bahan baku dari pemerintah di pulau-pulau kecil. **(Dinkes, Dinsos, Distan, Dinas KKP, Posyandu, PKK)**
- Mengembangkan layanan kesehatan di RSU utama provinsi baik penguatan sarana prasarana, perluasan layanan, dan penambahan dokter spesialis. **(Bappeda, Dinkes, Pemkab/Kota, Bappenas, Kemenkes)**
- Pengembangan dan pemerataan RS terstandar di setiap kab/kota serta meningkatkan layanan kesehatan di faskes tingkat I di setiap wilayah kepulauan melalui penambahan alat kesehatan, tenaga medis, dan keberadaan dokter **(Bappeda, Dinkes, Pemkab/Kota, Bappenas, Kemenkes)**
- Mendorong kerjasama dengan swasta melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP) maupun pengajuan dana hibah dari pemerintah pusat melalui Kementerian PU atau lembaga donor internasional untuk proyek pembangunan infrastruktur SPAM.serta mengimplementasikan skema retribusi air bersih berbasis konsumsi untuk masyarakat secara bertahap untuk mendukung pembiayaan operasional SPAM. **(Bappeda, Dinas PU, Bappenas, KemenPU, BUMD)**
- Pemanfaatan teknologi perpipaan tahan korosi yang cocok untuk kondisi wilayah pesisir dan laut, seperti pipa PVC atau HDPE (High-Density Polyethylene), pemetaan jaringan perpipaan digital (GIS) untuk membantu perencanaan perbaikan dan pemeliharaan serta mengembangkan aplikasi atau sistem online bagi masyarakat untuk melaporkan masalah terkait layanan air bersih/minum. **(BUMD, Dinas PU)**
- Mendorong pelatihan masyarakat dalam rangka memperkuat keberlanjutan pemanfaatan khsusunya terkait perawatan dan pengelolaan fasilitas air minum dan sanitasi pasca terbangun. **(BUMD, Dinas PU)**

Highlight EPD Provinsi Kepulauan Riau

Capaian Kurang Optimal

Tingkat Pengangguran Terbuka

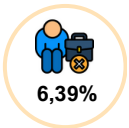

6,39%

Faktor Penghambat:

- Adanya kecenderungan bagi sektor industri manufaktur yang mulai bergeser ke padat teknologi/modal.
- Ketergantungan industri pengolahan yang cukup tinggi membuat pasar tenaga kerja di Kepri rentan dan terpengaruh oleh dinamika ekonomi global.
- Peningkatan proporsi pekerja di sektor informal
- Masih adanya *mismatch* dalam pasar tenaga kerja Kepri terutama disebabkan pergeseran kebutuhan pasar menuju produk berbasis teknologi tinggi atau rendah karbon yang berimplikasi pada kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan baru.
- Pertumbuhan Angkatan Kerja yang tidak seimbang dengan penyediaan lapangan kerja baru.
- Migrasi pekerja dari luar Kepri meningkatkan persaingan ketat di pasar kerja lokal.

Rasio Gini

0.349

Faktor Penghambat:

- Kualitas sumber daya manusia antardaerah yang kurang merata yang berimplikasi pada ketimpangan pendapatan di beberapa daerah
- Aktivitas ekonomi cenderung terpusat di wilayah tertentu, seperti Kota Batam, Bintan dan Tanjungpinang.
- Realiasi investasi dan pembangunan infrastruktur yang kurang merata yang berimplikasi pada disparitas ekonomi di antara kabupaten/kota.
- Beberapa daerah di Kepri masih menghadapi tantangan dalam akses transportasi dan komunikasi yang berimplikasi pada terhambatnya distribusi barang dan jasa serta akses ke peluang ekonomi.
- Sebagian besar tenaga kerja di Kepri bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil dan rendah.

Rekomendasi

- Penyediaan insentif bagi industri berorientasi ekspor diantaranya melalui pembebasan pajak ekspor untuk produk manufaktur tertentu dan keringanan bea masuk bahan baku yang digunakan untuk barang ekspor. (**Bappeda; Disperindag; Kemenperin; Kemenkeu**)
- Memperkuat kolaborasi antara Pemerintah, DUDI, dan Institusi Pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas kurikulum/materi pelatihan di sekolah vokasi, perluasan kuota program magang, sertifikasi, dan penempatan pasca sekolah. (**Disdik; Disperindag; Disnaker; Kemendikdasmen; Kemenperin; Kemenaker, Kemendiksaintek**)
- Mendorong perluasan pasar ekspor melalui kerja sama perdagangan internasional baru dan mengikuti pameran dagang internasional. (**Disperindag; Kemenperin; BKPM; Kemenlu**)
- Pengembangan SDM berbasis teknologi melalui pendirian pusat pelatihan teknologi dan keterampilan (tech-training centers) di kawasan strategis seperti Batam, Bintan, dan Karimun. (**Disdik; Disperindag; Disnaker; Kemendikdasmen; Kemenperin; Kemenaker, Kemendiksaintek**)
- Mendorong diversifikasi industri di sektor ekonomi lain seperti pariwisata, perikanan, logistik, dan teknologi digital salah satunya melalui penguatan iklim investasi di daerah. (**Bappeda; Disperindag; Dispar; DPMPTSP; Bappenas; Kemenperin; BKPM; BP Batam**)
- Pemberian insentif berupa beasiswa untuk pendidikan vokasi dan pelatihan teknologi tinggi. (**Disdik; Kemendiksaintek**)
- Memperkuat iklim investasi daerah melalui penguatan sistem perizinan yang efisien, penyediaan insetif investasi, pengembangan infrastruktur pendukung terutama energi dan logistik, serta memperkuat kapasitas SDM lokal. (**DPMPTSP; Disperindag; DinasPU; Dishub; Disdik; Disnaker; Disnaker; Kemenperin; Kemenhub; Kemendikdasmen; Kemenaker; BKPM**)
- Penguatan wirausaha melalui program pendampingan dan pelatihan wirausaha bagi pelaku usaha kecil dengan fokus pada digitalisasi dan akses pasar serta mendorong Kolaborasi dengan perbankan dan fintech untuk menyediakan kredit usaha mikro bagi pelaku sektor informal. (**Disdik; Kemendiksaintek**)

Highlight EPD Provinsi Kepulauan Riau

Capaian Kurang Optimal

Indeks Inovasi Provinsi

Faktor Penghambat:

- Kurangnya infrastruktur pendukung, seperti fasilitas penelitian dan pengembangan (R&D), laboratorium, dan pusat inovasi
- Kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat yang mengakibatkan program inovasi tidak berjalan efektif.
- Dukungan alokasi dana yang minim untuk kegiatan penelitian, pengembangan, dan implementasi inovasi yang membatasi ruang gerak dalam menciptakan dan mengadopsi inovasi baru.
- Tingkat kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya inovasi masih rendah, sehingga partisipasi dalam kegiatan inovatif kurang optimal.

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan

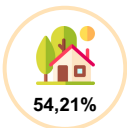

Faktor Penghambat:

- Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di Kepri, khususnya di kota-kota seperti Batam dan Tanjungpinang, menyebabkan keterbatasan lahan untuk perumahan. Hal ini berdampak pada tingginya harga tanah, sehingga hunian layak dan terjangkau sulit diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
- Masih terbatasnya pembangunan hunian vertikal (rumah susun) baru di kawasan perkotaan
- Terbatasnya anggaran terhadap alokasi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) permukiman.
- Masyarakat berpenghasilan rendah masih dihadapi oleh kesulitan dalam mengakses kredit perumahan dari perbankan karena persyaratan yang ketat dan kurangnya jaminan yang memadai.

Rekomendasi

- Mendorong pemberian insentif dan peningkatan kerjasama dalam rangka penyediaan fasilitas penelitian seperti laboratorium dengan pihak swasta terutama dunia usaha dan dunia industri **(Bappeda, Litbang, DMPTSP, Disperindag, BRIN)**
- Kerjasama dalam pengembangan fasilitas penelitian unggulan di institusi pendidikan tinggi di Kepri **(Bappeda, Litbang, Disperindag, PTN, BRIN, Kemendiktisaintek)**
- Menyusun rencana strategis terkait pengembangan riset dan inovasi secara periodik dan bersama dengan kolaborasi pemerintah, DUDI, dan institusi pendidikan **(Bappeda, Litbang, Disperindag, Disdik, PTN, BRIN, Kemendiktisaintek)**
- Melakukan kerjasama dengan NGO, swasta, dan donor dalam rangka pelaksanaan riset dan pengembangan inovasi di daerah, serta menginisiasi untuk membangun entitas pengelola dana abadi untuk riset dan pengembangan inovasi **(Bappeda, Litbang, Disdik, PTN, BRIN, Kemendiktisaintek, Kemenkeu)**
- Mengintegrasikan riset dalam materi pembelajaran di lingkungan sekolah serta menginisiasi pelaksanaan kompetisi riset antarsekolah **(Bappeda, Litbang, Disdik, PTN, BRIN, Kemendiktisaintek)**
- Mendorong percepatan pembangunan hunian berbasis vertikal atau rumah susun di wilayah perkotaan, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan berbasis zonasi **(Bappeda, Dinas Tata Ruang, DPMPTSP, ATR/BPN, KemenPKP)**
- Mendorong insentif finansial dan non finansial bagi pengembangan hunian berbasis vertikal khususnya untuk MBR **(Bappeda, DinasPU, KemenPKP)**
- Memprioritaskan pengembangan PSU pada wilayah atau permukiman kumuh dan tertinggal **(Bappeda, DinasPU, KemenPKP)**
- Kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga keuangan (perbankan) serta OJK dalam mendorong kemudahan pembiayaan bagi hunian MBR atau program subsidi bunga murah bagi hinian MBR serta membentuk Badan Jaminan Kredit Daerah dalam rangka penyaluran pembiayaan untuk hunian MBR. **(Bappeda, DinasPU, KemenPKP)**

11. Daerah Khusus Jakarta

Highlight EPD Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Capaian Optimal

Tingkat Kemiskinan

Faktor Pendukung:

- Belanja fiskal daerah untuk penanggulangan kemiskinan cukup besar lebih dari 20% terhadap APBD
- Pemberian bantuan sosial pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, jaminan sosial, subsidi pangan, subsidi transportasi untuk pengurangan beban pengeluaran
- Perbaikan kualitas permukiman, pembangunan jaringan air minum perpipaan, dan IPAL komunal

Indeks Pembangunan Manusia

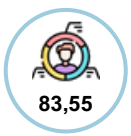

Faktor Pendukung:

- Kualitas layanan pendidikan yang telah menjangkau mayoritas penduduk dan fasilitas pendidikan yang sudah baik
- Kualitas layanan kesehatan mayoritas sudah baik dan kesadaran gaya hidup sehat masyarakat yang cukup baik

Indeks Ketimpangan Gender

Faktor Pendukung:

- Penerbitan SE Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 87/SE/2019 yang salah satu poinnya memandatkan kampanye lingkungan kerja yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan serta tidak diskriminatif
- Peningkatan peran perempuan dalam mengembangkan potensi diri untuk mandiri dan berkarya
- Upaya pencegahan terhadap kekerasan anak dan terjadinya pornografi

Rekomendasi

- Validasi dan intergasi berbagai sumber data kemiskinan untuk meningkatkan akurasi data dan pemberian bantuan sosial tepat sasaran. **(BPS, Kemensos, KemenkoPMK, Dinsos, Diskominfotik, Dinas Dukcapil)**
- Peningkatan penertiban, pembinaan, rehabilitasi dan pemberian pelatihan bagi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) seperti pengamen, pengemis, orang telantar dan masyarakat lainnya yang mengalami disabilitas sosial. **(Kemensos, Dinsos)**
- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar air minum, sanitasi layak, dan rumah layak huni pada kawasan kumuh **(KemenPU, KemenPKP, DPRKP, DSDA, Dinas Bina Marga)**
- Mendorong pemerataan infrastruktur sarana prasarana pendidikan dan kesehatan terutama untuk Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu **(Kemendikdasmen, KemenPKP, Dinkes, Disdik, DCKTRP)**
- Peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan **(Kemendikdasmen, Kemendiksaintek, Kemenkes, Dinkes, Disdik)**
- Mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dengan memberi kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam lembaga-lembaga pemerintahan dan kepemimpinan. (**KemenPPPA, DPPAPP**)
- Meningkatkan kesempatan untuk perempuan mengakses pendidikan tinggi, serta menyediakan beasiswa dan pelatihan profesional khusus bagi perempuan **(Kemendiksaintek, KemenPPPA, Disdik, DPPAPP)**
- Meningkatkan perlindungan hukum dan memberikan dukungan psikologis dan sosial bagi korban kekerasan berbasis gender (KBG). **(KemenPPPA, DPPAPP)**

Highlight EPD Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Capaian Optimal

Indeks Pelayanan Publik

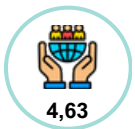

Faktor Pendukung:

- Pelayanan pengurusan surat dan izin berbagai jenis yang diterbitkan kurang dari tujuh hari, kecuali izin bangunan
- Penanganan permasalahan atau keluhan terhadap pelayanan publik melalui fitur JakLapor dan JakRespons yang terintegrasi dengan sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM).
- Peningkatan minat investor yang mempengaruhi meningkatnya realisasi penerimaan pajak hiburan, hotel, dan restoran

Indeks SPBE

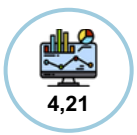

Faktor Pendukung:

- Efisiensi perizinan berbasis elektronik (online) yang mencakup penyederhanaan persyaratan, prosedur, dan birokrasi menjadi lebih ringkas sampai izin diterbitkan.
- Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik

Rasio Elektrifikasi

Faktor Pendukung:

- Peningkatan KWH listrik terjual kategori sosial dan rumah tangga

Rekomendasi

- Peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan lebih lanjut untuk memastikan ketepatan waktu, keamanan, dan prediktabilitas prosedur. **(BKPM, DPMPTSP)**
- Peningkatan sumber daya manusia dan kualitas pelayanan publik yang dapat diakses kapan saja, baik melalui aplikasi daring maupun *call center* yang beroperasi 24 jam. **(BKPM, Kemenaker, DPMPTSP)**
- Memberikan sistem pelaporan yang transparan dan akses informasi tentang prosedur, biaya, dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan. **(DPMPTSP)**
- Meningkatkan sistem pengaduan, umpan balik dan tindak lanjut melalui telepon, aplikasi atau media sosial guna menyediakan saluran yang responsif dan menjamin setiap pengaduan akan mendapatkan perhatian dan penyelesaian yang sesuai. **(BKPM, DPMPTSP)**
- Optimalisasi pelayanan perizinan dan peningkatan transparansi sebagai upaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak agar memacu akselerasi ekonomi. **(BKPM, Bapenda, DPMPTSP)**
- Penguatan jaminan keamanan dan kenyamanan investasi supaya terjalin kerjasama yang nyaman dan optimal. **(BKPM, DPMPTSP)**
- Mendorong peningkatan pasokan listrik Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET), kualitas PLTGU, PLTA, dan pemanfaatan EBT **(KemenESDM, Disnakertransgi)**
- Peningkatan upaya edukasi bijak penggunaan listrik dan pemasangan instalasi listrik yang sesuai prosedur untuk meminimalisir bencana kebakaran akibat arus pendek listrik, terutama di lingkungan padat penduduk dan lingkungan pasar. **(KemenESDM, Dinas Gulkarmat)**

Highlight EPD Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Laju Pertumbuhan Ekonomi 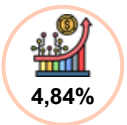 **4,84%**	**Faktor Penghambat:** • Penurunan kinerja ekspor akibat perlambatan ekonomi global • Rendahnya diversifikasi ekonomi karena ketergantungan pada sektor perdagangan, jasa keuangan, dan properti yang rentan terhadap penurunan harga komoditas, fluktuasi pasar finansial global, dan krisis ekonomi. • Kemacetan lalu lintas yang mengurangi efisien waktu dan biaya transportasi sehingga menghambat produktivitas ekonomi	Pengembangan *International Trade and Business Corridor* skala global dan regional. **(Kemendag, DisPPKUKM)** Penyederhanaan regulasi dan pemberian akses informasi mengenai prosedur ekspor dan pasar luar negeri bagi eksportir, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM). **(Kemendag, KemenUMKM, DisPPKUKM)** Pengembangan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) dan kawasan pariwisata sejarah/budaya guna mendukung diversifikasi ekonomi. **(Kemenpar, Kemenekraf, Kemenbud, Disbud, Disparekraf)** Mendorong digitalisasi dan teknologi untuk proses logistik guna meningkatkan transparansi, mempercepat proses pengiriman, dan efisiensi biaya sektor perdagangan dan bisnis. **(Kemendag, Komdigi, DisPPKUKM, Diskominfotik)**
Tingkat Pengangguran Terbuka 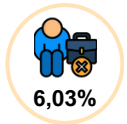 **6,03%**	**Faktor Penghambat:** • Migrasi yang tidak terencana menyebabkan semakin banyak orang yang mencari pekerjaan di Jakarta sehingga tingkat persaingan semakin tinggi • Ketidakmerataan kesempatan kerja akibat perbedaan kualitas pendidikan dan keterampilan antara pekerja sektor formal dan sektor informal	Ekskalasi aktivitas perekonomian kawasan pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD) dan pembangunan ruang kreatif. **(KemenPU, Kemenekraf, Dinas Bina Marga, DisPPKUKM)** Mendorong pelatihan keterampilan berbasis teknologi, seperti pemrograman, analisis data, dan desain grafis untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan daya saing terutama untuk pekerja sektor informal, penduduk usia produktif dan pencari kerja. **(Kemnaker, Komdigi, Diskominfotik, Disnakertransgi)**
Indeks Pembangunan Pemuda 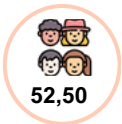 **52,50**	**Faktor Penghambat:** • Banyak pemuda yang belum memiliki wadah atau dukungan untuk mengorganisir kegiatan sosial, budaya, atau politik • Ketidaksesuaian antara keterampilan pemuda dengan permintaan pasar dan terbatasnya jumlah lapangan kerja yang tersedia	Program pelatihan ulang atau *reskilling* untuk mendukung pekerja dalam beradaptasi dengan perubahan kebutuhan industri. **(Kemnaker, Kemenperin, Disnakertransgi, DPPKUKM)** Meningkatkan inkubasi bisnis dan akses pemuda terhadap modal usaha dan pembiayaan agar dapat memulai usaha sendiri guna mendorong inovasi serta penciptaan lapangan kerja baru. **(Kemnaker, KemenUMKM, Disnakertransgi, DPPKUKM)**

Highlight EPD Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Capaian Kurang Optimal

Rasio Gini

Faktor Penghambat:

- Belum terpenuhinya RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan kecukupan prasarana dan sarana umum permukiman
- Peningkatan biaya hidup seperti transportasi, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya yang menyebabkan penghasilan masyarakat berpendapatan rendah habis untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Crime Rate

Faktor Penghambat:

- Kesenjangan sosial cukup tinggi yang mendorong beberapa individu atau kelompok melakukan pencurian atau perampokan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- Belum optimalnya kesadaran akan pentingnya keamanan informasi data (*security awareness*).
- Masih rendahnya keamanan dan pengawasan ruang publik seperti terminal, stasiun kereta, atau taman kota

Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Air

Faktor Penghambat:

- Kualitas dan kapasitas infrastruktur pengolahan limbah masih rendah
- Tingginya pencemaran lingkungan pada kawasan pemukiman padat dan tidak layak huni terutama di sekitar Daerah Aliran Sungai
- Polusi udara yang cukup tinggi akibat pembakaran sampah dan aktivitas industri pabrik.

Rekomendasi

- Peningkatan konektivitas dan memperluas jaringan transportasi publik hijau baik dalam kota dan antarwilayah. **(KemenPU, Kemenhub, DCKTRP, Dishub, Dinas Bina Marga)**
- Mendorong peningkatan subsidi rumah layak huni dan penataan tata ruang pada kawasan kumuh, pinggir sungai dan pinggiran kota. **(KemenPKP, DCKTRP, DPRKP, DSDA)**
- Optimalisasi pembangunan reservoir SPAM regional dan pengelolaan sumber-sumber air lainnya seperti waduk atau bendungan. **(KemenPU, KemenPKP, DSDA)**
- Pengurangan beban pajak masyarakat berpenghasilan rendah dan penyusunan regulasi harga dasar barang kebutuhan pokok (beras, minyak, dan bahan pangan lainnya) memiliki harga yang terjangkau. **(Kemenkeu, Bapenda)**
- Uji Keamanan Berkala melalui audit dan pengujian sistem secara rutin, mengembangkan sistem deteksi dini, serta membetuk tim respons untuk ancaman siber **(Komdigi, Kemenkum, POLRI, Diskominfotik)**
- Penambahan jumlah personel keamanan dan peningkatan kebijakan terhadap kewaspadaan, kerjasama, pengawasan keamanan dan penanganan konflik sosial pada fasilittas publik. (**KemenHAM, POLRI, SatpolPP)**
- Peningkatan fasilitas pengolahan limbah/IPAL dan daur ulang sampah, serta menerapkan larangan pembakaran sampah terbuka. **(KemenLH, DLH, Dinas Gulkarmat, DSDA)**
- Pemantauan, pengawasan, dan penegakan regulasi industri terhadap pabrik-pabrik dan industri untuk memastikan mematuhi standar emisi dan menggunakan teknologi bersih. **(Kemenperin, Kemenkum, KemenLH, DisPPKUKM, DLH**)

12. Jawa Barat

Highlight EPD Provinsi Jawa Barat

Capaian Optimal

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Faktor Pendukung:

- Merupakan salah satu pusat industri pengolahan di Pulau Jawa
- Tingginya aliran investasi yang masuk
- Terdapat berbagai proyek investasi berskala besar
- Promosi investasi dan *business matching* melalui forum WJIS

Kontribusi PDRB Provinsi

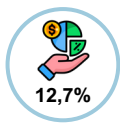

Faktor Pendukung:

- Potensi Daerah:
  - Sektor Industri Pengolahan
  - Sektor Ekonomi Kreatif
  - Sektor Pariwisata

Kontribusi PDB Industri Pengolahan

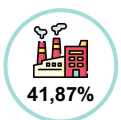

Faktor Pendukung:

- Tingginya aliran modal asing (PMA) yang masuk untuk sektor industri
- Terdapat berbagai proyek investasi berskala besar
- Subsektor Industri Pengolahan:
  - Industri Alat Angkutan
  - Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik
  - Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
  - Industri Makanan dan Minuman

Rekomendasi

- *Link and match* antara industri kecil dan industri besar antar kegiatan dan sektor perekonomian untuk meningkatkan *economic-linkage* di daerah **(Kemenperin, Kadin, Disperindag)**
- Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan berbasis agroindustri dan pariwisata berkelanjutan di wilayah Jabar Selatan **(Kemenpar, Kementan, Bappeda)**
- Peningkatan daya saing dan kualitas SDM melalui penguatan kurikulum sekolah vokasi yang berbasis industri, khususnya di wilayah Bandung dan Cikarang **(Kemnaker, Disdik, Disnakertrans)**
- Optimalisasi promosi investasi untuk pengembangan kawasan industri melalui kerja sama domestik maupun mancanegara **(Kemenperin, BKPM, DPMPTSP)**
- Optimalisasi sektor ekonomi kreatif dan peningkatan daya tarik pariwisata di Jawa Barat melalui strategi promosi berskala masif **(Kemenpar, Kemenekraf, Disparbud)**
- Optimalisasi pengembangan industri di Jawa Barat bagian Utara untuk industri otomotif, pangan, dan elektronika yang berteknologi tinggi **(Kemenperin, Komdigi, Disperindag)**

Highlight EPD Provinsi Jawa Barat

Capaian Optimal

Indeks Daya Saing Daerah

Faktor Pendukung:

- Transformasi digital di berbagai sektor
- Banyaknya perguruan tinggi (PTN/S) yang berkualitas
- Tata kelola pemerintahan yang cukup optimal

Indeks Inovasi Daerah

&

Indeks Pelayanan Publik

Faktor Pendukung:

- Digitalisasi sistem pemerintahan yang berjalan baik
- Program *Jabar Digital Academy*
- Tata kelola pemerintahan yang cukup optimal

Rekomendasi

Meningkatkan kolaborasi dengan pihak universitas untuk menciptakan inovasi berbasis riset dalam berbagai sektor **(Kemendiktisaintek, BRIN, BRIDA)**

Mendorong penerapan *research-based policy* dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di daerah (**BRIN, BRIDA, Bappeda)**

Optimalisasi dalam digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan melalui:

1. Penguatan sistem portal perlayanan terpadu digital melalui peningkatan stabilitas serta kapasitas portal digital
2. Penerapan penggunaan *dashboard* informasi publik untuk mempermudah akses data bagi masyarakat serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
3. Penerapan sistem pengaduan online untuk meningkatkan responsifitas terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat
4. Integrasi data antar dinas/lembaga untuk menjaga akurasi dan mencegah *mismatch* data dalam pelayanan ke masyarakat

(Komdigi, BRIN, Diskominfo)

Penerapan dan penguatan *cybersecurity* untuk menjaga keamanan dan meningkatkan perlindungan data-data yang bersifat sensitif dari ancaman siber **(Komdigi, BRIN, Diskominfo)**

Perumusan regulasi terkait perlindungan data pribadi yang sesuai dengan standar internasional terkini (**Komdigi, Diskominfo)**

Highlight EPD Provinsi Jawa Barat

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Rasio Gini **0,421**	**Faktor Penghambat:** • Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, serta belum optimalnya pusat pertumbuhan, terutama di wilayah Jabar Selatan	Percepatan perbaikan jaringan jalan yang menghubungan wilayah bagian Utara, Tengah, dan Selatan **(KemenPU, Kemenhub, Dinas BMPR)**
		Peningkatan infrastruktur konektivitas dan infrastruktur dasar di wilayah Jabar Selatan **(KemenPU, KemenPKP, Dinas BMPR)**
	• Terdapat gelombang PHK karena adanya perlemahan ekonomi global	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan berbasis agroindustri dan pariwisata berkelanjutan di wilayah Jabar Selatan **(Kemenpar, Kementan, Bappeda)**
	• Belum optimalnya dampak dari pengembangan sarana dan prasarana PKW	Optimalisasi pusat kegiatan wilayah melalui pemberian insentif bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan aktvitas ekonomi **(Kemenperin, Diperindag, Disparbud)**
Tingkat Pengangguran Terbuka **6,91%**	**Faktor Penghambat:** • Tata kelola pendidikan vokasi yang belum optimal	Peningkatan daya saing dan kualitas SDM melalui penguatan kurikulum sekolah vokasi yang berbasis industri, khususnya di wilayah Bandung dan Cikarang **(Kemnaker, Disdik, Disnakertrans)**
	• Masih tingginya *mismatch* antara kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dengan keahlian dari para tenaga kerja	Perluasan kerja sama antara sekolah vokasi dan pelaku industri dalam rangka peningkatan akses penyaluran siswa sekolah untuk magang dan penyaluran angkatan kerja **(Kemnaker, Disdik, Disnakertrans)**
	• Belum optimalnya program terkait dengan ketenagakerjaan (sertifikasi, penyaluran dan penempatan)	
	• Terdapat gelombang PHK karena adanya perlemahan ekonomi global	Pemberdayaan perempuan melalui program berbasis *community development* untuk menciptakan lingkungan kerja ramah perempuan **(Kemnaker, KemenPPPA, DP3AKB)**

Highlight EPD Provinsi Jawa Barat

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Tingkat Kemiskinan 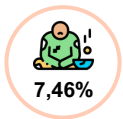 **7,46%**	**Faktor Penghambat:** • Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, serta belum optimalnya pusat pertumbuhan, terutama di wilayah Jabar Selatan	Peningkatan infrastruktur konektivitas dan infrastruktur dasar di wilayah Jabar Selatan **(KemenPU, KemenPKP, Dinas BMPR)**
	• Belum optimalnya pemberdayaan petani serta penyaluran bantuan pertanian yang tidak tepat sasaran	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan berbasis agroindustri dan pariwisata berkelanjutan di wilayah Jabar Selatan **(Kemenpar, Kementan, Bappeda)**
	• Validitas data sasaran program/kegiatan kemiskinan masih kurang akurat	Pemberian sarana dan prasarana produksi berteknologi tinggi untuk para petani yang disertai dengan pembinaannya dalam rangka peningkatan produktivitas **(Kementan, Distanhorti, Disbun)**
	• Biaya pendidikan yang tinggi menyebabkan rendahnya akses masyarakat untuk pendidikan	Penerapan program *central mapper* untuk meningkatkan akurasi penyaluran intervensi yang berkaitan dengan kemiskinan **(Bappenas, Kemenkeu, Kemensos)**
Indeks Pembangunan Manusia 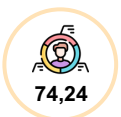 **74,24**	**Faktor Penghambat:** • Belum optimalnya program beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu	Penambahan alokasi beasiswa untuk pendidikan menengah dan tinggi bagi masyarakat kurang mampu **(Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Disdik)**
	• Angka Harapan Lama Sekolah yang masih kurang optimal	Pembangunan sekolah baru untuk daerah yang masih memiliki aksesibilitas ke pelayanan pendidikan yang rendah **(KemenPU, Kemendikdasmen, Disdik)**
	• Biaya pendidikan yang tinggi menyebabkan rendahnya akses masyarakat untuk pendidikan	Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk daerah dengan fasilitas kesehatan yang minim melalui penguatan peran puskesmas pembantu serta pembangunan Rumah Sakit Tipe B dan C **(KemenkoPMK, Kemenkes, Dinkes)**
	• Fasilitas kesehatan yang kurang memadai di daerah	

Highlight EPD Provinsi Jawa Barat

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi

Indeks Pembangunan Pemuda
 	
51,71
	Faktor Penghambat:
	• Tingginya tingkat pengangguran dari kalangan pemuda, yang disebabkan oleh beberapa faktor:
	  ◦ Masih tingginya *mismatch* antara kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dengan keahlian dari para tenaga kerja
	  ◦ Belum optimalnya program terkait dengan ketenagakerjaan (sertifikasi, penyaluran dan penempatan)
	  ◦ Terdapat gelombang PHK karena adanya perlemahan ekonomi global
		Peningkatan daya saing dan kualitas SDM melalui penguatan kurikulum sekolah vokasi yang berbasis industri, khususnya di wilayah Bandung dan Cikarang **(Kemnaker, Disdik, Disnakertrans)**
		
		Perluasan kerja sama antara sekolah vokasi dan pelaku industri dalam rangka peningkatan akses penyaluran siswa sekolah untuk magang dan penyaluran angkatan kerja **(Kemnaker, Disdik, Disnakertrans)**
		
		Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan berbasis agroindustri dan pariwisata berkelanjutan di wilayah Jabar Selatan **(Kemenpar, Kementan, Bappeda)**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup **64,66**	**Faktor Penghambat:** • Aktivitas sektor industri pengolahan yang tinggi • Rendahnya Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara • Belum adanya keterlibatan pihak swasta untuk proyek sektor persampahan melalui KPBU	Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan yang mempertimbangkan alokasi beban pencemar **(KemenPU, KemenLH, Dinas LH)** Penyusunan regulasi terkait penerapan praktik ESG untuk meminimalisir dampak negatif dari aktivitas industri ke lingkungan **(KemenLH, Kemenperin, Dinas LH)** Penguatan regulasi serta pengawasan terhadap pembuangan air limbah domestik dan non domestik **(KemenLH, Kemenperin, Dinas LH)** Penguatan regulasi dan pengendalian pemanfaatan ruang **(KemenPU, Dinas BMPR, Bappeda)** Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik untuk masyarakat dan kawasan industri **(KemenPU, KemenLH, Dinas BMPR)**

13. Jawa Tengah

Highlight EPD Provinsi Jawa Tengah

Capaian Optimal

Tingkat Pengangguran Terbuka

4,39%

Faktor Pendukung:

- Peningkatan tenaga kerja di sektor Industri Pengolahan
- Mayoritas tenaga kerja bekerja di sektor primer antara lain:
  - Sektor Pertanian (Pangan dan Holtikultura)
  - Sektor Perkebunan (Tembakau, Tebu, Kelapa)
  - Sektor Peternakan (Sapi dan Ayam)
- Meningkatnya tenaga kerja terdidik lulusan jenjang SMA ke atas

Kontribusi PDB Industri Pengolahan

34,03%

Faktor Pendukung:

- Potensi Industri Pengolahan Jawa Tengah:
  - Industri Makan dan Minum
  - Industri Pengolahan Tembakau
  - Industri Batubara dan Migas
  - Industri Tekstil dan Produk Tekstil
- Meningkatnya investasi padat karya

Skor Pola Pangan Harapan

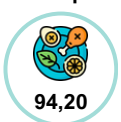

94,20

Faktor Pendukung:

- Produksi beras cukup optimal
- Pengembangan sentra pangan alternatif seperti Mocaf, Porang, Sorgum, dan Ubi Jalar di beberapa kabupaten cukup optimal
- Akses terhadap sumber pangan beragam cukup baik

Rekomendasi

- Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM terutama di sektor pertanian dan industri, salah satunya melalui pembangunan politeknik di sekitar kawasan industri terutama di Kab. Kendal dan Batang sebagai pusat pencetak tenaga kerja di kawasan industri tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri yang tersedia terutama industri makan dan minum, industri tekstil dan produk tekstil, industri pengolahan tembakau, serta industri batubara dan migas sebagai komoditi utama **(Kemenperin, Kemnaker, Disperin, Disnaker, Pengelola KEK Kendal dan KI Batang)**
- Peningkatan infrastruktur konektivitas, air baku, air bersih, irigasi, serta pergudangan sebagai upaya optimalisasi potensi pertanian dan industri **(KemenPU, Dinas PU Bina Marga Cipta Karya)**
- Percepatan intensifikasi pertanian melalui inovasi teknologi pertanian, peningkatan mutu benih dan pupuk, pelatihan petani muda, pengendalian penyakit dan hama, serta fasilitasi pemasaran dan sertifikasi produk pertanian **(Kementan, Distan)**
- Mendorong perluasan akses keuangan dan permodalan serta bantuan alat bagi petani, peternak, dan nelayan **(Kementan, KemenKP, Distan, Disnak, Dinas KP)**
- Memperkuat iklim investasi padat karya melalui kemudahan perizinan, reformasi birokrasi, serta peningkatan transparansi dan anti korupsi sebagai upaya dalam peningkatan investasi padat karya **(BKPM, DPMPTSP)**
- Mendorong perluasan akses pangan dan stabilitas harga komoditas pangan **(Kemenkopangan, Dishanpan)**

Highlight EPD Provinsi Jawa Tengah

Capaian Optimal

Penerapan Standar Pelayanan Minimum

Faktor Pendukung:

- Optimalnya Program Unggulan Daerah dalam Pemenuhan Infrastruktur Dasar, antara lain:
  - *Jateng Gayeng Tuku Lemah Oleh Omah* (Penyediaan Rumah bagi MBR)
  - *Jateng Gayeng Mbangun Omah Bareng* (Bedah Rumah bagi MBR)
  - Bantuan Sambungan listrik gratis bagi MBR
- Tata Kelola Pemerintahan & Pelayanan Publik yang Optimal

Indeks Daya Saing Daerah

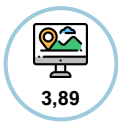

Faktor Pendukung:

- Pembangunan infrastruktur konektivitas:
  - Persentase Mantap Jalan Cukup Optimal
  - Elektrifikasi Kereta Lokal Solo - Yogyakarta Cukup Optimal
  - Rasio Eletrifikasi Cukup Optimal
- Usia Harapan Hidup Cukup Tinggi

Indeks Pelayanan Publik & Indeks SPBE

Faktor Pendukung:

- Transformasi Digital Pelayanan Publik yang Optimal
- Digitalisasi pelayanan publik satu pintu melalui aplikasi SIAP Jateng
- Pembangunan Mall Pelayanan Publik sebagai Sarana Pelayanan Publik Satu Pintu Cukup Optimal

Rekomendasi

- Mendorong *upscaling* program unggulan daerah dalam penerapan standar pelayanan minimum terutama dalam upaya menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM antara lain *Jateng Gayeng Tuku Lemah Oleh Omah* (Penyediaan Rumah bagi MBR) dan *Jateng Gayeng Mbangun Omah Bareng* (Bedah Rumah bagi MBR) **(Disperakim)**
- Mendorong keberlanjutan optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penerapan standar pelayanan minimum secara optimal **(Pemprov Jawa Tengah keseluruhan)**
- Mengoptimalkan pemerataan infrastruktur layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, konektivitas, ketenagalistrikan, dan hunian layak terutama di kawasan kawasan minim layanan dasar dan kantong kemiskinan **(KemenPU, KemenPKP, Kemendikdasmen, Kemenag, Kemenkes, KemenESDM, DinasPUBMCK, Disdikbud, Dinkes, Disperakim)**
- Optimalisasi transformasi digital pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui digitalisasi pelayanan publik, *e-government*, dan transparansi anggaran **(DPMPTSP)**
- Peningkatan kapasitas SDM aparatur daerah dalam transformasi digital pemerintah daerah **(KemenPANRB, Pemprov Jawa Tengah keseluruhan)**
- Mendorong keberlanjutan program digitalisasi pelayanan publik satu pintu melalui aplikasi SIAP Jateng **(DPMPTSP)**
- Memperkuat iklim investasi padat karya melalui kemudahan perizinan, reformasi birokrasi, serta peningkatan transparansi dan anti korupsi sebagai upaya dalam peningkatan investasi padat karya **(BKPM, DPMPTSP)**

Highlight EPD Provinsi Jawa Tengah

Capaian Kurang Optimal

Laju Pertumbuhan Ekonomi

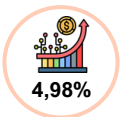

4,98%

Faktor Penghambat:

- Belum optimalnya inovasi teknologi serta regenerasi SDM pertanian
- Isu kebencanaan, perubahan iklim, dan penurunan daya dukung lingkungan
- Tantangan kesiapan SDM industri dan pertumbuhan kawasan industri baru di Jawa Tengah
- Tantangan infrastruktur dan konektivitas daerah terpencil dan minim layanan dasar

Rasio Gini

0,369

Faktor Penghambat:

- Ketimpangan pembangunan wilayah utara, tengah, dan selatan
- Ketidakstabilan Ekonomi Global
- Rendahnya Daya Beli Masyarakat Miskin
- Terbatasnya masyarakat terhadap akses keuangan dan permodalan

Rekomendasi

- Percepatan intensifikasi pertanian melalui inovasi teknologi pertanian, peningkatan mutu benih dan pupuk, pelatihan petani muda, pengendalian penyakit dan hama, serta fasilitasi pemasaran dan sertifikasi produk pertanian **(Kementan, Distan)**
- Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM terutama di sektor pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan, serta industri **(Kemnaker, Disnaker)**
- Mendorong pembangunan berkelanjutan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berorientasi kelestarian lingkungan, ketahanan bencana, dan perubahan iklim terutama di pantai utara **(Bappenas, KemenATR/BPN, KemenPU, KemenLH, Kemenhut, BNPB, Bappeda, DinasPUBMCK, Disperakim, DinasLHK, BPBD)**
- Memperkuat mitigasi kebencanaan pada sektor rentan terutama pertanian, industri, dan pariwisata **(BNPB, Kementan, Kemenperin, Kemenpar, BPBD, Distan, Disperin, Dispar)**
- Memperkuat iklim investasi padat karya melalui kemudahan perizinan, reformasi birokrasi, serta peningkatan transparansi dan anti korupsi sebagai upaya dalam peningkatan investasi padat karya terutama di KI Batang **(BKPM, DPMPTSP)**
- Meningkatkan infrastruktur PSU penunjang kawasan industri seperti energi listrik, air baku, dan air minum **(KemenPU, KemenPKP, Dinas PUBMCK, Disperakim)**
- Pemerataan infrastruktur layanan dasar seperti pendidikan, air baku, konektivitas, ketenagalistrikan, dan hunian layak terutama di kawasan minim layanan dasar dan kantong kemiskinan **(KemenPU, KemenPKP, Kemendikdasmen, Kemenag, KemenESDM, DinasPUBMCK, Disdikbud, Dinkes, Disperakim)**
- Penguatan kebijakan pengendalian inflasi, serta stabilitas harga untuk menekan beban pengeluaran masyarakat **(Distan, Disnak, DinasKP, Bank Indonesia)**
- Mendorong keterjangkauan harga pokok dan distribusi **(Kemenkopangan, Dishanpan)**
- Mendorong kolaborasi dengan Bank Indonesia dan tokoh setempat dalam penyuluhan literasi keuangan **(Pemprov Jawa Tengah secara keseluruhan, BI)**

Highlight EPD Provinsi Jawa Tengah

Capaian Kurang Optimal

Tingkat Kemiskinan

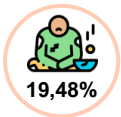

Faktor Penghambat:

- Belum terpadunya data kemiskinan (Regsosek – DTKS – P3KE) sehingga bansos belum tepat sasaran
- Belum tepat sasarannya program bantuan:
  - Bantuan Sosial
  - Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan
  - Bantuan Kesehatan
- Belum optimalnya produktivitas masyarakat serta rendahnya daya beli masyarakat miskin
- Tantangan infrastruktur dan konektivitas daerah terpencil dan minim layanan dasar

Prevalensi *Stunting*

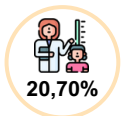

Faktor Penghambat:

- Rendahnya kesadaran gizi dan pola asuh serta bantuan pangan belum tepat sasaran
- Tantangan infrastruktur dan konektivitas daerah terpencil dan minim layanan dasar terutama air bersih dan sanitasi
- Terbatasnya masyarakat miskin terhadap akses pangan bergizi

Rekomendasi

- Mempercepat implementasi intervensi *Central Mapper* dan pemanfaatan data Regsosek sebagai upaya peningkatan integrasi dan akurasi program sosial seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan bantuan pangan **(Kemenkeu, Bappenas)**
- Akselerasi penurunan kemiskinan dan *stunting* terutama di kantong kemiskinan yaitu di Kab. Kebumen, Wonosobo, Brebes, Pemalang, Rembang, dan Banjarnegara **(Bappenas, Kemensos, Kemenkes, KemenkoPMK, BKKBN, Bappeda, Dinsos, Dinkes, TP2AK, *Non State Actor*)**
- Mendorong kolaborasi dengan tokoh setempat dalam penyuluhan gerakan masyarakat hidup sehat, perbaikan pola asuh anak, penyuluhan gizi ibu dan anak, serta penyuluhan terkait pernikahan dini **(BKKBN, Kemenag, KemenPPPA, Kemenkes, Dinkes)**
- Mendorong keberlanjutan kolaborasi multipihak dalam akselerasi penurunan *stunting* dan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan lapangan kerja **(Bappenas, TP2AK, KemenkoPMK, Kemenkes, Kemnaker, BKKBN, Bappeda, Dinsos, Dinkes, Disnaker)**
- Penguatan kapasitas kepala daerah dalam pengendalian penurunan kemiskinan dan *stunting* yang melibatkan kerjasama multipihak **(BKKBN, Pemprov, Pemkab/kot)**
- Pemerataan infrastruktur layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, konektivitas, ketenagalistrikan, dan hunian layak terutama di kawasan minim layanan dasar dan kantong kemiskinan **(KemenPU, KemenPKP, Kemendikdasmen, Kemenag, Kemenkes, DinasPUBMCK, Disdikbud, Dinkes, Disperakim)**
- Mendorong *upscaling* program unggulan daerah dalam upaya pencegahan *stunting* serta pemenuhan layanan dasar antara lain *Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng* (Cegah *stunting* dan kematian ibu-anak), *Jateng Gayeng Tuku Lemah Oleh Omah* (Penyediaan Rumah bagi MBR) dan *Jateng Gayeng Mbangun Omah Bareng* (Bedah Rumah bagi MBR) **(Dinkes, Disperakim)**
- Penguatan ketahanan dan diversifikasi pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pangan lokal dengan inovasi teknologi pertanian **(Kementan, Bapanas, Distan, Dishanpan)**

Highlight EPD Provinsi Jawa Tengah

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Indeks Pembangunan Manusia **73,87**	**Faktor Penghambat:** • Pengeluaran per kapita belum optimal • Rata-rata lama sekolah yang masih rendah • Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi cukup rendah • Tantangan infrastruktur dan konektivitas daerah terpencil dan minim layanan dasar (terlebih adanya aturan zonasi)	Akselerasi penurunan kemiskinan di kantong kemiskinan yaitu di Kab. Kebumen, Wonosobo, Brebes, Pemalang, Rembang **(Kemensos, Dinsos)** Mendorong keterjangkauan harga pokok dan distribusi **(Kemenkopangan, Dishanpan)** Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kapasitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik **(Kemendikdasmen, Kemenag, Disdikbud)** Pemerataan infrastruktur layanan dasar terutama pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, konektivitas, dan hunian layak terutama di kawasan minim layanan dasar dan kantong kemiskinan **(KemenPU, KemenPKP, Kemendikdasmen, Kemenag, Kemenkes, DinasPUBMCK, Disdikbud, Dinkes, Disperakim)**
Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun **8,44 Tahun** **Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi** 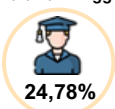 **24,78%**	**Faktor Penghambat:** • Faktor kemiskinan yang masih tinggi • Beasiswa dan bantuan pendidikan belum tepat sasaran • Tingginya biaya pendidikan terutama sekolah swasta, sedangkan sekolah negeri terbatas • Tantangan infrastruktur dan konektivitas daerah terpencil dan minim layanan dasar (terlebih adanya aturan zonasi) • Rendahnya kesadaran pentingnya pendidikan di masyarakat serta *mindset* untuk langsung bekerja setelah lulus sekolah menengah di masyarakat	Mendorong *upscaling* program unggulan daerah dalam upaya pemenuhan wajib belajar 13 tahun yaitu Program Sekolah Tanpa Sekat (*Boarding* dan *Semi-Boarding School*) secara gratis bagi masyarakat miskin Jawa Tengah **(Disdikbud)** Mendorong keberlanjutan kolaborasi multipihak dalam peningkatan kualitas SDM melalui kerjasama dengan *Non State Actor* untuk beasiswa pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi bagi masyarakat berprestasi maupun kurang mampu di Jawa Tengah terutama di Kab. Pemalang dan Banjarnegara **(Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Kemenag, Disdik)** Mendorong kolaborasi dengan tokoh setempat serta instansi sekolah dalam penyuluhan pentingnya jenjang pendidikan kepada masyarakat **(Kemendiktisaintek, Kemenag, Kemendikdasmen, Disdik)**

14. DI Yogyakarta

Highlight EPD Provinsi DI Yogyakarta

Capaian Optimal

Indeks Pembangunan Manusia

Faktor Pendukung:

- Usia harapan hidup cukup optimal
- Rata-rata lama sekolah cukup optimal
- Pusat jasa pendidikan (banyaknya perguruan tinggi level nasional – internasional)
- Tingginya angka partisipasi kasar perguruan tinggi
- Pusat riset dan inovasi

Tingkat Pengangguran Terbuka

Faktor Pendukung:

- Meningkatnya tenaga kerja terdidik didukung potensi daerah sebagai pusat jasa pendidikan, riset, dan inovasi
- Peningkatan tenaga kerja di sektor industri pengolahan
- Mayoritas penduduk bekerja di sektor perdagangan dan pertanian
- Potensi daerah sebagai pusat kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif menyerap cukup banyak tenaga kerja

Rekomendasi

- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyuluhan gerakan masyarakat hidup sehat, peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan infrastruktur serta layanan kesehatan, serta penguatan jaringan pengamanan sosial dan bantuan kesehatan gratis bagi masyarakat **(Kemenkes, Dinkes)**
- Peningkatan kompetensi SDM dosen dan peneliti, infrastruktur perguruan tinggi berskala internasional, layanan melalui *benchmarking,* serta kerjasama dengan institusi dan dunia kerja level global **(Kemediktisaintek, Kemnaker, Institusi Perguruan Tinggi)**
- Memperkuat iklim investasi padat karya baik investasi dalam maupun luar negeri melalui kemudahan perizinan, reformasi birokrasi, serta peningkatan transparansi dan anti korupsi sebagai upaya dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja terdidik **(BKPM, DPMPTSP)**
- Pengembangan jaringan *fixed broadband* dan *mobile broadband* untuk mendukung kegiatan pendidikan, riset dan inovasi, serta kepariwisataan **(Kemenkomdigi)**
- Mendorong perbaikan ekosistem riset dan inovasi Indonesia melalui optimalisasi pembelajaran internasional dan masukan pemangku kepentingan serta pemberian apresiasi berupa *award* bagi para peneliti unggul di Indonesia **(Kemendiktisaintek, BRIN)**
- Percepatan intensifikasi pertanian melalui inovasi teknologi pertanian, peningkatan mutu benih dan pupuk, pelatihan petani muda, pengendalian penyakit dan hama, serta fasilitasi pemasaran dan sertifikasi produk pertanian **(Kementan, Distan)**
- Peningkatan infrastruktur konektivitas, air baku, air bersih, irigasi, serta pergudangan sebagai upaya optimalisasi potensi pertanian, perdagangan, dan industri **(KemenPU, Kementan, Kemendag, Kemenperin, DinasPUPESDM, Distan, Disperindag)**
- Mendorong preservasi budaya sebagai upaya pelestarian kekayaan budaya yang beragam dalam memperkuat aspek sosial dan ekonomi **(Kemenbud, Disdikbud)**

Highlight EPD Provinsi DI Yogyakarta

Capaian Optimal

Indeks Pelayanan Publik

4,59

Faktor Pendukung:

- Kualitas SDM Terdidik Melimpah
- Pusat Riset dan Inovasi
- Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Optimal

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

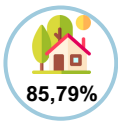

85,79%

Faktor Pendukung:

- Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Optimal
- Optimalnya program unggulan daerah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Terintegrasi (RTLH) dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Skor Pola Pangan Harapan

96,30

Faktor Pendukung:

- Akses terhadap sumber pangan beragam cukup baik dampak dari aktivitas ekonomi seperti pariwisata dan pendidikan
- Tingkat pendidikan masyarakat yang sudah baik berkorelasi positif terhadap selektivitas dalam pemilihan konsumsi pangan
- Pengembangan sentra pangan alternatif seperti Mocaf, Porang, Sorgum, dan Ubi Jalar di beberapa kabupaten cukup optimal

Rekomendasi

- Mendorong optimalisasi manajemen talenta serta pengembangan kompetensi kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah **(Pemprov DI Yogyakarta keseluruhan)**
- Mendorong penerapan *research based policy* dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan daerah **(Pemprov DI Yogyakarta keseluruhan)**
- Mendorong keberlanjutan optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penerapan standar pelayanan minimum secara optimal melalui optimalisasi transformasi digital pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui digitalisasi pelayanan publik, *e-government*, dan transparansi anggaran **(Pemprov DI Yogyakarta keseluruhan)**
- Mendorong *upscaling* program unggulan daerah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yaitu Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Terintegrasi (RTLH) **(DinasPUPESDM, Paniradya Kaistimewan)**
- Mendorong perluasan akses pangan dan stabilitas harga komoditas pangan **(Kemenkopangan, Distanhanpan)**
- Peningkatan infrastruktur konektivitas, air baku, air bersih, irigasi, serta pergudangan sebagai upaya optimalisasi potensi pertanian dan industri **(KemenPU, DinasPUPESDM)**

Highlight EPD Provinsi DI Yogyakarta

Capaian Kurang Optimal

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Faktor Penghambat:

- Belum optimalnya hilirisasi produk unggulan
- Belum optimalnya inovasi teknologi serta regenerasi SDM pertanian
- Belum pulihnya kunjungan wisatawan mancanegara pasca pandemi
- Minimnya *research-based policy*
- Ketimpangan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan
- Tantangan infrastruktur dan konektivitas daerah terpencil dan minim layanan dasar
- Isu kebencanaan, perubahan iklim, dan penurunan daya dukung lingkungan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Faktor Penghambat:

- Rendahnya Indeks Kualitas Air
- Isu pengelolaan persampahan perkotaan dan penurunan daya dukung lingkungan akibat dampak aktivitas ekonomi terutama jasa pendidikan dan kepariwisataan
- Isu turunnya permukaan air tanah akibat penggunaan berlebih dan kurang ketatnya pengendalian penggunaan air tanah di perkotaan tercermin dari rendahnya persentase sambungan air minum pipa perkotaan

Rekomendasi

- Percepatan intensifikasi pertanian melalui inovasi teknologi pertanian, peningkatan mutu benih dan pupuk, pelatihan petani muda, pengendalian penyakit dan hama, serta fasilitasi pemasaran dan sertifikasi produk pertanian **(Kementan, Distan)**
- Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM terutama di sektor pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan, serta industri **(Kemnaker, Disnaker)**
- Mendorong terobosan di sektor pariwisata melalui kolaborasi multipihak melalui pariwisata yang menitikberatkan pada interaksi budaya dan komunitas lokal, pemanfaatan sumber daya lokal, serta optimalisasi promosi kepariwisataan melalui media digital dan peningkatan kesiapan ekosistem pendukung **(Kemenpar, Dispar, Disbud, Paniradya Kaistimewan)**
- Mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dengan institusi pendidikan dan lembaga riset dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berlandaskan riset **(Pemprov DI Yogyakarta, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset)**
- Pemerataan infrastruktur layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, konektivitas, ketenagalistrikan, dan hunian layak terutama di kawasan minim layanan dasar dan kantong kemiskinan **(KemenPU, KemenPKP, Kemendikdasmen, Kemenag, Kemenkes, KemenESDM, DinasPUPESDM, Disdikpora, Dinkes)**
- Mendorong pembangunan berkelanjutan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berorientasi kelestarian lingkungan, ketahanan bencana, dan perubahan iklim **(KemenATR/BPN, KemenPU, KemenLH, Kemenhut, BNPB, DinasPUPESDM, DinasLHK, BPBD)**
- Mendorong inovasi pengelolaan sampah melalui penguatan 3R dan bank sampah, kolaborasi pemerintah-swasta-masyarakat dalam peningkatan edukasi *zero waste* dan peduli lingkungan, serta penggunaan sampah sebagai energi alternatif didukung oleh riset dan inovasi **(Dinas LHK, Institusi Perguruan Tinggi, *Non State Actor*)**
- Penguatan pengendalian perizinan penggunaan air tanah serta perluasan akses sambungan air minum pipa perkotaan **(Dinas LH, Dinas PUPESDM)**

Highlight EPD Provinsi DI Yogyakarta

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Tingkat Kemiskinan **10,83%**	**Faktor Penghambat:** • Belum terpadunya data kemiskinan (Regsosek – DTKS – P3KE)	Mempercepat implementasi intervensi *Central Mapper* dan pemanfaatan data Regsosek sebagai upaya peningkatan integrasi dan akurasi program sosial seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM **(Kemenkeu, Bappenas)**

	• Belum tepat sasarannya program bantuan:
	  ○ Bantuan sosial
	  ○ Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan
	  ○ Bantuan kesehatan
		Mendorong keberlanjutan kolaborasi multipihak dalam akselerasi penurunan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat terutama di kantong kemiskinan yaitu di Kab. Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo **(Kemensos, Kemenkop, KemenUMKM, Kemnaker, Dinsos, DiskopUMKM, Disnakertrans, *Non State Actor*)**

	• Rendahnya daya beli masyarakat miskin	
	• Faktor budaya *nrimo ing pandum* di kalangan masyarakat perdesaan yang disalahartikan sebagai sikap fatalistik	Mendorong kolaborasi dengan tokoh setempat dalam penyuluhan pemberdayaan masyarakat terkait *mindset* dalam peningkatan produktivitas terutama kepada pemuda dan perempuan **(Kemenkoekon, Kemenkop, KemenUMKM, Kemenag, KemenPPPA, DiskopUMKM, Disdikpora, DinasP3AP2)**
	• Tantangan infrastruktur dan konektivitas daerah terpencil, kepulauan, dan 3T	
	• Ketimpangan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan	Penguatan kebijakan pengendalian inflasi stabilitas harga bahan pokok untuk menekan beban pengeluaran masyarakat **(Distan, Disperindag, Bank Indonesia)**
Rasio Gini **0,435**	**Faktor Penghambat:** • Masih tingginya kemiskinan terutama di wilayah perdesaan	Pemerataan infrastruktur layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, konektivitas, ketenagalistrikan, dan hunian layak terutama di kawasan minim layanan dasar dan kantong kemiskinan **(KemenPU, KemenPKP, Kemendikdasmen, Kemenag, Kemenkes, KemenESDM, DinasPUPESDM, Disdikpora, Dinkes)**
	• Rendahnya daya beli masyarakat miskin	
	• Faktor budaya *nrimo ing pandum* di kalangan masyarakat perdesaan yang disalahartikan sebagai sikap fatalistik	Mendorong *upscaling* program unggulan daerah dalam upaya pemenuhan layanan dasar dan penurunan ketimpangan wilayah seperti Program Rehabilitasi RTLH Terpadu lintas OPD **(Pemprov DI Yogyakarta secara keseluruhan)**
	• Ketimpangan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan	
Crime Rate **285** per 100.000 penduduk	**Faktor Penghambat:** • Dampak dari aktivitas pendidikan (banyaknya remaja) menyebabkan tingginya kenakalan remaja dan maraknya *gangster/klitih*	Penguatan penyuluhan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum baik dari pihak kepolisian, sistem keamanan lingkungan, dan seluruh elemen masyarakat dalam upaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat. **(POLRI, Seluruh Elemen Masyarakat)**
	• Karakteristik perkotaan yang minim pencahayaan, kondisi jalan yang sepi, serta minimnya aktivitas terutama di malam hari berdampak pada minimnya pengawasan sosial	Mendorong upaya preventif dan peningkatan pengawasan pada titik-titik rawan kejahatan melalui redesain tata ruang perkotaan, penambahan penerangan jalan di titik gelap, pemerataan aktivitas di malam hari, serta optimalisasi pengawasan dari pihak kepolisian dan sistem keamanan lingkungan **(Pemprov, Dispertaru, Paniradya Kaistimewan, POLRI, Seluruh Elemen Masyarakat)**

15. Jawa Timur

Highlight EPD Provinsi Jawa Timur

Capaian Optimal

Tingkat Pengangguran Terbuka

Faktor Pendukung:

- Peningkatan jumlah pekerja di sektor utama daerah yang meliputi sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang semakin membaik merefleksikan tingkat kesempatan kerja yang semakin besar
- Perbaikan TPT di daerah perdesaan dan perkotaan
- Perbaikan TPT untuk lulusan pendidikan menengah dan dasar

Penyediaan Lapangan Kerja per Tahun

Faktor Pendukung:

- Peningkatan jumlah pekerja di sektor utama daerah yang meliputi sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan
- Peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN yang berimplikasi pada penyediaan lapangan kerja per tahun

Kontribusi PDB Industri Pengolahan

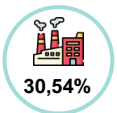

Faktor Pendukung:

- Peningkatan angka ekspor LN migas (minyak mentah) dan non migas (komoditas logam mulia, perhiasan, tembaga, produk kimia, serta bahan Kimia organik)
- Realiasasi investasi yang cukup signfiikan terutama untuk investasi di sektor industri pengolahan
- Jumlah industri pengolahan eksisting yang besar terutama untuk industri makanan dan minuman, industri pengolahan tembakau, dan industri kertas

Rekomendasi

- Mendorong investasi lokal dan asing untuk membuka peluang kerja baru di sektor utama khususnya melalui strategi pemberian insentif fiskal dan non fiskal kepada perusahaan yang menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal yang difokuskan di Kab. Malang, Lumajang, Bojonegoro, Banyuwangi (Pertanian); Kota Surabaya, Kota Malang, Gresik (Perdagangan); Sidoarjo, Gresik, Pasuruan (Industri). **(Bappeda, Disnaker, Disperindag, Distan | Bappenas, Kemenperin, Kemnaker, Kemenkeu, Kementan, BKPM)**
- Pemberdayaan ekonomi bagi kelompok petani, peternak, dan nelayan melalui pelatihan penerapan teknologi produk olahan yang difokuskan di Kab. Bojonegoro, Kab. Malang, Kab. Gresik. **(Disnaker, Disperindag, Distan, Dinas KP, Litbangda | Kemenperin, Kemenaker, Kementan, KemenKP, BKPM, BRIN (BPPT))**
- Mendorong pengembangan usaha berbasis agribisnis melalui peningkatan akses petani terhadap teknologi pertanian modern dan pasar hasil tani yang difokuskan di Kab. Bojonegoro, Kab. Malang, Kab. Jember, Kab. Banyuwangi. **(Distan, Diskominfo, Disperindag, Litbangda | Kementan, Kemendag, Kemenkomdigi)**
- Memperluas kemitraan institusi pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta meningkatkan fasilitasi kewirausahaan dan pekerja mandiri khususnya bagi lulusan SMA/SMK yang difokuskan di Kota Surabaya, Sidoarjo, Malang, Banyuwangi. **(Disdik, Disnaker, Disperindag | Kemendikdasmen, Kemendag)**
- Meningkatkan jangkauan promosi, kualitas dan cakupan potensi investasi dalam kegiatan *East Java Investment Forum* melalui kolaborasi dengan organisasi internasional dan lembaga keuangan global, memperkenalkan lebih banyak sektor unggulan Jawa Timur yang berpotensi menarik perhatian investor asing dan domestik, serta pemberian insentif pajak yang lebih menarik bagi investor yang terlibat dalam forum tersebut yang difokuskan di seluruh Provinsi Jawa Timur **(Bappeda, DPMPTSP, Disperindag, OPD Sektor Unggulan terkait | Bappenas, BKPM, Kemenkoekon, Kemenkeu, Bank Indonesia)**
- Menyediakan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam penerapan teknologi dan mesin produksi di sektor yang berkaitan dengan ekspor yang difokuskan di Kota Surabaya, Kab. Gresik, Pasuruan, Sidoarjo, Probolinggo. **(Bappeda, Disperindag, DPMPTSP, Litbangda | Bappenas, BKPM, Kemenperin, Kemendag, Kemenkeu, BRIN, Bank Indonesia)**
- Meningkatkan kapasitas dan daya saing pelabuhan serta transportasi logistik untuk mendukung pengiriman produk ekspor dengan biaya yang kompetitif yang difokuskan di Kota Surabaya (Tanjung Perak; Teluk Lamong), Gresik (JIIPE), Probolinggo (Pelabuhan Tanjung Tembaga) **(Bappeda, Dishub, Dinas PU, Disperindag, DPMPTSP | Bappenas, Kemenhub, Kemen PU, BUMN (PT Pelindo))**.
- Mendorong industri makanan dan minuman, tembakau, dan kertas untuk mengembangkan produk turunan yang lebih bernilai tambah, seperti produk olahan baru atau pengemasan yang lebih ramah lingkungan yang difokuskan di Kota Surabaya, Gresik, Pasuruan, Kediri. **(Bappeda, Disperindag, DPMPTSP | Bappenas, Kemenperin, BKPM)**
- Mendorong peningkatan kapasitas IKM dalam sektor pengolahan non-migas untuk memperbesar peluang pasar ekspor yang difokuskan di Kota Surabaya, Gresik, Pasuruan, Kediri. **(Bappeda, Disperindag, Disnaker | Bappenas, Kemenperin, Kemenkop UKM, Kemenekraf)**

Highlight EPD Provinsi Jawa Timur

Capaian Optimal

Rasio Gini

Faktor Pendukung:

- Perkembangan positif berbagai sektor dalam mendukung penciptaan lapangan kerja baru.
- Dana Desa dan pengembangan infrastruktur di wilayah perdesaan seperti jalan, listrik, dan sarana komunikasi yang turut mendukung pemerataan pendapatan dan menurunkan ketimpangan antar wilayah.
- Peningkatan daya beli petani yang direfleksikan dari peningkatan NTP Provinsi Jawa Timur
- Dukungan Bantuan Sosial dalam menjaga daya beli masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar
- Pemerataan dan peningkatan infrastruktur layanan dasar dan konektivitas antardaerah
- Dukungan program pemberdayaan ekonomi lokal melalui peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM.

Tingkat Kemiskinan

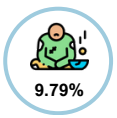

Faktor Pendukung:

- Peningkatan jumlah pekerja di sektor utama daerah yang meliputi sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan
- Dukungan program peningkatan sektor pertanian melalui subsidi dan bantuan alat pertanian.
- Peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN yang berimplikasi pada penyediaan lapangan kerja per tahun
- Peningkatan akses atau cakupan penerima terhadap Bantuan Sosial yang membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan kesehatan terutama di daerah perdesaan
- Peningkatan infrastruktur layanan dasar (pendidikan & kesehatan) dan konektivitas seperti jalan, energi, dan telekomunikasi terutama di daerah perdesaan mampu meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas baik masyarakat maupun barang/jasa
- Dukungan program pemberdayaan UMKM yang difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi dan akses pasar.

Rekomendasi

- Mendorong investasi lokal dan asing untuk membuka peluang kerja baru di sektor utama khususnya melalui strategi pemberian insentif fiskal dan non fiskal kepada perusahaan yang menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal yang difokuskan di Kab. Malang, Lumajang, Bojonegoro, Banyuwangi (Pertanian); Kota Surabaya, Kota Malang, Gresik (Perdagangan); Sidoarjo, Gresik, Pasuruan (Industri). **(Disnaker, Disperindag, Kemenperin, Kemnaker, Kemenkeu, BKPM)**
- Pemberdayaan ekonomi bagi kelompok petani, peternak, dan nelayan melalui pelatihan penerapan teknologi produk olahan yang difokuskan di Kab. Bojonegoro, Kab. Malang, Kab. Gresik. **(Disnaker, Disperindag, Distan, Dinas KP, Litbangda, Kemenperin, Kemenaker, Kementan, KemenKP, BKPM, BRIN (BPPT))**
- Mendorong pengembangan usaha berbasis agribisnis melalui peningkatan akses petani terhadap teknologi pertanian modern dan pasar hasil tani yang difokuskan di Kab. Bojonegoro, Kab. Malang, Kab. Jember, Kab. Banyuwangi. **(Distan, Diskominfo, Disperindag, Litbangda, Kementan, Kemendag, Kemenkomdigi)**
- Revitalisasi kawasan kumuh dan pengembangan PSU melalui mekanisme *Community Development Plan*, serta mengoptimalkan kerjasama dengan non state actor dalam pembiayaannya yang difokuskan di Kota Surabaya, Malang, Sidoarjo, Kediri, Gresik. (**Bappeda, Dinas PU, Bappenas, KemenPU, KemenPKP**)
- Peningkatan tata kelola Dana Desa melalui penguatan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan dari Dana Desa **(Bappeda, Dinas PMD, Kemendes PDT, Kemendagri)**
- Meningkatkan jangkauan promosi, kualitas, dan cakupan potensi investasi dalam kegiatan *East Java Investment Forum* melalui kolaborasi dengan organisasi internasional dan lembaga keuangan global **(Bappeda, DPMPTSP, Disperindag, Bappenas, BKPM, Kemenkoekon, Kemenkeu, Bank Indonesia)**
- Menyediakan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam penerapan teknologi dan mesin produksi di sektor yang berkaitan dengan ekspor yang difokuskan di Kota Surabaya, Kab. Gresik, Pasuruan, Sidoarjo, Probolinggo. **(DPMPTSP, BKPM, Kemenperin, Kemenkeu)**
- Meningkatkan kapasitas dan daya saing pelabuhan serta transportasi logistik untuk mendukung pengiriman produk ekspor dengan biaya yang kompetitif yang difokuskan di Kota Surabaya (Tanjung Perak; Teluk Lamong), Gresik (JIIPE), Probolinggo (Pelabuhan Tanjung Tembaga) **(Bappeda, Dishub, Dinas PU, Disperindag, DPMPTSP, Bappenas, Kemenhub, Kemen PU, BUMN (PT Pelindo)).**
- Mempercepat implementasi intervensi *Central Mapper* dan pemanfaatan data Regsosek sebagai upaya peningkatan integrasi dan akurasi program kemiskinan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. **(Bappeda, Dinsos, Bappenas, Kemenkeu, Kemensos, Kemendagri, BPS)**
- Mendorong pemerataan jumlah dan kualitas sekolah dan tenaga pendidik khususnya di wilayah perdesaan atau wilayah terpencil yang difokuskan di Kab. Bondowoso, Situbondo, Sampang, Pamekasan, Pacitan, Trenggalek, Jember, dan Lumajang. **(Bappeda, Disdik, Dinas PU, Bappenas, Kemendikdasmen, Kemendes, KemenPU)**
- Mendorong penggunaan teknologi digital dalam sektor ekonomi seperti pertanian, perdagangan, dan UMKM dalam rangka memfasilitasi pemasaran produk-produk lokal dan memperluas akses pasar yang difokuskan di Provinsi Jawa Timur. **(Bappeda, Disperindag, Diskop UKM, Distan, Diskominfo Pemerintah Kab/Kota terkait | Komenkomigi, Perusahaan *Market Place*)**

Highlight EPD Provinsi Jawa Timur

Capaian Optimal

Persentase Kondisi Mantap Jalan

Faktor Pendukung:

- Dukungan jaringan jalan tol Trans Jawa dan jalan strategis daerah
- Pengawasan dan perawatan jalan oleh Pemerintah Daerah secara rutin
- Responsivitas terhadap pengaduan layanan terbuka oleh masyarakat terkait kondisi jalan daerah melalui Program CETTAR

Kontribusi PDRB Provinsi

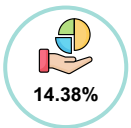

Faktor Pendukung:

- Aktivitas perekonomian yang besar (kapasitas sektoral dan jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur)
- Kontribusi UMKM yang cukup besar dalam mendukung aktivitas perdagangan
- Jumlah industri pengolahan eksisting yang besar terutama untuk industri makanan dan minuman, industri pengolahan tembakau, dan industri kertas
- Jumlah pelaku usaha pertanian yang cukup besar

Indeks Daya Saing Daerah

Faktor Pendukung:

- Potensi pasar daerah yang cukup besar
- Kapasitas institusi di Jawa Timur yang sudah cukup kuat
- Dinamisme bisnis yang cukup baik terutama dari sisi kemudahan untuk memulai usaha/bisnis dan keluar dari pasar

Skor Pola Pangan Harapan

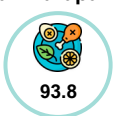

Faktor Pendukung:

- *Supply* sumber pangan beragam yang mencukupi
- Potensi sumber pangan alternatif lokal yang cukup besar
- Harga terhadap sumber pangan beragam yang terkendali

Rekomendasi

- Mendorong optimalisasi pemanfaatan infrastruktur strategis melalui dukungan daerah seperti prasarana dan regulasi pendukung dalam rangka mengintegrasikan antara infrastruktur nasional dan daerah yang difokuskan di Kota Surabaya, Gresik, Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto, Malang. **(Bappeda, DisPU, Dishub, Disperindag, DPMPTSP | Bappenas, KemenPU, Kemenhub, Kemenperin, BKPM, BPJT, Kemenkeu)**
- Mendorong percepatan realisasi lanjutan pengembangan infrastruktur Jalan Tol Trans Jawa di wilayah Jawa Timur dalam rangka mengurangi beban jalan eksisting dan peningkatan konektivitas wilayah yang difokuskan di Kota Surabaya, Gresik, Kediri, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi. **(Bappeda, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Pemerintah Kab/Kota terkait | Bappenas, Kemen PU, Kemenhub, BPJT, Kemenkeu)**
- Meningkatkan pengawasan dan pemiliharaan terhadap infrastruktur jalan eksisting diantaranya melalui penguatan pengawasan beban kendaraan, rambu lalu lintas, regulasi khusus angkutan barang komoditas besar dan logistik serta preservasi dan peningkatan kapasitas mutu jalan yang difokuskan di wilayah Provinsi Jawa Timur. **(Bappeda, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Pemerintah Kab/Kota terkait | Bappenas, KemenPU, Kemenhub, Kemenkeu)**
- Memperluas penggunaan aplikasi atau platform digital terkait pengaduan kondisi jalan serta meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penanganannya yang difokuskan di wilayah Provinsi Jawa Timur. **(Bappeda, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Diskominfo Pemerintah Kab/Kota terkait| KemenPU, Kemenhub, BPJT, Komenkomdigi)**
- Mendorong penggunaan teknologi digital dalam sektor ekonomi seperti pertanian, perdagangan, dan UMKM dalam rangka memfasilitasi pemasaran produk-produk lokal dan memperluas akses pasar yang difokuskan di Provinsi Jawa Timur. **(Bappeda, Disperindag, Diskop UKM, Distan, Diskominfo Pemerintah Kab/Kota terkait | Komenkomigi, Perusahaan *Market Place*)**
- Mendorong industri makanan dan minuman, tembakau, dan kertas untuk mengembangkan produk turunan yang lebih bernilai tambah, seperti produk olahan baru atau pengemasan yang lebih ramah lingkungan yang difokuskan di Kota Surabaya, Gresik, Pasuruan, Kediri. **(Bappeda, Disperindag, DPMPTSP | Bappenas, Kemenperin, BKPM)**
- Mendorong pengembangan usaha berbasis agribisnis melalui peningkatan akses petani terhadap teknologi pertanian modern dan pasar hasil tani yang difokuskan di Kab. Bojonegoro, Kab. Malang, Kab. Jember, Kab. Banyuwangi. **(Distan, Diskominfo, Disperindag, Litbangda | Kementan, Kemendag, Kemenkomdigi)**
- Peningkatan akses pasar melalui peningkatan infrastruktur dan kemudahan berbisnis yang difokuskan di Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, Kediri, Pasuruan, Kab. Banyuwangi. **(Bappeda, DPMPTSP, Disperindag, Dinas PU, Diskominfo | Bappenas, BKPM, Kemendag, Kemenperin, Bank Indonesia)**
- Peningkatan sinergitas antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pihak swasta dalam implementasi kebijakan berbasis data **(Pemprov Jawa Timur; Pemda Kab/Kota)**
- Mendorong pengembangan usaha pengolahan pangan lokal dan industri kecil menengah (IKM) untuk mengolah produk pertanian lokal menjadi produk pangan yang bernilai tambah yang difokuskan di Kab. Malang, Probolinggo, Banyuwangi, Jember. **(Distan, Dishanpan, Disperindag | Kementan, Kemendag)**
- Pengembangan pusat distribusi pangan dengan fasilitas yang efisien untuk menekan biaya distribusi dan mempercepat perputaran produk pangan di pasar yang difokuskan di Kab. Malang, Probolinggo, Banyuwangi, Jember. **(Bappeda, Distan, Dinas Ketahanan Pangan, Disperindag | Kementan, Kemendag)**

Highlight EPD Provinsi Jawa Timur

Capaian Kurang Optimal

Laju Pertumbuhan Ekonomi

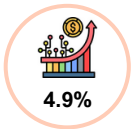

4.9%

Faktor Penghambat:

- Kinerja perdagangan dalam negeri menurun (konsumsi daerah mitra dagang utama Jawa Timur menurun)
- Gangguan pada rantai pasokan global yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku, peningkatan biaya produksi, dan ketidakpastian pasar internasional, hal ini tidak terlepas dari faktor tingginya ketergantungan terhadap impor bahan baku menopang kebutuhan produksi sektor industri pengolahan
- Fluktuasi harga komoditas di pasar global, serta ketegangan perdagangan internasional, telah menyebabkan penurunan pendapatan ekspor.
- Proyek strategis pemerintah yang telah masuk tahap finalisasi atau penyelesaian.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

69.59

Faktor Pendukung:

- Penurunan kualitas udara akibat faktor urbanisasi dan aktivitas industri yang turut meningkatkan emisi gas rumah kaca dan pencemaran udara, sehingga memengaruhi kualitas lingkungan di wilayah perkotaan seperti Surabaya dan sekitarnya
- Hilangnya tutupan lahan akibat deforestasi dan alih fungsi lahan yang cukup signifikan.
- Degradasi kualitas lahan akibat penurunan kesuburan tanah akibat penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan
- Aktivitas pertambangan yang tidak terkendali di beberapa wilayah menyebabkan kerusakan lingkungan dan berkontribusi pada degradasi lahan serta pencemaran air.

Rekomendasi

- Mengakselerasi realisasi investasi industri yang berfokus pada sektor dengan orientasi ekspor di wilayah prioritas Gerbangkertosusila sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui dukungan insentif fiskal dan non fiskal yang difokuskan di Kota Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan. **(Bappeda, Disperindag, DPMPTSP | Bappenas, Kemenkoekon, BKPM, Kemenperin)**
- Mendorong percepatan realisasi investasi dan kemudahan akses pembiayaan dalam pengembangan industri bahan baku serta peningkatan kapasitas produksi lokal untuk mendukung rantai pasok industri besar yang difokuskan di Kota Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo. **(Bappeda, Disperindag, DPMPTSP | Bappenas, Kemenkoekon, BKPM, Kemenperin)**
- Mendorong dan mengembangkan sektor-sektor baru yang berpotensi untuk diekspor, seperti produk-produk kreatif (handicraft, desain, dll.) dan produk berbasis teknologi yang lebih tahan terhadap fluktuasi pasar komoditas global. **(Bappeda, Disperindag, DPMPTSP | Bappenas, Kemenperin, BKPM)**
- Mendorong optimalisasi pemanfaatan infrastruktur strategis melalui dukungan daerah seperti prasarana dan regulasi pendukung dalam rangka mengintegrasikan antara infrastruktur nasional dan daerah yang difokuskan di Kota Surabaya, Gresik, Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto, Malang. **(Bappeda, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Disperindag, DPMPTSP | Bappenas, Kemen PU, Kemenhub, Kemenperin, BKPM, BPJT, Kemenkeu)**
- Pemberian insentif fiskal dan non fiskal khususnya untuk pelaku usaha terutama untuk perusahaan migas dan industri pengolahan yang telah menerapkan prinsip ESG yang dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. **(Bappeda, Dinas LH, Dinas ESDM, Disperindag, DPMPTSP, KADIN | Bappenas, KemenLH, KemenESDM, Kemenkeu, BPKPM)**
- Mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dalam rangka mengurangi eksplorasi dan pemanfaatan pembangkit listrik bertenaga fosil (batubara) yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Timur. **(Bappeda, Dinas LH, Dinas ESDM | Bappenas, KemenLH, KemenESDM, Kemenhut, KemenKP)**
- Penguatan pengawasan terhadap area konservasi hutan dan perairan sebagai upaya perlindungan kawasan terutama TN Bromo Semeru yang difokuskan di Kab. Malang, Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, Jember, Banyuwangi. **(Bappeda, Dinas LH, Dinas ESDM | Bappenas, Kemen LH, Kemen ESDM, Kemenhut, KemenKP)**
- program reforestasi dan *agroforestry* (pengelolaan hutan bersama pertanian) di daerah yang terdegradasi serta rogram restorasi ekosistem yang fokus pada rehabilitasi lahan kritis, seperti melalui penanaman pohon dan peningkatan kualitas tanah. **(Bappeda, Dinas LH | Bappenas, Kemen LH, Kementan)**
- Mendorong penerapan praktik pertanian berkelanjutan melalui promosi dan subsidi pertanian organik dan pelatihan intensif tentang praktik pertanian berkelanjutan**(Bappeda, Dinas LH, Distan | Bappenas, Kemen LH, Kementan)**
- Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan terutama yang tidak berizin serta mendorong penerapan ESG dalam aktivitas pertambangan atau ekstraktif lainnya. **(Bappeda, Dinas LH, Dinas ESDM | Bappenas, Kemen LH; KemenESDM; Polri)**

Highlight EPD Provinsi Jawa Timur

Capaian Kurang Optimal

Indeks Pembangunan Manusia

75.35

Faktor Pendukung:

- Belum meratanya jumlah dan kualitas dari fasilitas layanan kesehatan rujukan (RS tipe B atau A) di setiap wilayah
- Ketimpangan dalam akses layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur antara daerah maju dan tertinggal (seperti di kawasan Madura dan Tapal Kuda) menghambat peningkatan IPM secara merata.
- Belum meratanya pendapatan masyarakat, terutama di sektor informal dan pertanian, mengurangi kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai
- Persoalan budaya dan sistem pendidikan, dimana sebagian besar pesantren salaf di Jawa Timur belum terintegrasi dalam sistem pendidikan formal. Ini menyebabkan banyak lulusan pesantren tidak tercatat dalam indikator pendidikan formal yang memengaruhi perhitungan IPM

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun

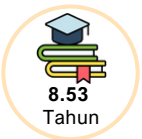

8.53 Tahun

Faktor Pendukung:

- Ketimpangan akses pendidikan, dimana masih ada disparitas yang signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan khususnya terkait ketersediaan sekolah menengah dan fasilitas pendukung.
- Masih adanya masyarakat putus sekolah, dimana faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama putus sekolah, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.
- RLS perempuan usia di atas 15 tahun lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini sering kali dipengaruhi oleh peran gender tradisional yang membatasi akses dan peluang pendidikan bagi perempuan

Rekomendasi

- Pengembangan fasilitas layanan kesehatan rujukan utama baru (RS tipe B atau A) di setiap kawasan prioritas (Regional) yang difokuskan di Kawasan Gerbangkertosusila, Kawasan Prioritas Bromo – Tengger – Semeru, Kawasan Prioritas Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, Kawasan Madura dan Kepulauan, Kawasan Selingkar Ijen. **(Bappeda, Dinkes | Bappenas, Kemenkes)**
- Mendorong pemerataan jumlah dan kualitas sekolah dan tenaga pendidik khususnya di wilayah perdesaan atau terpencil yang difokuskan di Kab. Bondowoso, Situbondo, Sampang, Pamekasan, Bangkalan, Pacitan, Trenggalek, Jember, Lumajang. **(Bappeda, Disdik, Dinas PU| Bappenas, Kemendikdasmen, Kemendes, KemenPU)**
- Meningkatkan jumlah bantuan pendidikan bagi siswa untuk mengurangi *out of pocket* biaya pendidikan yang tinggi yang dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. **(Bappeda, Disdik | Bappenas, Kemendikdasmen)**
- Menambah jumlah bantuan beasiswa untuk pendidikan Pendidikan Tinggi yang difokuskan di Kab. Bondowoso, Situbondo, Sampang, Pamekasan, Bangkalan, Pacitan, Tuban, Lamongan, Trenggalek, Jember, Lumajang. **(Bappeda, Disdik | Bappenas, Kemendiktisaintek, Kemenkeu)**
- Mendorong adanya standarisasi fasilitas sarana dan prasarana pendidikan keagamaan (pesantren) yang difokuskan di Kab. Bondowoso, Sampang, Pamekasan, Bangkalan, Pacitan, Gresik, Lamongan, Trenggalek, Jember, Lumajang. **(Bappeda, Disdik | Bappenas, Kemenag)**
- Mendorong adanya pendidikan yang lebih inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat khususnya bagi kelompok perempuan yang difokuskan di Kab. Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Situbondo, Jember, Lumajang, dan Malang. **(Bappeda, Disdik, DPPPA | Bappenas, Kemendikdasmen, Kemenag, KemenPPPA)**
- Menyediakan beasiswa penuh bagi kelompok perempuan dari keluarga miskin, terutama di tingkat SMA/SMK dan pendidikan tinggi, dengan fokus pada keahlian kerja seperti teknologi, pertanian, atau perikanan yang difokuskan di Kab. Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Situbondo, Jember, Lumajang, Kota Surabaya, dan Malang. **(Bappeda, Disdik, DPPPA | Bappenas, Kemendikdasmen, Kemenag, KemenPPPA)**

16. Banten

Highlight EPD Provinsi Banten

Capaian Optimal

Tingkat Kemiskinan

Faktor Pendukung:

- Pemberian bantuan sosial terintegrasi antar kementerian dan pemerintah daerah di Banten
- Adanya kebijakan daerah berupa Surat Edaran Gubernur Banten Nomor: 050/1609-Bapp/2023, perihal Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan *Stunting*
- Penguatan program dan anggaran dalam penanganan kemiskinan
- Potensi penanganan kemiskinan dengan anggaran di luar APBD (*non-state actor*)

Indeks Pembangunan Manusia

Faktor Pendukung:

- Dukungan pemerintah daerah tercermin dalam prioritas alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
- Akses dan mutu pendidikan dan kesehatan yang semakin merata
- Kemudahan perijinan pendirian RS swasta dan lembaga pendidikan swasta, pembangunan RSUD di Wilayah Selatan
- Pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru, rehabilitasi sekolah, pengadaan alat praktik siswa, dan pemberian BOSDA

Usia Harapan Hidup

Faktor Pendukung:

- Keadaan lingkungan aman dan tentram, ketersediaan pangan baik, akses dan mutu pendidikan maupun kesehatan sudah baik

Rekomendasi

- Mempercepat implementasi intervensi *Central Mapper* dan pemanfaatan data Regsosek sebagai upaya peningkatan integrasi dan akurasi program sosial seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan bantuan pangan **(Kemenkeu, Bappenas, BPS, KemenkoPMK)**
- Pemberian akses dan perlindungan bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan anak terlantar (**Dinsos, Dinkes, BKKBN**)
- Pemberian bantuan pangan, pemenuhan gizi seimbang dan makanan sehat **(Dinsos, Dinkes, Distan, BKKBN, Kemensos, Kemenkes, Kementan)**
- Menjaga stabilitas harga pangan dan menjaga inflasi daerah **(Disperindag, Distan, Bank Indonesia)**
- Pemberian bantuan yang bersifat pemberdayaan dan peningkatan kompetensi masyarakat (**Disnaker, Dinsos**)
- Optimalisasi kolaborasi antar *stakeholder* dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat **(Dinsos, Disnaker)**
- Peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah selatan Banten (termasuk peningkatan investasi RS swasta) **(Dinkes)**
- Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, serta pemerataan fasilitasnya **(Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemenag, Dinkes, Disdikbud)**
- Peningkatan pencegahan penyakit menular **(Kemenkes, Dinkes)**
- Sosialisasi akan pentingnya pola hidup sehat, makanan bergizi dan aktivitas olahraga serta istirahat yang cukup **(Dinkes, BKKBN, Kades, Penyuluh)**

Highlight EPD Provinsi Banten

Capaian Optimal

PDB Industri Pengolahan

Faktor Pendukung:

- Lokasi strategis sebagai pintu perdagangan internasional, penghubung Jawa - Sumatera serta penyangga kawasan Jabodetabekpunjur
- Meningkatnya industri perkebunan (karet, melinjo, cengkeh dan lada)
- Industri pengolahan mineral logam, tekstil, pangan, farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik serta potensi pertambangan dan penggalian (semen, bijih besi dan emas)

Prevelansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

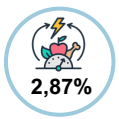

Faktor Pendukung:

- Optimalnya pemberian bantuan pangan, pemenuhan gizi seimbang, dan makanan sehat
- Akses terhadap sumber pangan beragam cukup baik dampak dari aglomerasi Jabodetabekpunjur
- Tingginya eksternalitas seperti urbanisasi di Wilayah Banten Utara membawa dampak positif dalam keberagaman alternatif pangan

Skor Pola Pangan Harapan

- Pengembangan sentra pangan lokal khas Banten yaitu talas beneng, yang banyak tumbuh di sekitar kawasan Gunung Karang, Kabupaten Pandeglang.

Rekomendasi

- Industrialisasi di sektor pertanian, pemanfaatan teknologi pertanian dan intensifikasi produksi pada wilayah pertanian Banten Tengah dan Selatan **(Kementan, Kemenperin, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian)**
- Peningkatan infrastruktur wilayah (tol, bandara, jalan) dan infrastruktur dasar (air minum, air bersih, sanitasi, rumah layak huni) **(PUPR, Kemenhub, Dinas PUPR, Dishub)**
- Pembangunan SPAL terpadu, pemantauan dan pengawasan pada industri **(Kemenperin, Dinas Perindustrian)**
- Pemberian bantuan pangan, pemenuhan gizi seimbang dan makanan sehat **(Dinsos, Dinkes, Distan, BKKBN, Kemensos, Kemenkes, Kementan)**
- Mendorong perluasan akses pangan dan stabilitas harga komoditas pangan **(Kemenkopangan, Kementan, Dinas Pertanian)**
- Peningkatan infrastruktur konektivitas, air baku, air bersih, irigasi, serta pergudangan sebagai upaya optimalisasi potensi pertanian dan industri **(KemenPU, DinasPUPR)**
- Peningkatan produksi sektor pertanian terutama di wilayah Banten Selatan **(Dinas Pertanian, Kementan)**

Highlight EPD Provinsi Banten

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,71%	**Faktor Penghambat:** • Investasi yang masuk hanya terpusat di Wilayah Banten Utara • Masih tingginya kesenjangan pembangunan perekonomian antarwilayah utara dan selatan • Belum optimalnya KEK Tanjung Lesung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Banten • Belum optimalnya produktivitas pertanian • Belum optimalnya hilirisasi produk unggulan • Belum optimalnya Bendungan Sindagheula karena terkendala jaringan irigasi dan perpipaan	Penguatan investasi, pemerataan infrastruktur, serta penguatan promosi wisata ke wilayah Banten Barat dan Selatan **(BKPM, KemenPU, Kemenpar, DPMPTSP, DisPUPR, Dispar)** Peningkatan daya saing ekonomi melalui intensifikasi, ekstensifikasi, serta hilirisasi produk unggulan hasil alam **(Kemenperin, Kementan, Dinas pertanian, Dinas Perindustrian)** Industrialisasi di sektor pertanian, pemanfaatan teknologi pertanian dan intensifikasi produksi pada wilayah pertanian Banten Tengah dan Selatan **(Kemenperin, Kementan, Dinas pertanian, Dinas Perindustrian)** Pembangunan infrastruktur wilayah (tol, bandara, jalan) dan infrastruktur dasar (air minum, air baku, sanitasi, rumah layak huni, serta jaringan irigasi pendukung bendungan) **(PUPR, Kemenhub, Dishub, Dinas PUPR)**
Rasio Gini 0,353	**Faktor Penghambat:** • Investasi yang masuk hanya terpusat di Wilayah Banten Utara • Masih tingginya kesenjangan pembangunan perekonomian antarwilayah utara dan selatan • Program pemberdayaan masyarakat kurang optimal	Pembentukan komisi irigasi sebagai optimalisasi pemanfaatan bendungan sebagai prasarana pemeliharaan air baku Kota Serang, pengendalian banjir, pembangkit listrik tenaga hidro, serta destinasi wisata air dan konservasi alam **(KemenPU, DinasPUPR)** Peningkatan pemberdayaan atau kompetensi masyarakat melalui pelatihan kerja dan kewirausahaan **(Kemenkop, KemenUMKM, DinkopUMKM)**
Indeks Kerukunan Umat Beragama 70,05 **Indeks Pembangunan Kebudayaan** 52,49	**Faktor Penghambat:** • Belum optimalisasi upaya penguatan keagamaan dan budaya sebagai karakter jatidiri masyarakat • Ketimpangan sosial dan ekonomi bisa menciptakan rasa iri atau kebencian yang berpotensi merusak kerukunan. • Kurangnya Dialog Antaragama dan Antarbudaya	Penguatan kebijakan pondok pesantren sebagai pusat budaya dan keagamaan **(Kemenag, Kemenbud)** Penguatan kesadaran tentang toleransi dan keberagaman **(Kemenag, Kemenbud, Disdik)** Meningkatkan dialog dan kerja sama melalui pengembangan event kerukunan antaragama dan antarbudaya **(Kemenag, Kemenbud)**

Highlight EPD Provinsi Banten

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Tingkat Pengangguran Terbuka 7,02%	**Faktor Penghambat:** • Gelombang PHK di sektor industri dampak dari eksodus industri ke luar daerah (termasuk ke Jawa Tengah)	Penguatan kebijakan *link and match* dunia pendidikan dan dunia industri/dunia usaha melalui pendidikan vokasi berbasis sumber daya lokal **(Kemdikdasmen, Kemenaker, Disdik, Disnaker)**
	• Kurangnya kerja sama dengan *stakeholders* dalam penyerapan tenaga kerja	Optimalisasi pendidikan vokasi dalam mempersiapkan tenaga kerja berkualitas **(Kemenaker, Disnaker)**
	• Daya saing SDM dan adanya *mismatch* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha serta dunia industri	

	• Permasalahan BLKI :
	  ○ Belum adanya BLKI di wilayah Banten Selatan
	  ○ Perlunya modernisasi peralatan pelatihan di BLKI wilayah Banten Utara
	  ○ Masih kurangnya tenaga pengajar (Instruktur) di BLKI
		Pembangunan BLKI Khusus untun Banten Selatan dan moderinisasi alat - alat pelatihan BLKI **(Kemenaker, Disnaker**)
		Mendorong peningkatan kemampuan angkatan kerja melalui BLKI (**Kemenaker, Disnaker)**
		Peningkatan kapasitas pengajar melalui beasiswa pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi digital **(Kemenaker, Disnaker)**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 65,52	**Faktor Penghambat:** • Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana serta degradasi lingkungan	Penguatan mitigasi bencana dengan menguatkan *early warning system* dan adaptasi terhadap bencana dengan penataan tata ruang serta bangunan tahan bencana **(BMKG, BNPB, & Basarnas)**
	• Cukup tingginya indeks risiko bencana	Pengembangan keanekaragaman hayati, memperluas wilayah untuk penghijauan dan membuat sengkedan atau terasering **(KemenLH, Dinas LH)**
	• Luas lahan kritis tinggi (229.840,73 hektar)	Pembangunan sumber - sumber energi terbarukan seperti energi surya dan angin **(Kemen ESDM, Dinas ESDM)**
	• Belum optimalnya ketahanan energi dan air	Perencanaan pembangunan waduk yang terintegrasi dengan jaringan irigasi dan pemanfaatan potensi PLTA **(Kemen ESDM, Dinas ESDM)**

17. Bali

Highlight EPD Provinsi Bali

Capaian Optimal

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Faktor Pendukung:

- Pulihnya pariwisata Bali yang ditunjukkan oleh kinerja sektor akmamin dan tingginya *share* pariwisata terhadap perekonomian
- Adanya pengembangan pariwisata berkelanjutan dan kunjungan wisman yang meningkat
- Pembangunan infrastruktur: *Shortcut* Singaraja-Mengwitani, Pelabuhan Sanur-Denpasar dan Pelabuhan Sampalan, Bendungan Tamblang, Bendungan Sidan, dan Pembangunan Bali *Maritime Tourism Hub* Denpasar.

Tingkat Kemiskinan

Faktor Pendukung:

- Adanya upaya diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian
- Adanya Program "*Ngerombo*"/Keroyo kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem
- Adanya stimulus Program pengentasan kemiskinan yang lebih terarah

Tingkat Pengangguran Terbuka

Faktor Pendukung:

- Pulihnya aktivitas pariwisata di Bali dan meningkatnya lapangan kerja konstruksi
- Adanya Program Kartu Prakerja
- Adanya pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi

Indeks Pembangunan Manusia

Faktor Pendukung:

- Peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi
- Pembangunan Infrastruktur: Pengembangan jalan, jembatan, dan transportasi umum untuk meningkatkan mobilitas penduduk
- Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui program beasiswa dan sekolah gratis

Rekomendasi

- Mendorong arah pengembangan pariwisata Bali lebih fokus pada *quality based*. Selain itu, perlu disediakan ekosistem pariwisata dengan konsep berkelanjutan diiringi dengan penguatan infrastruktur digital dan promosi yang efektif **(Kemenpar, Dispar, Dinas KUKM))**
- Kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak sangat esensial dalam mendorong pariwisata berkualitas sehingga ke depan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan **(BKPM, DPMPTSP, swasta)**
- Mengurangi ketimpangan ekonomi di Bali melalui investasi yang mencakup pengembangan sektor unggulan nonpariwisata seperti pertanian, kelautan, perikanan, industri, dan ekonomi kreatif serta mendorong investasi melalui penyederhanaan prosedur perizinan dan pemberian insentif bagi pelaku usaha **(BKPM, DPMPTSP, Bappeda)**
- Pengembangan pusat-pusat agropolitan sebagai pengembangan pangan dan agrikultur terintegrasi hulu-hilir **(Kementan, Distan KP)**
- Peningkatan produktivitas pertanian padi dan komoditas pangan lainnya terutama pada Kab Tabanan, Kab Gianyar, Kab Badung dan Kab Buleleng **(Kementan, KemenPU, Distan KP, Dinas PUPPR)**
- Meningkatkan optimalisasi program pengentasan kemiskinan bersama *stakeholders* terkait **(Dinsos, Bappeda, BPS)**
- Optimalisasi Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang lebih tepat sasaran **(Disnaker ESDM)**
- Pengembangan/peningkatan perguruan tinggi akademik/vokasi STEAM **(Kemendiktisaintek, Kemenperin)**
- Pengembangan *multi-infrastructur corridor* untuk meningkatkan konektivitas antarkawasan dan intrakawasan (jalan tol, listrik, internet) **(KemenPU, Kemenhub, KemenESDM, KemenKomdigi)**
- Perluasan akses layanan pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah dan peningkatan penerima program beasiswa dan sekolah gratis **(Kemendikdasmen, Disdikpora)**

Highlight EPD Provinsi Bali

Capaian Optimal

Prevalensi *Stunting*

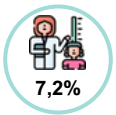

Faktor Pendukung:

- Melaksanakan strategi percepatan penurunan *stunting* melalui penguatan konvergensi lintas sektor, intervensi spesifik dan sensitif tepat sasaran, peningkatan kolaborasi lini lapangan (KPM, PKB, PLKB, Kader), penyediaan data sasaran yang valid, penguatan monitoring dan evaluasi di berbagai jenjang, peningkatan sosialisasi dan komunikasi, informasi, serta edukasi
- Adanya berbagai inovasi yang dilakukan oleh pemkab dan pemkot

Indeks Daya Saing Daerah

Faktor Pendukung:

- Memiliki potensi sektor pariwisata yang tinggi
- Pembangunan infrastruktur: Pengembangan jalan, jembatan, dan transportasi umum untuk meningkatkan mobilitas

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

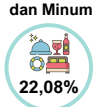

Faktor Pendukung:

- Membaiknya perekonomian Bali pascapandemi dan peningkatan aktivitas pariwisata di Bali
- Adanya penyelenggaraan *MICE event* nasional dan internasional

RT dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Faktor Pendukung:

- Membaiknya perekonomian Bali yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat
- Masyarakat Bali semakin sadar akan pentingnya memiliki rumah yang layak huni
- Adanya Program seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) turut berkontribusi pada peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki rumah layak.

Rekomendasi

- Melakukan verifikasi dan validasi data balita *stunting* agar strategi percepatan penurunan *stunting* bisa lebih tepat sasaran **(Kemenkes, Dinkes)**
- Melanjutkan praktik baik inovasi daerah dalam rangka percepatan penurunan prevalensi *stunting* **(Dinkes)**
- Peningkatan kolaborasi dan sinergi pemerintah kab/kota **(Bappeda, Dinkes, Distan KP)**
- Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A terutama pada kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan (Kawasan Ulapan, Nusa Penida, Bali Barat, Bali Utara, Bali Tengah, Bali Selatan, dan Bali Timur) **(Kemenpar, Kemenekraf, Dispar, Dinas KUKM)**
- Pengembangan *multi-infrastructur corridor* untuk meningkatkan konektivitas antarkawasan dan intrakawasan (jalan tol, listrik, internet) **(KemenPU, Kemenhub, KemenESDM, KemenKomdigi)**
- Optimalisasi edukasi dan sosialisasi secara berkala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat rumah layak huni **(Dinsos, Dinas PUPPR)**
- Memberikan kemudahan dalam mengakses pembiayaan untuk perumahan bagi MBR **(Perbankan)**
- Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan perumahan yang layak huni. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang berkontribusi dalam pembangunan perumahan layak huni **(DPMPTSP, Perbankan)**

Highlight EPD Provinsi Bali

Capaian Optimal		Rekomendasi
Indeks SPBE 4,07	**Faktor Pendukung:** • Peningkatan kualitas layanan publik melalui penerapan SPBE	Memperkuat infrastruktur Teknologi Informasi dengan memastikan jaringan internet yang cepat dan stabil di seluruh wilayah **(Diskominfotik)**
	• Integrasi layanan dengan berbagai entitas (SDI, Lapor, dll)	Mendorong integrasi antara berbagai sistem dan layanan pemerintah untuk menciptakan interoperabilitas yang memudahkan akses dan pertukaran data antar instansi **(Diskominfotik)**
Indeks Pelayanan Publik 4,54	**Faktor Pendukung:** • Peningkatan kualitas layanan publik melalui penerapan SPBE	Meningkatkan keamanan data dan sistem dengan menerapkan standar keamanan siber yang ketat dan rutin melakukan audit keamanan **(Diskominfotik)**
Indeks Demokrasi Provinsi 85,13	**Faktor Pendukung:** • Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat	Mendorong dialog dan diskusi publik yang terbuka dan bebas antara pemerintah, masyarakat, dan aparat negara tentang isu-isu kebebasan ini **(Badan Kesbangpol)**
		Menyediakan akses informasi yang jelas dan mudah diakses terkait kebijakan pemerintah, anggaran, dan pelaksanaan program **(Diskominfotik)**
	• Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	Mengembangkan infrastruktur digital untuk memfasilitasi akses informasi dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi **(Diskominfotik)**
Indeks Pembangunan Kebudayaan 71,36	**Faktor Pendukung:** • Upacara dan adat istiadat telah menjadi identitas dari masyarakat Hindu di Bali	Melindungi dan melestarikan situs-situs bersejarah, adat istiadat, tarian, musik, dan bahasa daerah melalui program-program pelestarian yang melibatkan masyarakat **(Kemenbud, Disbud)**
	• Kembalinya kegiatan seni budaya seperti PK Bali memicu percepatan pemulihan sektor pariwisata, selain itu, adanya perhelatan KTT G20 yang melibatkan pelaku seni mampu menarik wisatawan dalam dan luar negeri	Meningkatkan fasilitas budaya seperti museum, perpustakaan, pusat seni, dan ruang publik untuk mendukung kegiatan budaya dan seni **(Kemenbud, Disbud)**
Indeks Kerukunan Umat Beragama 82,38	**Faktor Pendukung:** • Tingginya sikap toleran dan terbuka dari masyarakat Bali terhadap keberagaman	Mendorong dialog rutin dan kerjasama antara pemuka agama dan komunitas untuk membangun saling pengertian dan menghormati **(Badan Kesbangpol)**
		Mengintegrasikan pendidikan tentang toleransi, kerukunan, dan keberagaman agama dalam kurikulum sekolah sejak dini untuk membentuk pemahaman dan sikap yang inklusif di kalangan pelajar **(Badan Kesbangpol)**

Highlight EPD Provinsi Bali

Capaian Kurang Optimal

Kontribusi PDB Industri Pengolahan

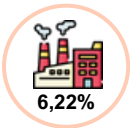

Faktor Penghambat:

- Masih tingginya ketergantungan pada sektor pariwisata dan masih terkonsentasi pada wilayah Bali Selatan
- Kualitas SDM tenaga kerja masih rendah
- Keterbatasan akses permodalan

Rasio Gini

Faktor Penghambat:

- Masih tingginya ketergantungan pada sektor pariwisata dan masih terkonsentasi pada wilayah Bali Selatan
- Kualitas dan daya saing SDM tenaga kerja masih rendah
- Ketimpangan ekonomi: Kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan

Pembentukan Modal Total Bruto

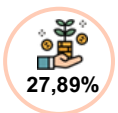

Faktor Penghambat:

- Ketidakpastian global yang turut menahan investor
- Kebijakan pemasaran pariwisata yang hanya terfokus di Badung Selatan

Produksi Perikanan

Faktor Penghambat:

- Keterbatasan infrastruktur dan teknologi yang digunakan dalam proses perikanan

Rekomendasi

- Pemerataan pembangunan wilayah Bali Utara dan Bali Selatan seperti pembangunan infrastruktur dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Bali Utara dan sekitarnya **(KemenPU, Kemenpar, Dinas PUPPR, Dispar)**
- Pengembangan sektor unggulan nonpariwisata seperti pertanian, kelautan, perikanan, industri, dan ekonomi kreatif **(Distan KP, Dinas KP, Disperindag, Dispar)**
- Pengembangan pusat-pusat agropolitan sebagai pengembangan pangan dan agrikultur terintegrasi hulu-hilir **(Kementan, Distan KP)**
- Pengembangan/peningkatan perguruan tinggi akademik/vokasi STEAM **(Kemendiktisaintek, Kemenperin)**
- Memberikan kemudahan untuk akses modal bagi pelaku UMKM lokal **(Dinas KUKM)**
- Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A terutama pada kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan (Kawasan Ulapan, Nusa Penida, Bali Barat, Bali Utara, Bali Tengah, Bali Selatan, dan Bali Timur) **(Kemenpar, Kemenekraf, Dispar, Dinas KUKM)**
- Mengurangi ketimpangan ekonomi di Bali melalui investasi yang mencakup pengembangan sektor unggulan nonpariwisata seperti pertanian, kelautan, perikanan, industri, dan ekonomi kreatif serta mendorong investasi melalui penyederhanaan prosedur perizinan dan pemberian insentif bagi pelaku usaha. **(BKPM, DPMPTSP, Bappeda)**
- Pemerataan pembangunan wilayah Bali Utara dan Bali Selatan seperti pembangunan infrastruktur dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Bali Utara dan sekitarnya **(KemenPU, Kemenpar, Dinas PUPPR, Dispar)**
- Peningkatan produktivitas perikanan budaya dan tangkap dalam rangka pengembangan *blue economy* melalui peningkatan infrastruktur dan teknologi, serta SDM kelautan dan perikanan **(Kemen KP, Dinas KP)**

18. Nusa Tenggara Barat

Highlight EPD Provinsi Nusa Tenggara Barat

Capaian Optimal

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Faktor Pendukung:

- Potensi Daerah:
  - Sektor Pertambangan dan Penggalian
  - Sektor Pertanian
  - Sektor Pariwisata
- Adanya perpanjangan izin ekspor hasil tambang bijih logam
- Terdapat KEK Mandalika yang menyelenggarakan berbagai event internasional

Tingkat Pengangguran Terbuka

Faktor Pendukung:

- Penyelenggaraan berbagai program *job fair* dengan menggandeng *stakeholders* terkait
- Terdapat program inovasi PePADu Plus untuk mengurangi *mismatch*
- Keberadaan KEK Mandalika yang cukup banyak merekrut tenaga kerja lokal

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Faktor Pendukung:

- Pembangunan proyek smelter tembaga dan pemurnian logam mulia beserta fasilitas pendukungnya di Pulau Sumbawa
- Pembangunan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika

Rekomendasi

- Mengadakan kerja sama antar provinsi dalam meningkatkan keterkaitan *supply* dan *demand* bahan mentah/bahan setengah jadi/barang jadi **(Kemendag, Kemenhub, Disdag)**
- Peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui pemanfaatan bibit unggul, *digital farming*, pemanfaatan pupuk ataupun media tanam yang lebih ekonomis **(Kementan, Distanbun)**
- Pengembangan hilirisasi beras melalui melalui penyaluran bantuan saprotan, penyerapan gabah, pembuatan peraturan RDTR untuk mengendalikan alih fungsi lahan, dan inovasi skema pembiayaan **(Kementan, Distanbun)**
- Pembangunan laboratorium untuk standardisasi produk kualitas ekspor, khususnya untuk komoditas pertanian dan perkebunan **(Kemenperin, Kemendag, Disperin)**
- Peningkatan konektivitas berupa penambahan rute pesawat domestik dan internasional termasuk kapal laut **(Kemenhub, Dishub)**
- Peningkatan kapasitas tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri **(Kemnaker, Kemenperin, Disnakertrans)**
- Fasilitasi pembentukan *Teaching Factory* pada SMK untuk meningkatkan kesiapan kerja dan karakter kerja para lulusan **(Kemnaker, Disnakertrans, Disdikbud)**
- Pengembangan wilayah proyek smelter dengan melibatkan masyarakat sekitar melalui pemberian bantuan modal, pelatihan, dan pembinaan usaha **(KemenUMKM, Diskop UKM)**
- Peningkatan kapasitas SDM di bidang pariwisata dalam bidang kemampuan bahasa asing dan *hospitality* dengan skala besar **(Kemnaker, Kemenpar, Disnakertrans)**

Highlight EPD Provinsi Nusa Tenggara Barat

Capaian Optimal

Skor Pola Pangan Harapan

&

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Faktor Pendukung:

- Komoditas pertanian dan perkebunan yang melimpah:
  - Padi dan beras
  - Jagung
  - Cabai
  - Bawang
- Tingkat inflasi yang cukup terjaga

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

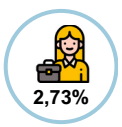

Faktor Pendukung:

- Komoditas pertanian dan perkebunan yang melimpah menjadi sumber mata pencaharian utama
- Tingginya penduduk perempuan yang bekerja pada sektor informal

Rekomendasi

- Modernisasi dan mekanisasi sektor pertanian serta mendorong regenerasi petani untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian **(Kementan, Distanbun)**
- Peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui pemanfaatan bibit unggul, *digital farming*, pemanfaatan pupuk ataupun media tanam yang lebih ekonomis **(Kementan, Distanbun)**
- Pengembangan hilirisasi beras melalui melalui penyaluran bantuan saprotan, penyerapan gabah, pembuatan peraturan RDTR untuk mengendalikan alih fungsi lahan, dan inovasi skema pembiayaan **(Kementan, Distanbun)**
- Mendorong program subtitusi impor untuk pangan tertentu (seperti jagung, padi) dalam rangka menyerap hasil panen komoditas lokal **(Kemendag, Kadin, Disdag)**
- Pemberdayaan perempuan melalui program *community development* untuk menciptakan lingkungan kerja ramah perempuan **(KemenPPPA, DP3AP2KB)**
- Pengembangan asosiasi untuk pekerja informal perempuan untuk perlindungan hak-hak tenaga kerja dan perlindungan hukum serta meningkatkan akses terhadap pembiayaan usaha **(KemenPPPA, DP3AP2KB)**

Highlight EPD Provinsi Nusa Tenggara Barat

Capaian Kurang Optimal

Tingkat Kemiskinan

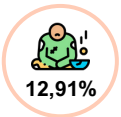

Faktor Penghambat:

- Intervensi kemiskinan masih banyak yang tidak tepat sasaran
- Pemutakhiran data penduduk miskin yang tidak berjalan secara optimal
- Penduduk miskin yang tersebar di berbagai sisi daerah menjadi tantangan tersendiri
- Banyak penduduk berprofesi sebagai buruh tani yang penghasilannya masih di bawah standar hidup layak

PDRB per Kapita & Rasio Gini

Faktor Penghambat:

- Banyak penduduk berprofesi sebagai buruh tani yang penghasilannya masih di bawah standar hidup layak
- Perekonomian masih bergantung pada sektor pertambangan yang cenderung bersifat padat modal

Indeks Pembangunan Manusia

Faktor Penghambat:

- Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yang masih cukup tinggi
- Capaian Rata-rata Lama Sekolah yang masih belum optimal
- Tingkat kesadaran masyarakat untuk mengikuti pendidikan kesetaraan masih rendah

Rekomendasi

- Penerapan program *central mapper* untuk meningkatkan akurasi penyaluran intervensi yang berkaitan dengan kemiskinan **(Kemensos, Kemenkeu, Bappenas)**
- Percepatan perbaikan jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan wilayah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, barang, serta jasa **(KemenPU, Kemenhub, Dinas PUPR)**
- Peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui pemanfaatan bibit unggul, *digital farming*, pemanfaatan pupuk ataupun media tanam yang lebih ekonomis **(Kementan, Distanbun)**
- Pengembangan hilirisasi beras melalui melalui penyaluran bantuan saprotan, penyerapan gabah, pembuatan peraturan RDTR untuk mengendalikan alih fungsi lahan, dan inovasi skema pembiayaan **(Kementan, Distanbun)**
- Pembentukan Perumda yang berfungsi sebagai *offtaker* dapat menyerap hasil panen lokal, mengefisienkan rantai pasok, mengelola pasokan, dan memasarkan produk ke konsumen **(KemenBUMN, Kementan, Distanbun)**
- Mendorong investasi di sektor manufaktur, pariwisata, dan jasa untuk mengurangi ketergantungan pada sektor primer sekaligus meningkatkan diversifikasi ekonomi **(BKPM, Disperin, DPMTSP)**
- Pengembangan dan peningkatan kapasitas infrastruktur transportasi seperti pelabuhan dan bandara untuk mendukung aktivitas ekspor dan pariwisata **(KemenPU, Kemenhub, Dinas PUPR)**
- Intensifikasi program pengawasan serta bantuan makanan dan gizi untuk ibu hamil dan balita **(Kemenkes, Dinkes)**
- Menerapkan program *telemedicine* dan puskesmas keliling untuk memberikan pelayanan kesehatan dari jarak jauh dan secara *mobile* **(Kemenkes, Dinkes)**
- Penerapan program sekolah alternatif melalui pengembangan sekolah berbasis komunitas serta sistem pembelajaran modular **(Kemendikdasmen, Disdikbud)**

Highlight EPD Provinsi Nusa Tenggara Barat

Capaian Kurang Optimal

Kontribusi PDB Industri Pengolahan

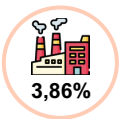

Faktor Penghambat:

- Mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian
- Regenerasi petani yang masih rendah menyebabkan minimnya inovasi, kreatifitas, dan penerapan teknologi di sektor pertanian
- Jumlah penduduk yang cenderung sedikit belum representatif sebagai pusat pasar bagi produk hasil industri
- Daya saing rendah karena biaya logistik yang tinggi

Rasio Kewirausahaan Provinsi

Faktor Penghambat:

- Akses permodalan untuk UMKM yang masih cukup rumit
- Keterampilan dan ide kreatif dari masyarakat yang masih perlu dikembangkan

Indeks Ketimpangan Gender

Faktor Penghambat:

- Menurunnya keterwakilan perempuan dalam legislatif
- Meningkatnya proporsi perempuan 15-49 tahun yang melahirkan anak pertama saat berusia kurang dari 20 tahun
- Persentase penduduk perempuan yang berpendidikan SMA ke atas masih berada di bawah 30 persen

Rekomendasi

- Pengembangan hilirisasi beras melalui melalui penyaluran bantuan saprotan, penyerapan gabah, pembuatan peraturan RDTR untuk mengendalikan alih fungsi lahan, dan inovasi skema pembiayaan **(Kementan, Distanbun)**
- Pengembangan hilirisasi komoditas cabai dengan menerapkan pengaturan pola tanam dan penerapan *digital farming* untuk mengoptimalkan produksi pada *offseason*, pemberian bantek dan bimtek dalam pengolahan produk turunan dari cabai **(Kementan, Distanbun)**
- Pengembangan hilirisasi rumput laut dengan pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis dengan memanfaatkan dana CSR, pembangunan pabrik pengolahan, pemberian insentif khusus untuk menarik investasi industri hilir serta pengembangan UMKM **(KKP, Kemenperin, Dinas KP)**
- Menerapkan kebijakan pemberian insentif bagi pemuda yang beralih profesi ke sektor pertanian seperti skema kredit berbunga rendah, pemberian bimbingan teknis dan penyaluran bantuan teknis **(Kementan, Distanbun)**
- Pembangunan laboratorium untuk standardisasi produk kualitas ekspor, khususnya untuk komoditas pertanian dan perkebunan **(Kemnaker, Disnakertrans)**
- Pengembangan dan peningkatan kapasitas infrastruktur transportasi seperti pelabuhan dan bandara untuk mendukung aktivitas ekspor dan pariwisata **(Kemenhub, KemenPUPR, Dishub, Dinas PUPR)**
- Memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah untuk pelaku industri kecil dan menengah (IKM), subsidi modal bagi yang ingin mendirikan usaha, serta menyusun skema pembiayaan yang inovatif **(KemenUMKM, BI, Diskop UKM)**
- Optimalisasi kerja sama antara pemerintah daerah dan Kadin dalam pelatihan dan pembinaan kewirausahaan bagi masyarakat **(KemenUMKM, Kadin, Diskop UKM)**
- Mengadopsi kebijakan kuota yang lebih ketat untuk keterwakilan perempuan di lembaga legislatif maupun eksekutif **(KemenPPPA, DP3AP2KB)**
- Meningkatkan program pendewasaan usia pernikahan untuk mengurangi pernikahan dini dan risiko kesehatan reproduksi **(KemenPPPA, BKKBN, DP3AP2KB)**
- Penerapan program sekolah alternatif melalui pengembangan sekolah berbasis komunitas serta sistem pembelajaran modular **(Kemendikdasmen, Disdikbud)**

19. Nusa Tenggara Timur

Highlight EPD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Capaian Optimal

Rasio Gini

Faktor Pendukung:

- Kemandirian ekonomi masyarakat dalam mengelola sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai sumber penghidupan
- Meningkatnya peluang kerja berbasis pariwisata dan budaya seiring meningkatnya aktivitas pariwisata dan kebudayaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Pembangunan Jalan Nasional Trans Flores, Timor, Sumba

Tingkat Pengangguran Terbuka

Faktor Pendukung:

- Terjadinya tren peningkatan tenaga kerja di sektor primer, antara lain sektor peternakan (babi, sapi, kuda), sektor kelautan dan perikanan (rumput laut dan ikan tangkap), sektor pertanian (jagung), serta sektor perkebunan (kopi, kakao, kelapa)
- Meningkatnya tenaga kerja terdidik lulusan jenjang SMA/SMK ke atas
- Kontribusi *Non-State Actor* dalam program infrastruktur dan sosial cukup tinggi

Rekomendasi

- Peningkatan daya saing ekonomi melalui intensifikasi, ekstensifikasi, serta hilirisasi produk unggulan hasil alam seperti rumput laut, ikan, jagung, dan ternak, serta produk unggulan kreatif & budaya seperti kain tenun **(Kementan, KemenKP, Kemenpar, Distan, DinasKP, Disparekraf)**
- Optimalisasi pariwisata dan budaya sebagai kontributor utama PAD melalui program pemerataan wisata dan kerjasama dengan promotor swasta untuk meningkatkan paket wisata NTT dan event wisata dan budaya level internasional **(Kemenpar, Disparekraf)**
- Pemenuhan infrastruktur layanan dasar seperti pendidikan, konektivitas, ketenagalistrikan, dan hunian layak terutama di kawasan kawasan minim layanan dasar dan kantong kemiskinan **(KemenPU, KemenPKP, Kemenag, Kemendikdasmen, KemenESDM, DinasPUPR, Disdikbud)**
- Peningkatan akses dan konektivitas intermoda antar dan intra pulau **(Kemenhub, Dishub)**
- Pengadaan *Job Fair* terutama bagi pekerja di kawasan pariwisata prioritas **(Kemnaker, Disnaker)**
- Mendorong keberlanjutan kolaborasi multipihak dalam akselerasi penyediaan lapangan kerja yang menjawab kebutuhan dunia kerja **(Bappenas, Kemnaker, Bappeda, Disnaker, *Non State Actor*)**

Highlight EPD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Capaian Optimal		Rekomendasi
Produksi Perikanan **1,55 Juta Ton**	**Faktor Pendukung:** • Potensi Sektor Kelautan dan Perikanan (Rumput Laut dan Ikan Tangkap) • Potensi sebagai Daerah Kepulauan • Optimalnya Program Kampung Perikanan Budidaya	Peningkatan daya saing ekonomi melalui intensifikasi, ekstensifikasi, serta hilirisasi produk unggulan hasil laut seperti rumput laut, ikan tangkap, ikan budidaya, dan hasil laut lainnya **(KemenKP, DinasKP)** Peningkatan akses dan konektivitas intermoda antar dan intra pulau **(Kemenhub, Dishub)** Mendorong keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan seperti Program Kampung Perikanan Budidaya **(KemenKP)**
Imunisasi Dasar Lengkap Balita 12 – 23 Bulan 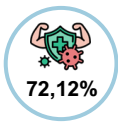 **72,12%**	**Faktor Pendukung:** • Kontribusi *Non-State Actor* dalam program infrastruktur dan sosial cukup tinggi • Program Kemitraan Gizi Ibu dan Anak cukup optimal • Program Kemitraan Layanan Dasar (SKALA) cukup optimal	Mendorong keberlanjutan kolaborasi multipihak dalam akselerasi penurunan *stunting* dan peningkatan kualitas SDM **(Bappenas, Kemenkes, BKKBN, Bappeda, Dinkes , *Non State Actor*)**
Indeks Kerukunan Umat Beragama 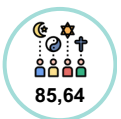 **85,64**	**Faktor Pendukung:** • Potensi Kekayaan Budaya yang Beragam • Forum Komunikasi Umat Beragama berjalan optimal • Optimalnya Program Desa Sadar Kerukunan dan Kampung Moderasi Beragama	Mendorong preservasi budaya sebagai upaya pelestarian kekayaan budaya yang beragam dalam memperkuat aspek sosial dan ekonomi **(Kemenbud, Disdikbud)** Mendorong toleransi, moderasi, dan kolaborasi antar umat beragama **(Kemenag, FKUB, Lembaga/Organisasi Keagamaan)** Mendorong keberlanjutan Program Desa Sadar Kerukunan dan Kampung Moderasi Beragama **(Kemenag, Perangkat Desa terkait)**

Highlight EPD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Laju Pertumbuhan Ekonomi **4,08%**	**Faktor Penghambat:** • Belum optimalnya produktivitas pertanian dan hilirisasi produk unggulan pertanian • Belum optimalnya program daerah pendukung DPP Labuan Bajo berdampak pada belum optimalnya pariwisata sebagai sumber PAD • Kapasitas fiskal daerah terbatas • Belum optimalnya pemanfaatan bendungan karena belum tersambung dengan irigasi tersier • Tantangan infrastruktur dan konektivitas daerah terpencil, kepulauan, dan 3T • Kebijakan investasi masih belum optimal • Isu kebencanaan dan perubahan iklim	Peningkatan daya saing ekonomi melalui intensifikasi, ekstensifikasi, serta hilirisasi produk unggulan hasil alam seperti rumput laut, ikan, jagung, dan ternak, serta produk unggulan kreatif & budaya seperti kain tenun **(Kementan, KemenKP, Kemenpar, Distan, DinasKP, Disparekraf)** Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM terutama di sektor pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan, serta industri **(Kemnaker, Disnaker)** Optimalisasi pariwisata alam dan budaya sebagai kontributor utama PAD melalui program pemerataan wisata dan kerjasama dengan promotor swasta untuk meningkatkan paket dan event wisata level internasional **(Kemenpar, Disparekraf)** Pembentukan komisi irigasi sebagai optimalisasi pemanfaatan bendungan sebagai prasarana pendukung pertanian **(KemenPU, Kementan, DinasPUPR, Distan)** Peningkatan akses dan konektivitas intermoda antar dan intra pulau **(Kemenhub, Dishub)**
Indeks Pembangunan Manusia **69,14**	**Faktor Penghambat:** • Rendahnya rata-rata lama sekolah • Rendahnya pengeluaran perkapita masyarakat • Usia harapan hidup belum cukup optimal • Tantangan infrastruktur dan konektivitas daerah terpencil, kepulauan, dan 3T • Terbatasnya masyarakat terhadap akses pendidikan	Mendorong kemudahan investasi dan percepatan perizinan serta optimalisasi peran pemerintah dalam pelayanan publik **(BKPM, DPMPTSP)** Penguatan pembangunan berorientasi ketahanan bencana dan perubahan iklim **(BNPB, Bappenas, KemenATR/BPN, KemenPU, KemenLH, Bappeda, DinasPUPR, BPBD)** Mendorong keberlanjutan kolaborasi multipihak dalam peningkatan kualitas SDM, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan lapangan kerja **(Kemendikdasmen, Kemnaker, KemenUMKM, Disnaker, Disdikbud, DiskopUMKM, *Non State Actor*)**
Indeks Pelayanan Publik **3,04**	**Faktor Penghambat:** • Kapasitas fiskal daerah terbatas • Belum optimalnya tata kelola dan pelayanan publik pemerintah daerah	Pemenuhan infrastruktur layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, konektivitas, ketenagalistrikan, dan hunian layak terutama di kawasan kawasan minim layanan dasar dan kantong kemiskinan **(KemenPU, Kemenag, Kemendikdasmen, Kemenkes, KemenESDM, DinasPUPR, Disdikbud, Dinkes)** Optimalisasi peran pemerintah daerah serta memperkuat digitalisasi pelayanan publik, *e-government,* dan transparansi anggaran **(DPMPTSP, Pemprov NTT)**

Highlight EPD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi

Tingkat Kemiskinan
 	
19,48%
	Faktor Penghambat:
	• Belum terpadunya data kemiskinan (Regsosek – DTKS – P3KE) sehingga bansos belum tepat sasaran
	• Belum tepat sasarannya program bantuan:
	  ◦ Bantuan Sosial
	  ◦ Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan
	  ◦ Bantuan Kesehatan
	• Tingginya biaya pesta adat dan budaya
	• Tantangan infrastruktur dan konektivitas daerah terpencil, kepulauan, dan 3T
		Mempercepat implementasi intervensi *Central Mapper* dan pemanfaatan data Regsosek sebagai upaya peningkatan integrasi dan akurasi program sosial seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan bantuan pangan **(Kemenkeu, Bappenas)**
		Mendorong keberlanjutan kolaborasi multipihak dalam akselerasi penurunan *stunting* dan kemiskinan di Pulau Sumba, Timor, Rote, Sabu Raijua, & Lembata **(Bappenas, Kemensos, Kemenkes, BKKBN, Bappeda, Dinsos, Dinkes, *Non State Actor*)**
		Mendorong kolaborasi dengan pemuka agama dan tetua adat setempat dalam penyuluhan gerakan masyarakat hidup sehat, perbaikan pola asuh anak, penyuluhan gizi ibu dan anak, penyuluhan terkait pernikahan dini, serta literasi keuangan **(Kemenkes, KemenPPPA, Kemenag, KemendesPDTT, BKKBN, Dinkes, Dinas PMD, Bank Indonesia, Masyarakat)**

Prevalensi *Stunting* **37,90%**	**Faktor Penghambat:** • Faktor kemiskinan yang masih tinggi • Rendahnya kesadaran gizi dan pola asuh • Terbatasnya masyarakat terhadap akses infrastruktur air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan • Tantangan infrastruktur dan konektivitas daerah terpencil, kepulauan, dan 3T • Terbatasnya masyarakat terhadap akses pangan bergizi	Mendorong keberlanjutan kolaborasi multipihak dalam akselerasi peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat serta pemenuhan infrastruktur pendidikan terutama di Pulau Sumba, Timor, Rote, Sabu Raijua, & Lembata **(Bappenas, Kemdikdasmen, Kemenag, Bapppeda, Disdikbud, *Non State Actor*)** Pemenuhan infrastruktur layanan dasar air bersih, sanitasi, konektivitas, ketenagalistrikan, dan hunian layak terutama di kawasan kawasan minim layanan dasar dan kantong kemiskinan **(KemenPU, KemenPKP, KemenESDM, DinasPUPR)**
Skor Pola Pangan Harapan **74,30**	**Faktor Penghambat:** • Terbatasnya masyarakat terhadap akses pangan bergizi • Rendahnya kesadaran gizi dan pola asuh • Bantuan pangan belum tepat sasaran • Tantangan infrastruktur dan konektivitas daerah terpencil, kepulauan, dan 3T	Penguatan ketahanan dan diversifikasi pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pangan lokal dengan inovasi teknologi pertanian **(Kemenkopangan, Kementan, Distan)** Mendorong keberlanjutan kolaborasi multipihak dalam memperkuat jaringan pengaman sosial dan bantuan pangan bergizi yang lebih tepat sasaran **(Kemenkopangan, Kemensos, Distan, Dinsos)** Memperkuat infrastruktur konektivitas dan infrastruktur pendukung pertanian salah satunya melalui pembentukan komisi irigasi sebagai bentuk tindak lanjut pemanfaatan bendungan sebagai sarana utama pendukung pertanian **(KemenPUPR, Kementan, DisPUPR, Distan)**

20. Kalimantan Barat

Highlight EPD Provinsi Kalimantan Barat

Capaian Optimal

Tingkat Kemiskinan

6,32%

Faktor Pendukung:

- Pengendalian inflasi melalui koordinasi pemerintah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga pangan, terutama untuk kebutuhan pokok
- Peningkatan pendapatan masyarakat terutama petani yang dicerminkan dari kenaikan NTP salah satunya akibat peningkatan harga dan produksi (CPO) kelapa sawit

Rasio Gini

0,310

Faktor Pendukung:

- Pengendalian inflasi melalui koordinasi pemerintah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga pangan, terutama untuk kebutuhan pokok
- Peningkatan pendapatan masyarakat terutama petani yang dicerminkan dari kenaikan NTP
- Perbaikan kondisi infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum lainnya, berkontribusi dalam memperbaiki akses ke pasar dan memfasilitasi distribusi ekonomi yang lebih merata

Pembentukan Modal Tetap Bruto

32,0%
PDRB

Faktor Pendukung:

- Peningkatan produksi CPO dan jumlah pabrik kelapa sawit
- Realisasi dari investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terutama smelter bauksit dan usaha perkebunan kelapa sawit
- Pembangunan industri pengolahan khususnya industri alumina di Kab. Mempawah, Kab. Sanggau dan Kab. Ketapang
- Pembangunan berbagai Proyek Strategis Nasional seperti kawasan industri, jalan, dan pelabuhan

Rekomendasi

- Mengoptimalkan peran TPID untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan sistem logistik pangan daerah, penguatan cadangan pangan daerah, mendorong kerja sama antar daerah (KAD) untuk distribusi pangan terutama dengan daerah tetangga, serta membangun infrastruktur pergudangan untuk mengurangi biaya distribusi dan penyimpanan yang difokuskan di Kota Pontianak, Kubu Raya, Sambas, Sanggau, Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang, Mempawah. **(Bappeda, Disperindag, Distan, Dinas PU | Bulog)**
- Pemberdayaan ekonomi bagi kelompok petani, peternak, dan nelayan melalui pelatihan penerapan teknologi produk olahan, dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, peternakan, dan perikanan yang difokuskan di Kab. Sambas, Ketapang, Kapuas Hulu, Sanggau. **(Bappeda, Distan | Bappenas, Kementan)**
- Pemberdayaan pelaku usaha, petani, dan nelayan dalam pemanfaatan teknologi digital atau platform jual beli komoditas pertanian/perikanan atau kemitraan dengan perusahaan besar yang difokuskan di Kab. Sambas, Ketapang, Kapuas Hulu, Sanggau. **(Bappeda, Distan, Diskominfo, Disperindag | Bappenas, Kementan, Kominfodigi, Kemendag, Perusahaan Market Place)**
- Pemberian subsidi pupuk yang merata dan mendorong penggunaan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas yang difokuskan di Kab. Sambas, Landak, Sanggau, Kubu Raya. **(Distan | Kementan)**
- Menyediakan skema pembiayaan mikro berbunga rendah melalui lembaga keuangan daerah atau koperasi petani yang difokuskan di Kab. Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu, Ketapang. **(Bappeda, Distan, BPD, Koperasi | Bappenas, Kementan, OJK, Bank Indonesia, Kemenkop)**
- Membangun dan memperluas program rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan. Fokus pada perumahan vertikal seperti rusunawa untuk memanfaatkan lahan secara optimal yang difokuskan di Kota Pontianak, Singkawang, Kubu Raya, Sambas. **(Bappeda, Dinas PU | Bappenas, KemenPKP)**
- Percepatan pengembangan sarana dan prasarana transportasi umum di wilayah perkotaan terutama transportasi umum berbasis bus (*Bus Rapid Transit*) yang difokuskan di Kota Pontinak dan Singkawang. **(Bappeda, Dishub | Bappenas, Kemenhub)**
- Mendorong pemberian insentif fiskal terhadap investasi pengembangan industri pengolahan lanjutan dari komoditas kelapa sawit serta mengimplementasikan program intensifikasi kebun sawit melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan petani plasma, dan dukungan mekanisasi pertanian yang difokuskan di Kab. Ketapang, Sanggau (Smelter Bauksit), Sintang, Landak, Kapuas Hulu, Melawi, Sambas (kelapa sawit). **(Bappeda, Distan, Disperindag | Bappenas, Kemenkeu, Kementan, Kemenperin, BKPM)**
- Mendorong integrasi PSN seperti Pelabuhan Internasional Kijing dan kawasan industri dengan investasi lokal untuk menciptakan *multiplier effect yang difokuskan di* Kab. Mempawah, Ketapang, Kubu Raya Kota Pontianak. **(Bappeda, Disperindag, DPMPTS | Bappenas, Kemenkeu, Kemenperin, BKPM)**

Highlight EPD Provinsi Kalimantan Barat

Capaian Optimal

Persentase Kondisi Mantap Jalan

Faktor Pendukung:

- Peningkatan dan pembangunan jalan secara masif oleh pemerintah, termasuk pembangunan jalan perbatasan dan antar kabupaten
- Pengembangan jalan arteri yang menghubungkan kawasan industri, pelabuhan, dan pusat ekonomi utama.
- Kegiatan pemeliharaan jalan secara berkala, termasuk perbaikan jalan yang rusak dan peningkatan kualitas jalan yang sudah ada
- Alokasi anggaran yang memadai untuk pembangunan dan perbaikan jalan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah

Indeks Kerukunan Umat Beragama

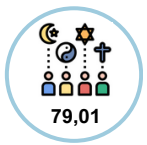

Faktor Pendukung:

- Nilai-nilai budaya lokal yang mengedepankan toleransi dan gotong-royong memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat
- FKUB Kalimantan Barat secara konsisten memfasilitasi dialog antarumat beragama dan bertindak sebagai mediator dalam mencegah potensi konflik.
- Keterlibatan Pemuka Agama dan Pemuda dalam Aktivitas Sosial

Indeks SPBE

Faktor Pendukung:

- Upaya pengintegrasian berbagai layanan digital untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien
- Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengembangkan serta mengimplementasikan aplikasi layanan digital
- Pelatihan aparatur sipil negara (ASN) dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN dalam mengelola aplikasi dan sistem berbasis SPBE
- Penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kalimantan Barat, termasuk jaringan internet di wilayah perkotaan dan pedesaan

Rekomendasi

- Mendorong penyelesaian pembangunan jalan paralel perbatasan, peningkatan kualitas jalan lintas antar kabupaten, serta akses jalan ke wilayah-wilayah terpencil untuk mengurangi isolasi ekonomi yang difokuskan di Kab. Sambas, Sanggau, dan Kapuas Hulu (Perbatasan), Sintang-Kapuas Hulu, Ketapang-Kayong Utara, dan Sambas-Bengkayang (antar kabupaten), Melawi, Sekadau, dan Kapuas Hulu (wilayah terpencil). **(Bappeda, Dinas PU | Bappenas, KemenPU)**
- Optimalisasi Jalan di Wilayah Ekonomi Khusus melalui Pembangunan jalan menuju kawasan industri, termasuk akses langsung ke Pelabuhan Kijing yang difokuskan di Kab. Mempawah, Ketapang, Landak, Kota Pontianak. **(Bappeda, Dinas PU | Bappenas, KemenPU)**
- Meningkatkan pengawasan dan pemiliharaan terhadap infrastruktur jalan eksisting di antaranya melalui penguatan pengawasan beban kendaraan, rambu lalu lintas, regulasi khusus angkutan barang komoditas besar dan logistik serta preservasi dan peningkatan kapasitas mutu jalan yang dilaksanakan di seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Barat. **(Bappeda, Dinas PU, Dishub | Bappenas, Kemen PU, Kemenhub)**
- Memfokuskan pembangunan jalan dan jembatan di daerah terpencil yang sulit dijangkau, terutama untuk desa-desa penghasil komoditas unggulan yang di antaranya dapat melalui pemanfaatan dana Inpres Jalan dan pemanfataan DAK. yang difokuskan di Kab. Kapuas Hulu, Sambas, Ketapang, Sintang. **(Bappeda, Dinas PU, Dinas Perhubungan | Bappenas, Kemen PU, Kemenhub)**
- Pelaksanaan dialog rutin antar umat beragama yang dipandu oleh FKUB dan Forkopimda Kalimantan Barat, serta menyelenggarakan kegiatan sosial yang melibatkan semua kelompok agama, seperti gotong royong, pembangunan fasilitas umum, dan pengadaan rumah ibadah bersama yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat. **(Bappeda, Forkopimda, FKUB | Bappenas, Kemenag)**
- Pengintegrasian layanan digital untuk tata kelola pemerintahan yang efisien melalui pengembangan satu platform *e-government* yang dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat. **(Bappeda, Diskominfo | Kemenkomdigi, Kemen PAN RB)**
- Pelatihan terstruktur bagi ASN dalam pengelolaan aplikasi dan sistem berbasis SPBE terutama untuk materi terkait keamanan data, penggunaan sistem *e-government*, serta pengelolaan aplikasi yang mendukung efisiensi layanan publik yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat. **(Bappeda, Diskominfo | Kemenkomdigi)**
- Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diiringi dengan pengembangan pusat data (*data center*) yang dapat mendukung kebutuhan data pemerintah yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat. **(Bappeda, Diskominfo | Kemenkomdigi)**

Highlight EPD Provinsi Kalimantan Barat

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Laju Pertumbuhan Ekonomi 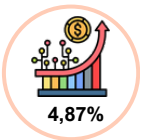 **4,87%**	**Faktor Penghambat:** • Produksi industri karet yang terkontraksi disebabkan permasalahan dalam penyediaan bahan baku akibat penurunan produktivitas karet alam	Program Revitalisasi Perkebunan Karet melalui peningkatan produktivitas karet dengan memberikan subsidi bibit unggul karet kepada petani melalui koperasi berbasis komunitas di sentra perkebunan serta mendukung pelatihan budidaya modern yang difokuskan di Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu, Sanggau (sentra perkebunan karet). **(Dinas Perkebunan, Koperasi Petani Karet | Kementan, Badan Litbang Pertanian | Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (GAPKINDO)).**
	• Volume ekspor bauksit Kalimantan Barat yang sempat terkontraksi akibat kebijakan larangan ekspor	Pengembangan ekspor produk hilir bauksit melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (*smelter*) dengan insentif fiskal seperti pembebasan pajak penghasilan (PPh) dan bea masuk untuk investasi peralatan pabrik serta diversifikasi pasar ekspor untuk produk hilir bauksit dengan menggandeng mitra baru yang difokuskan di Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu, Sanggau (sentra perkebunan karet). **(Bappeda, DisESDM, Disperin | Bappenas, KemenESDM, BKPM)**
	• Perubahan iklim (*La Nina*) yang berakibat bencana alam seperti banjir membuat potensi gagal panen	Pembangunan sistem irigasi tahan banjir dan perlindungan lahan pertanian di wilayah rawan bencana serta menyediakan program asuransi pertanian dalam upaya memitigasi potensi dan kerugian akibat gagal panen yang difokuskan di Kabupaten Sambas, Landak, Bengkayang (rawan banjir dan sawah utama). **(Bappeda, Dinas Pertanian, BPBD | Kementan, BNPB | PT Jasindo)**
	• Proyek strategis pemerintah yang telah masuk tahap finalisasi atau penyelesaian	Mendorong penyusunan peta jalan pemanfaatan infrastruktur strategis seperti pelabuhan dan kawasan industri baru untuk menarik investor serta mengintegrasikan proyek strategis dengan sektor lain, seperti pertanian dan perdagangan, melalui klasterisasi ekonomi yang difokuskan di Kota Pontianak, Mempawah, Kubu Raya (lokasi proyek utama). **(Bappeda, Pemkab/Kota, Bappeda, Dinas PU, Dihub | Bappenas, Kemenkoekon, KemenPU, Kemenhub)**
	• Belum beroperasinya seluruh smelter bauksit atau pabrik aluminia	Meningkatkan pelatihan tenaga kerja lokal dengan fokus pada keahlian teknis pengolahan bauksit dan operasionalisasi pabrik yang difokuskan di Kab. Ketapang, Mempawah (lokasi smelter). **(Bappeda, DisESDM, Disperin, Disnaker | Bappenas, KemenESDM, Kemenaker)**
Tingkat Pengangguran Terbuka 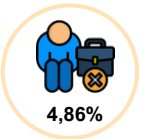 **4,86%**	**Faktor Penghambat:** • Belum beroperasinya seluruh smelter bauksit atau pabrik aluminia	Mendorong regulasi pengutamaan rekrutmen tenaga kerja lokal khususnya bagi perusahaan pertambangan dan konstruksi yang difokuskan di Kab. Ketapang, Mempawah, dan Kubu Raya (sentra aktivitas pertambangan dan konstruksi). **(Bappeda, DPMPTSP, Dinas ESDM, Disperin, Disnaker, DiskopUKM | Bappenas, Kemenperin, Kemen ESDM, Kemenaker)**
	• Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas, dimana adanya kenaikan angka angkatan kerja yang tidak diiringi kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menurun yang mencerminkan adanya tantangan dalam penyerapan angkatan kerja baru	
	• Penurunan jumlah tenaga kerja pada sektor konstruksi dan pertambangan	
Indeks Pembangunan Manusia **71,19**	**Faktor Penghambat:** • Kesenjangan ketersediaan infrastruktur dasar, dimana masih banyak kabupaten/kota di Kalimantan Barat memiliki akses sanitasi layak yang sangat rendah.	Pengembangan infrastruktur sanitasi di kawasan dengan cakupan akses terendah, seperti toilet komunal dan sistem pengolahan limbah sederhana di desa terpencil serta perluasan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang difokuskan di Kab. Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Sambas, dan Melawi. **(Dinkes; Dinas PUPR) | Kemenkes; Kemen PKP)**
	• Angka rata-rata lama sekolah di beberapa kabupaten masih rendah, menunjukkan keterbatasan akses ke pendidikan berkualitas.	Mendorong pemerataan jumlah dan kualitas sekolah dan tenaga pendidik khususnya di wilayah perdesaan atau terpencil yang difokuskan di Kab. Kapuas Hulu, Sintang, Ketapang, Sambas. **(Bappeda, Disdik | Bappenas, Kemindikdasmen)**
	• Belum meratanya jumlah tenaga pendidik dan tenaga kesehatan khususnya di wilayah-wilayah 3T	Pengembangan *Community Learning and Development Center* (CLDC) dalam rangka penyediaan layanan pendidikan nonformal, pemeriksaan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam satu lokasi yang dikelola secara terintegrasi yang difokuskan di Kab. Kapuas Hulu, Sintang, Ketapang, Sambas. **(Bappeda, Disdik, Dinkes, Dinasker)**
	• Sarana dan prasana layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan yang belum merata antardaerah	

Highlight EPD Provinsi Kalimantan Barat

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
PDRB per Kapita (ADHB) 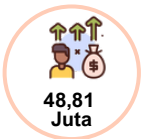 **48,81 Juta**	**Faktor Pendukung:** • Tenaga kerja yang masih didominasi pekerja di sektor primer terutama pertanian dan perkebunan yang memiliki kondisi sektoral dengan nilai tambah relatif rendah	Diversifikasi ekonomi sektoral melalui hilirisasi pertanian dan perkebunan melalui pemberian insentif pajak atau bantuan subsidi bagi investasi swasta yang mendukung industrialisasi sektor primer yang difokuskan di Kab. Kabupaten Sintang, Ketapang, Sanggau. **(Bappeda, DPMPTSP, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Diskop UKM | Bappenas, Kemenperin, Kemen ESDM)**
	• Terbatasnya ketersediaan jumlah lapangan kerja formal	Peningkatan akses lapangan kerja formal melalui Program Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan dengan peningkatan kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta yang difokuskan di Kota Pontianak, Singkawang, Kubu Raya. **(Bappeda, DPMPTSP, Disnaker | Bappenas, BKPM, Kemenaker)**
	• Tingginya pekerja informal dan setengah pengangguran menjadi kendala dalam memperkuat daya beli masyarakat dan kontribusi terhadap PDRB per kapita	Pemberian akses permodalan mikro kepada pelaku usaha informal melalui kredit usaha rakyat (KUR) dengan suku bunga rendah serta perlindungan sosial pekerja informal melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang difokuskan di Kab. Melawi, Sambas, Kapuas Hulu. **(Diskop UKM, Dinas Ketenagakerjaan | Bappenas, BKPM, Kemenaker, BPJS Ketenagakerjaan, Perbankan, platform *e-commerce*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK))**
Indeks Daya Saing Daerah 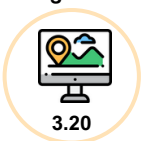 **3.20**	**Faktor Pendukung:** • Terbatasnya kapasitas dan kualitas infrastruktur di Kalimantan Barat, baik dari sisi konektivitas, energi, mapun ketersediaan air bersih yang mempengaruhi efisiensi ekonomi.	Mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan lintas utama, jembatan strategis, serta pelabuhan laut dan sungai untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah serta memperluas akses air bersih melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah dengan akses terbatas yang difokuskan di Kab. Kapuas Hulu, Sambas, Sanggau **(Bappeda, Diskop UKM, Dinas PU| Bappenas, Kemen PU, Kemenhub)**
	• Terbatasnya akses ke lembaga keuangan, dimana masih banyak daerah di Kalimantan Barat yang kurang terjangkau oleh lembaga keuangan formal serta kurangnya perkembangan industri keuangan yang mampu mengakomodasi kebutuhan investasi lokal.	Meningkatkan kehadiran lembaga keuangan formal di daerah perdesaan dengan mendirikan cabang bank mikro dan koperasi kredit berbasis komunitas yang difokuskan di Kab. Ketapang, Melawi, Sekadau. **(Bappeda, Dinas koperasi dan UKM, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Kemenkop, OJK)**
	• Belum optimalnya dukungan kebijakan untuk mengurangi hambatan pasar bagi UKM serta kurangnya infrastruktur pasar yang mendukung	Membentuk pasar lokal yang terintegrasi dengan pusat distribusi dan logistik berbasis digital untuk memperluas akses produk UKM yang difokuskan di Kota Pontianak, Kubu Raya, Sambas, Sintang. **(Bappeda, Diskop UKM, Dinas PU| Bappenas, Kemen PU, Kemenhub)**
Indeks Risiko Bencana (IRBI) **138.92**	**Faktor Pendukung:** • Risiko bencana yang disebabkan oleh kebakaran hutan, banjir, cuaca ekstrim, dan tanah longsor.	Penguatan sistem mitigasi bencana dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta melaksanakan kampanye terpadu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lahan tanpa bakar dan dampak perubahan iklim yang difokuskan di Kab. Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu. **(Bappeda, Dinas LH, BPBD | Kemen LH, Kemenhut, BNPB, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM))**
	• Tingginya angka deforestasi dan kerusakan ekosistem yang disebabkan pembukaan atau alih fungsi lahan menjadi lahan perkebunan dan pertambangan yang berdampak pada menurunanya daya dukung alam untuk mengurangi potensi bahaya dan kerentanan bencana.	Penegakan hukum dan rehabilitasi ekosistem untuk mengatasi deforestasi khususnya melalui pelaksanaan moratorium alih fungsi lahan di kawasan lindung dan hutan gambut serta memperketat pengawasan perizinan perkebunan dan tambang Kab. Sanggau, Sekadau, Melawi. **(Bappeda, Dinas LH, BPBD, DPMPTSP | Kemen LH, BNPB, Kemenhut, Kemen Investasi/BKPM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM))**

21. Kalimantan Tengah

Highlight EPD Provinsi Kalimantan Tengah

Capaian Optimal

Tingkat Pengangguran Terbuka

Faktor Pendukung:

- Mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan
- Terdapat penyelenggaraan program pelatihan kerja dan peningkatan kapasitas SDM

Rasio Gini

Faktor Pendukung:

- Potensi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dapat membuka lapangan pekerjaan
- Mengadakan program penjualan sembako murah

Pertumbuhan PDB Perikanan

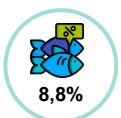

Faktor Pendukung:

- Potensi di sektor perikanan, khususnya untuk komoditas udang vaname
- Pengembangan *shrimp estate* di Kabupaten Sukamara

Rekomendasi

- Percepatan adopsi proses produksi yang berteknologi tinggi di sektor pertanian, seperti traktor, alat mekanisasi, dan alat panen modern, untuk meningkatkan produktivitas **(Kementan, Dinas TPHP, Dinas Ketahanan Pangan)**
- Mengadakan program pelatihan dan pengembangan SDM melalui kerja sama dengan sektor swasta untuk menyediakan pelatihan teknis dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja **(Kemnaker, Disnakertrans, Disdagperin)**
- Mendorong pengembangan UMKM melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan, pendampingan pengelolaan bisnis, pemberian bantuan modal dan subsidi khusus, serta perluasan akses pasar **(Kemnaker, Kadin, Disnakertrans)**
- Perluasan pasar untuk hasil panen udang vaname dari *shrimp estate* melalui kegiatan promosi dan expo **(KKP, Kemenperin, Kadin, Dislutkan)**
- Peningkatan kapasitas produksi *shrimp estate* melalui penyaluran tambak modern, *cold storage* untuk penyimpanan hasil panen, sistem pemberian pakan otomatis, serta laboratorium pendukung **(KKP, Dislutkan)**

Highlight EPD Provinsi Kalimantan Tengah

Capaian Kurang Optimal

Laju Pertumbuhan Ekonomi

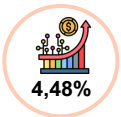

4,48%

Faktor Penghambat:

- Perlambatan sektor pertambangan dan penggalian:
  - Penurunan produksi komoditas bauksit dikarenakan adanya moratorium ekspor
  - Fluktuasi harga komoditas batubara
- Perlemahan kinerja ekspor luar negeri akibat menurunnya permintaan global

Tingkat Kemiskinan

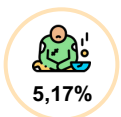

5,17%

Faktor Penghambat:

- Penurunan hasil panen komoditas pertanian dan perkebunan yang diakibatkan oleh kondisi cuaca yang kurang baik
- Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian yang cenderung memiliki penghasilan rendah
- Dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan kenaikan jumlah penduduk miskin

Rekomendasi

- Percepatan perbaikan jaringan jalan dan jembatan, pembangunan infrastruktur pelabuhan dan energi untuk mendukung kegiatan tambang dan pengangkutan hasil tambang secara efisien **(KemenPU, Kemenhub, KemenESDM)**
- Mendorong pembangunan industri pengolahan seperti smelter atau pabrik untuk meningkatkan nilai tambah **(KemenESDM, Dinas ESDM)**
- Peningkatan diversifikasi hasil tambang dengan mendorong eksplorasi logam tanah jarang dan komoditas mineral lainnya yang memiliki nilai strategis **(KemenESDM, Dinas ESDM)**
- Perluasan pasar untuk hasil panen udang vaname dari *shrimp estate* melalui kegiatan promosi dan expo **(KKP, Kemenperin, Kadin, Dislutkan)**
- Mendorong hilirisasi komoditas sawit untuk meningkatkan diversifikasi ekonomi serta resiliensi perekonomian daerah **(Kementan, Dinas TPHP, Disbun)**
- Mengadakan program pelatihan dan pengembangan SDM melalui kerja sama dengan sektor swasta untuk menyediakan pelatihan teknis dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja **(Kemnaker, Disnakertrans, Disdagperin)**
- Mendorong pengembangan UMKM melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan, pendampingan pengelolaan bisnis, pemberian bantuan modal dan subsidi khusus, serta perluasan akses pasar **(Kemnaker, Kadin, Disnakertrans)**
- Penerapan program *central mapper* untuk meningkatkan akurasi penyaluran intervensi yang berkaitan dengan kemiskinan **(Kemensos, Kemenkeu, Bappenas)**

Highlight EPD Provinsi Kalimantan Tengah

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Persentase Kondisi Mantap Jalan **85,25%**	**Faktor Penghambat:** • Pembangunan infrastruktur konektivitas (jalan dan jembatan) dan pelayanan dasar yang belum optimal	Percepatan perbaikan jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan wilayah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, barang, serta jasa **(KemenPU, Kemenhub, Dinas PUPR, Dishub)**
	• Tingginya risiko bencana alam, seperti banjir dan kebakaran hutan	Penerapan *early warning system* sebagai upaya mitigasi kebakaran hutan dan banjir **(KemenLH, BNPB, Dinas LH)**
Rasio Elektrifikasi **97,36%**	**Faktor Penghambat:** • Kondisi geografis menjadi kendala dalam pemerataan akses listrik	Mendorong pemerataan infrastruktur listrik untuk daerah terpencil dan pedesaan dengan memberikan bantuan pemasangan serta subsidi untuk biaya pemakaian **(KemenESDM, Dinas ESDM, PLN)**
	• Kapasitas dan kualitas infrastruktur konektivitas (jalan dan jembatan) yang masih terbatas di daerah pedesaan	Pembangunan unit-unit sekolah baru di daerah yang terpencil serta revitalisasi fasilitas dan gedung sekolah **(Kemendikdasmen, KemenPU, Disdik)**
		Pemutakhiran data penduduk miskin untuk meningkatkan akurasi penyaluran intervensi yang berbentuk bantuan beasiswa yang disertai dengan peningkatan alokasi beasiswa untuk masyarakat miskin **(Kemensos, Disdik, Dinsos)**
Indeks Pembangunan Manusia **74,28**	**Faktor Penghambat:** • Angka Harapan Lama Sekolah yang masih belum optimal	Penerapan program sekolah alternatif melalui pengembangan sekolah berbasis komunitas serta sistem pembelajaran modular untuk siswa di wilayah migrasi atau terpencil **(Kemendikdasmen, Disdik)**
	• Belum optimalnya program bantuan beasiswa pendidikan	
	• Fasilitas dan akses pendidikan yang belum merata di seluruh daerah	Menerapkan program *telemedicine* dan puskesmas keliling untuk memberikan pelayanan kesehatan dari jarak jauh dan secara *mobile* ke daerah yang masuk dalam kategori terpencil **(Kemenkes, Dinkes)**

22. Kalimantan Selatan

Highlight EPD Provinsi Kalimantan Selatan

Capaian Optimal

Laju Pertumbuhan Ekonomi

5,01%

Faktor Pendukung:

- Proyek infrastruktur PSN (Jalan, Bendungan Riam Kiwa)
- Peningkatan kinerja sektor pertanian (padi dan kelapa sawit) dan pertambangan (Batubara), industri pengolahan (CPO)
- Peningkatan realisasi investasi swasta, e.g Pembangunan smelter nikel di Kab. Tanah Bumbu, konstruksi tambang di Kab. Tabalong
- Memiliki potensi SDA (batubara, padi, kelapa sawit, karet, perikanan, dan pariwisata)

Tingkat Kemiskinan

4,11%

Faktor Pendukung:

- Kinerja sektor pertanian yang meningkat akibat siklus panen raya
- Adanya program-program peningkatkan infrastruktur pelayanan dasar dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat
- Mengoptimalkan pemutakhiran kualitas data yang digunakan sebagai dasar perencanaan program penanggulangan kemiskinan

Rasio Gini

0,302

Faktor Pendukung:

- Kinerja sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan yang meningkat
- Adanya program-program peningkatkan infrastruktur pelayanan dasar dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat

Rekomendasi

- Pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi (panjang jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara) guna memperlancar akses dan distribusi barang **(Kemenhub, KemenPU, Dishub, dan Dinas PUPR)**
- Meningkatkan pengembangan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui peningkatan infrastruktur irigasi, pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan teknologi pertanian yang berkelanjutan **(Kementan, KemenPU, Distan, Dinas PUPR)**
- Penguatan diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor nontambang seperti industri pengolahan, pariwisata, dan jasa, melalui perkuatan infrastruktur dan insentif bagi investor **(Bappeda Provinsi, Distan, Dispar, Dinas PUPR)**
- Perluasan akses layanan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan terutama di daerah yang sulit dijangkau karena faktor geografis dan masih berada dalam kawasan hutan **(Kemendikdasmen, Dinas Pendidikan)**
- Perluasan akses layanan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan terutama di daerah yang sulit dijangkau karena faktor geografis dan masih berada dalam kawasan hutan **(Kemenkes, Dinas Kesehatan)**
- Pemberdayaan *high value economy* dan *commodity* bagi masyarakat lokal **(Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Disbuntan)**
- Pemenuhan infrastruktur layanan dasar (infrastruktur sumber daya air, transportasi dan konektivitas antarkawasan dan intrakawasan, ketenagalistrikan, telekomunikasi dan informatika, perumahan dan kawasan permukiman) **(KemenPU, Dinas PUPR, Dinas ESDM, PLN)**
- Optimalisasi pemenuhan akses sanitasi dan air minum aman universal **(Dinas PUPR)**
- Penyediaan data kemiskinan yang lebih akurat dan valid melalui Satu Data Kemiskinan (**Kemensos, BPS, Kemen PPN/Bappenas, Dinas Sosial**)

Highlight EPD Provinsi Kalimantan Selatan

Capaian Optimal		Rekomendasi
Tingkat Pengangguran Terbuka **4,20%**	**Faktor Pendukung:** • Adanya upaya meningkatkan kompetensi dan daya saing sehingga angkatan kerja dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja	Memperluas program pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan Pendidikan vokasi dengan fokus pada kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan pasar/industri yang mencakup pelatihan *softskill* dan *hardskill* **(Kemenperin, Kemnaker, Disnakertrans)**
	• Adanya program dari daerah seperti penyediaan bursa kerja dan Program Kartu Prakerja	Memperluas penyediaan bursa kerja dan peningkatan penciptaan lapangan kerja **(Disnakertrans)**
Indeks Demokrasi Provinsi **80,44**	**Faktor Pendukung:** • Peningkatan dalam aspek-aspek seperti Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik, dan Lembaga Demokrasi	Mendorong kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah **(DPPA)**
		Memperbaiki kualitas dan transparansi lembaga-lembaga demokrasi, seperti parlemen, lembaga pengawas, dan badan-badan independen lainnya **(Badan Kesbangpol)**
	• Adanya peningkatan dalam kebebasan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik	Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan politik, serta melindungi hak-hak individu untuk menyuarakan pendapat dan mengambil bagian dalam proses demokrasi **(Badan Kesbangpol)**
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan **4,48**	**Faktor Pendukung:** • Memiliki potensi sektor pertanian dan perikanan yang cukup melimpah	Optimalisasi peningkatan akses terhadap pangan sehat dan bergizi melalui bantuan pangan dan peningkatan disktribusi pangan **(Dinas Ketahanan Pangan)**
		Peningkatan edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan bergizi seimbang melalui penyuluhan, seminar, dan kampanye media termasuk mengedukasi para petani untuk menghasilkan pangan kaya nutrisi dan mengoptimalkan keberagaman jenis pangan lokal **(Dinas Ketahanan Pangan)**
	• Inflasi dan harga pangan yang cukup terkendali	Mendorong masyarakat untuk diversifikasi produk pangan lokal seperti dan pemanfaatan teknologi pertanian **(Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan)**
	• adanya peningkatan produksi pangan lokal terutama padi	Optimalisasi pengendalian harga pangan melalui Operasi Pasar dan Pasar Murah untuk mengendalikan komoditas bahan pokok penting seperti beras minyak goreng, tepung terigu, bawang, dan telur ayam ras **(Bank Indonesia, Disperin, Dinas Perdagangan)**

Highlight EPD Provinsi Kalimantan Selatan

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Indeks Pembangunan Manusia **75,19**	**Faktor Penghambat:** • Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik yang kompeten sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah	Perluasan akses layanan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan **(Kemendikdasmen, Dinas Pendidikan)**
	• Belum optimalnya kualitas dan layanan kesehatan	Perluasan akses layanan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan **(Kemenkes, Dinas Kesehatan)**
	• Belum optimalnya keterampilan dan kompetensi SDM serta produktivitas yang masih rendah	Pemberdayaan *high value economy and commodity* bagi masyarakat lokal (pertanian, perkebunan, dan perikanan) **(Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan)**
	• Keterbatasan infrastruktur terutama di daerah terpencil (termasuk TIK)	Pemenuhan infrastruktur layanan dasar (infrastruktur sumber daya air, transportasi dan konektivitas antarkawasan dan intrakawasan, ketenagalistrikan, telekomunikasi dan informatika, perumahan dan Kawasan permukiman **(Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM)**
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun **8,95** Tahun	**Faktor Penghambat:** • Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik yang kompeten sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah	Memperluas program pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan Pendidikan vokasi dengan fokus pada kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan pasar/industri yang mencakup pelatihan *softskill* dan *hardskill* **(Kemenperin, Kemenaker dan Disnakertrans)**
	• Angka putus sekolah masih cukup tinggi di daerah terpencil	Pengembangan/peningkatan perguruan tinggi akademik/vokasi STEAM **(Kemendiktisaintek)**
Pembentukan Modal Total Bruto **21,52%**	**Faktor Penghambat:** • Masih terbatasnya investasi baik PMA maupun PMDN yang saat ini masih didominasi oleh sektor pertambangan dan pertanian	Pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi (panjang jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara) guna memperlancar akses dan distribusi barang **(Kemenhub, KemenPU, Dinas Perhubungan, dan Dinas PUPR)**
	• Belum optimalnya promosi investasi yang berkelanjutan	Memperluas jangkauan promosi investasi dan penyediaan insentif fiskal seperti pengurangan pajak dan pembebasan bea masuk untuk menarik investor asing **(BKPM, DPMPTSP)**
	• Belum adanya *matchmaking* dalam rangka kemitraan dunia usaha	

Highlight EPD Provinsi Kalimantan Selatan

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Prevalensi *Stunting* 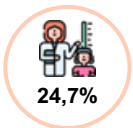 **24,7%**	**Faktor Penghambat:**	
	• Sistem sanitasi dan lingkungan yang kurang baik	Peningkatan budaya Gerakan Pola Bersih Hidup Sehat (PHBS) terutama masyarakat di pinggiran sungai **(Kemenkes dan Dinkes)**
	• Masih tingginya kasus perkawinan anak	Mengoptimalisasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (RADPPUA) **(DPPA)**
	• Kesalahan pola asuh anak	Mengoptimalisasi program 8.000 hari pertama kehidupan (HPK) untuk mencegah kasus *stunting*, melalui pemenuhan kesehatan dan gizi remaja putri sebagai calon ibu di masa depan **(Dinkes, Bappeda)**
	• Masih tingginya prevalensi anemia gizi pada perempuan khususnya remaja putri dan ibu hamil	Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak terutama bagi daerah-daerah dengan prevalensi *stunting* yang cukup tinggi **(KemenPU, Dinas PUPR)**
		Meningkatkan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik dan pola asuh yang sehat **(Dinkes, Dinas Ketahanan Pangan)**
		Meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan kesehatan termasuk pelayanan gizi, imunisasi, dan perawatan kesehatan umum untuk ibu dan anak **(Dinkes)**
Indeks SPBE **2,69**	**Faktor Penghambat:**	
	• Belum tersusunnya strategi untuk pemenuhan indikator baru terutaman pada Domain Manajemen SPBE	Mendorong penyusunan strategi untuk pemenuhan indikator baru terutama pada domain manajemen SPBE **(Diskominfo)**
	• Belum tersedianya seluruh dokumen Perencanaan Strategis (Probis terintegrasi, Arsitektur dan Peta Rencana SPBE)	Mendorong penyusunan dokumen perencanaan strategis SPBE (probis terintegrasi, arsitektur dan peta rencana SPBE) **(Diskominfo)**

23. Kalimantan Timur

Highlight EPD Provinsi Kalimantan Timur

Capaian Optimal		Rekomendasi
Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,19%	**Faktor Pendukung:** • Potensi sektor pertanian, terutama komoditi perkebunan (kelapa, kelapa sawit)	Pengelolaan SDA yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan **(KemenLH, Kemenhut, Kementan, Bappeda, Dinas LH, Dinas Kehutanan, Dispertan, Dinas PUPR-PERA)**
	• Permintaan ekspor batubara dan migas masih cukup kuat	Akselerasi upaya transformasi ekonomi yang diimplementasikan melalui strategi pengembangan kawasan industri **(Kemenperin, Dinas Perindagkop UKM)**
	• Meningkatnya aktivitas hilirisasi industri, pengembangan sektor industri (RDMP, Semen, Smelter, CPO, Minyak Goreng)	
PDRB Per Kapita (ADHB) 215,76 Jt	• Pembangunan IKN dan infrastruktur penunjangnya	Pembangunan infrastruktur penunjang superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara **(Bappenas, KemenPU, Bappeda, Dinas PUPR-PERA)**
	• Pelatihan pemberdayaan masyarakat miskin melalui BUMDes	Peningkatan realisasi investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing dengan berfokus pada potensi lokal (SDA, Pariwisata, wilayah strategis IKN) **(BKPM, Kemenpar, Kementan, DPMPTSP, Dispar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)**
		Pelatihan pemberdayaan masyarakat miskin melalui BUMDes untuk meningkatkan pendapatan masyarakat **(KemendesPDT, Kemensos, Kemenkop, KemenUMKM, Bappeda, Dinas PMPD, Dinsos, Dinas Perindagkop UKM)**
Indeks Pembangunan Manusia 78,79	**Faktor Pendukung:** • Penyediaan kualitas layanan kesehatan masyarakat dengan prinsip non diskriminatif	Peningkatan akses dan layanan kesehatan dengan prinsip non diskriminatif serta optimalisasi bantuan kesehatan untuk masyarakat miskin **(Kemenkes, Kemensos, Dinkes, Dinsos)**
	• Adanya bantuan iuran kesehatan masyarakat miskin untuk peningkatan UHC	
	• Tersedianya bantuan pendidikan berupa Beasiswa Kaltim	Optimalisasi pengadaan beasiswa pada semua jenjang pendidikan terutama untuk penduduk miskin **(Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Kemensos, Disdikbud, Dinsos)**
	• Penerapan kebijakan dan program wajib belajar 12 tahun secara intensif	

Highlight EPD Provinsi Kalimantan Timur

Capaian Optimal

Tingkat Kemiskinan

Faktor Pendukung:

- Penyediaan kualitas layanan kesehatan masyarakat dengan prinsip non diskriminatif
- Adanya bantuan iuran kesehatan masyarakat miskin untuk peningkatan UHC
- Tersedianya bantuan pendidikan berupa Beasiswa Kaltim
- Terdapat pemetaan potensi dan masalah kemiskinan melalui penyusunan data partisipatif desa/kelurahan
- Pelatihan pemberdayaan masyarakat miskin melalui BUMDes
- Perbaikan akses dan kualitas fasilitas pelayanan dasar (sanitasi, air minum, air baku, rumah tidak layak huni)

RT dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

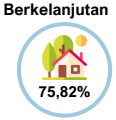

Faktor Pendukung:

- Perbaikan akses dan kualitas fasilitas pelayanan dasar (sanitasi, air minum, air baku, rumah tidak layak huni)

RT dengan Sanitasi Layak dan Aman

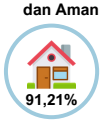

Rekomendasi

- Peningkatan akses dan layanan kesehatan dengan prinsip non diskriminatif serta optimalisasi bantuan kesehatan untuk masyarakat miskin **(Kemenkes, Kemensos, Dinkes, Dinsos)**
- Optimalisasi pengadaan beasiswa pada semua jenjang pendidikan terutama untuk penduduk miskin **(Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Kemensos, Disdikbud, Dinsos)**
- Pemutakhiran data kemiskinan hingga level desa/kelurahan **(Kemensos, Bappenas, Dinsos, Bappeda)**
- Pelatihan pemberdayaan masyarakat miskin melalui BUMDes untuk meningkatkan pendapatan masyarakat **(KemendesPDT, Kemensos, Kemenkop, KemenUMKM, Bappeda, Dinas PMPD, Dinsos, Dinas Perindagkop UKM)**
- Optimalisasi pembangunan infrastruktur dasar (sanitasi, air bersih, air baku, dan rumah layak huni) **(KemenPU, KemenPKP, Dinas PUPR-PERA)**
- Penerapan Sistem Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di desa-desa atau area perkotaan **(KemenPU, KemenPKP, Dinas PUPR-PERA)**
- Perluasan jaringan air bersih dari PDAM untuk wilayah yang sulit dijangkau **(KemenPU, KemenPKP, Dinas PUPR-PERA)**
- Rehabilitasi kawasan resapan air dan mata air yang rusak akibat aktivitas manusia **(KemenPU, KemenPKP, Dinas PUPR-PERA)**

Highlight EPD Provinsi Kalimantan Timur

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Tingkat Pengangguran Terbuka **5,14%**	**Faktor Penghambat:** • Belum optimalnya keterhubungan antara kebutuhan pasar tenaga kerja Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dengan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten • Rendahnya kompetensi/keterampilan angkatan kerja • Penyediaan lingkup pendidikan vokasi yang belum selaras dengan DUDI	Peningkatan kompetensi tenaga kerja (*supply system*) yang selaras dengan kebutuhan DUDI (*demand system*) **(Kemnaker, Kemenperin, Disnaker)** Optimalisasi dan penyesuaian kurikulum SMK dengan kebutuhan pasar kerja **(Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Dinas Pendidikan)**
Rasio Gini **0,321**	**Faktor Penghambat:** • Belum optimalnya peran BUMdes dan Kelompok Usaha Bersama/KUBE di tingkat tapak sebagai penggerak utama klaster ekonomi lokal berbasis keuntungan komparatif dan kompetitif wilayah • Ketersediaan layanan infrastruktur serta aksesibilitas-konektivitas wilayah yang belum merata hingga wilayah pedalaman	Peningkatanperan BUMDes dan KUBE sebagai penggerak utama klaster ekonomi lokal berbasis keuntungan komparatif dan kompetitif wilayah **(KemendesPDT, Kemensos, Kemenkop, KemenUMKM, Bappeda, Dinas PMPD, Dinsos, Dinas Perindagkop UKM)** Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur konektivitas dan infrastruktur digital terutama di daerah 3T **(KemenPU, Kemenkomdigi, Dinas PUPR-PERA, Diskominfo)**
Indeks Risiko Bencana **144,43**	**Faktor Penghambat:** • Masih tingginya risiko bencana terutama yang berpotensi pada banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dll	Peningkatan upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana seperti kebakaran hutan dan lahan serta banjir **(BNPB, BPBD)** Perencanaan adaptasi perubahan iklim melalui pembangunan rendah karbon dan transisi energi **(KemenESDM, Dinas ESDM)**
Persentase Kondisi Mantap Jalan **89,31%**	**Faktor Penghambat:** • Ketersediaan layanan infrastruktur serta aksesibilitas-konektivitas wilayah yang belum merata hingga wilayah pedalaman	Pengembangan klaster pariwisata di sekitar Ibu Kota Negara dan pariwisata berbasis budaya dan ekowisata di wilayah seperti Berau (Kepulauan Derawan) dan Kutai Kartanegara **(Kemenpar, Dispar)** Pengembangan infrastruktur dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata **(Kemenpar, KemenPU, Dispar, Dinas PUPR-PERA)**
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 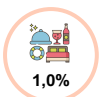 **1,0%**	**Faktor Penghambat:** • Belum optimalnya aspek pelayanan dan konektivitas wilayah sebagai keuntungan kompetitif pada pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif • Pengembangan sektor pariwisata dan ekraf (termasuk UMKM)	Optimalisasi diversifikasi pariwisata (wisata alam, wisata budaya dan buatan) dengan memperhatikan ekowisata berkelanjutan **(Kemenpar, KemenLH, Dispar, Dinas LH)**

24. Kalimantan Utara

Highlight EPD Provinsi Kalimantan Utara

Capaian Optimal

Tingkat Pengangguran Terbuka

Rasio Gini

PDRB per Kapita (ADHB)

Faktor Pendukung:

- Sektor perkebunan dan perikanan yang prima (kelapa sawit, kelapa, kakao, rumput laut, udang, dll).
- Kepadatan penduduk masih rendah dan lingkungan sosial yang relatif homogen.
- Meningkatnya lapangan kerja terutama di sektor konstruksi dan administrasi pemerintahan (Pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) dan PLTA Mentarang, serta pengadaan jasa pemerintahan)
- Aktivitas pertambangan masih masih berkontribusi signifikan pada perekonomian, lapangan kerja, dan pendapatan penduduk.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Faktor Pendukung:

- Kepadatan penduduk masih rendah dan lingkungan sosial yang relatif homogen.
- Dominasi tutupan lahan perkebunan dan belum luasnya lahan terbangun

Indeks Kerukunan Umat Beragama

Faktor Pendukung:

- Kepadatan penduduk masih rendah dan lingkungan sosial yang relatif homogen.
- Meningkatnya kesadaran toleransi antar umat bergama

Rekomendasi

Peningaktan nilai tambah hasil perkebunan dan perikanan melalui pengembangan hilirisasi SDA terutama pada bidang perkebunan dan perikanan:

- Kelapa dan rumput laut (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, dan Kota Tarakan)
- Perikanan budidaya (Kab. Tana Tidung)
- Perkebunan dan hasil hutan (Kab. Malinau dan Kab. Nunukan)

(BKPM, Disbun, Dinas KP, Disperindagkop, dan DPMPTSP Prov. Kaltara)

Peningkatan aksesibilitas perpindahan barang dan jasa melalui Afirmasi Regulasi (Inpres percepatan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar serta logistik). **(Kemenkoinfra, KemenPU, dan Kemenhub)**

Penguatan kebijakan *link and match* dunia pendidikan dengan DUDI terutama dalam rangka penyiapan pengoperasian KIHI melalui:

- optimalisasi perencanaan pendidikan formal dan non formal terutama melakukan pemetaan dan pengembangan minat, bakat, dan jenjang karir peserta didik
- optimalisasi sistem informasi lapangan pekerjaan dan pelatihan kerja
- pengembangan fasilitas pelatihan dan tenaga pengajar tenaga kerja yang memadai

(Disdikbud dan Disnakertrans Prov. Kaltara)

Penguatan pengendalaian pemanfaatan ruang terutama pada kawasan hutan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi eksisting (Kota Tarakan, Kawasan Perkotaan Tajung Selor, Kawasan Industri Hijau Indonesia, dll). **(KemenATR/BPN, Kemenhut, Kemenperin, dan Dinas PUPR dan Perkim Prov. Kaltara)**

Optimaliasi dampak aktivitas pertambangan dan perkebunan (kelapa sawit) terhadap perekonomian, lingkungan alam, dan lingkungan sosial melalui:

- Moratorium pemberian izin baru dan evaluasi menyeluruh bagi usaha pertambangan Batubara dan Perkebunan Kelapa Sawit
- Pengawasan Intensif dan Komprehensif terhadap Izin pertambangan Batubara dan Perkebunan Kepala Sawit

(KemenLH, Kemenhut, DinasLH, dan Disbun Prov. Kaltara)

Penguatan toleransi dan moderasi antar umat beragama melalui pengoptimalan peran forum kerukunan umat beragama (FKUB). **(Kemenag)**

Highlight EPD Provinsi Kalimantan Utara

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Laju Pertumbuhan Ekonomi **4,54%**	**Faktor Penghambat:** • Minimnya hilirisasi dan diversifikasi produk turunan berbasis SDA dan adanya *illegal logging* di kawasan perbatasan • Terbatasnya konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar • Kawasan perkotaan yang belum optimal • Pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal	Pengembangan hilirisasi SDA terutama pada bidang perkebunan dan perikanan: • Kelapa dan rumput laut (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, dan Kota Tarakan) • Perikanan budidaya (Kab. Tana Tidung) • Perkebunan dan hasil hutan (Kab. Malinau dan Kab. Nunukan) **(BKPM, Kemendag, Disbun, Dinas KP, Disperindagkop, dan DPMPTSP Prov. Kaltara)** Penguatan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan keamanan lintas batas negara **(Kemendag, BNPP, dan Kemenhut)** Peningkatan aksesibilitas perpindahan barang dan jasa melalui Afirmasi Regulasi (Inpres percepatan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar serta logistik). **(Kemenkoinfra, KemenPU, dan Kemenhub)**
Pembentuk Modal Tetap Bruto **26% PDRB**	**Faktor Penghambat:** • Terbatasnya konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar • Pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal • Terbatasnya ketersediaan tenaga kerja terampil dan profesional yang mendukung investasi • Belum optimalnya tata kelola pemerintahan terutama yang mendukung penarikan investasi (regulasi, SDM, dan fasilitas)	Penguatan pengendalaian pemanfaatan ruang terutama pada kawasan hutan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi eksisting (Kota Tarakan, Kawasan Perkotaan Tajung Selor, Kawasan Industri Hijau Indonesia, dll). **(KemenATR/BPN, Kemenhut, Kemenperin, dan Dinas PUPR dan Perkim Prov. Kaltara)** Penguatan kebijakan *link and match* dunia pendidikan dengan DUDI melalui: 1. Optimalisasi perencanaan pendidikan formal dan non formal terutama melakukan pemetaan dan pengembangan minat, bakat, dan jenjang karir peserta didik 2. Optimalisasi sistem informasi lapangan pekerjaan dan pelatihan kerja 3. Pengembangan fasilitas pelatihan dan tenaga pengajar tenaga kerja yang memadai **(Disdikbud dan Disnakertrans Prov. Kaltara)**
Indeks SPBE **2,83**	**Faktor Penghambat:** • Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital bidang pemerintahan	Reformasi tata kelola pemerintahan darerah melalui: 1. Peningkatan kualitas SDM aparatur di daerah (Penerapan *merit system,* pelatihan, dan penerapan *reward and punishment*) 2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi bidang pemerintahan (peningkatan fasilitas dan SDM digital) 3. Dukungan Desentralisasi Pemerintahan di Prov. Kalimantan Utara (pembentukan Satker Pemerintah Pusat di Kaltara, percepatan Otonomi Daerah) 4. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah **(KemenPANRB, Komdigi, Bappeda, BKD, Diskominfo Prov. Kaltara)**

Highlight EPD Provinsi Kalimantan Utara

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Tingkat Kemiskinan **6,32%**	**Faktor Penghambat:** • Dominasi lapangan kerja sektor primer (terutama perorangan) belum mampu memenuhi standar hidup layak	Pengembangan hilirisasi SDA terutama pada bidang perkebunan dan perikanan: • Kelapa dan rumput laut (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, dan Kota Tarakan) • Perikanan budidaya (Kab. Tana Tidung) • Perkebunan dan hasil hutan (Kab. Malinau dan Kab. Nunukan) **(BKPM, Kemendag, Disbun, Dinas KP, Disperindagkop, dan DPMPTSP)**
	• Infrastruktur dasar yang dibangun belum termanfaatkan secara optimal	Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dasar melalui pengawasan, pengecekan, dan perbaikan secara berkala, serta penguatan sinergi dengan kepala pemerintahan terkecil dan tokoh masyarakat dalam pemanfaatannya **(Dinas PUPR dan Perkim Prov. Kaltara)**
	• Konsumsi masyarakat didominasi komoditi makanan dan berasal dari luar daerah terpengaruh besar oleh tinggi dan berfluktuasinya harga makanan	Peningkatan aksesibilitas perpindahan barang dan jasa melalui Afirmasi Regulasi (Inpres percepatan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar serta logistik). **(Kemenkoinfra, KemenPU, dan Kemenhub)**
Skor Pola Pangan Harapan **82,9**	**Faktor Penghambat:** • Infrastruktur konektivitas dan logistik belum memadai yang berakibat pada tingginya harga pangan	
	• Ketersediaan pangan cenderung tidak stabil	Optimalisasi pengendalian ketersedian dan diversifikasi pangan daerah melalui perbaikan produksi dan penguatan kerja sama dengan daerah lain. **(Distanhanpan)**
	• Kurangnya kebijakan dalam hal penguatan dan diversifikasi cadangan pangan	Penguatan kebijakan dan regulasi diversifikasi ketersediaan pangan berbasis pemanfaatan komuditas lokal dan pemberdayaan masyarakat **(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)**
Indeks Risiko Bencana **148,16**	**Faktor Penghambat:** • Upaya penanggulangan bencana belum optimal	Penguatan Manajemen Risiko Bencana sebagai salah satu orientasi pembangunan. **(Bappeda Litbang Prov. Kaltara)**
	• Penyediaan dan pengelolaan data dan informasi kebencanaan yang belum optimal	Peningakatan fasilitas penanganan bencana terutama pada unit-unit yang berada di sekitar daerah dengan kejadian bencana yang cukup intens **(BNPB dan BPBD Prov. Kaltara)**
	• Koordinasi antar *stakeholder* belum optimal	Optimalisasi perencanaan penanggulan bencana yang lebih terstruktur dan terperinci. **(BPBD Prov. Kaltara)**
		Peningkatan sinergi dengan berbagai *stakeholder* dalam pembangunan sistem penanggulangan bencana (perangkat daerah, *non state actors*, dan masyarakat). **(OPD, NGO, Swasta, dan Masyarakat)**

Highlight EPD Provinsi Kalimantan Utara

Capaian Kurang Optimal

Indeks Pembangunan Manusia

72,88

Angka Keberhasilan Pengobatan TBC

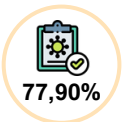

77,90%

Faktor Penghambat:

1. Dimensi Kesehatan

- Terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap budaya hidup sehat terutama di daerah 3T
- Terbatasnya akses ekonomi masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan
- Terbatasnya fasilitas dan tenaga kesehatan, serta akses transportasi terutama di daerah 3T

2. Dimensi Pengetahuan

- Terbatasnya fasilitas dan tenaga pendidikan, serta akses transportasi terutama di daerah 3T
- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan
- Konsistensi kurikulum pendidikan

3. Dimensi Standar Hidup Layak

- Rendahnya pendapatan masyarakat

Rekomendasi

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui:
- peningkatan kesadaran, kemauan, kemampuan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat
- peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas dan SDM kesehatan yang memadai
- kebijakan subsidi dan pelayanan kesehatan gratis

(Kemenkes dan Dinkes Prov. Kaltara)

Pengembangan infrastruktur transportasi terutama di daerah 3T berupa:
- pengembangan akses jalan yang memadai dan terhubung dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan
- pengembangan transportasi publik

(KemenPU, Kemenhub, Dinas PUPR dan Perkim, dan Dishub Prov. Kaltara)

Peningkatan tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat melalui:
- peningkatan kualitas ekosistem pendidikan masyarakat terutama mendorong motivasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan
- peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas dan SDM pendidikan yang memadai
- pengembangan sekolah berpola asrama

(Kemendikdasmen dan Disdikbud Prov. Kaltara)

Kajian konsistensi dan kualitas kebijakan kurikulum pendidikan
(Kemendikdasmen)

Penguatan kebijakan pemberdayaan SDM lokal dalam pembangunan daerah
(Bappeda Litbang dan Disnakertrans Prov. Kaltara)

25. Sulawesi Utara

Highlight EPD Provinsi Sulawesi Utara

Capaian Optimal

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Faktor Pendukung:

- Kontribusi besar terhadap PDRB dari sektor pertanian (kelapa, cengkeh) dan perikanan (ikan, udang)
- Kebijakan Mari Jo Ba Kobong
- *Direct Call* Manado-Jepang-Singapura (mendukung perdagangan komoditas unggulan)
- Program Wirausaha Unggulan Sulawesi Utara (WANUA) dan Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA). Program pendampingan intensif yang dilakukan kepada pengusaha dari sisi hulu – PATUA dan pengusaha dari sisi hilir – WANUA
- Potensi Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

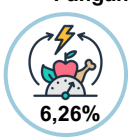

Faktor Pendukung:

- Kontribusi besar terhadap PDRB dari sektor pertanian (kelapa, cengkeh) dan perikanan (ikan, udang)
- Kebijakan Mari Jo Ba Kobong

Rekomendasi

- Peningkatan produktivitas sektor unggulan (pertanian, perikanan dan pariwisata) serta diversifikasi sektor ekonomi dan pangan **(Kemenkopangan, Kementan, KemenKP, Kemenekraf, Kemenpar, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas KP, Dispar)**
- Perluasan akses pasar dan ekspor komoditas unggulan daerah (pertanian dan perikanan) **(Kemendag, Kementan, KemenKP, BKPM, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas KP, Disperindag)**
- Pengembangan *entrepreneur/agropreneur mindset* pelaku usaha yang *agile* dan berkelanjutan **(Kemnaker, KemenUMKM, Disnakertrans, Dinas KUKM)**
- Pengembangan skala usaha UMKM dan klaster pertanian **(Kemenkoekon, KemenUMKM, Kemendag, Kemenperin, Kementan, Disperindag, Dinas KUKM, Dinas Pertanian dan Peternakan)**
- Pengembangan UMKM ekspor dan penunjang pariwisata **(KemenUMKM, Kemenekraf, Kemenpar, Dinas KUKM, Dispar)**
- Percepatan pembangunan pariwisata (alam, bahari, budaya dan buatan) dengan implementasi *blue, green, and circular economy* **(Kemenekraf, Kemenpar, Dispar)**

Highlight EPD Provinsi Sulawesi Utara

Capaian Optimal		Rekomendasi
Indeks Pembangunan Manusia **75,68**	**Faktor Pendukung:** • Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan • Pembangunan rumah sakit • Pembangunan infrastruktur pendidikan dan peningkatan kualitas pengajaran • Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C Optimal • Program "Mapalus Pendidikan"/Gerakan Transformasi Pendidikan	Peningkatan kualitas akses, mutu, dan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan terutama di daerah terpencil dan wilayah kepulauan dengan penguatan sistem informasi dan teknologi **(Kemendikdasmen, Kemenkes, KemendesPDT, Kemenkomdigi, Dinkes, Dinas Pendidikan)** Optimalisasi distribusi tenaga kesehatan dan guru yang berkualitas terutama di daerah terpencil di wilayah kepulauan **(Kemendikdasmen, Kemenkes, Dinkes, Disdik)**
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun **9,94 Tahun**	**Faktor Pendukung:** • Pembangunan infrastruktur pendidikan dan peningkatan kualitas pengajaran • Program "Mapalus Pendidikan"/Gerakan Transformasi Pendidikan • Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C Optimal	Penyediaan unit sekolah baru dan infrastruktur penunjangnya terutama di daerah terpencil di wilayah kepulauan **(Kemendikdasmen, KemendesPDT, Dinas Pendidikan)** Optimalisasi mutu pendidikan melalui Gerakan Transformasi Pendidikan **(Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, KemendesPDT, Dinas Pendidikan)**
Indeks Pemberdayaan Gender 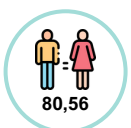 **80,56**	**Faktor Pendukung:** • Peningkatan jumlah perempuan yang menduduki posisi di parlemen dan jabatan publik • Kesetaraan dalam akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan posisi manajerial	Optimalisasi kebijakan pemerintah daerah yang mendorong kesetaraan gender di berbagai sektor, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan politik **(KemenPPPA, Kemnaker, Kemendikdasmen, Kemendagri, Dinas PPPAD, Disnakertrans, Dinas Pendidikan)** Penyuluhan tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang dilakukan secara rutin **(KemenPPPA, Dinas PPPAD)**

Highlight EPD Provinsi Sulawesi Utara

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Tingkat Pengangguran Terbuka **5,85%**	**Faktor Penghambat:** • *Mismatch* antara tenaga kerja dan lapangan pekerjaan • Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan ketrampilan (vokasi) • Pencari kerja yang memiliki pendidikan tinggi cenderung memilih-memilih pekerjaan • Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tinggi menimbulkan kompetisi tinggi bagi pencari kerja dari luar dan dalam daerah • Program *Job Fair* yang belum optimal	Optimalisasi *link and match* Dunia Usaha dan Dunia Industri melalui pendidikan dan pelatihan berbasis industri **(Kemnaker, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Kemenperin, Kemendag, Disnakertrans, Dinas Pendidikan, Disperindag)** Optimalisasi dan penyesuaian kurikulum SMK dengan kebutuhan pasar kerja **(Kemnaker, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Kemenperin, Kemendag, Disnakertrans, Dinas Pendidikan, Disperindag)** Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja lokal **(Kemnaker, Disnakertrans)** Optimalisasi keterlibatan dan kerjasama perusahaan/swasta dalam pelaksanaan *Job Fair* **(Kemnaker, Disnakertrans)**
Tingkat Kemiskinan 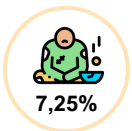 **7,25%**	**Faktor Penghambat:** • Penetapan status masyarakat miskin sering kali dipengaruhi oleh preferensi subyektif • Belum optimalnya pemutakhiran data penduduk miskin • Inflasi yang tinggi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat	Optimalisasi Data Terpadu Kemiskinan melalui pemutakhiran data Regsosek dalam mendukung verifikasi dan validasi data kemiskinan **(Bappenas, Kemensos, BPS, Dinsos)** Optimalisasi pengendalian inflasi melalui penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah **(TPID)**
Rasio Gini **0,360**	**Faktor Penghambat:** • Belum optimalnya pemerataan pembangunan antar wilayah sebagai penunjang lapangan usaha produktif	Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas yang mendukung kawasan strategis daerah **(KemenPU, KemenPKP, Kemenhub, Dinas PUPR, Dishub)**
Indeks SPBE 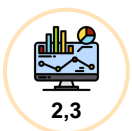 **2,3**	**Faktor Penghambat:** • Digitalisasi birokrasi dan keamanan siber masih belum optimal	Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan berbasis digital dan penguatan infratruktur digital **(Kemendagri, Kominfo, KemenPANRB)** Percepatan transformasi proses layanan publik **(Kemendagri, Kominfo, KemenPANRB)**

Highlight EPD Provinsi Sulawesi Utara

Capaian Kurang Optimal

Prevalensi *Stunting*

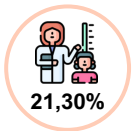

Faktor Penghambat:

- Aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting* yang belum optimal
- Rendahnya cakupan layanan esensial Percepatan Penurunan *Stunting*
- Tingkat pernikahan usia dini masih tinggi

Crime rate

Faktor Penghambat:

- Masih tingginya kejahatan konvensional seperti pencurian dan perampokan, pemerasan, tawuran antar warga, penganiayaan dan kekerasan, penghinaan, pembunuhan, dan lain-lain
- Tingginya kejahatan transnasional seperti peredaran narkotika, penyelundupan barang dan senjata, perdagangan satwa liar, *human trafficking*, *illegal fishing*, *money laundering*, dan lain-lain

Rekomendasi

- Penguatan aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting* dan integrasi program lintas sektor **(Kemenkes, BKKBN, KemenPKP, Dinkes, DisPUPR, DisdukcapilKB)**
- Peningkatan peran *stakeholders* dan tokoh masyarakat serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader masyarakat **(BKKBN, Kemenkes, Bappeda, Dinkes, DisdukcapilKB)**
- Optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan gerakan masyarakat hidup sehat, perbaikan pola asuh anak, penyuluhan gizi ibu dan anak, serta penyuluhan terkait pernikahan dini **(BKKBN, Kemenkes, Dinkes)**
- Percepatan penurunan prevalensi *stunting* dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik setempat **(Kemenkes, BKKBN, KemenPKP, Dinkes, Dinas PUPR, DisdukcapilKB)**
- Peningkatan akses terhadap pangan bergizi dan pemanfaatan produk pangan lokal dan berkelanjutan **(Kemekopangan, Kemenkes, Dinas Ketahanan Pangan, Dinkes)**
- Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak **(Kemenkes, Dinkes)**
- Peningkatan infrastruktur dan fasilitas sanitasi dan air bersih **(KemenPKP, Dinas PUPR)**
- Peningkatan penjagaan, pengawalan dan patroli rutin di ruang publik **(Kemenkopolkam, Kemenhan, TNI, POLRI)**
- Modernisasi sistem pelaporan kejahatan termasuk sistem emergensi nasional serta penanganan kejahatan secara cepat **(Kemenkopolkam, Kemenhan, TNI, POLRI)**
- Penguatan keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar **(Kemenkopolkam, Kemenhan, TNI, POLRI)**

26. Sulawesi Tengah

Highlight EPD Provinsi Sulawesi Tengah

Capaian Optimal

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Faktor Pendukung:

- Peningkatan produksi dan nilai tambah sektor unggulan daerah (pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan) yang berbasis kawasan
- Kinerja sektor pertambangan (nikel) terus tumbuh didorong oleh meningkatnya produksi industri pengolahan
- Pengembangan infrastruktur daerah dalam mendukung peningkatan produksi sektor unggulan

Kontribusi PDB Industri Pengolahan

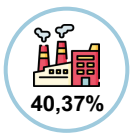

Faktor Pendukung:

- Kinerja sektor pertambangan (nikel) terus tumbuh didorong oleh meningkatnya produksi industri pengolahan

Rasio Gini

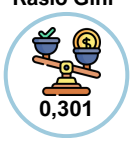

Faktor Pendukung:

- Penyediaan akses yang lebih baik terhadap pinjaman, modal, dan pasar untuk IKM dan UMKM
- Pembinaan dan pengembangan UMKM

Rekomendasi

- Peningkatan nilai tambah (*added value*) sumberdaya alam dan diversifikasi ekonomi sektor unggulan daerah menjadi produk baru yang lebih tinggi nilai ekonomisnya **(Kemenkoekon, Kementan, KemenKP, KemenESDM, Dinas TPH, Disbunnak, Dinas KP, Dinas ESDM)**
- Peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah (rumput laut, garam, kelapa, kakao, padi, sapi dll) yang berbasis kawasan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat menjaga kualitas, kuantitas dan kontinuitas hasil produksi **(Kemenkoekon, Kementan, KemenKP, Dinas TPH, Disbunnak, Dinas KP)**
- Peningkatan pelatihan dan kompetensi petani/pekebun/peternak/nelayan dan pelaku usaha untuk peningkatan produksi/produktivitas komoditas unggulan, mengolah hasil panen dan kemampuan manajerial dalam hal berwirausaha **(Kementan, KemenKP, KemenUMKM, Dinas TPH, Disbunnak, Dinas KP, Dinas KUKM)**
- Perluasan akses pasar dan ekspor komoditas unggulan daerah dengan membangun jejaring pemasaran dan perbaikan tata niaga komoditas **(Kemendag, Kementan, KemenKP, BKPM, Disperindag, Dinas TPH, Disbunnak, Dinas KP, DPMPTSP)**
- Penguatan hilirisasi industri berbasis komoditas nikel **(KemenESDM, Dinas ESDM)**
- Pengembangan rantai pasok antara industri besar dengan IKM dan UMKM **(KemenUMKM, Kemenperin, Kemendag, Dinas KUKM, Disperindag)**
- Peningkatan akses terhadap layanan keuangan dan edukasi literasi keuangan **(Kemenkeu, BPKAD)**
- Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur daerah dalam rangka mengurangi kesenjangan atau disparitas pembangunan antarwilayah **(KemenPU, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang)**

Highlight EPD Provinsi Sulawesi Tengah

Capaian Optimal

Tingkat Pengangguran Terbuka

2,94%

Faktor Pendukung:

- Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja lokal
- Pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar dunia usaha dan dunia industri
- Pemanfaatan teknologi digital dan internet untuk menghubungkan pekerja dengan peluang kerja

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

79,93

Faktor Pendukung:

- Peningkatan kinerja pengelolaan limbah B3, sampah, dan ruang terbuka hijau

Rekomendasi

- Penciptaan lapangan kerja yang merata sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal yang memperhatikan konsep *decent job* atau pekerjaan layak **(Kemnaker, Disnakertrans)**
- Peningkatan pelatihan dan sertifikasi pekerja baik secara *offline* maupun *online* **(Kemnaker, Kemenkomdigi, Disnakertrans, Diskominfosantik)**
- Optimalisasi platform pencarian kerja dan *freelance* **(Kemnaker, Kemenkomdigi, Disnakertrans, Diskominfosantik)**
- Peningkatan kerja sama pemerintah dengan kemitraan swasta untuk memperluas jangkauan lapangan pekerjaan **(Kemenkoekon, Kemnaker, Disnakertrans)**
- Peningkatan infrastruktur pengolahan limbah **(KemenLH, Dinas LH)**
- Pengendalian pencemaran air di sektor industri **(KemenLH, Dinas LH)**
- Optimalisasi bank sampah dan pengembangan program daur ulang sampah **(KemenLH, Dinas LH)**
- Penggunaan teknologi pengolahan sampah modern **(KemenLH, Dinas LH)**
- Pembangunan dan perluasan ruang terbuka hijau **(KemenLH, Dinas LH)**
- Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah dan sampah yang baik serta menjaga kebersihan RTH **(KemenLH, Dinas LH)**

Highlight EPD Provinsi Sulawesi Tengah

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Tingkat Kemiskinan 11,77%	**Faktor Penghambat:** • Program-program penurunan kemiskinan yang tidak terkoordinasi dengan baik antar instansi, menyebabkan tumpang tindih atau bahkan konflik dalam pelaksanaan	Penguatan koordinasi terhadap program-program penurunan kemiskinan **(TNP2K, Kemensos, Bappeda, Dinsos)**
	• Ketidakakuratan data mengenai kemiskinan menghambat penentuan kebijakan yang tepat sasaran	Optimalisasi pemanfaatan dan pemutakhiran data Regsosek dalam mendukung verifikasi dan validasi data kemiskinan **(TNP2K, Bappenas, Kemensos, Bappeda, Dinsos)**
	• Pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan untuk berusaha	Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur daerah dalam rangka mengurangi kesenjangan atau disparitas pembangunan antar wilayah **(KemenPU, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang)**
	• Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum dirasakan merata oleh seluruh masyarakat (pertumbuhan ekonomi belum inklusif)	Penguatan pemberdayaan ekonomi desa **(KemendesPDT, DPMD)**
Indeks Pembangunan Manusia 72,24	**Faktor Penghambat:** • Pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan untuk berusaha	Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur daerah dalam rangka mengurangi kesenjangan atau disparitas pembangunan antarwilayah **(KemenPU, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang)**
	• Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan yang masih kurang	Peningkatan akses, mutu dan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih merata **(Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Dinkes, Dinas Pendidikan)**
	• Distribusi sarana pendidikan dan tenaga medis yang kurang merata	Optimalisasi pemerataan sarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidik dan kesehatan **(Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Dinkes, Dinas Pendidikan)**
Crime Rate 270 per 100.000 penduduk	**Faktor Penghambat:** • Masih tingginya kejahatan konvensional seperti pencurian dan perampokan, pemerasan, perkelahian antar kelompok, penodongan dan pemalakan, kekerasan fisik, dan pembunuhan	Peningkatan penjagaan, pengawalan dan patroli rutin di ruang publik **(Kemenkopolkam, Kemenhan, TNI, POLRI)**
	• Terdapat konflik kejahatan lingkungan terutama terkait pembalakan liar, perburuan satwa liar, pencemaran laut, konflik agraria, dan sengketa sumber daya	Modernisasi sistem pelaporan kejahatan termasuk sistem emergensi nasional serta penanganan kejahatan secara cepat **(Kemenkopolkam, Kemenhan, TNI, POLRI)**
	• Tingginya kejahatan transnasional seperti penyalahgunaan dan peredaran narkotika, penyelundupan barang, *human trafficking*, dan lain-lain	Penguatan keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar **(Kemenkopolkam, Kemenhan, TNI, POLRI)**
		Penguatan kampanye kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi melaporkan tindak kejahatan dan menjadi kunci keberhasilan upaya penanganan kejahatan **(Kemenkopolkam, Kemenhan, TNI, POLRI)**

Highlight EPD Provinsi Sulawesi Tengah

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Prevalensi *Stunting* 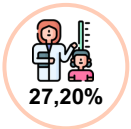 **27,20%**	**Faktor Penghambat:** • Aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting* yang belum optimal	Penguatan aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting* dan integrasi program lintas sektor **(Kemekopangan, Kemenkes, BKKBN, KemenPKP, Bappeda, Dinkes, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang)**
	• Tingkat pernikahan usia dini masih tinggi	Peningkatan peran *stakeholders* dan tokoh masyarakat serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader masyarakat **(BKKBN, Kemenkes, Bappeda, Dinkes)**
	• Rendahnya cakupan layanan esensial percepatan penurunan *stunting*	Optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan gerakan masyarakat hidup sehat, perbaikan pola asuh anak, penyuluhan gizi ibu dan anak, serta penyuluhan terkait pernikahan dini **(BKKBN, Kemenkes, Dinkes)**
		Percepatan penurunan prevalensi *stunting* dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik setempat **(Kemekopangan, Kemenkes, BKKBN, KemenPKP, Bappeda, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinkes)**
Skor Pola Pangan Harapan **81,20**	**Faktor Penghambat:** • Keterbatasan akses terhadap pangan yang beragam	Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak **(Kemenkes, Dinkes)**
	• Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pola konsumsi makan seimbang dan beragam	Peningkatan infrastruktur dan fasilitas sanitasi dan air bersih **(KemenPKP, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang)**
	• Produksi pangan lokal yang masih terbatas	Peningkatan akses terhadap pangan bergizi dan pemanfaatan produk pangan lokal dan berkelanjutan **(Kemekopangan, Kemenkes, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinkes)**
		Optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan tentang pola konsumsi pangan sehat **(Kemekopangan, Kemenkes, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinkes)**
Indeks Risiko Bencana **140,56**	**Faktor Penghambat:** • Masih rendahnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana, penguatan pengendalian rencana ruang wilayah dan pengendalian risiko bencana **(BNPB, BPBD)**

27. Sulawesi Selatan

Highlight EPD Provinsi Sulawesi Selatan

Capaian Optimal

Tingkat Kemiskinan

Faktor Pendukung:

- Pengendalian harga bahan pokok masyarakat dalam menekan inflasi
- Peningkatan alih fungsi lahan non produktif menjadi produktif
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat padat karya

Nilai Tukar Nelayan

Produksi Perikanan

Faktor Pendukung:

- Tingginya produksi perikanan (4,53 juta ton) pada tahun 2022 menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai produsen perikanan tertinggi di Indonesia
- Cukup optimalnya Program Aplikasi E-Sejuta Ikan, Program 1000 Rumpon, serta Program Gerai Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan (Gesit-19)
- Potensi Sektor Perikanan dan Kelautan (Ikan tangkap, ikan budidaya, rumput laut, udang)

Pembentukan Modal Total Bruto

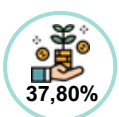

Faktor Pendukung:

- Meningkatnya investasi transportasi, perdagangan, dan logistik
- Meningkatnya investasi perumahan, kawasan industri, dan perkantoran
- Meningkatnya investasi industri pengolahan terutama industri makan minum dan industri pengolahan logam
- Tingginya investasi sektor pertambangan dan penggalian

Rekomendasi

- Penguatan kebijakan pengendalian inflasi stabilitas harga bahan pokok untuk menekan beban pengeluaran masyarakat **(DisTPHBUN, Disperindag, BI)**
- Penguatan kebijakan pengendalian inflasi stabilitas harga bahan pokok untuk menekan beban pengeluaran masyarakat **(DisTPHBUN, Disperindag, BI)**
- Peningkatan daya saing ekonomi melalui intensifikasi, ekstensifikasi, serta hilirisasi produk unggulan hasil laut seperti rumput laut, ikan tangkap, ikan budidaya, dan hasil laut lainnya **(KemenKP, DinasKP)**
- Mendorong keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan seperti Program Aplikasi E-Sejuta Ikan, Program 1000 Rumpon, serta Program Gerai Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan (Gesit-19) **(DinasKP)**
- Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri, salah satunya melalui pembangunan politeknik di sekitar kawasan industri terutama di Kab. Bantaeng dan Luwu Timur dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri **(Kemenperin, Kemnaker, Disperindag, Disnakertrans, Pengelola KI Bantaeng dan KI Malili)**
- Peningkatan infrastruktur konektivitas, air baku, air bersih, irigasi, serta pergudangan sebagai upaya optimalisasi potensi pertanian, perikanan, dan industri **(KemenPU, Dinas SDACKTR, Dinas BMBK, DisTPHBUN)**
- Memperkuat iklim investasi padat karya melalui kemudahan perizinan, reformasi birokrasi, serta peningkatan transparansi dan anti korupsi sebagai upaya dalam peningkatan investasi padat karya **(BKPM, DPMPTSP)**

Highlight EPD Provinsi Sulawesi Selatan

Capaian Optimal

Indeks Pembangunan Manusia

Faktor Pendukung:

- Cukup optimalnya usia harapan hidup
- Cukup optimalnya persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar
- Cukup optimalnya pengeluaran perkapita
- Pusat Jasa Pendidikan dan Kesehatan Kawasan Timur Indonesia

Indeks Pelayanan Publik & Indeks Daya Saing Daerah

Faktor Pendukung:

- Pusat Jasa Pendidikan dan Kesehatan Kawasan Timur Indonesia
- Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Optimal
- Pembangunan Mall Pelayanan Publik
- Potensi Simpul Transportasi, Perdagangan, dan Logistik Kawasan Timur Indonesia

Penerapan Standar Pelayanan Minimum

Faktor Pendukung:

- Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Optimal
- Cukup optimalnya penerapan standar pelayanan minimum:
  - Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar
  - Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
  - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman
  - Persentase mantap jalan
- Cukup optimalnya program kemitraan WASH (air bersih & sanitasi)

Rekomendasi

- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyuluhan gerakan masyarakat hidup sehat, peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan infrastruktur serta layanan kesehatan, serta penguatan jaringan pengamanan sosial dan bantuan kesehatan gratis bagi masyarakat **(Kemenkes, Dinkes)**
- Mendorong pemerataan layanan dasar terutama tenaga kesehatan sesuai standar di seluruh wilayah terutama di kawasan minim layanan dasar **(Kemenkes, Dinkes)**
- Penguatan kebijakan pengendalian inflasi stabilitas harga bahan pokok untuk menekan beban pengeluaran masyarakat **(DisTPHBUN, Disperindag, BI)**
- Peningkatan kompetensi SDM dosen dan peneliti, infrastruktur perguruan tinggi berskala internasional, layanan melalui *benchmarking,* serta kerjasama dengan institusi dan dunia kerja level global **(Kemediktisaintek, Kemnaker)**
- Pengembangan jaringan *fixed broadband* dan *mobile broadband* untuk mendukung kegiatan pendidikan, riset dan inovasi, serta kepariwisataan **(Kemenkomdigi)**
- Optimalisasi transformasi digital pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui digitalisasi pelayanan publik, *e-government*, transparansi anggaran, serta digitalisasi pelayanan publik satu pintu **(DPMPTSP)**
- Peningkatan kapasitas SDM aparatur daerah dalam transformasi digital pemerintah daerah **(KemenPANRB, Pemprov Sulawesi Selatan)**
- Peningkatan simpul transportasi serta penguatan akses pasar perdagangan nasional dan internasional melalui peningkatan fungsi pelabuhan internasional, perluasan jalur perkeretaapian, pembangunan jalan tol antar pusat perekonomian, serta optimalisasi moda transportasi umum darat, air, dan udara **(Kemenhub, Kemendag, KemenPU, Kemenperin, Dishub, Disperindag, Dinas BMBK)**
- Mendorong keberlanjutan optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penerapan standar pelayanan minimum secara optimal **(Pemprov Sulawesi Selatan)**
- Mendorong keberlanjutan kolaborasi multipihak dalam akselerasi pemenuhan infrastruktur layanan dasar **(Bappenas, KemenkoPU, Bappeda, Dinas SDACKTR, *Non State Actor*)**

Highlight EPD Provinsi Sulawesi Selatan

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Laju Pertumbuhan Ekonomi **4,90%**	**Faktor Penghambat:** • Belum optimalnya produktivitas pertanian dan hilirisasi produk unggulan pertanian	Percepatan intensifikasi pertanian melalui inovasi teknologi pertanian, peningkatan mutu benih dan pupuk, pelatihan petani muda, pengendalian penyakit dan hama, serta fasilitasi pemasaran dan sertifikasi produk pertanian **(Kementan, DisTPHBUN)**
	• Belum optimalnya inovasi teknologi serta regenerasi SDM pertanian	Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM terutama di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, serta industri **(Kemnaker, Disnaker)**
	• Isu kebencanaan (banjir dan kekeringan) dan perubahan iklim (*el-nino & la-nina*)	Penguatan mitigasi kebencanaan dan mendorong penguatan pengendalian pembangunan berorientasi ketahanan bencana dan perubahan iklim **(Bappenas, BNPB, KemenATR/BPN, KemenPU, KemenLH, Kemenhut, KemenESDM, Bappeda, Dinas SDACKTR, Dinas BMBK, DinasLHK, BPBD)**
	• Ketimpangan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan	
	• Tantangan infrastruktur dan konektivitas daerah terpencil dan minim layanan dasar	Pemerataan infrastruktur layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, konektivitas, ketenagalistrikan, dan hunian layak terutama di kawasan minim layanan dasar dan kantong kemiskinan **(KemenPU, KemenPKP, Kemendikdasmen, Kemenag, Kemenkes, KemenESDM, DinasPUPESDM, Disdikpora, Dinkes)**
	• Isu perlambatan ekonomi global dan geopolitik	
Rasio Gini **0,435**	**Faktor Penghambat:** • Masih tingginya kemiskinan terutama di wilayah perdesaan	Mendorong peningkatan daya saing dan memperluas pasar dalam negeri, membangun infrastruktur perdagangan yang memadai, serta menerapkan *good governance* untuk mendukung pemerataan pembangunan **(Bappeda, DPMPTSP, Disperindag, Dinas SDACKTR, Dinas BMBK)**
	• Rendahnya daya beli masyarakat miskin	
	• Ketimpangan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan	Mendorong keberlanjutan kolaborasi multipihak dalam akselerasi penurunan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat terutama di kantong kemiskinan **(Bappenas, Kemensos, KemenkoPMK, Kemenkop, KemenUMKM, Kemnaker, Bappeda, Dinsos, TNP2K, *Non State Actor*)**
Crime Rate **285** per 100.000 penduduk	**Faktor Penghambat:** • Tingginya konflik sosial antar kelompok masyarakat	Penguatan kebijakan pengendalian inflasi stabilitas harga bahan pokok untuk menekan beban pengeluaran masyarakat **(DisTPHBUN, Disperindag, BI)**
	• Tingginya kenakalan remaja dan maraknya *gangster*	Penguatan penyuluhan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum baik dari pihak kepolisian, sistem keamanan lingkungan, dan seluruh elemen masyarakat dalam upaya meningkatkan kemanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat. **(POLRI, Seluruh Elemen Masyarakat)**
	• Urbanisasi yang pesat tanpa dukungan infrastruktur yang memadai	

Highlight EPD Provinsi Sulawesi Selatan

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Prevalensi *Stunting* 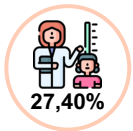 **27,40%**	**Faktor Penghambat:** • Rendahnya kesadaran gizi dan pola asuh • Cukup tingginya angka pernikahan dini • Rendahnya kesadaran dan *mindset* masyarakat terhadap penggunaan sanitasi layak dan aman terutama di perdesaan	Mendorong kolaborasi dengan pemuka agama dan tetua adat setempat dalam penyuluhan gerakan masyarakat hidup sehat, perbaikan pola asuh anak, penyuluhan gizi ibu dan anak, penyuluhan terkait pernikahan dini, serta literasi keuangan **(Kemenkes, KemenPPPA, Kemenag, BKKBN, Dinkes, Dinas PMD)**
	• Tantangan infrastruktur dan konektivitas daerah terpencil, pegunungan, dan kepulauan	Mendorong keberlanjutan kolaborasi multipihak dalam akselerasi penurunan *stunting* melalui pemerataan infrastruktur layanan dasar seperti seperti Program WASH (air bersih & sanitasi) terutama di Kab. Enrekang, Kep. Selayar, Barru, Jeneponto, Marros, Toraja Utara, Soppeng, dan Pangkep **(Bappenas, BKKBN, Kemensos, Kemenkes, TP2AK, Bappeda, Dinsos, Dinkes, *Non State Actor*)**
Tingkat Pengangguran Terbuka 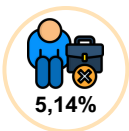 **5,14%**	**Faktor Penghambat:** • Belum optimalnya keterhubungan antara kebutuhan pasar tenaga kerja Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dengan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten	Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri, salah satunya melalui pembangunan politeknik dan sekolah vokasi di sekitar kawasan industri terutama di Kab. Bantaeng dan Luwu Timur dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri **(Kemenperin, Kemnaker, Disperindag, Disnakertrans, Pengelola KI Bantaeng dan KI Malili)**
	• Rendahnya kompetensi/keterampilan angkatan kerja • Penyediaan lingkup pendidikan vokasi yang belum selaras dengan dunia industri dan dunia usaha	Mendorong keberlanjutan kolaborasi multipihak dalam akselerasi penyediaan lapangan kerja **(Bappenas, Kemnaker, Bappeda, Disnaker, *Non State Actor*)**
	• Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Mendorong peningkatan *skill* dan kompetensi serta penyediaan lapangan kerja bagi pekerja perempuan **(Kemnaker, Disnaker, *Non State Actor*)**

28. Sulawesi Tenggara

Highlight EPD Provinsi Sulawesi Tenggara

Capaian Optimal		Rekomendasi
Laju Pertumbuhan Ekonomi **5,51%**	**Faktor Pendukung:** • Akselerasi kinerja sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan (sejalan dengan peningkatan harga komoditas perkebunan seperti kakao dan kopi)	Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri pengolahan berbasis mineral dan SDA (nikel, aspal, pertanian, perkebunan, dan perikanan) **(Bappeda, Disperindag, Distanak, Swasta)**
	• Akselerasi industri pengolahan dan ekspor didorong oleh baiknya permintaan olahan nikel dan perikanan Sulawesi Tenggara dari luar negeri yang didukung oleh situasi nilai tukar Rupiah	Pemanfaatan program pemerintah melalui APBN untuk asuransi pertanian JASINDO dalam rangka memitigasi dampak perubahan iklim **(Kementan, Distanak)**
	• Adanya intervensi terkait pengembangan ekonomi lokal (pertanian, perikanan, dan industri kecil) dan intervensi terkait perluasan lahan dan pompanisasi serta bantuan bibit	Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi (bendungan, jalan, air bersih, listrik) terutama daerah yang terpencil **(KemenPU, KemenESDM, Kemendes PDT, Dinas CK, Dinas ESDM, DPMD)**
	• Adanya intervensi terkait pembangunan infrastruktur (bendungan, jalan, air bersih, dan listrik)	Mempermudah dan meminimalkan hambatan pada proses administratif perizinan investasi, terutama bagi industri yang mendukung hilirisasi bahan alam dengan nilai tambah besar **(BKPM, DPMPTSP)**
Pembentukan Modal Tetap Bruto **36,37% PDRB**	**Faktor Pendukung:** • Proyek pembangunan kawasan industri baru di Sultra (PSN PT IKIP, IPIP, KKIT, CNI)	Mendorong investasi pada lapangan usaha potensial yang proses pembangunannya bersifat padat karya dan berdampak besar pada penyerapan tenaga kerja lokal, misalnya industri pengolahan pangan dan hasil perkebunan Sulawesi Tenggara **(BKPM, DPMPTSP)**
	• Adanya pembangunan *waterfront* Wakatobi	
Tingkat Pengangguran Terbuka **3,09%**	**Faktor Pendukung:** • Adanya peningkatan investasi dan pertumbuhan sektor pertambangan dan pertanian menjadi faktor pendorong terciptanya banyak lapangan kerja	Mendorong pengembangan UMKM yang merupakan unit usaha dengan *labor intensive* melalui peningkatan kapasitas, peningkatan akses pembiayaan dan pengembangan kelembagaan UMKM yang lebih baik **(Dinas KUKM)**
	• Adanya SMK khusus Pertanian	Pengembangan SDM unggul melalui penyiapan pendidikan vokasi sesuai dengan sektor unggulan daerah (pertambangan, pertanian, pariwisata) dan pelatihan yang sesuai dengan dunia kerja yang dibutuhkan **(Kemenperin, Kemendiktisaintek, Disdikbud)**
	• Pembangunan politeknik untuk pengembangan SDM Unggul (Nikel)	

Highlight EPD Provinsi Sulawesi Tenggara

Capaian Optimal		Rekomendasi
Indeks Demokrasi Provinsi 77,03	**Faktor Pendukung:** • Peningkatan partisipasi politik dan hak-hak politik, seperti hak untuk memilih dan dipilih	Mendorong peningkatan partisipasi politik, terjaminnya kebebasan berkumpul, berpendapat dalam setiap kebijakan, peningkatan akses masyarakat terhadap kebijakan publik, kinerja birokrasi dalam pelayanan publik **(Bakesbangpol)**
	• Adanya intervensi terkait peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Optimalisasi program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan **(Bakesbangpol)**
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 78,41	**Faktor Pendukung:** • Adanya kebijakan pembangunan daerah dan dukungan program yang berwawasan lingkungan	Penegakkan regulasi dalam upaya mengatasi isu prioritas dan pembangunan berwasasan lingkungan **(KemenLH, Dinas LH)**
	• Adanya regulasi dalam upaya mengatasi isu prioritas lingkungan hidup (isu pertambangan, alih fungsi lahan, pencemaran, kerusakan laut)	Rehabilitasi dan restorasi lahan yang telah dibuka untuk pertambangan, pengendalian pencemaran sungai dan kerusakan laut **(KemenLH, Dinas LH)**
Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan 74,01	**Faktor Pendukung:** • Adanya komitmen pemenuhan rumah yang layak huni	Optimalisasi pembangunan rumah layak huni terutama bagi kaum marjinal dan peningkatan penanganan kawasan permukiman kumuh **(KemenPU, Dinas PU)**
	• Adanya intervensi terkait Rusun untuk MBR, pelajar/mahasiswa	
	• Adanya rumah khusus untuk nelayan, dan masyarakat di daerah tertinggal	Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak **(KemenPU, Dinas CK, Dinas PU)**

Highlight EPD Provinsi Sulawesi Tenggara

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Tingkat Kemiskinan **11,21%**	**Faktor Penghambat:** • Keterbatasan infrastruktur (dasar, telekomunikasi, transportasi) • Masih banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau karena kurangnya infrastruktur jalan, listrik, dan air bersih • Banyaknya penduduk yang bekerja di sektor informal khususnya pertanian • Pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif	Pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas dan ekonomi khususnya di daerah terpencil **(KemenPU, KemenESDM, Kemendes PDT, Dinas CK, Dinas ESDM, DPMD)** Peningkatan kualitas SDM untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih tinggi **(Disdik, Disnaker)** Mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan **(Bappeda, Distanak, Dispar)** Melakukan pemberdayaan ekonomi terutama masyarakat miskin, pengembangan koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) **(Dinas KUKM, Dinsos)**
Rasio Gini **0,370**	**Faktor Penghambat:** • Ketimpangan pembangunan pada wilayah daratan dan kepulauan • Kondisi geografis yang beragam sehingga mempengaruhi akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi	Meningkatkan konektivitas antara pulau-pulau dan wilayah daratan melalui pengembangan infrastruktur transportasi seperti jembatan, pelabuhan, dan bandara **(KemenPU, Kemenhub, Dinas PU, Dishub)** Memperbaiki pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan sanitasi di wilayah kepulauan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat **(Disdik, Dinkes, Dinas PU)**
Indeks Pembangunan Manusia **73,62**	**Faktor Penghambat:** • Rendahnya produktivitas ekonomi • Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat • Keterbatasan sarana dan tenaga kesehatan yang memadai	Mendorong investasi pada lapangan usaha potensial yang proses pembangunannya bersifat padat karya dan berdampak besar pada penyerapan tenaga kerja lokal, misalnya industri pengolahan pangan dan hasil perkebunan (**BKPM, DPMPTSP**) Pemerataan kualitas, kuantitas, dan akses terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan **(Kemenkes, Dinkes)**
Usia Harapan Hidup **71,79** Tahun	**Faktor Penghambat:** • Tingkat kemiskinan yang tinggi menyebabkan masyarakat sulit untuk memperoleh makanan yang sehat dan layanan kesehatan yang diperlukan • Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas masih terbatas, terutama di daerah pedesaan • Masih tingginya angka gizi buruk khususnya pada anak-anak	Meningkatkan pemantauan balita, pemberian ASI kaya protein hewani bagi balita, dan tata laksana balita dengan masalah gizi (berat badan kurang, gizi kurang, gizi buruk dan stunting) **(Kemenkes, Dinkes)**

Highlight EPD Provinsi Sulawesi Tenggara

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Prevalensi *Stunting* 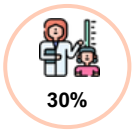 **30%**	**Faktor Penghambat:**	
	• Tingginya persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air bersih dan sanitasi layak	Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak terutama bagi daerah-daerah dengan *stunting* yang cukup tinggi **(KemenPU, Dinas PUPR, Kemenkes, Dinkes)**
	• Pernikahan pada usia dini masih cukup tinggi	Meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang bahaya pernikahan dini melalui program-program pendidikan di sekolah dan komunitas **(KemenPPPA, DPPAKB)**
	• Kondisi ekonomi masyarakat yang kurang memadai	Pemberdayaan *high value economy and commodity* bagi masyarakat lokal (pertanian, perkebunan, dan perikanan) **(Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Dinas Kelautan dan Perikanan)**
	• Terdapat pengukuran anak stunting yang berbeda	Satu data pengukuran prevalensi *stunting* agar data lebih valid dan *realtime* **(Kemenkes, Dinkes, BKKBN)**
Kontribusi PDB Industri Pengolahan **8,73%**	**Faktor Penghambat:**	
	• Perlambatan permintaan sebagai dampak *oversupply* olahan nikel dunia dan penjadwalan *maintenance* bulanan baru yang menyebabkan menurunnya produksi	Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri pengolahan berbasis mineral dan SDA (nikel, aspal, pertanian, perkebunan, dan perikanan) **(Bappeda, Disperindag, Distanak, Swasta)**
	• Industri pengolahan di Sulawesi Tenggara masih terfokus pada beberapa produk utama, seperti minyak sawit dan pertambangan	Memperluas program pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan Pendidikan vokasi dengan fokus pada kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan pasar/industri yang mencakup pelatihan *softskill* dan *hardskill* **(Kemenperin, Kemenaker dan Disnakertrans)**
	• Keterbatasan dalam akses terhadap pelatihan dan keterampilan	Pengembangan/peningkatan perguruan tinggi akademik/vokasi STEAM **(Kemendiktisaintek)**
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum **0,51%**	**Faktor Penghambat:**	
	• Belum optimalnya Infrastruktur pendukung pariwisata dan promosi pariwisata, serta peningkatan SDM pariwisata	Mendorong optimalisasi pengembangan pariwisata khususnya di DPP Wakatobi seperti pembangunan konektivitas dan infrastruktur pendukung, termasuk SDM pariwisata **(Kemenpar, Kemenhub, KemenPU, Dispar, Dishub, Dinas PU)**
	• Belum optimalnya pengembangan pariwisata di Sulawesi Tenggara	Mendorong perkembangan sektor penunjang di Kawasan Industri baru untuk memperkuat dampak rambatan *spillover* pertumbuhan industri pengolahan seperti sektor akomodasi, makanan, dan minuman **(Dinas KUKM, Disperindag)**

Highlight EPD Provinsi Sulawesi Tenggara

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Indeks Inovasi Daerah **32,85**	**Faktor Penghambat:** • Kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan produktif belum optimal	Penguatan komitmen untuk melaksanakan inovasi yang sudah disusun untuk peningkatan pelayanan publik dan menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah **(Balitbang)** Pengembangan SDM unggul melalui penyiapan pendidikan vokasi sesuai dengan sektor unggulan daerah (pertambangan, pertanian, pariwisata) dan pelatihan yang sesuai dengan dunia kerja yang dibutuhkan **(Kemenperin, Kemendiktisaintek, Disdikbud)**
Indeks SPBE **2,59**	**Faktor Penghambat:** • Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik • Masih terbatasnya kapasitas SDM dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi	Mengembangkan dan memperbarui infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di seluruh wilayah, termasuk daerah pedesaan dan terpencil, untuk memastikan akses yang merata dan berkualitas **(Diskominfo)** Menyediakan pelatihan dan program pengembangan keterampilan bagi aparatur pemerintahan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (**Diskominfo)** Mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform berbasis elektronik untuk memudahkan akses dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat **(Diskominfo)**
Indeks Risiko Bencana **153,08**	**Faktor Penghambat:** • Alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan menjadi daerah pertambangan • Banyaknya daerah yang menjadi kawasan rawan gelombang pasang dan rawan bencana alam geologi (gempa bumi dll.) • Potensi kecelakaan laut yang cukup tinggi karena tingginya gelombang laut	Meningkatkan komitmen, kebijakan pengurangan risiko bencana, serta kuantitas dan kualitas kegiatan penanggulangan bencana untuk mengurangi dampak negatif dari bencana **(BNPB, BPBD, Satpol PP)** Menetapkan dan menerapkan standar keselamatan yang ketat untuk semua kapal, termasuk uji kelaikan kapal secara berkala dan memastikan bahwa kapten dan awak kapal terlatih dalam prosedur keselamatan (**Kemenhub, Dishub)** Meningkatkan infrastruktur pelabuhan untuk mendukung operasi kapal yang lebih aman, termasuk pengembangan pelabuhan yang lebih tahan terhadap gelombang tinggi dan badai **(Kemenhub, Dishub)**

29. Gorontalo

Highlight EPD Provinsi Gorontalo

Capaian Optimal

Tingkat Pengangguran Terbuka

Faktor Pendukung:

- Meningkatnya kualitas dan kapasitas tenaga kerja
  - Perluasan pendidikan vokasi
  - Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja
- Perluasan lapangan kerja (formal dan informal) melalui
  - Peningkatan kapasitas UMKM
  - Fasilitasi kemudahan investasi dan izin usaha
  - Dukungan kredit dan pembiayaan bagi UMKM
- Meningkatnya lapangan kerja di sektor formal

Angka Keberhasilan Pengobatan TBC

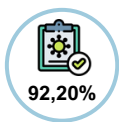

Faktor Pendukung:

- Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat khususnya akses layanan kesehatan di tingkat puskesmas
- Adanya kolaborasi lintas sektor (pemerintah, klinik swasta, komunitas lokal)

Indeks Pelayanan Publik

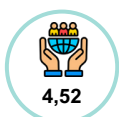

Faktor Pendukung:

- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk penguatan penerapan *e-services* dan sistem informasi pelayanan publik

Rekomendasi

- Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan, pemagangan, dan pengembangan keterampilan yang dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan, perguruan tinggi, maupun perusahaan swasta untuk meningkatkan keterampilan teknis yang dibutuhkan di pasar kerja **(Dinas Tenaga Kerja, ESDM, dan Transmigrasi, Kemnaker, Diskumperindag, KemenUMKM)**
- Pengembangan program magang dan kewirausahaan untuk anak muda yang dapat mencakup pelatihan bisnis, akses permodalan, dan bimbingan dari pelaku bisnis sukses. **(Diskumperindag, KemenUMKM, Kemenekraf)**
- Penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor UMKM (pemberian akses pembiayaan mikro, bantuan pemasaran, bimbingan teknis) dan mendorong ekonomi kreatif di bidang pariwisata, kerajinan, dan kuliner lokal dapat menarik minat anak muda dan memperluas lapangan kerja. **(Diskumperindag, Dispar, KemenUMKM, Kemenpar, Kemenekraf)**
- Optimalisasi program padat karya khususnya pada wilayah perdesaan yang difokuskan pada proyek-proyek infrastruktur di perdesaan, perbaikan fasilitas publik, dan revitalisasi lahan pertanian atau perikanan. **(DinPUPR-Perkim, Disdukcapil dan PMD, KemendesPDT, KemenPU, KemenPKP)**
- Penciptaan lapangan kerja yang merata sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal yang memperhatikan konsep *decent job* atau pekerjaan layak dengan meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk berivenstasi. **(Dinas Tenaga Kerja, ESDM, dan Transmigrasi, Kemnaker)**
- Optimalisasi kualitas layanan dan fasilitas kesehatan serta pemenuhan kebutuhan penyediaan tenaga kesehatan. **(Dinkes, Kemenkes)**
- Kampanye edukasi dan kesadaran tentang TBC serta memberikan Terapi Pencegahan TBC bagi kelompok berisiko tinggi. **(Dinkes, Kemenkes)**
- Mendorong keberlanjutan kolaborasi lintas sektor dalam akselerasi peningkatan angka keberhasilan pengobatan TBC **(Dinkes, Kemenkes)**
- Memperluas penggunaan sistem digital (digitalisasi sistem pelayanan publik) untuk dapat mempercepat proses layanan, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan transparansi serta peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur pelayanan sehingga dapat melayani dengan lebih profesional. **(Seluruh OPD Provinsi, KemenPANRB)**

Highlight EPD Provinsi Gorontalo

Capaian Kurang Optimal

Laju Pertumbuhan Ekonomi

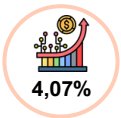

4,07%

Faktor Penghambat:

- Belum optimalnya diversifikasi ekonomi, dimana kontribusi sektor industri, pertambangan, dan pariwisata masih rendah
- Produktivitas pada sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan belum optimal
- Kinerja ekspor yang fluktuatif dipengaruhi oleh daya saing produk lokal di pasar internasional
- Bantuan terhadap UMKM dan koperasi belum optimal

Indeks Pembangunan Manusia

72,01

Faktor Penghambat:

- Ketimpangan pendapatan antara wilayah perkotaan dan perdesaan
- Ketergantungan dan dominasi pada sektor tertentu (sektor pertanian tanaman pangan yang produktivitasnya rendah)
- Pendidikan, keterampilan, dan produktivitas SDM yang rendah
- Keterbatasan infrastruktur dasar
- Masih rendahnya akses terhadap sanitasi dan air minum layak

Rekomendasi

Diversifikasi Ekonomi **(Distan, Diskumperindag, DinasKP, Kementan, KemenUMKM, Dispar, Kemenpar, KemenKP)**

- Mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru yang memiliki potensi nilai tambah tinggi, seperti industri makanan dan minuman, agrowisata, dan perikanan berbasis ekspor
- Percepatan pembangunan pariwisata (alam, bahari, budaya dan buatan) dengan implementasi *blue, green, and circular economy*
- Pengembangan UMKM berbasis komoditas lokal seperti kelapa, jagung, atau hasil laut

Peningkatan kualitas SDM **(Kemendikdasmen, Disdikbud, Kemnaker, Disnaker)**

- Memperbaiki akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal
- Program beasiswa pendidikan kejuruan berbasis kebutuhan pasar lokal
- Pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi bagi pemuda
- Memperluas program magang untuk pemuda di sektor non-pertanian (manufaktur dan jasa)
- Melibatkan swasta dalam membangun program pelatihan kerja dan investasi di sektor baru

Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur **(DinPUPR-Perkim, KemenPU)**

- Memperluas infrastruktur dasar di wilayah perdesaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan produktivitas ekonomi
- Pembangunan jalan penghubung antarwilayah produksi dan pasar
- Penyediaan fasilitas penyimpanan hasil pertanian untuk mengurangi kerugian pascapanen
- Penyediaan jaringan internet di daerah tertinggal untuk meningkatkan akses terhadap informasi dan peluang bisnis
- Optimalisasi pembangunan infrastruktur dasar seperti sanitasi, air bersih, air baku, dan rumah layak huni

Program perlindungan sosial yang tepat sasaran **(Dinsos, Kemensos)**

- Mengoptimalkan program bantuan sosial berbasis data seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Monitoring dan evaluasi penerima bantuan untuk memastikan ketepatan sasaran
- Program pemberdayaan berbasis komunitas, seperti koperasi petani dan kelompok usaha bersama
- Optimalisasi program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sistem data yang terintegrasi

Mendorong transformasi sektor pertanian **(Distan, Kementan, Diskumperindag)**

- Modernisasi dan peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui teknologi dan diversifikasi produk
- Pelatihan penggunaan teknologi pertanian modern
- Mendorong integrasi pertanian dengan industri pengolahan
- Peningkatan produksi pasca panen pangan nabati kawasan padi dan jagung
- Penerapan teknologi dan penyediaan bahan baku bioindustri agro kawasan kelapa

Highlight EPD Provinsi Gorontalo

Capaian Kurang Optimal

Tingkat Kemiskinan

14,57%

Faktor Penghambat:

- Ketergantungan pada sektor primer dan transformasi industri yang lambat
- Keterbatasan infrastruktur seperti sarana transportasi, teknologi, dan akses pasar
- Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dikarenakan pendidikan dan keterampilan yang rendah
- Kesenjangan atau ketimpangan (khususnya pendapatan) antarwilayah perkotaan dan perdesaan
- Intervensi program penurunan kemiskinan belum berjalan konvergen

Rasio Gini

0,414

Faktor Penghambat:

- Perekonomian Gorontalo masih didominasi oleh sektor pertanian yang memiliki produktivitas dan pendapatan relatif rendah, sehingga kontribusinya terhadap pengurangan ketimpangan terbatas
- Rendahnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan membatasi peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dengan pendapatan lebih tinggi, sehingga memperburuk ketimpangan pendapatan
- Perbedaan akses terhadap infrastruktur dasar antara daerah perkotaan dan perdesaan menyebabkan disparitas ekonomi

Rekomendasi

Diversifikasi Ekonomi **(Distan, Diskumperindag, DinasKP, Kementan, KemenUMKM, Dispar, Kemenpar, KemenKP)**

- Mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru yang memiliki potensi nilai tambah tinggi, seperti industri makanan dan minuman, agrowisata, dan perikanan berbasis ekspor
- Memberikan pelatihan teknis dan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
- Mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan swasta untuk inovasi produk lokal
- Pengembangan UMKM berbasis komoditas lokal seperti kelapa, jagung, atau hasil laut

Peningkatan kualitas SDM **(Kemendikdasmes, Disdikbud, Kemnaker, Disnaker)**

- Memperbaiki akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal
- Program beasiswa pendidikan kejuruan berbasis kebutuhan pasar lokal
- Pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi bagi pemuda
- Memperluas program magang untuk pemuda di sektor non-pertanian, (manufaktur dan jasa)
- Melibatkan swasta dalam membangun program pelatihan kerja dan investasi di sektor baru

Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur **(DinPUPR-Perkim, KemenPU)**

- Memperluas infrastruktur dasar di wilayah perdesaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan produktivitas ekonomi
- Pembangunan jalan penghubung antarwilayah produksi dan pasar
- Penyediaan fasilitas penyimpanan hasil pertanian untuk mengurangi kerugian pascapanen
- Penyediaan jaringan internet di daerah tertinggal untuk meningkatkan akses terhadap informasi dan peluang bisnis

Program perlindungan sosial yang tepat sasaran **(Dinsos, Kemensos)**

- Mengoptimalkan program bantuan sosial berbasis data seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Monitoring dan evaluasi penerima bantuan untuk memastikan ketepatan sasaran
- Program pemberdayaan berbasis komunitas, seperti koperasi petani dan kelompok usaha bersama
- Optimalisasi program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sistem data yang terintegrasi

Mendorong transformasi sektor pertanian (**Distan, Kementan, Diskumperindag)**

- Modernisasi dan peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui teknologi dan diversifikasi produk
- Pelatihan penggunaan teknologi pertanian modern
- Mendorong integrasi pertanian dengan industri pengolahan
- Peningkatan produksi pasca panen pangan nabati kawasan padi dan jagung
- Penerapan teknologi dan penyediaan bahan baku bioindustri agro kawasan kelapa

Highlight EPD Provinsi Gorontalo

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Prevalensi *Stunting* 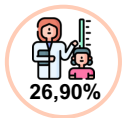 **26,90%**	**Faktor Penghambat:**	
	• Aksi konvergensi percepatan penurunan stunting yang belum optimal	Penguatan aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting* dan integrasi program lintas sektor **(Kemenkes, BKKBN, KemenPKP, Bappeda, Dinkes, DinPUPR-Perkim)**
	• Tingkat pernikahan usia dini masih tinggi	Peningkatan peran *stakeholders* dan tokoh masyarakat serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader masyarakat **(BKKBN, Kemenkes, Bappeda, Dinkes)**
	• Rendahnya cakupan layanan esensial percepatan penurunan *stunting*	Optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan gerakan masyarakat hidup sehat, perbaikan pola asuh anak, penyuluhan gizi ibu dan anak, serta penyuluhan terkait pernikahan dini **(BKKBN, Kemenkes, Dinkes)**
	• Konsumsi energi yang tidak mencukupi kebutuhan harian anak	Percepatan penurunan prevalensi *stunting* dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik setempat **(Kemenkes, BKKBN, KemenPKP, Bappeda, DinPUPR-Perkim, Dinkes)**
	• Pola pemberian MPASI yang tidak tepat, seperti pemberian makanan yang tidak sesuai usia atau kurangnya variasi makanan	Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak **(Kemenkes, Dinkes)**
		Peningkatan infrastruktur dan fasilitas sanitasi dan air bersih **(KemenPKP, DinPUPR-Perkim)**
Skor Pola Pangan Harapan **76,10**	**Faktor Penghambat:**	
	• Akses yang masih terbatas terhadap pangan bergizi	Peningkatan akses terhadap pangan bergizi dan pemanfaatan produk pangan lokal dan berkelanjutan **(Kemekopangan, Kemenkes, Distan, Dinkes)**
	• Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan yang beragam	Optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan tentang pola konsumsi pangan sehat dan beragam **(Kemekopangan, Kemenkes, Distan, Dinkes)**

30. Sulawesi Barat

Highlight EPD Provinsi Sulawesi Barat

Capaian Optimal

Tingkat Pengangguran Terbuka

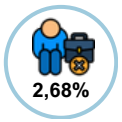

2,68%

Faktor Pendukung:

- Mayoritas penduduk bekerja di sektor perkebunan, perdagangan, dan industri pengolahan
- Persentase pekerja di sektor informal menurun, mencerminkan perbaikan dalam kualitas pekerjaan yang tersedia serta peningkatan kesempatan kerja yang lebih stabil dan terlindungi
- Ketersediaan lapangan kerja di Sulawesi Barat meningkat, terutama didorong oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial yang mengalami pertumbuhan signifikan.
- Dukungan infrastruktur dan kebijakan lokal, pemulihan pasca bencana 2021 berkontribusi dalam mendorong perusahaan lokal kembali beroperasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperbaiki kondisi ketenagakerjaan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

78,05

Faktor Pendukung:

- Adanya kebijakan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan dukungan regulasi lingkungan hidup
- Pemantauan kualitas air sungai dan udara ambien secara berkala serta penggalakkan kampanye pengelolaan limbah melalui 3R

Rekomendasi

Mendorong transformasi sektor pertanian **(Kementan, Disbun, Dinas TPHP)**

- Modernisasi dan peningkatan produktivitas pertanian melalui teknologi dan diversifikasi produk.
- Pelatihan penggunaan teknologi pertanian modern.
- Mendorong integrasi pertanian dengan industri pengolahan.

Penyelarasan pendidikan kejuruan dan pelatihan vokasional dengan kebutuhan industri lokal **(Disdikbud dan Disnaker)**

- Pelatihan kerja berbasis keterampilan di sektor unggulan seperti agribisnis dan industri pengolahan.
- Kolaborasi dengan sektor swasta untuk program magang dan pelatihan.

Mendorong peningkatan produktivitas industri pengolahan **(Kemenperin, BKPM, Disdagperinkopukm)**

- Mendorong integrasi perkebunan dan perikanan dengan industri pengolahan.
- Peningkatan penggunaan teknologi industri mutakhir.
- Peningkatan investasi padat karya melalui kemudahan investasi

Ekspansi Program Padat Karya **(Kemnaker dan Disnaker)**

- Meningkatkan program berbasis komunitas untuk menciptakan lapangan kerja.
- Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bekerja sesuai kebutuhan industri.
- Kolaborasi dan *channeling* dengan pasar kerja dalam penyerapan lapangan kerja.

Diversifikasi ekonomi lokal **(Kementan, KKP, Kemenperin, KemenUMKM, Disbun, DinasKP, Disdagperinkopukm, DPMPTSP)**

- Meningkatkan nilai tambah produk lokal melalui pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas utama, seperti kelapa sawit dan perikanan.
- Investasi dalam teknologi pengolahan hasil perkebunan dan perikanan.
- Program pendampingan bagi UMKM untuk ekspansi pasar.
- Pelatihan kewirausahaan di sektor non-tradisional seperti pariwisata dan ekonomi kreatif

Peningkatan infrastruktur strategis **(KemenPU, Kemenhub, KemendesPDT, Kemkomdigi, Dinas PUPR, Dishub, Diskominfo)**

- Membangun konektivitas yang lebih baik untuk mempercepat distribusi hasil produksi ke pasar nasional dan internasional.
- Penyelesaian proyek jalan dan pelabuhan utama.
- Digitalisasi desa untuk mendukung inklusi ekonomi berbasis teknologi.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup **(KemenLH, Dinas LH)**

- Peningkatan infrastruktur pengolahan limbah
- Pengendalian pencemaran air dan udara di sektor perkebunan dan industri
- Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang pengelolaan limbah dan sampah yang baik

Highlight EPD Provinsi Sulawesi Barat

Capaian Kurang Optimal

Laju Pertumbuhan Ekonomi

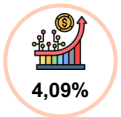

4,09%

Faktor Pendukung:

- Rendahnya produktivitas sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan sebagai kontributor dominan terhadap PDRB
- Penurunan produksi industri *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya
- Mayoritas penduduk yang bekerja merupakan lulusan SMP ke bawah
- Kurang memadainya infrastruktur konektivitas dan ekonomi terutama di perdesaan sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian daerah

Kontribusi PDRB Provinsi

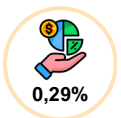

0,29%

Faktor Penghambat:

- Rendahnya produktivitas sektor unggulan daerah seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan sebagai kontributor dominan terhadap PDRB

Rasio Gini

0,354

Faktor Penghambat:

- Perekonomian Sulawesi Barat masih didominasi oleh sektor pertanian yang memiliki produktivitas dan pendapatan relatif rendah, sehingga kontribusinya terhadap pengurangan ketimpangan terbatas.
- Rendahnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan membatasi peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dengan pendapatan lebih tinggi, sehingga memperburuk ketimpangan pendapatan
- Perbedaan akses terhadap infrastruktur dasar antara daerah perkotaan dan perdesaan menyebabkan disparitas ekonomi yang berkontribusi pada tingginya rasio gini.

Rekomendasi

Mendorong transformasi sektor pertanian **(Kementan, Disbun, Dinas TPHP)**

- Modernisasi dan peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui teknologi dan diversifikasi produk.
- Pelatihan penggunaan teknologi pertanian modern.
- Mendorong integrasi pertanian dengan industri pengolahan.

Mendorong peningkatan produktivitas industri pengolahan **(Kemenperin, BKPM, DPMPTSP, Disdagperinkopukm)**

- Mendorong integrasi perkebunan dan perikanan dengan industri pengolahan.
- Peningkatan penggunaan teknologi industri mutakhir.
- Peningkatan investasi padat karya melalui kemudahan investasi

Diversifikasi ekonomi lokal **(Kementan, KKP, Kemenperin, KemenUMKM, Disbun, DinasKP, Disdagperinkopukm, DPMPTSP)**

- Meningkatkan nilai tambah produk lokal melalui pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas utama, seperti kelapa sawit dan perikanan.
- Investasi dalam teknologi pengolahan hasil perkebunan dan perikanan.
- Program pendampingan bagi UMKM untuk ekspansi pasar.
- Pelatihan kewirausahaan di sektor non-tradisional seperti pariwisata dan ekonomi kreatif

Peningkatan kualitas SDM **(Kemendikdasmen, Kemenag, Kemenaker, Disdikbud, Disnaker)**

- Memperbaiki akses pendidikan vokasi dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.
- Program beasiswa pendidikan kejuruan berbasis kebutuhan pasar lokal.
- Pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi bagi pemuda.
- Memperluas program magang melalui kolaborasi dengan perusahaan lokal terutama di sektor non-pertanian, seperti manufaktur dan jasa.
- Melibatkan swasta dalam membangun program pelatihan kerja dan investasi di sektor baru
- Menyelaraskan pelatihan kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja lokal.
- Pengembangan keterampilan berbasis teknologi digital bagi generasi muda.

Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur **(KemenPU, Kemkomdigi, DisPUPR)**

- Memperluas infrastruktur dasar di wilayah perdesaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan produktivitas ekonomi.
- Pembangunan jalan penghubung antarwilayah produksi dan pasar.
- Penyediaan fasilitas penyimpanan hasil pertanian untuk mengurangi kerugian pascapanen.
- Penyediaan jaringan internet di daerah tertinggal untuk meningkatkan akses terhadap informasi dan peluang bisnis.

Highlight EPD Provinsi Sulawesi Barat

Capaian Kurang Optimal

Tingkat Kemiskinan

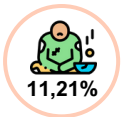

Faktor Penghambat:

- Tingginya ketergantungan pada sektor pertanian dan perkebunan yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas serta cuaca ekstrem memengaruhi pendapatan masyarakat.
- Implementasi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan bergantung pada data penerima manfaat yang kurang mutakhir dapat mengurangi efektivitas upaya pengentasan kemiskinan.
- Ketersediaan jalan, transportasi, listrik, dan fasilitas air bersih di beberapa wilayah belum memadai
- Kualitas sumber daya manusia cenderung rendah, tercermin dari angka melek huruf dan tingkat pendidikan

Indeks Pembangunan Manusia

Faktor Penghambat:

- Tingginya angka anak tidak sekolah hingga 44 ribu jiwa
- Adanya ketimpangan pembangunan fasilitas serta kualitas sektor pendidikan dan kesehatan.

Prevalensi *Stunting*

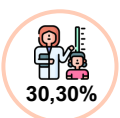

Faktor Penghambat:

- Terbatasnya akses pangan bergizi, didukung faktor kemiskinan yang tinggi
- Terbatasnya infrastruktur dasar seperti fasilitas kesehatan, air bersih, dan sanitasi
- Rendahnya kesadaran gizi dan pola asuh di masyarakat
- Tingginya pernikahan dini hingga 11 persen menyebabkan banyaknya ibu hamil usia anak

Rekomendasi

Mendorong transformasi sektor pertanian **(Kementan, Disbun, Dinas TPHP)**
- Modernisasi dan peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui teknologi dan diversifikasi produk.
- Pelatihan penggunaan teknologi pertanian modern.
- Mendorong integrasi pertanian dengan industri pengolahan.

Pengembangan Ekonomi Desa dan Pemberdayaan UMKM: **(Kemendes PDT, KemenUMKM, Disdagperinkopukm)**
- Diversifikasi kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal (agribisnis dan pariwisata desa).
- Peningkatan akses permodalan melalui lembaga keuangan mikro.
- Pelatihan kewirausahaan untuk pelaku UMKM dan kelompok tani.

Program Bantuan Sosial Tepat Sasaran **(Kemensos, Kementan, Dinsos, Distan)**
- Pemanfaatan data Regsosek untuk optimalisasi akurasi sasaran penerima bantuan.
- Monitoring dan evaluasi rutin penerima manfaat.
- Pengembangan program bantuan berbasis pemberdayaan, seperti bantuan alat produksi pertanian.

Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar **(KemenPU, Kemendes PDT, DisPUPR)**
- Menyediakan akses infrastruktur yang memadai di wilayah terpencil.
- Pembangunan akses jalan, listrik, air bersih, dan sanitasi di desa-desa tertinggal.
- Pemanfaatan dana desa untuk infrastruktur produktif.

Penguatan Sektor Pendidikan: **(Disdikbud, Kemndikdasmen, Kemenag)**
- Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di semua jenjang.
- Membangun fasilitas pendidikan di daerah terpencil.
- Memberikan insentif bagi tenaga pendidik untuk bertugas di daerah sulit.
- Program beasiswa khusus untuk pelajar dari keluarga miskin.

Perbaikan Layanan Kesehatan: **(Dinkes, Kemenkes)**
- Meningkatkan kualitas layanan kesehatan primer, terutama di wilayah pedesaan.
- Penyediaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan di puskesmas terpencil.
- Program pencegahan *stunting* melalui edukasi gizi dan layanan kesehatan ibu-anak.

Sosialisasi dan edukasi sosial terkait *stunting*: **(BKKBN, Kemenkes, Kemenag, Kemensos, Diskes, Dinsos, TP2AK)**
- Sosialisasi terkait pentingnya gizi bagi ibu hamil dan bayi di 1000 HPK.
- Bersama tokoh setempat mengedukasi pentingnya kesiapan menikah.

31. Maluku

Highlight EPD Provinsi Maluku

Capaian Optimal		Rekomendasi
Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,93%	**Faktor Pendukung:** • Potensi yang besar pada tanaman pangan dan perkebunan • Potensi komoditas perikanan budidaya yang besar • Pertumbuhan sektor industri pengolahan yang cukup tinggi	Pembangunan kawasan sentra produksi pangan berbasis tanaman pangan, pangan akuatik/*bluefood*, hewani, sayur, dan buah **(Kementan, KKP, Distan, Dinas KP)** Pengembangan ekosistem produksi, industri, dan riset-inovasi berbasis komoditas TCT, udang, dan lobster **(KKP, Kemenperin, Dinas KP)**
Rasio Gini 0,282	**Faktor Pendukung:** • Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dan perikanan • Kebijakan pemerataan ekonomi yang dilaksanakan oleh Pemda dan Pusat • Melaksanakan program gerakan pangan murah	Percepatan pembangunan, pengembangan, dan optimalisasi infrastruktur pembangkit dari sumber energi baru terbarukan (EBT) dan sistem interkoneksi serta sistem terisolasi (*isolated grid*) kepulauan **(KemenESDM, Dinas ESDM)** Pengembangan infrastruktur dan layanan konektivitas serta fasilitas keselamatan keamanan transportasi **(KemenPU, Kemenhub, Dinas PUPR, Dishub)**
Pertumbuhan PDB Perikanan 7,03%	**Faktor Pendukung:** • Potensi komoditas perikanan budidaya yang besar • Komoditas ikan dan udang merupakan produk yang memiliki volume ekspor tertinggi • Penunjukkan sebagai provinsi percontohan untuk penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang berlokasi di Kota Tual dan Kabupaten Dobo	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pada sektor perikanan dari hulu ke hilir **(Kemnaker, Kemendikdasmen, Disnakertrans)** Peningkatan kapasitas dan modernisasi pelabuhan pendaratan di Kota Tual dan Kabupaten Dobo **(Kemenhub, KemenPU, Dishub, Dinas PUPR)** Pengembangan kampung nelayan modern sebagai *support system* dari pelabuhan pendaratan **(KemenUMKM, Diskop UKM)**
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 78,75	**Faktor Pendukung:** • Minimnya pencemaran pada air laut dan udara serta masih tingginya tutupan lahan • Kepadatan penduduk yang cukup rendah	Mengadakan program reboisasi hutan gundul serta perluasan kawasan konservasi laut **(KemenLH, KKP, Dinas LH, Dinas KP)** Penguatan regulasi dan pengendalian pemanfaatan ruang **(KemenPU, KemenLH, Dinas PUPR)**

Highlight EPD Provinsi Maluku

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Tingkat Kemiskinan **16,05%**	**Faktor Penghambat:** • Cakupan program pengentasan kemiskinan yang terbatas karena luasnya persebaran masyarakat miskin dan memiliki karakteristik yang berbeda • Validitas data penduduk miskin yang masih tidak akurat • Kapasitas infrastruktur yang masih terbatas menghambat intervensi untuk daerah dengan kantong-kantong kemiskinan • Rata-rata penduduk bekerja di sektor pertanian dan perikanan yang cenderung berpenghasilan rendah serta rentan akan volatilitas harga dan cuaca	Penerapan program *central mapper* untuk meningkatkan akurasi penyaluran intervensi yang berkaitan dengan kemiskinan **(Kemensos, Kemenkeu, Bappenas)** Percepatan perbaikan jaringan jalan, jembatan, dan pelabuhan kecil yang menghubungkan wilayah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, barang, serta jasa **(KemenPU, Kemenhub, Dinas PUPR, Dishub)** Pembangunan kawasan sentra produksi pangan berbasis tanaman pangan, pangan akuatik/*bluefood*, hewani, sayur, dan buah **(Kementan, KKP, Distan, Dinas KP)**
PDRB per Kapita (ADHB) **30,46 jt**	**Faktor Penghambat:** • Rata-rata penduduk bekerja di sektor pertanian dan perikanan yang cenderung berpenghasilan rendah serta rentan akan volatilitas harga dan cuaca • Masih minimnya peningkatan nilai tambah untuk komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan	Pengembangan ekosistem produksi, industri, dan riset-inovasi berbasis komoditas TCT, udang, dan lobster **(KKP, Kemenperin, Dinas KP)** Pembentukan Perumda yang berfungsi sebagai *offtaker* dapat menyerap hasil panen lokal, mengefisienkan rantai pasok, mengelola pasokan, dan memasarkan produk ke konsumen **(KemenBUMN, Kementan, Distanbun)** Mendorong investasi di sektor manufaktur, pariwisata, dan jasa untuk mengurangi ketergantungan pada sektor primer sekaligus meningkatkan diversifikasi ekonomi **(Kemeperin, BKPM, DPMTSP)**
Tingkat Pengangguran Terbuka **6,11%**	**Faktor Penghambat:** • Ketersediaan lapangan kerja yang lebih kecil dari jumlah angkatan kerja • Masih adanya *mismatch* antara antara kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dengan kompetensi dari tenaga kerja • Aksesibilitas informasi tentang pasar kerja yang masih minim	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pada sektor perikanan, pertanian, dan perkebunan dari hulu ke hilir **(Kemnaker, Disnakertrans)** Pembangunan sekolah vokasi dengan kurikulum terkini dalam bidang perkebunan, maritim, pariwisata, dan energi **(Kemendikdasmen, Disnakertrans, Disdikbud)** Peningkatan dan intensifikasi kerja sama antara pemda, universitas, sekolah vokasi, dan sektor industri dalam penyelenggaraan program *job fair* dan penyaluran tenaga kerja **(Kemnaker, Disnakertrans)**

Highlight EPD Provinsi Maluku

Capaian Kurang Optimal

Prevalensi *Wasting*

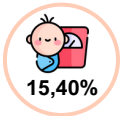

Faktor Penghambat:

- Tingkat kemiskinan yang cukup tinggi
- Penyediaan sarana prasarana serta kualitas pelayanan kesehatan yang belum merata
- Pembangunan infrastruktur yang belum merata menghambat distribusi barang dan jasa serta intervensi dari Pemda
- Persebaran tenaga kesehatan yang belum merata

Indeks Pembangunan Manusia

Faktor Penghambat:

- Usia Harapan Hidup yang tergolong cukup rendah
- Masih rendahnya aksesibilitas menuju fasilitas pendidikan, khususnya pada daerah yang memiliki kondisi geografis dan karakteristik pemukiman yang menyebar
- Penyediaan sarana prasarana serta kualitas pelayanan kesehatan yang belum merata
- Persebaran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang belum merata

Usia Harapan Hidup

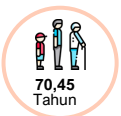

Faktor Penghambat:

- Penyediaan sarana prasarana serta kualitas pelayanan kesehatan yang belum merata
- Pembangunan infrastruktur yang belum merata menghambat distribusi barang dan jasa serta intervensi dari Pemda
- Persebaran tenaga kesehatan yang belum merata

Rekomendasi

- Penerapan program *central mapper* untuk meningkatkan akurasi penyaluran intervensi yang berkaitan dengan kemiskinan **(Kemensos, Kemenkeu, Bappenas)**
- Menerapkan program *telemedicine* untuk memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh, terutama untuk daerah yang termasuk ke dalam kategori terpencil **(Kemenkes, Dinkes)**
- Penyediaan program pelayanan kesehatan bergerak (*mobile health service*) berbasis kepulauan untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan secara *mobile* **(Kemenkes, Dinkes)**
- Percepatan perbaikan jaringan jalan, jembatan, dan pelabuhan kecil yang menghubungkan wilayah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, barang, serta jasa **(KemenPU, Kemenhub, Dinas PUPR)**
- Percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur terkait layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, konektivitas, ketenagalistrikan, dan hunian layak terutama di kawasan minim layanan dasar dan kantong kemiskinan **(KemenPU, KemenPKP, KemenESDM)**
- Peningkatan kualitas, kapasitas, dan kuantitas tenaga kesehatan dan tenaga pendidik melalui intensifikasi program sertifikasi serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik **(Kemenkes, Kemendikdasmen, Dinkes, Disdikbud)**
- Pembangunan unit-unit sekolah baru di daerah yang terpencil serta revitalisasi fasilitas dan gedung sekolah **(Kemendikdasmen, KemenPU, Disdikbud, Dinas PUPR)**
- Penerapan program sekolah alternatif melalui pengembangan sekolah berbasis komunitas serta sistem pembelajaran modular untuk siswa di wilayah migrasi atau terpencil **(Kemendikdasmen, Disdikbud)**

32. Maluku Utara

Highlight EPD Provinsi Maluku Utara

Capaian Optimal

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Faktor Pendukung:

- Potensi yang besar pada sektor pertambangan, khususnya nikel
- Peningkatan nilai tambah komoditas nikel melalui program hilirisasi
- Pengembangan sektor industri pengolahan yang cukup masif
- Volume dan nilai ekspor komoditas pertambangan yang tinggi

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Faktor Pendukung:

- Pembangunan smelter nikel dan infrastruktur pendukungnya, terutama di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan
- Tingginya realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) untuk sektor industri logam dasar, barang logam, mesin dan peralatannya

Rasio Gini

Faktor Pendukung:

- Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena aktivitas hilirisasi
- Peralihan tenaga kerja ke sektor pertambangan dan industri pengolahan
- Tingginya proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan

Rekomendasi

Optimalisasi pengembangan hilirisasi industri pengolahan komoditas nikel melalui:
- Peningkatan investasi untuk pembangunan smelter baru serta pengembangan teknologi pengolahan nikel di Halmahera Timur
- Penerapan mekanisme insentif fiskal untuk mendorong aliran investasi

(BKPM, KemenESDM, Dinas ESDM)

Pengembangan infrastruktur transportasi, dan logistik melalui:
- Percepatan pembangunan pelabuhan pendaratan untuk mendukung kegiatan ekspor
- Pembangunan jalan penghubung menuju kawasan industri
- Penyediaan infrastruktur listrik yang andal di kawasan industri
- Membangun infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan kecil di daerah terpencil untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, barang, serta jasa

(KemenPU, Dinas PUPR)

Optimalisasi aktivitas investasi di daerah melalui:
- Penyederhanaan regulasi dan proses perizinan terkait pelaksanaan penanaman modal
- Penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam rangka digitalisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal

(BKPM, DPMPTSP)

Diversifikasi sektor perekonomian melalui:
- Pengembangan pariwisata bahari dan budaya di Kepulauan Tidore dan Halmahera
- Peningkatan aksesibilitas ke kawasan pariwisata serta pengembangan atraksi pariwisata
- Pembangunan kawasan sentra perkebunan dan perikanan dengan memanfaatkan hasil produksi komoditas lokal
- Hilirisasi hasil produk perkebunan dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah

(Kemenpar, Kementan, Kemenperin)

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal melalui:
- Pembangunan sekolah vokasi dengan kurikulum terkini dalam bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan
- Pengembangan pusat pelatihan keterampilan berbasis industri dan pertambangan

(Kemenaker, Disnakertrans)

Highlight EPD Provinsi Maluku Utara

Capaian Optimal

Tingkat Kemiskinan

Faktor Pendukung:

- Pertumbuhan sektor industri pengolahan dan pertambangan yang cukup tinggi
- Tingkat pengangguran yang cukup rendah karena tingginya aktivitas masyarakat di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan
- Harga komoditas konsumsi pokok yang relatif stabil
- Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan dana desa

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Faktor Pendukung:

- Koordinasi dan kolaborasi antara pihak pemerintah dan pihak ketiga dalam menjaga kualitas tutupan lahan
- Kolaborasi pemangku kepentingan yang melibatkan bimbingan teknis dan program kolaboratif yang mendukung konservasi lingkungan dan perlindungan sumber daya alam.
- Jumlah desa yang bebas dari pencemaran cukup tinggi

Rekomendasi

Optimalisasi pengembangan hilirisasi industri pengolahan komoditas nikel melalui:
- Peningkatan investasi untuk pembangunan smelter baru serta pengembangan teknologi pengolahan nikel di Halmahera Timur
- Penerapan mekanisme insentif fiskal untuk mendorong aliran investasi

(Kemenperin, KemenESDM, Dinas ESDM)

Pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai sektor unggulan melalui:
- Pemberian pelatihan teknis kepada petani dan nelayan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas
- Penyediaan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah untuk usaha berbasis komunitas
- Perluasan pasar untuk hasil produksi komoditas perikanan, cengkeh, kelapa, pala

(Kementan, KKP, Distan, Dinas KP)

Pengembangan infrastruktur pelayananan dasar, transportasi, dan logistik melalui:
- Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan kecil di daerah terpencil untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, barang, serta jasa

(KemenPU, Dinas PUPR)

Penguatan penyaluran program bantuan dan perlindungan sosial melalui:
- Penerapan program *central mapper* untuk meningkatkan akurasi penyaluran intervensi yang berkaitan dengan kemiskinan

(Kemensos, Kemenkeu, Bappenas)

Pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan melalui:
- Peningkatan pengawasan terhadap praktik pembalakan liar (*illegal logging*).
- Mendorong skema reboisasi berbasis masyarakat di kawasan hutan yang mengalami degradasi
- Mengintegrasikan tata ruang wilayah dengan upaya konservasi hutan

(Kemenhut, KemenLH, Dinas Kehutanan)

Optimalisasi penanganan limbah dan sampah melalui:
- Membangun fasilitas pengolahan limbah padat dan cair yang terintegrasi
- Mengembangkan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti bank sampah dan komposting skala rumah tangga

(KemenLH, Dinas LH)

Highlight EPD Provinsi Maluku Utara

Capaian Kurang Optimal	Faktor Penghambat:	Rekomendasi
Tingkat Pengangguran Terbuka **4,03%**	• Sebagian besar tenaga kerja berada di sektor informal, yaitu sebesar 64,76% pada tahun 2024 • Tingginya tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMK menunjukkan adanya *mismatch* antara keterampilan lulusan dan kebutuhan pasar kerja • Keterbatasan diversifikasi lapangan kerja yang masih terkonsentrasi di sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. • Kurangnya akses ke peluang ekonomi di wilayah terpencil sehingga menghambat penciptaan lapangan kerja baru yang signifikan.	Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal seperti sektor perikanan, pertanian, pariwisata melalui: • Mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru yang memiliki potensi nilai tambah tinggi, seperti industri makanan dan minuman, agrowisata, dan perikanan berbasis ekspor • Memberikan pelatihan teknis dan akses permodalan bagi pelaku UMKM • Mendorong kolaborasi perguruan tinggi, pemda, dan swasta untuk inovasi produk lokal • Pengembangan UMKM berbasis komoditas lokal seperti kelapa, pala, dan perikanan **(Kementan, Kemenpar, KKP)**
		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal melalui: • Pembangunan sekolah vokasi dengan kurikulum terkini dalam bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan • Pengembangan pusat pelatihan keterampilan berbasis industri dan pertambangan **(Kemenaker, Disnakertrans)**
Kontribusi PDRB Provinsi 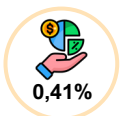 **0,41%**	**Faktor Penghambat:** • Aktivitas perekonomian yang cenderung masih terfokus pada sektor primer (pertanian, perkebunan, perikanan) yang memiliki nilai tambah rendah • Tingginya *share* industri pengolahan belum mencerminkan diversifikasi ekonomi di daerah	Pengembangan infrastruktur transportasi, dan logistik melalui: • Percepatan pembangunan pelabuhan pendaratan untuk mendukung kegiatan ekspor • Pembangunan jalan penghubung menuju kawasan industri • Penyediaan infrastruktur listrik yang andal di kawasan industri • Membangun infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan kecil di daerah terpencil untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, barang, serta jasa **(KemenPU, Dinas PUPR)**
		Diversifikasi sektor perekonomian melalui: • Pengembangan pariwisata bahari dan budaya di Kepulauan Tidore dan Halmahera • Peningkatan aksesibilitas ke kawasan pariwisata serta pengembangan atraksi pariwisata • Pembangunan kawasan sentra perkebunan dan perikanan dengan memanfaatkan hasil produksi komoditas lokal • Hilirisasi hasil produk perkebunan dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah **(Kemenpar, Kementan, Kemenperin)**
Indeks SPBE 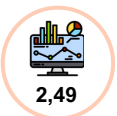 **2,49**	**Faktor Penghambat:** • Masih rendahnya adopsi TIK dan penyelenggaraan SPBE • Belum optimalnya penerapan manajemen SPBE	Peningkatan digitalisasi dalam sistem pemerintahan melalui: • Penyesuaian kebijakan daerah dengan standar nasional SPBE, seperti Kerangka Arsitektur SPBE dan Manajemen Keamanan Informasi • Pemberian pelatihan intensif kepada ASN di daerah untuk mengoperasikan aplikasi dan sistem berbasis elektronik **(Komdigi, BRIN, Diskominfosan)**

Highlight EPD Provinsi Maluku Utara

Capaian Kurang Optimal

Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PoU)

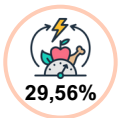

29,56%

Faktor Penghambat:

- Masih kurangnya pemantauan dalam upaya perbaikan gizi masyarakat
- Kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih kurang
- Sarana dan prasarana distribusi pangan yang masih minim
- Kondisi geografis menjadi tantangan dalam pendistribusian pangan ke masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia

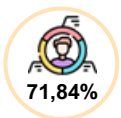

71,84%

Faktor Penghambat:

- Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengalami perlambatan pertumbuhan yang menunjukkan adanya keterbatasan dalam akses dan kualitas pendidikan formal
- Faktor seperti akses ke fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, dan kondisi sanitasi menjadi tantangan
- Ketimpangan dalam distribusi pendapatan atau akses ke peluang ekonomi tetap menjadi hambatan yang memengaruhi kualitas hidup sebagian masyarakat.

Rekomendasi

Mendorong produksi dan konsumsi bahan makanan pokok melalui:
- Pemberian subsidi harga bahan pokok, khususnya di daerah dengan tingkat ketidakcukupan pangan yang tinggi
- Mendorong penggunaan teknologi modern dalam budidaya tanaman dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas
- Mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan pangan lokal seperti sagu dan jagung sebagai alternatif sumber energi dan gizi

(Kementan, Distan, Dinas Pangan)

Penguatan ketahanan pangan lokal melalui:
- Pembentukan kelompok tani, nelayan, atau koperasi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi pangan
- Pengembangan sistem distribusi pangan berbasis kepulauan

(Kementan, Distan, Dinas Pangan)

Pengembangan infrastruktur transportasi, dan logistik melalui:
- Percepatan pembangunan pelabuhan pendaratan untuk mendukung kegiatan ekspor
- Pembangunan jalan penghubung menuju kawasan industri
- Penyediaan infrastruktur listrik yang andal di kawasan industri
- Membangun infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan kecil di daerah terpencil untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, barang, serta jasa

(KemenPU, Dinas PUPR)

Peningkatan kualitas dan aksesibilitas terhadap pendidikan melalui:
- Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendidikan, seperti sekolah dan fasilitas pendukung di daerah terpencil
- Penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, terutama untuk pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi

(Kemendikdasmen, Kemenag, Disdikbud)

Penguatan layanan serta peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan melalui:
- Menerapkan program *telemedicine* untuk memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh, terutama untuk daerah yang termasuk ke dalam kategori terpencil
- Penyediaan program pelayanan kesehatan bergerak (*mobile health service*) berbasis kepulauan untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan secara *mobile*
- Pemberian insentif khusus untuk tenaga kesehatan yang ditempatkan di wilayah terpencil

(Kemenkes, Dinkes)

33. Papua Barat

Highlight EPD Provinsi Papua Barat

Capaian Optimal

Laju Pertumbuhan Ekonomi

14,33%

Faktor Pendukung:

- Pertumbuhan sektor industri pengolahan, sektor jasa keuangan, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor perdagangan yang cukup signifikan
- Upaya pengembangan sektor potensial non-kekayaan alam seperti teknologi informasi, agribisnis, dan sektor industri ringan untuk perikanan tangkap
- Industri karet, barang dari karet dan plastik, serta industri pengilangan migas bekontribusi signifikan terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan

Tingkat Pengangguran Terbuka

4,13%

Faktor Pendukung:

- Adanya peluang penyerapan tenaga kerja lokal di sekitar kawasan perusahaan sektor formal

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

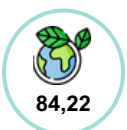

84,22

Faktor Pendukung:

- Semakin membaiknya kondisi infrastruktur pendukung seperti prasarana pengelolaan lingkungan dan limbah rumah tangga dengan sistem terpadu

Rekomendasi

- Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan sarana prasarana di sekitar kawasan industri untuk mempermudah aktivitas ekonomi dan distribusi logistik **(KemenPU, Kemenhub, Dishub, DPUPR)**
- Peningkatan keterampilan teknis bagi tenaga kerja lokal untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sektor industri pengolahan juga sektor ekonomi lainnya **(Kemenaker, Kemenperin, Disperindag)**
- Mendorong diversifikasi ekonomi sektor berkembang seperti pariwisata melalui pengembangan kawasan pariwisata bahari di Kab Kaimana **(Kemenpar, Disbudpar)**
- Pengembangan agribisnis dan agorindustri melalui pembangunan sentra produksi perkebunan komoditas kakao, penguatan sentra tanaman pangan dan hortikultura komoditas padi sagu ubi, serta sentra perikanan tangkap **(Kementan, Kemenperin, KemenKP, DKP, DTPHP, Disperindag)**
- Peningkatan keterampilan manajerial, kewirausahaan, kemitraan dan fasilitasi pendampingan inkubasi bisnis di kalangan masyarakat agar dapat mengelola bisnis industri pengolahan dan UMKM dengan lebih efisien **(Kemenperin, KemenUMKM, Disperindag, DinkopUKM, DPMK)**
- Pengembangan industri ramah lingkungan termasuk pengolahan bahan baku yang lebih efisien menggunaan energi terbarukan dan daur ulang **(Kemenperin, KemenLH, Disperindag, DLHT)**
- Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan ekonomi sirkular, konservasi, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan limbah **(KemenLH, DLHT, DPMK)**

Highlight EPD Provinsi Papua Barat

Capaian Kurang Optimal

Tingkat Kemiskinan

21,66%

Faktor Penghambat:

- Akurasi dan validitas data kemiskinan dari berbagai sumber data kemiskinan belum terintegrasi sehingga pemberian bantuan dan rehabilitasi sosial belum tepat sasaran
- Perlindungan sosial yang belum responsif terhadap kondisi kelompok miskin dan rentan, seperti perlindungan kecelakaan kerja, jaminan kematian akibat kecelakaan kerja.
- Kuantitas dan kualitas rumah tangga dengan akses air minum, air baku, air bersih, sanitasi dan hunian belum optimal

Rasio Gini

0,389

Faktor Penghambat:

- Konektivitas antarwilayah (jalan jembatan) dan infrastruktur untuk pembangunan daerah 3T masih rendah
- Implementasi kebijakan pembangunan wilayah afirmatif untuk komunitas adat dan Orang Asli Papua belum optimal
- Distribusi kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan belum merata terutama untuk wilayah terpencil
- Akses, fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan belum memadai dan merata
- Belum optimalnya akses, kualitas dan tata kelola pendidikan

Rekomendasi

- Mendorong pemanfaatan sistem administrasi kampung dalam memverifikasi dan validasi data Regsosek, DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), dan P3KE (Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi) **(BPS, Kemen PPNBappenas, Kemensos, KemenkoPMK, Dinsos, DPMK)**
- Pengembangan program perlindungan sosial yang responsif bagi tenaga kerja, Orang Asli Papua, anak-anak dan lansia **(Kemensos, Kemnaker, Distransnaker, Dinsos)**
- Peningkatan penyediaan air baku, air minum perpipaan, sanitasi, dan rumah layak huni **(KemenPU, KemenPKP, DPUPR, DPKP)**
- Percepatan pengembangan bandara dan pelabuhan, pembangunan infrastruktur konektivitas jalan strategis intra dan antarwilayah baik di perkotaan dan wilayah afirmatif **(KemenPU, Kemenhub, DPUPR, Dishub)**
- Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan kelas rumah sakit regional, puskesmas dan *telemedicine* **(Kemenkes, Dinkes)**
- Pelatihan kompetensi dan optimalisasi distribusi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik terutama untuk wilayah terpencil **(Kemenkes, Kemendikdasmen, Dinkes, Disdik)**
- Pemberian bantuan pendidikan kepada masyarakat miskin dan pemerataan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan **(Kemendikdasmen, Disdik)**
- Penyusunan kurikulum kontekstual wilayah papua dan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan **(Kemendikdasmen, Kemendiksaintek, Disdik)**

Highlight EPD Provinsi Papua Barat

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Indeks Pembangunan Manusia 67,69	**Faktor Penghambat:** • Rendahnya daya saing dan kesempatan kerja bagi sumber daya manusia lokal dan Orang Asli Papua	Pemberian subsidi beasiswa dan pelatihan keterampilan bagi SDM lokal dan OAP yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, seperti pelatihan teknologi, kewirausahaan, dan industri kreatif **(Kemendikdasmen, Kemenperin, KemenUMKM, Disdik, Disperindag, DinkopUKM)**
	• Kualitas sumber daya manusia rendah yang dipengaruhi oleh gizi sejak 1000 Hari Pertama Kelahiran	Mendorong edukasi peningkatan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan pemberian ASI eksklusif kepada calon pengantin dan ibu hamil **(Kemenkes, Dinkes)**
	• Terbatasnya kapasitas, kualitas dan kuantitas SDM tenaga kesehatan dan tenaga pendidik	Peningkatan kompetensi dan optimalisasi distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan terutama untuk wilayah perkotaan dan afirmatif **(Kemendiksaintek, Kemendikdasmen, Kemenag, Kemenkes, Disdik, Dinkes)**
Indeks Pembangunan Kebudayaan 48,04	**Faktor Penghambat:** • Belum optimalnya pendidikan lingkungan dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Menerapkan materi mengenai kebudayaan Papua Barat dalam kurikulum pendidikan formal **(Kemendikdasmen, Kemenbud, Disdik, Disbudpar)**
	• Belum tersedianya ruang publik, gedung kesenian dan taman budaya untuk pertunjukan seni dan budaya	Peningkatan pelatihan seni dan *workshop* tradisional seperti tarian, musik, ukiran kayu, tenun, serta kerajinan tangan khas Papua Barat guna meningkatkan keterampilan yang mendukung pelestarian budaya dan peningkatan pendapatan **(Kemenbud, Kemenekraf, Disbudpar)**
	• Belum optimalnya pembinaan nilai-nilai budaya dan pengetahuan lokal tua-tua adat kepada generasi muda dan kelompok-kelompok sanggar seni dan budaya	Mendorong pembangunan sarana prasarana ruang publik yang mendukung peningkatan kreatifitas dan pengembangan wisata budaya **(Kemenpar, Kemenbud, Disbudpar)**
Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif 31547 orang	**Faktor Penghambat:** • Munculnya orientasi berlebihan kepada kegiatan politik praktis seputar kekuasaan dibandingkan kegiatan kepeloporan di bidang sosial, penumbuhan kreasi seni, budaya, ekonomi kreatif, serta olahraga	Memperkuat posisi lembaga adat dan partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kebudayaan dan pembangunan termasuk mendukung inisiatif untuk mengembangkan dan mengajarkan tradisi secara lebih luas **(DPRD Papua Barat, Disbudpar, DPMK)**
	• Masih minimnya pengembangan kapasitas pelaku ekonomi	Pelestarian adat dan peningkatan pemberdayaan ekonomi kreatif pada sekitar kawasan pariwisata rintisan seperti kawasan pariwisata bahari Kab Kaimana dan pariwisata alam dan budaya di Kab Pegunungan Arfak **(Kemenpar, Kemenekraf, KemenUMKM, Disbudpar, DinkopUKM)**

Highlight EPD Provinsi Papua Barat

Capaian Kurang Optimal

Skor Pola Pangan Harapan

Faktor Penghambat:

- Rendahnya kapasitas petani pengolah pangan sebagai salah satu penentu kapasitas *supply* bahan pangan
- Terbatasnya diversifikasi pangan lokal karena belum optimalnya sumber pangan alternatif seperti komoditas sagu, ubi jalar dan keladi sebagai potensi bahan pangan lokal

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Faktor Penghambat:

- Belum tersedianya data dan informasi potensi investasi daerah
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan perizinan standar OSS yang memadai
- Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM layanan perizinan

Indeks Inovasi Daerah

Indeks Daya Saing Daerah

Faktor Penghambat:

- Belum optimalnya pengembangan dan pemerataan infrastruktur serta peningkatkan kapasitas ekonomi di beberapa wilayah prioritas
- Minimnya pengetahuan UMK tentang manajemen bisnis, sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi bisnisnya
- Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan, kreativitas, inovasi dan daya saing pemuda dalam aktivitas perekonomian

Rekomendasi

- Pembangunan infrastruktur pengolahan pangan (laboratorium uji mutu, peralatan, dll) yang turut menentukan kapasitas produksi dan ketersediaan bahan pangan **(Kementan, DTPHP)**
- Peningkatan pelatihan dan kapasitas jumlah petugas penyuluh/pendamping pengolahan pangan dan gizi untuk mendorong diversifikasi sumber pangan lokal potensial (sagu, ubi, jagung, dan kakao) bagi pelaku usaha pengolahan pangan dan rumah tangga **(Kementan, Diskepang, DTPHP)**
- Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas transportasi untuk mempermudah distribusi bahan pangan ke daerah-daerah terpencil dan memperlancar aktivitas ekonomi **(KemenPU, Kemenhub, Dinas PU, Dishub)**
- Menyusun peta investasi dan peningkatan upaya promotif yang kreatif guna menjangkau calon-calon investor **(BKPM, DPMPTSP)**
- Memperkuat iklim investasi melalui optimalisasi kapasitas SDM, peningkatan sarana prasarana pelayanan perizinan, reformasi birokrasi, serta peningkatan transparansi untuk memacu akselerasi ekonomi **(BKPM, DPMPTSP)**
- Penguatan jaminan keamanan dan kenyamanan investasi supaya terjalin kerjasama yang nyaman dan optimal **(BKPM, DPMPTSP, Bakesbangpol)**
- Peningkatan pelatihan manajemen bisnis, kewirausahaan, pemasaran digital, dan fasilitasi inkubasi bisnis bagi pemuda, pelaku usaha, dan masyarakat **(KemenUMKM, DinkopUKM, DPMK)**
- Pengembangan mitra IKM dan ekonomi kreatif yang holistik guna meningkatkan daya saing dan menambah penghasilan **(Kemenekraf, KemenUMKM, DinkopUKM)**

Highlight EPD Provinsi Papua Barat

Capaian Kurang Optimal

Indeks Demokrasi Provinsi

Faktor Penghambat:

- Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu, pengambilan kebijakan dan pengawasan pembangunan
- Masih terdapat ancaman kekerasan atau konflik sosial dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain
- Menurunnya peran DPRD terutama dalam menghasilkan Perda inisiatif
- Masih terdapat tindakan atau pernyataan diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya

Crime Rate

Faktor Penghambat:

- Jumlah tenaga pengendali dan keamanan lingkungan belum memadai
- Potensi kecemburuan sosial antara Orang Asli Papua dan warga pendatang
- Belum optimalnya koordinasi antar instansi penegak hukum dan keamanan
- Penyelenggaraan keamanan, ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat belum optimal

Rekomendasi

- Peningkatan pendidikan politik yang intensif untuk meningkatkan kesadaran warga Papua Barat mengenai hak pilih dan pentingnya partisipasi dalam pemilu melalui media massa, pelatihan, dan program sosialisasi. **(Kemenkopolkam, KemenHAM, Kemendikdasmen, Badan Kesbangpol, Disdik)**
- Fasilitasi akses bagi masyarakat di wilayah terpencil untuk dapat ikut serta dalam pemilu, dengan menyediakan lokasi pemungutan suara yang lebih dekat dan memadai. **(Bawaslu, POLRI, Badan Kesbangpol)**
- Penguatan kapasitas dan peningkatan pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, akuntabel dan jauh dari korupsi guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. **(Kemenkum, KemenHAM, POLRI, Badan Kesbangpol, Satpol PP)**
- Penambahan jumlah personel keamanan dan peningkatan kebijakan terhadap kewaspadaan, ketertiban, pengawasan keamanan dan penanganan konflik sosial. **(Kemenhan, POLRI, Satpol PP)**
- Fasilitasi forum dialog inklusif antara kelompok etnis dan komunitas untuk meredakan ketegangan dan meningkatkan kerjasama antar kelompok dengan melibatkan mediator independen/penegak hukum/LSM/organisasi sosial. **(Kemenkum, Kemenhan, POLRI, Badan Kesbangpol, Satpol PP)**
- Peningkatan kewaspadaan dan keamanan dengan memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas (*community policing*) untuk mencegah terjadinya kejahatan. **(KemenHAM, Kemenhan, POLRI, Badan Kesbangpol, Satpol PP)**
- Mendorong penggunaan kamera pengawas di tempat-tempat publik dan pemantauan berbasis aplikasi untuk melaporkan kejahatan dan meningkatkan deteksi dini terhadap tindakan kriminal. **(POLRI, Badan Kesbangpol, SatpolPP)**

34. Papua Barat Daya

Highlight EPD Provinsi Papua Barat Daya

Capaian Optimal

Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

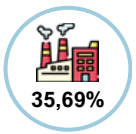

Faktor Pendukung:

- Industri pengilangan migas dan industri karet bekontribusi signifikan terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan
- Pengembangan industri pengolahan seperti pengalengan ikan tuna dan cakalang

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

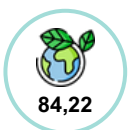

Faktor Pendukung:

- Potensi sumber daya alam yang masih asri dan kaya akan keanekaragaman hayati flora dan fauna
- Wilayah pesisir yang kaya akan terumbu karang dan hutan mangrove berfungsi sebagai pelindung pantai dan mendukung kehidupan berbagai jenis ikan dan organisme laut lainnya

Rekomendasi

- Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan sarana prasarana disekitar kawasan industri untuk mempermudah aktivitas ekonomi dan distribusi logistik **(KemenPU, Kemenhub, dan DPUPR)**
- Peningkatan keterampilan teknis bagi tenaga kerja lokal untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sektor industri pengolahan juga sektor ekonomi lainnya **(Kemenaker, Kemenperin, dan DinkopUKMPP)**
- Pengembangan agribisnis dan agorindustri melalui pembangunan sentra produksi perkebunan, penguatan sentra tanaman pangan dan hortikultura, serta sentra perikanan tangkap **(Kementan, Kemenperin, dan KemenKP)**
- Peningkatan keterampilan manajerial, kewirausahaan, kemitraan dan fasiliasi pendampingan inkubasi bisnis di kalangan masyarakat agar dapat mengelola bisnis industri pengolahan dan UMKM dengan lebih efisien **(Kemenperin, KemenUMKM, dan DinkopUKMPP)**
- Pengembangan industri ramah lingkungan termasuk pengolahan bahan baku yang lebih efisien menggunaan energi terbarukan dan daur ulang **(Kemenperin, KemenLH, DinkopUKMPP, DLHKP)**
- Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan ekonomi sirkular, konservasi, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan limbah **(KemenLH, DLHKP, dan DukcapilPMK)**
- Peningkatan program konservasi untuk melindungi spesies langka dan ekosistem penting, seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan hutan tropis **(KemenLH, DLHKP)**

Highlight EPD Provinsi Papua Barat Daya

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Laju Pertumbuhan Ekonomi 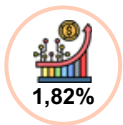 **1,82%**	**Faktor Penghambat:** • Belum optimalnya pelayanan perhubungan, konektivitas dan transportasi antarmoda yang mempengaruhi distribusi logistik dan aktivitas ekonomi	Percepatan pengembangan bandara dan pelabuhan, pembangunan infrastruktur konektivitas jalan strategis intra dan antarwilayah untuk mempermudah aktivitas distribusi dan ekonomi **(KemenPU, Kemenhub, dan DinasPUPR)**
	• Rendahnya diversifikasi ekonomi karena ketergantungan pada sektor pertambangan dan penggalian yang rentan terhadap penurunan harga komoditas, fluktuasi pasar global, dan risiko geopolitik.	Peningkatan diversifikasi ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya lokal seperti industri pengolahan berbasis hasil pertanian dan perikanan unggulan dapat meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan baru **(Kementan, KemenKP, dan DP2KP)**
	• Belum optimalnya pembangunan sektor pariwisata yang potensial dengan sinergi ekonomi kreatif	Pengembangan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) dan pemberdayaan ekonomi kreatif pada sekitar kawasan pariwisata unggulan seperti Raja Ampat **(Kemenpar dan Dinporaperkraf)**
Pembentukan Modal Tetap Bruto **-15,04% PDRB**	**Faktor Penghambat:** • Belum optimalnya daya tarik investasi	Menyusun peta investasi dan peningkatan upaya promotif yang kreatif guna menjangkau calon-calon investor. **(BKPM dan DPMPTSP)**
	• Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan perizinan standar OSS yang memadai	Penguatan jaminan keamanan dan kenyamanan investasi supaya terjalin kerjasama yang nyaman dan optimal. **(BKPM dan DPMPTSP)**
	• Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM layanan perizinan	Memperkuat iklim investasi melalui optimalisasi kapasitas SDM, peningkatan sarana prasarana pelayanan perizinan, reformasi birokrasi, serta peningkatan transparansi untuk memacu akselerasi ekonomi**. (BKPM dan DPMPTSP)**
Indeks Daya Saing Daerah **3,03**	**Faktor Penghambat:** • Belum optimalnya pengembangan dan pemerataan infrastruktur serta peningkatkan kapasitas ekonomi di beberapa wilayah prioritas	Peningkatan pelatihan manajemen bisnis, kewirausahaan, pemasaran digital, dan fasilitasi inkubasi bisnis bagi pemuda, pelaku usaha, dan masyarakat. **(KemenUMKM, DinkopUKMPP, dan DPMK)**
	• Minimnya pengetahuan UMK tentang manajemen bisnis, sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi bisnisnya	Pengembangan mitra IKM yang holistik guna meningkatkan daya saing dan menambah penghasilan **(Kemenekraf, KemenUMKM, dan DinkopUKMPP)**

Highlight EPD Provinsi Papua Barat Daya

Capaian Kurang Optimal

Tingkat Pengangguran Terbuka

Faktor Penghambat:

- Ketersediaan kesempatan kerja dan kualitas daya saing sumber daya manusia masih kurang memadai
- Masih adanya perselisihan hubungan industrial antarperusahaan atau antarusaha

Tingkat Kemiskinan

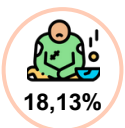

Faktor Penghambat:

- Belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan Orang Asli Papua.
- Akurasi dan validitas data kemiskinan dari berbagai sumber data kemiskinan belum terintegrasi sehingga pemberian bantuan dan rehabilitasi sosial belum tepat sasaran
- Kuantitas dan kualitas rumah tangga dengan akses air minum, air baku, air bersih, drainase, sanitasi dan hunian belum memadai

Rasio Gini

Faktor Penghambat:

- Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas untuk daerah 3T masih rendah
- Distribusi kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan belum merata terutama untuk wilayah terpencil
- Akses, fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan dan tata kelola pendidikan belum memadai dan merata

Rekomendasi

- Peningkatan sinergi industri dan pendidikan dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja (pemagangan, pelatihan kerja, dan riset guna menciptakan lapangan kerja baru. **(Kemenperin, Kemendiksaintek, dan Kemendikdasmen)**
- Mengedukasi pekerja dan pengusaha tentang hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, menyediakan forum mediasi, dan menyusun PKB (Perjanjian Kerja Bersama). **(Kemnaker dan DisnakertransESDM)**
- Pengembangan program jaminan dan perlindungan sosial yang responsif bagi tenaga kerja, Orang Asli Papua, anak-anak dan lansia. **(Kemensos, Kemnaker, dan DinsosPPPA)**
- Mendorong pemanfaatan sistem administrasi kampung dalam memverifikasi dan validasi data Regsosek, DTKS, dan P3KE. **(Kemensos, KemenkoPMK, dan DinsosPPPA)**
- Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas jalan jembatan, penyediaan infrastruktur dasar (air baku, SPAM regional, sanitasi, dan rumah layak huni) di perkotaan dan wilayah afirmatif. **(KemenPU, KemenPKP, dan Kemenhub)**
- Pelatihan kompetensi dan optimalisasi distribusi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik **(Kemenkes dan Kemendikdasmen)**
- Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan kelas rumah sakit regional, puskesmas dan *telemedicine*. **(Kemenkes, DinkesPPKB)**
- Pemberian bantuan pendidikan kepada masyarakat miskin, pemerataan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, serta penyusunan kurikulum kontekstual wilayah papua dan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan **(Kemendikdasmen, Disdikbud)**

Highlight EPD Provinsi Papua Barat Daya

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Indeks Pembangunan Manusia 69,65	**Faktor Penghambat:** • Rendahnya daya saing dan kesempatan kerja bagi sumber daya manusia lokal dan Orang Asli Papua • Kualitas sumber daya manusia rendah yang dipengaruhi oleh gizi sejak 1000 Hari Pertama Kelahiran dan kasus *stunting* • Terbatasnya kapasitas, kompetensi, kualitas dan kuantitas SDM tenaga kesehatan dan tenaga pendidik	Pemberian subsidi beasiswa dan pelatihan keterampilan bagi SDM lokal dan OAP yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, seperti pelatihan teknologi, kewirausahaan, dan industri kreatif **(Kemendikdasmen dan Disdikbud)** Edukasi peningkatan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan pemberian ASI eksklusif kepada calon pengantin dan ibu hamil **(Kemenkes dan DinkesPPKB)** Peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan **(Kemendiksaintek, Kemenkes, dan Disdikbud)**
Indeks Pembangunan Kebudayaan 48,04	**Faktor Penghambat:** • Belum optimalnya pendidikan lingkungan dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat • Belum tersedianya ruang publik, gedung kesenian dan taman budaya untuk pertunjukan seni dan budaya • Belum optimalnya pembinaan nilai-nilai budaya dan pengetahuan lokal tua-tua adat kepada generasi muda dan kelompok-kelompok sanggar seni dan budaya	Menerapkan materi mengenai kebudayaan Papua Barat dalam kurikulum pendidikan formal **(Kemendikdasmen, Kemenbud, dan Disdikbud)** Peningkatan pelatihan seni dan *workshop* tradisional seperti tarian, musik, ukiran, tenun, serta kerajinan tangan guna meningkatkan keterampilan yang mendukung pelestarian budaya dan peningkatan pendapatan **(Kemenbud, Disdikbud, dan Disporaparekraf)** Mendorong pembangunan sarana prasarana ruang publik yang mendukung peningkatan kreatifitas dan pengembangan wisata budaya **(Kemenbud, Disporaparekraf)**
Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif 31.547 orang	**Faktor Penghambat:** • Masih minimnya pengembangan kapasitas pelaku ekonomi • Munculnya orientasi berlebihan kepada kegiatan politik praktis seputar kekuasaan dibandingkan kegiatan kepeloporan di bidang sosial, penumbuhan kreasi seni, budaya, ekonom kreatif, serta olahraga	Memperkuat posisi lembaga adat dan partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kebudayaan dan pembangunan termasuk mendukung inisiatif untuk mengembangkan dan mengajarkan tradisi secara lebih luas **(DPRD, Disdikbud)** Pelestarian adat dan peningkatan pemberdayaan ekonomi kreatif pada sekitar kawasan pariwisata rintisan seperti kawasan pariwisata bahari Kab. Kaimana dan pariwisata alam dan budaya di Kab. Pegunungan Arfak **(Kemenpar, Kemenekraf, dan Disporaparekraf)**

Highlight EPD Provinsi Papua Barat Daya

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Skor Pola Pangan Harapan 81,2	**Faktor Penghambat:** • Diversifikasi pangan lokal belum memadai karena sumber pangan alternatif seperti komoditas sagu, ubi jalar dan kelapa sebagai potensi bahan pangan lokal masih belum dimanfaatkan dengan baik	Peningkatan pelatihan dan kapasitas jumlah petugas penyuluh/pendamping pengolahan pangan dan gizi untuk mendorong diversifikasi sumber pangan lokal potensial (sagu, ubi, jagung, dan kakao) bagi pelaku usaha pengolahan pangan dan rumah tangga. **(Kementan dan DP2KP)**
	• Ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan distribusi pangan belum memadai	Pembangunan infrastruktur pengolahan pangan (laboratorium uji mutu, peralatan, dll) yang turut menentukan kapasitas produksi dan ketersediaan bahan pangan. **(Kementan dan DP2KP)**
		Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas transportasi untuk mempermudah distribusi bahan pangan ke daerah-daerah terpencil dan memperlancar aktivitas ekonomi. **(KemenPU, Kemenhub, Dishub, DisPUPR)**
Crime Rate 353 per 100.000 penduduk	**Faktor Penghambat:** • Jumlah tenaga pengendali dan keamanan lingkungan belum memadai	Penambahan jumlah personel keamanan dan peningkatan kebijakan terhadap kewaspadaan, ketertiban, pengawasan keamanan dan penanganan konflik sosial. **(KemenHAM, POLRI, SatpolPP)**
	• Penyelenggaraan keamanan, ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat belum optimal	Peningkatan kewaspadaan dan keamanan dengan memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas (*community policing*) untuk mencegah terjadinya kejahatan. **(KemenHAM, POLRI, dan SatpolPP)**
Indeks Demokrasi Provinsi 65,55	**Faktor Penghambat:** • Masih terdapat ancaman kekerasan dan diskriminasi dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain	Fasilitasi forum dialog inklusif antara kelompok etnis dan komunitas untuk meredakan ketegangan dan meningkatkan kerjasama antar kelompok dengan melibatkan mediator independen/penegak hukum/LSM/organisasi sosial. **(Kemenkum, KemenHAM, dan POLRI)**
	• Belum optimalnya pencegahan potensi konflik sosial dan sinergi antara pemerintah daerah dengan Forkopimda dalam menjaga stabilitas wilayah	
	• Belum optimalnya pemahaman dan pendidikan politik masyarakat yang mempengaruhi rendahnya partisipasi terhadap pemilu dan politik	Peningkatan pendidikan politik yang intensif untuk meningkatkan kesadaran warga Papua Barat mengenai hak pilih dan pentingnya partisipasi dalam pemilu melalui media massa, pelatihan, dan program sosialisasi. **(Kemenkopolkam, KemenHAM, dan Kemendikdasmen)**

35. Papua

Highlight EPD Provinsi Papua

Capaian Optimal

*Laju Pertumbuhan Ekonomi

Faktor Pendukung:

- Potensi hasil eksplorasi sektor pertambangan dan penggalian yang besar
- Peningkatan angka ekspor nontambang Papua terutama komoditas kayu olahan
- Penerbitan kembali izin ekspor konsentrat tembaga
- Potensi perikanan tangkap yang besar terutama untuk pasar ekspor
- Pelaksanaan berbagai Proyek Strategis Nasional terutama pembangunan fisik untuk mendukung aktivitas ekonomi (jalan trans Papua, bandara, irigasi)

Penyediaan Lapangan Kerja per Tahun

Faktor Pendukung:

- Perbaikan kondisi ekonomi diberbagai sektor mendorong penciptaan pembukaan lapangan kerja khususnya di sektor formal.

Indeks Pembangunan Pemuda

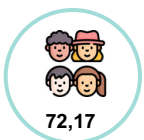

Faktor Pendukung:

- Tingkat kesehatan pemuda Papua yang optimal, direfleksikan oleh keberhasilan Papua dalam menekan angka kesakitan pemuda, menurunya angka pemuda korban kejahatan, rendahnya persentase pemuda yang merokok, dan rendahnya remaja perempuan yang sedang hamil
- Kondisi lapangan dan kesempatan kerja bagi pemuda Papua yang cukup baik
- Capaian partisipasi dan kepemimpinan pemuda Papua yang cukup baik

Rekomendasi

Mendorong pengembangan sektor unggulan daerah baru pasca DOB diantaranya melalui optimalisasi sektor perikanan tangkap dan pengolahan hasil laut, sektor pariwisata berbasis budaya dan alam, serta hilirisasi hasil hutan non kayu (HHBK) yang difokuskan di Kab. Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Waropen, Supiori (perikanan/hasil laut), Kab. Jayapura, Sarmi, Keerom, Kota Jayapura (pariwisata), Kab. Mamberamo Raya, Keerom, Waropen, Biak Numfor (HHBK). **(Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata, Dinas KKP | Bappenas, Kemenhut, Kemenpar, Kementan, KemenKP)**

Mendorong optimalisasi pemanfaatan infrastruktur strategis dengan memastikan pengembangan prasarana pendukung di daerah, penyusunan regulasi daerah yang memperkuat integrasi infrastruktur nasional dengan kawasan sentra ekonomi baru, dan penguatan konektivitas antar wilayah yang difokuskan di Kab. Jayapura, Keerom, Biak Numfor, dan Kota Jayapura. **(Bappeda, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Disperindag, Dinas KKP, DPMPTSP | Bappenas, Kemen PU, Kemenhub, Kemendag, Kemenperin, KemenKP, BKPM, BPJT, Kemenkeu)**

Mengembangkan program padat karya berbasis potensi lokal dengan fokus pada sektor perikanan, pertanian, pariwisata, dan jasa, serta mendirikan pusat pelatihan kerja terpadu untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan pasar lokal dan regional yang difokuskan di Kab. Waropen, Keerom, Biak Numfor, dan Kota Jayapura. **(Bappeda, Disnaker, Ditan, Dinas Pariwisata, Diskop UKM, Disperindag, Dinas KKP, DPMPTSP | Bappenas, Kemendag, Kemenperin, KemenKP, Kemenaker, Kemenpar, Kemenekraf, BKPM)**

Peningkatan kesehatan kualitas pemuda melalui peningkatan akses pemuda terhadap fasilitas layanan kesehatan preventif dan kuratif, serta mengintensifkan kampanye gaya hidup sehat yang difokuskan di Kab. Biak Numfor, Keerom, Kepulauan Yapen, dan Kota Jayapura. **(Dispora, Dinkes, | Kemenpora, Kemenkes)**

Peningkatan kesemapatan kerja pemuda melalui peningkatan pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal serta membangun pusat pelatihan kerja pemuda (*Youth Training Centers*) yang difokuskan di Kab. Biak Numfor, Keerom, Kepulauan Yapen, dan Kota Jayapura. **(Dispora, Disnaker, | Kemenpora, Kemenaker)**

Peningkatan partisipasi dan kepemimpinan pemuda melalui pembentukan organisasi pemuda berbasis komunitas serta penyediaan beasiswa kepemimpinan untuk pemuda Papua dalam bidang pendidikan dan keterampilan yang difokuskan di Kab. Biak Numfor, Keerom, Kepulauan Yapen, dan Kota Jayapura. **(Dispora, Disdik | Kemenpora, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek)**

*Keterangan: kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua masih memperhitungkan wilayah sebelum DOB

Highlight EPD Provinsi Papua

Capaian Optimal

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Faktor Pendukung:

- Masih tingginya tutupan lahan di Provinsi Papua
- Keterlibatan masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan dan kawasan konservasi
- Penentapan kawasan konservasi diberbagai wilayah hutan Papua
- Pelaksanaan program REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) telah memberikan kontribusi dalam mengurangi laju deforestasi dan melestarikan hutan di Papua.
- Relatif masih minimnya kegiatan industrialisasi berat di Papua, sehingga pencemaran lingkungan dari aktivitas industri relatif rendah.
- Masih minimnya pembangkit listrik beretenaga bahan bakar fosil berkapasitas besar
- Papua memiliki wilayah yang luas dengan populasi yang relatif rendah. Ini mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan dibandingkan wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.

Rekomendasi

Peningkatan pengawasan kualitas lingkungan, wilayah hutan, wilayah perairan, dan wilayah konservasi melalui pemanfaatan teknologi khususnya teknologi satelit untuk pengawasan tutupan hutan yang difokuskan di Kabupaten Jayapura, Memberamo Raya, Biak Numfor, Keerom. **(Bappeda, Dinas LH, Dishut | Bappenas, Kemen LH, Kemenhut, BIG)**

Mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi melalui peningkatan keterlibatan masyarakat luas yang difokuskan di Kabupaten Jayapura, Memberamo Raya, Biak Numfor, Keerom dan Kepulauan Yapen. **(Bappeda, Dinas LH, Dishut | Bappenas, Kemen LH, Kemen ATR, Kemenhut)**

Memperluas cakupan program REDD+ di wilayah Papua untuk mengurangi deforestasi dan meningkatkan pengelolaan hutan primer yang difokuskan di Kabupaten Jayapura, Memberamo Raya, Biak Numfor, Keerom. **(Bappeda, Dinas LH, Dishut| Bappenas, Kemen LH, Kemenhut)**

Mendorong pembentukan zona lindung adat untuk melindungi hutan primer yang difokuskan di Kabupaten Jayapura, Memberamo Raya, Sarmi, Keerom. **(Bappeda, Dinas LH, Dishut | Bappenas, Kemen LH, Kemenhut, KemenATR)**

Mendorong penguatan regulasi insentif/disinsentif untuk memastikan aktivitas industri tetap sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan seperti melalui penerapan ESG bagi sektor usaha yang difokuskan di Kab. Biak Numfor, Mamberamo Raya, Waropen, Jayapura. **(Bappeda, DisLH, Dishut | Bappenas, KemenLH, Kemenhut)**

Mendorong transisi energi melalui penerapan energi baru terbarukan berbasis sumber daya EBT lokal di Provinsi Papua (energi hidro, surya, angin, dan panas bumi) yang difokuskan di Kab. Kab. Keerom, Mamberamo Raya, Sarmi, Waropen. **(Bappeda, Dinas LH, Dinas Kehutanan, Dinas ESDM | Bappenas, Kemen LH, Kemenhut, Kemen ESDM)**

Pengembangan ekowisata dalam rangka melestarikan kawasan hutan primer sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal yang difokuskan di Kab. Jayapura, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Sarmi **(Bappeda, Dinas LH, Dinas Kehutanan, Dispar | Bappenas, Kemen LH, Kemenhut, Kemenpar, KemendesPDT)**

Highlight EPD Provinsi Papua

Capaian Kurang Optimal

Tingkat Kemiskinan

17,26%

Faktor Penghambat:

- Pendapatan masyarakat masih bergantung pada aktivitas ekonomi sektor primer (pertanian subsisten, perikanan, dan hasil hutan)
- Konektivitas antarwilayah yang masih terbatas terutama antar distrik, desa adat, pusat pelayanan dasar dan pusat ekonomi lokal (pasar)
- Kerawanan pangan yang masih tinggi
- Fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata dan memadai
- Masih rendahnya penguatan nilai tambah dari sektor dominan daerah seperti sektor pertanian, perkebunan dan perikanan
- Akses terhadap infrastruktur dasar sepert listrik dan air bersih masih terbatas di banyak wilayah Papua, khususnya di daerah pedalaman.

Rasio Gini

0,362

Faktor Penghambat:

- Pendapatan masyarakat masih bergantung pada aktivitas ekonomi sektor primer (pertanian subsisten, perikanan, dan hasil hutan)
- Geografi dan disparitas wilayah terutama wilayah pedalaman yang terisolasi memperparah ketimpangan antara kota dan desa.
- Peningkatan inflasi akibat pasokan pangan yang terbatas dari wilayah Sulawesi

Tingkat Pengangguran Terbuka

6,48%

Faktor Penghambat:

- Tingkat partisipasi angkatan kerja, terutama di kalangan perempuan, serta masih rendah serta kurangnya peluang pekerjaan formal dan dominasi sektor informal
- Tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat Papua terutama di daerah pedalaman relatif rendah.
- Investasi yang minim menjadi penghambat pembukaan lapangan kerja baru, serta infrastruktur yang belum memadai dan tantangan keamanan menjadi hambatan bagi investor.
- Migrasi masuk dari luar Papua untuk pekerjaan di sektor tambang atau jasa menyebabkan persaingan di pasar kerja meningkat.

Rekomendasi

- Pengembangan kapasitas kelompok petani dan nelayan melalui pemberdayaan ekonomi dan pemberian bantuan modal untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan yang difokuskan di Kab. Jayapura, Biak Numfor, Sarmi dan Kepulauan Yapen. **(Dinas Pertanian, Dinas KP, Disko UKM, Kelompok Petani dan Nelayan, KADIN | Kementan, KemenKP. Kemen UKM)**
- Meningkatkan kapasitas konektivitas antarwilayah kabupaten/kota dan ibu kota provinsi melalui pengembangan akses jalan, bandara perintis, dan subsidi angkutan perintis untuk mempercepat distribusi barang dan mobilitas penduduk yang difokuskan di Kab. Keerom, Mamberamo Raya, Waropen, Sarmi. **(Bappeda, Dishub, Dinas PU | Bappenas, Kemenhub, Kemen PU)**
- Pengembangan tata kelola distribusi pangan dengan fasilitas yang efisien untuk menekan biaya distribusi dan mempercepat perputaran produk pangan di pasar di antaranya melalui pembangunan gudang logistik daerah di setiap regional kabupaten/kota dalam rangka memperkuat pasokan pangan dan barang esensial yang difokuskan di Kab. Jayapura, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Mamberamo Raya. **(Bappeda, Dishub, Dinas PU | Bappenas, Kemenhub, Kemen PU, Bulog)**
- Pembangunan unit sekolah dan fasilitas kesehatan baru di wilayah 3T melalui mekanisme bangunan modular atau fabrikasi dalam rangka mempercepat dan meningkatkan efisiensi anggaran dan waktu pembangunan sekolah/puskesmas yang difokuskan di Kab. Keerom, Mamberamo Raya, Sarmi, Waropen. **(Bappeda, Disdik, Dishub, Dinas PU | Bappenas, Kemendikdasmen, Kemenhub, Kemen PU)**
- Pembangunan sarana prasarana berbasis sumber daya lokal seperti pembangunan jaringan kelistrikan melalui pemanfaatan teknologi energi baru terbarukan (EBT) seperti PLTS atap, PLTA mini, pembangunan embung-embung kecil dan bak penampungan air yang difokuskan di Kab. Kab. Keerom, Mamberamo Raya, Sarmi, Waropen. **(Bappeda, Dinas ESDM, Dinas PU | Bappenas, Kemen PU, Kemen ESDM)**
- Mempercepat pembukaan jalan baru untuk menghubungkan antarwilayah distrik dan wilayah desa adat yang difokuskan di Kab. Jayapura, Keerom, Mamberamo Raya, Waropen, Kepulauan Yapen. **(Bappeda, Dinas PU, Dinas PMD | Bappenas, Kemen PU, Kemendes PDTT)**
- Mendorong peningkatan kapasitas perempuan melalui pengembangan pendidikan yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat khususnya bagi kelompok perempuan salah satunya melalui penyediaan beasiswa untuk tingkat pendidikan menengah dan tinggi yang difokuskan di Kab. Keerom, Waropen, Mamberamo Raya, Kota Jayapura **(Bappeda, Disdik, DPPPA | Bappenas, Kemendikdasmen, Kemenag, Kemen PPPA)**
- Mendorong pemerataan jumlah dan kualitas sekolah serta tenaga pendidik, terutama di wilayah perdesaan dan terpencil, untuk meningkatkan akses pendidikan dan penguatan keterampilan kerja yang difokuskan di Kab. Keerom, Waropen, Mamberamo Raya, Sarmi. **(Bappeda, Dinas Pendidikan, Pemda Kab/Kota terkait | Bappenas, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Kemendes PDT)**
- Pengembangan kawasan industri atau sentra IKM di wilayah yang memiliki potensi konflik rendah yang difokuskan di Kab. Keerom, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Jayapura, dan Kota Jayapura. **(Bappeda, Disperindag, DPMPTS | Bappenas, Kemenperin, Kemendag, BKPM)**
- Mendorong regulasi yang mengutamakan rekrutmen tenaga kerja lokal, khususnya di sektor pertambangan dan jasa, melalui penguatan peraturan daerah dan kerja sama lintas sektor untuk menciptakan peluang kerja bagi masyarakat setempat yang difokuskan di Kab. Jayapura, Keerom, Biak Numfor, Mamberamo Raya. **(Bappeda, DPMPTSP, Dinas ESDM, Dinas Perindag, Dinas Ketenagakerjaan | Bappenas, Kemenperin, Kemen ESDM, Kemenaker)**

Highlight EPD Provinsi Papua

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Indeks Pembangunan Manusia **63,01**	**Faktor Pendukung:**	
	• Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) masih rendah akibat keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah terpencil.	Pembangunan unit sekolah baru di wilayah 3T melalui mekanisme bangunan modular atau fabrikasi dalam rangka mempercepat dan meningkatkan efisiensi anggaran dan waktu pembangunan sekolah yang difokuskan di Kab. Keerom, Mamberamo Raya, Sarmi, Waropen. **(Bappeda, Disdik, Dishub, Dinas PU | Bappenas, Kemendikdasmen, Kemenhub, Kemen PU)**
	• Kekurangan tenaga pengajar berkualitas di wilayah pedalaman menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan.	Kolaborasi program penempatan guru/dokter/nakes pembantu dan permanen di wilayah 3TP dengan mendorong pemberian insentif tambahan bagi guru, dokter, dan nakes di wilayah 3TP baik itu insentif upah dan bantuan tempat tinggal layak di daerah penugasan yang difokuskan di Kab. Keerom, Mamberamo Raya, Sarmi, Waropen. **(Bappeda, Disdik, Dishub, Dinas PU | Kemendikdasmen, Kemenhub, Kemen PU)**
	• Rendahnya akses ke layanan kesehatan berkualitas, terutama di daerah terpencil, mengakibatkan rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH).	Membangun dan memperluas klinik kesehatan bergerak berbasis modular untuk menjangkau daerah terpencil serta menyediakan subsidi transportasi darurat kesehatan melalui pesawat perintis dan kapal medis yang difokuskan di Kab. Keerom, Mamberamo Raya, Sarmi, Waropen. **(Bappeda, Dinkes | Kemenkes)**
	• Infrastruktur kesehatan yang minim, termasuk jumlah rumah sakit dan tenaga medis	Membangun RS tipe D dan pos pelayanan kesehatan di setiap distrik strategis yang difokuskan di Kab. Keerom, Mamberamo Raya, Sarmi, Waropen, Kepulauan Yapen, Kota Jayapura. **(Bappeda, Dinkes | Bappenas, Kemenkes)**
	• Masalah gizi buruk, stunting, dan angka kematian ibu dan anak yang tinggi	Optimalisasi pelayanan kesehatan bergerak, pemberian paket makanan bergizi bagi kelompok ibu hamil dan pasca melahirkan, serta mendorong pengembangan lumbung pangan lokal berbasis hasil pertanian lokal seperti sagu, umbi-umbian, dan jagung melalui pemberian bantuan alsintan dan bibit berkualitas yang difokuskan di Kab. Keerom, Mamberamo Raya, Sarmi, Waropen, Supiori. **(Bappeda, Dinkes, Distan | Bappenas, Kemenkes, Kementan, BKKBN)**
	• Tingkat kemiskinan di Papua tetap menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia, membatasi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan.	
	• Beberapa komunitas adat masih memiliki pola hidup tradisional yang kurang terhubung dengan konsep modernisasi pembangunan, sehingga memengaruhi partisipasi mereka dalam pendidikan formal dan ekonomi pasar.	Mendorong pengembangan program pemberdayaan berbasis komunitas adat seperti pelatihan kerajinan, perikanan, dan pertanian modern serta mendorong penyaluran bantuan alat pertanian, bibit, dan pupuk yang difokuskan di Kab. Jayapura, Supiori, Kepulauan Yapen, Biak Numfor.**(Diskop UKM, Disnaker|KemenUKM)** Mendorong pengembangan sekolah berbasis komunitas dengan integrasi budaya lokal serta menyediakan beasiswa khusus untuk anak-anak dari komunitas adat yang difokuskan di Kab. Mamberamo Raya, Waropen, Sarmi, Keerom. **(Bappeda, Disdik, Dinas DPM | Bappenas, Kemendikdasmen, Kemendes PDT)**
Kontribusi PDB Industri Pengolahan 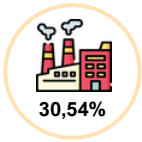 **30,54%**	**Faktor Pendukung:**	
	• Ketersediaan energi listrik yang terbatas di beberapa wilayah menjadi penghambat pengembangan industri pengolahan.	Mendorong penyediaan insentif bagi perusahaan industri yang menggunakan EBT dalam proses produksinya yang difokuskan di Kab. Kepulauan Yapen, Sarmi, Waropen, dan Supiori. **(Bappeda, Dinas ESDM | Bappenas, Kemen ESDM)**
	• Kurangnya tenaga kerja terampil di bidang manufaktur dan pengolahan	Pengembangan pusat pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri lokal, seperti agribisnis, perikanan, dan kelautan yang difokuskan di Kab. Biak Numfor, Mamberamo Raya, Keerom, Kota Jayapura. **(Bappeda, Disdik, Disnaker | Bappenas, Kemendikdasmen, Kemenaker)**
	• Tingkat investasi di sektor pengolahan masih rendah karena tantangan geografis dan persepsi risiko terkait keamanan di Papua.	Peningkatan promosi investasi melalui pengembangan event investasi Papua yang menekankan pada promosi potensi dan perkembangan kondusifitas wilayah yang difokuskan di Kab. Jayapura dan Kota Jayapura. **(Bappeda, Disperindag | Bappenas, Kemenperin)**
	• Infrastruktur transportasi dan logistik di Papua, khususnya untuk mendukung distribusi hasil industri, masih sangat terbatas.	Pengembangan jalur ekspor khusus melalui penguatan infrastruktur pelabuhan atau Bandara Biak Numfor dan Jayapura untuk mengurangi biaya logistik produk industri Papua ke pasar global khususnya wilayah Oceania, Asia Timur, dan pasifik yang difokuskan di Kab. Biak Numfor dan Kota Jayapura. **(Bappeda, Dishub, Dinas PU, Disperindag, DPMPTS | Bappenas, Kemenhub, Kemen PU, Kemenperin, BKPM)**
	• Jarak ke pasar luar Papua membuat produk industri lokal sulit bersaing secara kompetitif.	
	• Papua memiliki populasi yang relatif kecil dengan daya beli rendah, sehingga pasar domestik untuk produk industri pengolahan terbatas.	Pembangunan sentra IKM berbasis komoditas unggulan seperti perikanan, agribisnis, dan hasil hutan yang difokuskan di Kab. Biak Numfor, Mamberamo Raya, Waropen, Jayapura. **(Bappeda, Disperindag | Bappenas, Kemenperin)**

Highlight EPD Provinsi Papua

Capaian Kurang Optimal

RT dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan

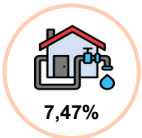

7,47%

Faktor Pendukung:

- Topografi Papua yang sulit, dengan banyak wilayah pegunungan dan hutan lebat, menyulitkan pembangunan dan perawatan jaringan perpipaan.
- Persebaran penduduk yang tidak merata membuat pengembangan jaringan perpipaan menjadi mahal dan kurang ekonomis.
- Beberapa daerah di Papua mengalami keterbatasan sumber air bersih yang layak untuk diolah menjadi air minum
- Konflik lahan atau kepemilikan tanah di sekitar sumber air dapat menghambat pembangunan infrastruktur air perpiaan.

Persentase Kondisi Mantap Jalan

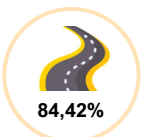

84,42%

Faktor Pendukung:

- Mayoritas tenaga kerja dan teknisi yang kompeten dalam pengelolaan proyek infrastruktur khususnya jalan dan jembatan masih harus didatangkan dari luar daerah, yang berpotensi meningkatkan biaya dan waktu pengerjaan.
- Papua memiliki karakteristik geografis yang kompleks, seperti wilayah pegunungan, hutan lebat, dan rawa-rawa, yang meningkatkan tantangan dalam pembangunan (pengangkutan material) dan perawatan jaringan jalan. Kondisi ini juga mengakibatkan biaya konstruksi menjadi sangat tinggi.
- Material lokal yang tersedia kurang memenuhi standar teknis, sehingga berdampak pada ketahanan jalan yang dibangun.
- Anggaran pemeliharaan yang terbatas menyebabkan jalan-jalan yang telah dibangun mengalami kerusakan lebih cepat akibat kurangnya perawatan berkala.
- Konektivitas antarwilayah masih rendah, terutama untuk menghubungkan daerah terpencil dengan pusat ekonomi dan layanan dasar.
- Beberapa wilayah di Papua masih mengalami gangguan keamanan dan konflik sosial, yang menghambat proses pembangunan infrastruktur jalan.

Rekomendasi

- Pengembangan sistem air minum terintegrasi di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi untuk memastikan efisiensi ekonomi pembangunan jaringan perpipaan yang difokuskan di Kab. Jayapura, Keerom, Biak Numfor, Kota Jayapura. **(Bappeda, Dinas PU | Bappenas, Kemen PU)**
- Pembangunan sistem reservoir dan stasiun pengolahan air (IPA) dengan kapasitas memadai di wilayah strategis untuk menjangkau lebih banyak rumah tangga yang difokuskan di Kab. Jayapura, Keerom, Biak Numfor, Kota Jayapura. **(Bappeda, Dinas PU | Bappenas, Kemen PU)**
- Pembangunan *water kiosks* atau sistem desalinasi sederhana untuk daerah terpencil atau pesisir serta memanfaatkan teknologi perpipaan khusus seperti *gravity-fed water systems* untuk wilayah pegunungan yang difokuskan di Kab. Kepulauan Yapen, Mamberamo Raya, Sarmi, Waropen. **(Bappeda, Dinas PU | Bappenas, Kemen PU)**
- Implementasi pendekatan berbasis kearifan lokal dan *social anthropology* untuk menyelesaikan konflik lahan di area sekitar sumber air yang difokuskan di Kab. Biak Numfor, Mamberamo Raya, Jayapura, dan Keerom. **(Bappeda, Dinas PU | Bappenas, Kemen PU)**
- Mendorong adanya pemetaan sumber daya air bersih potensial di wilayah prioritas dan melindungi daerah tangkapan air yang difokuskan di Kab. Biak Numfor, Mamberamo Raya, Jayapura, dan Keerom. **(Bappeda, Dinas PU | Bappenas, Kemen PU)**
- Pemberian insentif kepada perusahaan air minum swasta untuk mengembangkan jaringan perpipaan di daerah terpencil serta mendorong penyediaan skema pembiayaan publik-swasta (PPP) untuk pengembangan infrastruktur air yang difokuskan di Kab. Biak Numfor, Mamberamo Raya, Kepulauan Yapen, dan Keerom. **(Bappeda, Dinas PU, DPMPTSP | Bappenas, Kemen PU, Kemenkeu, BKPM)**
- Pembangunan jalan dengan optimalisasi teknologi konstruksi yang sesuai dengan karakteristik geografis Papua, seperti *geocell stabilization* untuk area rawa-rawa dan teknologi *cut-and-fill* untuk kawasan perbukitan atau pegunungan yang difokuskan di Kab. Jayapura, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom. **(Bappeda, Dinas PU | Bappenas, Kemen PU)**
- Pemanfaatan material lokal yang inovatif melalui pengembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas material lokal serta pengembangan kompetensi SDM lokal melalui keterlibatan institusi pendidikan vokasi untuk mendukung proyek infrastruktur yang difokuskan di Kab. Sarmi, Supiori, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Kota Jayapura. **(Bappeda, Dinas PU | Bappenas, Kemen PU)**
- Peningkatan sarana jalan melalui penguatan struktur konstruksi jalan serta dukungan prasarana jalan terutama dalam upaya mitigasi bencana seperti tanah longsor dan banjir yang difokuskan di Kota Jayapur, Kab. Jayapura, Keerom, Waropen. **(Bappeda, Dinas PU | Bappenas, Kemen PU)**
- Optimalisasi kolaborasi seluruh *stakeholders* pembangunan terutama Badan Pertanahan Nasional dan TNI/Polri dengan tokoh masyarakat lokal dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan, selain itu diperlukan penyusunan regulasi terkait mekanisme kompensasi jangka panjang dalam pemanfaatan infrastruktur jalan bagi ekonomi lokal yang difokuskan di Kab. Mamberamo Raya, Keerom, Sarmi, Jayapura. **(Bappeda, Dinas PU | Bappenas, Kemen PU, Kemen ATR, TNI, Polri)**

Highlight EPD Provinsi Papua

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Prevalensi *Stunting* **28,6%**	**Faktor Pendukung:**	
	• Angka kemiskinan di Papua menjadi salah satu penyebab utama keterbatasan akses masyarakat terhadap pangan bergizi dan layanan kesehatan. Hal ini juga berdampak pada ketidakstabilan pola makan anak.	Mengoptimalkan pemberian subsidi pangan bergizi seperti telur, susu, dan kacang-kacangan kepada rumah tangga miskin melalui program distribusi lokal dengan memanfaatkan Dana Desa untuk mendukung penyediaan pangan lokal bergizi secara berkelanjutan yang difokuskan di Kab. Mamberamo Raya, Sarmi, Keerom, Waropen. **(Dinsos, Dinas Ketahanan Pangan, Dinkes, Distan | Kementan, Kemenso, Kemenkes, Badan Gizi Nasional)**
	• Distribusi bahan pangan bergizi terhambat akibat minimnya infrastruktur logistik di wilayah terpencil	Pembangunan fasilitas logistik, seperti gudang penyimpanan pangan, di wilayah terpencil untuk mendukung distribusi bahan pangan bergizi serta menyusun tata kelola dan strategi distribusi logistik di Provinsi Papua yang difokuskan di Kab. Jayapura, Biak Numfor, Mamberamo Raya, Kepulauan Yapen. **(Dinas PU, Dinas Ketahanan Pangan, Distan, Dishub | Kementan, Kemen PU, Kemenhub, Badan Gizi Nasional, Bulog)**
	• Pengetahuan masyarakat khususnya ibu terkait pentingnya pemberian gizi seimbang kepada anak masih rendah	Meningkatkan frekuensi pelatihan dan kampanye tentang pentingnya gizi seimbang dan pola makan sehat untuk ibu hamil dan balita melalui posyandu serta pelibatan tokoh masyarakat atau tokoh agama (misionaris) untuk mendukung perubahan perilaku yang difokuskan di Kab. Keerom, Sarmi, Waropen, Supiori. **(Dinkes | Kemenkes | Kader Posyandu, Tokoh Masyarakat)**
	• Masih adanya kebiasaan tradisional dalam pola asuh dan kesehatan anak yang kurang selaras dengan upaya pencegahan *stunting*.	
	• Wilayah geografis yang sulit dijangkau menyebabkan rendahnya cakupan layanan kesehatan, seperti imunisasi dan perawatan balita.	Membangun dan memperluas klinik kesehatan dan Posyandu bergerak berbasis modular untuk menjangkau daerah terpencil serta menyediakan subsidi transportasi darurat kesehatan melalui pesawat perintis dan kapal medis untuk meningkatkan akses imunisasi dan perawatan balita yang difokuskan di Kab. Supiori, Mamberamo Raya, Sarmi, Kepulauan Yapen. **(Bappeda, Dinkes | Bappenas, Kemenkes)**
	• Program nasional seperti Program Percepatan Pencegahan *Stunting* belum sepenuhnya menjangkau daerah-daerah terpencil di Papua yang sangat memerlukan intervensi.	
	• Keterbatasan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak	Pembangunan *water kiosks* atau sistem desalinasi sederhana untuk daerah terpencil atau pesisir serta memanfaatkan teknologi perpipaan khusus seperti *gravity-fed water systems* untuk wilayah pegunungan yang difokuskan di Kab. Kepulauan Yapen, Mamberamo Raya, Sarmi, Waropen. **(Bappeda, Dinas PU | Bappenas, Kemen PU)**
	• Keterbatasan sarana informasi dan edukasi mengenai pentingnya gizi bagi ibu hamil dan anak menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat dalam pencegahan *stunting*.	Penguatan pendataan melalui *single platform database* untuk balita *stunting* dan kelompok ibu hamil dalam rangka meningkatkan efektivitas intervensi yang dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi Papua. **(Bappeda, Dinkes, Dinsos, Dinas Dukcapil | Bappenas, Kemenkes, Kemensos)**
	• Kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam pelaksanaan program sering kali tidak efektif, sehingga dampak program kurang terasa secara luas.	Mendorong penguatan kolaborasi dan pembagian peran multi sektor yang dikoordinir langsung oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan integrasi program penurunan *stunting* agar berjalan dengan baik khususnya dengan menginisiasi kegiatan intervensi yang dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi Papua. **(Bappeda, Dinkes, Dinsos | Bappenas, Kemenkes, Kemensos)**
Indeks Pelayanan Publik **3,27**	**Faktor Pendukung:**	
	• Tantangan dalam implementasi kebijakan di wilayah terpencil dan terisolasi, menghambat pelayanan yang efektif dan merata.	Peningkatan aksesibilitas layanan publik di wilayah 3T melalui pengembangan Unit Pelayanan Terpadu Bergerak (*mobile service units*) untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, dan pendidikan di wilayah terpencil yang difokuskan di Kab. Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, Waropen. **(Bappeda, Dinas Dukcapil, Dinkes, Dinsos, Disdik | Kemendagri, Kemendes PDT, Kemendikdasmen, Kemenkes)**
	• Kurangnya fasilitas pengaduan yang efektif dan mekanisme partisipasi masyarakat yang belum optimal	
	• Terbatasnya penggunaan teknologi dan sistem informasi yang belum memadai	Mendorong pelatihan intensif dan sertifikasi bagi ASN, terutama dalam pelayanan administratif dan manajemen berbasis digital serta pemberian insentif khusus untuk menarik tenaga pelayanan ke daerah 3T yang difokuskan di Kab. Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, Waropen, Jayapura, Biak Numfor, dan Kota Jayapura. **(Bappeda, BKD, Diskominfo | Kemendagri, BKN, Kemenkomdigi, Kemenpada RB)**
	• Kekurangan tenaga profesional yang terlatih, serta terbatasnya pelatihan dan pengembangan SDM	

36. Papua Selatan

Highlight EPD Provinsi Papua Selatan

Capaian Optimal (*)		Rekomendasi
Tingkat Pengangguran Terbuka **4,05%**	**Faktor Pendukung:** • Sebagian besar penduduk terserap pada sektor pertanian	Mengembangkan program pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan lokal Papua Selatan, termasuk kerjasama dengan lembaga pendidikan dan dunia usaha untuk memberikan pelatihan yang relevan dan efektif **(Kemnaker, Disnakertrans dan ESDM)**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 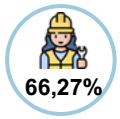 **66,27%**	**Faktor Pendukung:** • Sektor pertanian merupakan pekerjaan utama bagi sebagian besar perempuan	Mendorong optimalisasi kawasan sentra produksi pangan **(Kementan, DPPKP)** Mendorong dan mendukung kewirausahaan perempuan dengan menyediakan pelatihan bisnis, akses pasar, dan pendampingan **(Dinas KUKM dan Perindag)**

*Keterangan: Capaian indikator Provinsi Papua Selatan masih merupakan capaian provinsi induk yaitu Provinsi Papua kecuali indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Highlight EPD Provinsi Papua Selatan

Capaian Optimal (*)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Faktor Pendukung:

- Masih tingginya tutupan lahan di Provinsi Papua
- Keterlibatan masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan dan kawasan konservasi
- Penentapan kawasan konservasi diberbagai wilayah hutan Papua
- Pelaksanaan program REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) telah memberikan kontribusi besar dalam mengurangi laju deforestasi dan melestarikan hutan di Papua.
- Relatif masih minimnya kegiatan industrialisasi berat di Papua, sehingga pencemaran lingkungan dari aktivitas industri relatif rendah.
- Masih minimnya pembangkit listrik non EBT berkapasitas besar
- Papua memiliki wilayah yang luas dengan populasi yang relatif rendah. Ini mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan dibandingkan wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.

Rekomendasi

- Peningkatan pengawasan kualitas lingkungan, wilayah hutan, wilayah perairan, dan wilayah konservasi melalui pemanfaatan teknologi khususnya teknologi satelit untuk pengawasan tutupan hutan **(Dinas LH, Dishut, Kemen LH, Kemenhut, BIG)**
- Mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi melalui peningkatan keterlibatan masyarakat luas **(Dinas LH, Dishut, Kemen LH, Kemen ATR, Kemenhut)**
- Memperluas cakupan program REDD+ di wilayah Papua secara umum untuk mengurangi deforestasi dan meningkatkan pengelolaan hutan primer **(Dinas LH, Dishut, Bappenas, Kemen LH, Kemenhut)**
- Mendorong pembentukan zona lindung adat untuk melindungi hutan primer **(Dinas LH, Dishut, Kemen LH, Kemenhut, KemenATR)**
- Mendorong penguatan regulasi insentif/disinsentif untuk memastikan aktivitas industri tetap sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan seperti melalui penerapan ESG bagi sektor usaha **(DinasLH, Dishut, KemenLH, Kemenhut)**
- Mendorong transisi energi melalui penerapan energi baru terbarukan berbasis sumber daya EBT lokal **(Dinas ESDM, Kemen ESDM)**
- Pengembangan ekowisata dalam rangka melestarikan kawasan hutan primer sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal **(Bappeda, Dinas LH, Dinas Kehutanan, Dispar, Kemen LH, Kemenhut, Kemenpar, KemendesPDT)**

*Keterangan: Capaian indikator Provinsi Papua Selatan masih merupakan capaian provinsi induk yaitu Provinsi Papua

Highlight EPD Provinsi Papua Selatan

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Tingkat Kemiskinan **17,44%**	**Faktor Penghambat:**	
	• Tingginya garis kemiskinan yang jauh di atas nasional, dengan garis kemiskinan menjadi faktor dominan	Memastikan keterjangkauan harga kebutuhan bahan makanan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin **(Dinsos dan PPPA)**
	• Kurang optimalnya program bantuan langsung kepada masyarakat	Memperbaiki dan memperbarui satu data kemiskinan dengan memanfaatkan Data Regsosek agar bantuan lebih tepat sasaran **(BPS, Bappenas, Dinsos)**
	• Kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan seperti *telemedicine* dan pelayanan kesehatan bergerak **(Kemenkes dan Dinkes)**
	• Pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan menyebabkan ketimpangan pendapatan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari dan sekolah berpola asrama **(Kemendikdasmen, Disdikbud)**
Rasio Gini **0,404**	**Faktor Penghambat:**	
	• Tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya program pelatihan membatasi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan lebih mampu.	
	• Papua Selatan terletak di daerah pegunungan yang sulit dijangkau, sehingga infrastruktur yang memadai masih terbatas	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antarwilayah **(KemenPU, DPUPR)**
	• Pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan menyebabkan ketimpangan pendapatan	Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri pengolahan berbasis SDA (pertanian, perkebunan, dan perikanan) **(Kementan, KemenKP, Dinas KUMKM dan Perindag, DPPKP)**
Laju Pertumbuhan Ekonomi **4,27%**	**Faktor Penghambat:**	
	• Melambatnya kinerja sektor industri pengolahan	
	• Belum optimalnya konektivitas wilayah	Melakukan reboisasi dan rehabilitasi hutan serta lahan kritis untuk meningkatkan kemampuan lahan dalam menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir dan tanah longsor **(KLHK, Dinas LHKP)**
	• Melambatnya kinerja pertambangan karena terdampak banjir dan tanah longsor	
	• Perlambatan kinerja sektor pertanian karena adanya pergeseran masa panen	Pemanfaatan program pemerintah melalui APBN untuk asuransi pertanian JASINDO dalam rangka memitigasi dampak perubahan iklim **(Kementan, DPPKP)**

Highlight EPD Provinsi Papua Selatan

Capaian Kurang Optimal (*)		Rekomendasi
Indeks Pembangunan Manusia 68,86	**Faktor Penghambat:** • Kualitas dan daya saing SDM yang masih rendah	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendidikan untuk memastikan adanya tenaga kerja yang kompeten dan siap industri **(Kemenperin, Kemendiktisaintek, Disnakertrans dan ESDM)**
	• Kesenjangan sosial mencakup ekonomi, pendidikan, kesehatan, wilayah	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antarwilayah **(KemenPU, DPUPR)**
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun 7,34 Tahun	**Faktor Penghambat:** • Masih terbatasnya kualitas, kuantitas dan akses terhadap fasilitas pendidikan terutama untuk wilayah-wilayah terpencil dan terisolir	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari dan sekolah berpola asrama **(Kemendikdasmen, Disdikbud)**
Usia Harapan Hidup 68,17 Tahun	**Faktor Penghambat:** • Masih terbatasnya kualitas, kuantitas, dan akses terhadap layanan kesehatan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan seperti *telemedicine* dan pelayanan kesehatan bergerak **(Kemenkes dan Dinkes)**
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan 2,93%	**Faktor Penghambat:** • Potensi SDA yang dimiliki Papua Selatan belum dikelola secara optimal untuk diolah menjadi input produksi	Mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, dan keuangan mikro untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Program pelatihan keterampilan dan kredit mikro juga perlu diperkuat **(DPPKP, Perbankan, Disnakertrans dan ESDM)**
	• Konektivitas dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi kendala utama dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor industri	Meningkatkan iklim investasi melalui peningkatan kualitas regulasi dan transparansi dalam proses perizinan untuk mempercepat proses investasi dan mengurangi biaya administrasi **(DPMPTSP)**
		Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antarwilayah **(KemenPU, DPUPR)**
	• Masalah keamanan yang sering terjadi juga menjadi penghalang bagi perkembangan industri	Mengimplementasikan pendekatan keamanan berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. **(Polri, TNI, Bakesbangpol)**

*Keterangan: Capaian indikator Provinsi Papua Selatan masih merupakan capaian provinsi induk yaitu Provinsi Papua kecuali capaian IPM

Highlight EPD Provinsi Papua Selatan

Capaian Kurang Optimal (*)

Skor Pola Pangan Harapan

Faktor Penghambat:

- Masih rendahnya konsumsi pangan lokal akibat perubahan pola hidup masyarakat yang lebih suka mengkonsumsi beras
- Minimnya pengetahuan masyarakat tentang Kandungan Gizi Pangan Lokal
- Ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Faktor Penghambat:

- Masih tingginya jumlah penduduk miskin

Prevalensi *Stunting*

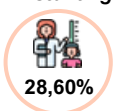

Faktor Penghambat:

- Kurangnya asupan gizi yang memadai
- Infrastruktur dan akses layanan kesehatan yang masih terbatas
- Ketimpangan sosial dan ekonomi
- Masih terbatasnya akses air bersih (*stunting* tertinggi di Asmat sebesar 55%)

Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan

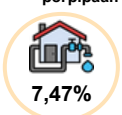

Faktor Penghambat:

- Masih terbatasnya akses terhadap air bersih

Rekomendasi

- Mendorong perbaikan kualitas konsumsi pangan untuk memenuhi gizi masyarakat dan konsumsi pangan lokal yang lebih beragam melalui penguatan pengembangan pangan lokal dan edukasi pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), serta penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademisi, lembaga nonpemerintah dan media) **(DPPKP, Dinkes)**
- Mendorong peningkatan produksi pertanian melalui dukungan teknologi, akses ke pupuk dan benih berkualitas, serta pelatihan bagi petani. Hal ini juga termasuk diversifikasi tanaman untuk memastikan ketersediaan berbagai jenis pangan **(Kementan, DPPKP)**
- Memastikan keterjangkauan harga kebutuhan bahan makanan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin **(Dinsos dan PPPA)**
- Memperbaiki dan memperbarui satu data kemiskinan dengan memanfaatkan Data Regsosek agar bantuan lebih tepat sasaran **(BPS, Bappenas, Dinsos)**
- Pemberian Kartu Usaha Afirmatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat **(Kemensos, Dinsos)**
- Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* dan perbaikan gizi lainnya **(Dinkes, DPPKP)**
- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan seperti telemedicine dan pelayanan kesehatan bergerak **(Kemenkes, Dinkes)**
- Mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, dan keuangan mikro untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Program pelatihan keterampilan dan kredit mikro juga perlu diperkuat **(DPPKP, Perbankan, Disnakertrans dan ESDM)**
- Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan di terutama untuk daerah dengan prevalensi *stunting* tinggi **(KemenPU, DPUPR)**
- Meningkatkan infrastruktur dan layanan dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan sanitasi di kawasan perumahan untuk memastikan kualitas hidup yang layak **(KemenPU, DPUPR, KemenPKP)**

*Keterangan: Capaian indikator Provinsi Papua Selatan masih merupakan capaian provinsi induk yaitu Provinsi Papua

Highlight EPD Provinsi Papua Selatan

Capaian Kurang Optimal		Rekomendasi
Persentase Kondisi Mantap Jalan 84,42%	**Faktor Penghambat:** • Biaya konstruksi yang tinggi	Mengadopsi teknologi modern dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan, seperti penggunaan material yang lebih tahan lama dan metode konstruksi yang lebih efisien **(KemenPU, DPUPR)**
	• Faktor geografis	Menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja lokal, dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dan mendukung perekonomian lokal **(Disnakertrans ESDM, DPUPR, KemenPU)**
		Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antarwilayah **(KemenPU, DPUPR)**
Indeks Inovasi Daerah 24,94	**Faktor Penghambat:** • Kualitas dan daya saing SDM yang masih rendah	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendidikan untuk memastikan adanya tenaga kerja yang kompeten dan siap industri **(Kemenperin, Dinas KUKM dan Perindag, Disnakertrans ESDM)**
Indeks SPBE 1,91	**Faktor Penghambat:** • SDM yang belum mendukung	Mengadakan pelatihan dan edukasi bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat umum tentang manfaat dan penerapan SPBE, serta cara penggunaannya yang efektif **(Diskominfotik)**
	• Keterbatasan infrastruktur pendukung (misal IT)	Meningkatkan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi di Papua dengan memperbaiki infrastruktur jaringan internet dan memastikan akses yang merata ke teknologi canggih **(Kemenkomdigi, Diskominfotik)**
		Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan SPBE, termasuk server, perangkat keras, dan sistem keamanan informasi **(Kemenkomdigi, Diskominfotik)**
Indeks Pembangunan Kebudayaan 48,52	**Faktor Penghambat:** • Kurangnya wadah untuk menampilkan kreasi dalam seni tarian membuat anak muda papua untuk terlibat dalam tarian berkurang	Pengembangan infrastruktur kebudayaan melalui pembangunan museum, galeri seni, dan taman budaya untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Papua kepada generasi muda dan wisatawan **(Kemenbud, Disdikbud)**
	• Rendahnya budaya literasi di Papua yaitu minimnya tenaga guru, fasilitas pendidikan yang kurang memadai dan kurangnya buku pelajaran yang menjadi pegangan siswa	Penguatan pendidikan kebudayaan melalui peningkatan kurikulum pendidikan yang mencakup materi tentang kebudayaan lokal Papua, termasuk bahasa, seni, dan tradisi **(Kemenbud, Disdikbud)**

*Keterangan: Capaian indikator Provinsi Papua Selatan masih merupakan capaian provinsi induk yaitu Provinsi Papua

37. Papua Tengah

Highlight EPD Provinsi Papua Tengah

Capaian Optimal

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Faktor Pendukung:

- Pertumbuhan jasa keuangan dan asuransi
  - Pertumbuhan kredit modal kerja
  - Pertumbuhan kredit konsumsi
- Investasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi
- Potensi pengolahan sumber daya alam yang besar
  - Kegiatan pertambangan dan penggalian komoditas emas, tembaga, dan perak
  - Perkebunan kelapa sawit
  - Pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit oleh

PDB Per Kapita

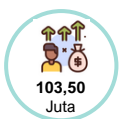

Faktor Pendukung:

- Investasi sektor tambang dan non tambang (konstruksi)
- Dominasi kegiatan pertambangan dan penggalian komoditas emas, tembaga, dan perak

Rekomendasi

Meningkatkan pertumbuhan jasa keuangan dan asuransi melalui:
1. Pengembangan infrastruktur keuangan dan perluasan agen perbankan
2. Pengembangan produk keuangan yang relevan dengan kondisi masyarakat
3. Edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat

(OJK, Lembaga Keuangan)

Penyediaan infrastruktur konektivitas, transportasi, dan sarpras ekonomi melalui pengadaan pusat, daerah maupun pemanfaatan CSR **(Kemenkoinfra, Dinas PUPR, Pelaku Usaha)**

Meningkatkan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi perizinan dan pemberian insentif bagi investor
(BKPM, DPMPTSP)

Optimalisasi komoditas kelapa sawit melalui:
1. Peningkatan produktivitas dengan peremajaan kelapa sawit, penyediaan bibit unggul, serta pengelolaan lahan berkelanjutan
2. Diversifikasi produk olahan kelapa sawit
3. Penguatan hilirisasi produk

(Kementan, Dinas PPKP, DisPPKUKM)

Optimalisasi kegiatan pertambangan melalui:
1. Perbaikan dan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik
2. Penguatan regulasi praktik tambang berkelanjutan melalui penyediaan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan
3. Peningkatan kapasitas SDM dan tenaga kerja lokal melalui beasiswa dan pelatihan
4. Peningkatan kontribusi CSR dalam pemabangunan Papua Tengah

(KemenESDM, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha)

Highlight EPD Provinsi Papua Tengah

Capaian Optimal

Tingkat Pengangguran Terbuka

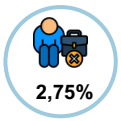

2,75%

Faktor Pendukung:

- Kontribusi sektor pertanian yang signifikan dalam serapan tenaga kerja
- Pertumbuhan ekonomi yang positif dan peningkatan investasi di sektor pertambangan dan penggalian
- Dukungan program pelatihan vokasional dan pengembangan kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal.
- Pengembangan berbagai infratsruktur strategis sepeti jalan Trans Papua, pengembangan Mozes Kilangin, dan pembangunan Pelabuhan Pomako

Rekomendasi

- Pengembangan kapasitas kelompok petani dan nelayan melalui pemberdayaan ekonomi dan pemberian bantuan modal untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan **(Dinas PPKP, DisPPKUKM, Kelompok Petani dan Nelayan, KADIN | Kementan, KemenKP. Kemen UKM)**
- Pembukaan lapangan kerja dengan diversifikasi ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi dan keunggulan daerah serta pengembangan ekonomi masyarakat melalui kelompok UMKM, koperasi, BUMDes, serta pemberdayaan perempuan dan kelompok marjinal **(KemendesPDT, Dinas PPKUKM, dan DisnakertransESDM)**
- Mendorong pengembangan program pemberdayaan berbasis komunitas adat seperti pelatihan kerajinan, perikanan, dan pertanian modern serta mendorong penyaluran bantuan alat pertanian, bibit, dan pupuk.**(DisPKUKM, DisnakertransESDM | KemenUKM)**
- Kerja sama dengan pelaku usaha dalam penyerapan tenaga kerja lokal melalui penerapan kebijakan *affirmative action* dan pemberian insentif bagi perusahaan **(DPMPTSP, DisnakertransESDM, Pelaku Usaha)**
- Mendorong regulasi yang mengutamakan rekrutmen tenaga kerja lokal, khususnya di sektor pertambangan dan jasa, melalui penguatan peraturan daerah dan kerja sama lintas sektor untuk menciptakan peluang kerja bagi masyarakat setempat. (**Bapperida, DisnakertransESDM | Bappenas, KemenESDM, Kemenaker**)
- Pembangunan unit sekolah baru di wilayah 3T melalui mekanisme bangunan modular atau fabrikasi dalam rangka mempercepat dan meningkatkan efisiensi anggaran dan waktu pembangunan sekolah. **(Bapperida, Disdik, Dishub, Dinas PUPR | Bappenas, Kemendikdasmen, Kemenhub, Kemen PU)**
- Mendorong pengembangan sekolah berbasis komunitas dengan integrasi budaya lokal serta menyediakan beasiswa khusus untuk anak-anak dari komunitas adat . **(Bapperida, Disdik, DPMPTSP | Bappenas, Kemendikdasmen, Kemendes PDT)**
- Mendorong optimalisasi pemanfaatan infrastruktur strategis dengan memastikan pengembangan prasarana pendukung di daerah, penyusunan regulasi daerah yang memperkuat integrasi infrastruktur nasional dengan kawasan sentra ekonomi baru **(Bapperida, Dinas PUPR, Dishub, DisPPKUKM, Dinas PPKP, DPMPTSP | Bappenas, KemenPU, Kemenhub, Kemenperin, KemenKP, BKPM, Kemenkeu)**

Highlight EPD Provinsi Papua Tengah

Capaian Kurang Optimal

Indeks Pembangunan Manusia

60,25

Faktor Penghambat:

- Rendahnya usia harapan hidup (68,18 tahun)
- Rendahnya rata-rata lama sekolah (6,12 tahun) dan harapan lama sekolah (9,63 tahun)
- Minimnya infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan
- Rendahnya pengeluaran per kapita masyarakat, tidak sebanding dengan PDRB per kapita yang sangat tinggi

Tingkat Kemiskinan

29,76%

Faktor Penghambat:

- Sektor pertambangan tidak menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal sehingga tidak inklusif
- Mayoritas penduduk bekerja di sektor informal (87,02%) sehingga cenderung tidak produktif dan bernilai tinggi

Rasio Gini

0,381

- Terbatasnya akses masyarakat lokal terhadap kebutuhan dasar rumah tangga
- Terbatasnya aksesibilitas menyebabkan kurang optimalnya mobilitas barang dan jasa
- Tidak meratanya pembangunan perkotaan dan perdesaan

Rekomendasi

Pemerataan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui:
1. Pemerataan infrastruktur sekolah dan layanan kesehatan (puskesmas dan RS)
2. Pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kesehatan melalui pemberian insentif khusus untuk daerah Papua
3. Bantuan bagi OAP untuk mengakses pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dan akses kesehatan

(Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Kemenag, Kemenkes, Disdik, Dinkes)

Kolaborasi dengan *non-state actor* dalam pemberian beasiswa pendidikan dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi melalui pembiayaan non APBN/APBD **(Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Kemenag, Disdik)**

Peningkatan kualitas masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan potensi sektor unggulan daerah **(Kemenaker, Disnakertrans)**

Kolaborasi bersama pelaku usaha dalam penyerapan tenaga kerja lokal melalui penerapan kebijakan *affirmative action* dan pemberian insentif bagi perusahaan **(DPMPTSP, Disnakertrans, Pelaku Usaha)**

Pembukaan lapangan kerja dengan diversifikasi ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi dan keunggulan daerah serta pengembangan ekonomi masyarakat melalui kelompok UMKM, koperasi, BUMDes, serta pemberdayaan perempuan dan kelompok marjinal **(KemendesPDT, Dinas PPKUKM, dan Disnakertrans)**

Pengembangan usaha produktif masyarakat berbasis potensi lokal sebagai pendukung aktivitas pertambangan dan perkebunan **(Dinas PPKUKM)**

Meningkatkan aksesibilitas rumah tangga terhadap infrastruktur dasar yang meliputi sanitasi, air bersih, air minum, dan listrik **(KemenPKP,KemenESDM, Dinas PUPR)**

Penyediaan infrastruktur konektivitas, transportasi, dan sarpras ekonomi melalui pengadaan pusat, daerah, maupun pemanfaatan CSR **(Kemenkoinfra, Dinas PUPR, Pelaku Usaha)**

38. Papua Pegunungan

Highlight EPD Provinsi Papua Pegunungan

Capaian Optimal

Laju Pertumbuhan Ekonomi

4,78%

Faktor Pendukung:

- Pertumbuhan di lapangan usaha:
  - Pertambangan dan penggalian
  - Keuangan dan asuransi
  - Perdagangan besar dan eceran

Tingkat Pengangguran Terbuka

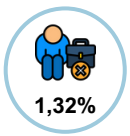

1,32%

Faktor Pendukung:

- Mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian (88,42%)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

85,08

Faktor Pendukung:

- Minimnya aktivitas industri berat
- Tingginya Indeks Kualitas Udara
  - Minimnya polusi udara
  - Hutan tropis yang luas (33,12 juta Ha - Provinsi Papua secara keseluruhan)
- Tradisi masyarakat
  - SASI (melarang pengambilan hasil alam dalam waktu tertentu)

Rekomendasi

- Mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas dan transporasi untuk memperlancar distribusi barang dan jasa sekaligus membuka akses ke wilayah pedalaman **(KemenPU, Kemenhub, dan Kemenkomdigi)**
- Diversifikasi kegiatan ekonomi dan peningkatan nilai tambah produk melalui pengelolaan komoditas lokal, seperti sagu, kopi, dan kakao untuk meningkatkan harga jual produk **(Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan)**
- Pengembangan sumber daya alam yang memperhatikan keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat adat dalam prosesnya **(Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan; serta Bappedalitbang)**
- Peningkatan kualitas masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan potensi dan sektor unggulan daerah serta beasiswa pendidikan dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi **(Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan Kemenaker)**
- Pembukaan lapangan kerja dengan diversifikasi ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi dan keunggulan daerah serta pengembangan ekonomi masyarakat melalui kelompok UMKM, koperasi, BUMDes, serta pemberdayaan perempuan dan kelompok marjinal **(KemendesPDT, Dinas PPKUKM, dan Disnakertrans)**
- Penyediaan infrastruktur konektivitas, transportasi, sarpras ekonomi, serta peningkatan keamanan wilayah **(Kemenkoinfra, Kemenkoekon, dan Kemenkopolkam)**
- Pemerataan infrastruktur lingkungan, seperti pengelolaan sampah termasuk pengolahan limbah rumah tangga dengan sistem pengolahan terpadu **(DLHKP)**
- Pengelolaan hutan secara berkelanjutan melalui peningkatan pengawasan terhadap penebangan liar dan pembukaan lahan secara masif, disertai dengan penguatan regulasi tentang pemanfaatan SDA **(Kemenhut dan DLHKP)**
- Pelestarian tradisi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam (SASI) melalui kepastian perlindungan hukum dan hak dari masyarakat adat **(Pemerintah Daerah, DLHKP, dan Masyarakat Adat)**

Highlight EPD Provinsi Papua Pegunungan

Capaian Optimal

Indeks Pembangunan Pemuda

72,17*

Faktor Pendukung:

- Meningkatnya domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda
  - Papua Muda Inspiratif
  - Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM
    - Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) OAP
    - *Papuan Youth Scholarship (Magister/Doctoral/Double Degree/Joint Degree)*
- Meningkatnya domain kesehatan dan kesejahteraan
  - Program Papua Sehat
    - Peningkatan layanan kesehatan (fasilitas dan SDM)
    - Jaminan kesehatan (Jamkesdes, BPJS Kesehatan, Kartu Imunisasi)
  - Peningkatan pemanfaatan jaminan kesehatan rawat inap oleh perempuan

Angka Keberhasilan Pengobatan TBC

73,7%

Faktor Pendukung:

- Meningkatnya layanan kesehatan
  - Fasilitas kesehatan
  - Tenaga kesehatan
  - Program Papua Sehat
  - Jaminan kesehatan
- Validasi data pelayanan TBC
- *Global fund ATM (AIDS, Tuberculosis and Malaria)*

*Keterangan: Capaian indikator Provinsi Papua Pegunungan masih merupakan capaian provinsi induk yaitu Provinsi Papua

Rekomendasi

Penguatan Papua Muda Inspiratif melalui pendampingan dan bantuan berupa akses permodalan, teknologi, penyediaan pasar, serta pelatihan pengembangan keterampilan bagi pelaku usaha **(Dinas PPKUKM, Disnakertrans, dan Disporapar)**

Peningkatan kualitas SDM melalui:
1. Optimalisasi pemberian beasiswa, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Daerah
2. Pengembangan dan pemerataan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan komunikasi, khususnya di daerah-daerah sulit akses
3. Penguatan pelatihan bagi masyarakat melalui perluasan cakupan BLK, pennyelarasan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan DUDI, dan kerja sama dengan swasta untuk penempatan tenaga kerja

(Kemendikdasmen, Kemenaker, dan Kemenkes)

Pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan ke daerah sulit akses melalui:
1. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui pemberian beasiswa
2. Pemberian beasiswa dan perjanjian pengabdian
3. Pemberian insentif khusus

(Kemendiktisaintek, Kemenkes, dan Pemerintah Daerah)

Akselerasi perluasan cakupan jaminan kesehatan melalui:
1. Percepatan implementasi *central mapper* dan pemanfaatan data Regsosek untuk integrasi dan akurasi bantuan bagi masyarakat miskin
2. Kolaborasi lintas sektor dan pelibatan organisasi masyarakat lokal, keagamaan, dan DUDI

(Kemenkes, Kemensos, dan BPJS Kesehatan)

Peningkatan validasi data program TBC, baik data pelaporan maupun pelayanan TBC **(Kemenkes dan Dinkes PPKB)**

Optimalisasi penggunaan Dana Otsus sebagai dukungan terhadap *global fund ATM* **(Dinkes PPKB)**

Highlight EPD Provinsi Papua Pegunungan

Capaian Kurang Optimal

Tingkat Kemiskinan

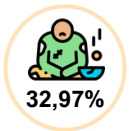

32,97%

Faktor Penghambat:

- Distribusi bantuan pemerintah yang belum optimal
- Keterbatasan infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, dan konektivitas)
- Rendahnya pendapatan masyarakat:
  - Mayoritas pekerja berstatus pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar
  - Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat
  - Terbatasnya kegiatan ekonomi
  - Minimnya investasi karena adanya isu keamanan

Indeks Pembangunan Manusia

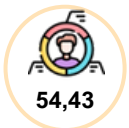

54,43

Faktor Penghambat:

- Rendahnya pendapatan masyarakat:
  - Mayoritas pekerja berstatus pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar
  - Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat
  - Terbatasnya kegiatan ekonomi
  - Minimnya investasi karena adanya isu keamanan
- Keterbatasan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan

Rasio Gini

0,340

Faktor Penghambat:

- Terbatasnya akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi
  - Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat
  - Terbatasnya kegiatan ekonomi
  - Minimnya investasi karena adanya isu keamanan
  - Keterbatasan infrastruktur yang menyebabkan terbatasnya aksesibilitas
- Distribusi pendapatan yang tidak merata antar masyarakat

Rekomendasi

Akselerasi penurunan kemiskinan melalui percepatan implementasi intervensi *central mapper* dan pemanfaatan data Regsosek untuk integrasi dan akurasi program kemiskinan **(Bappenas, Kemensos, dan DinsosP3A)**

Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, konektivitas, listrik) serta infrastruktur transportasi dan komunikasi, khususnya di daerah sulit akses **(Kemensos, KemenPU, dan DinsosP3A)**

Peningkatan kualitas SDM melalui:
1. Optimalisasi pemberian beasiswa
2. Penguatan pelatihan bagi masyarakat melalui perluasan cakupan BLK, pennyelarasan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan DUDI, dan kerja sama dengan swasta untuk penempatan tenaga kerja

(Kemendikdasmen, Kemenaker, dan Kemenkes)

Pemerataan akses layanan pendidikan dan kesehatan melalui:
1. Pemerataan penyediaan infrastruktur
2. Bantuan pendidikan melalui beasiswa dari pemerintah pusat maupun daerah dari jenjang pendidikan dasar hinggi pendidikan tinggi
3. Pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan

(Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan Kemenkes)

Peningkatan dan penguatan keamanan di seluruh wilayah Papua Pegunungan, khususnya di wilayah perbatasan **(Kemenkopolkam, KemenkoH2IP, dan TNI/POLRI)**

Pembukaan lapangan kerja:
1. Diversifikasi ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi dan keunggulan daerah
2. Pengembangan ekonomi masyarakat melalui kelompok UMKM, koperasi, BUMDes, serta pemberdayaan perempuan dan kelompok marjinal

(KemendesPDT, Dinas PPKUKM, Disnakertrans)

Highlight EPD Provinsi Papua Pegunungan

Capaian Kurang Optimal

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

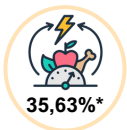

35,63%*

Skor Pola Pangan Harapan

79*

Faktor Penghambat:

- Sistem pertanian tidak berkelanjutan sehingga sulit mencapai ketahanan pangan
  - Krisis iklim (embun salju) dan cuaca (kekeringan)
  - Keterbatasan teknologi pertanian
- Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pangan
  - Tidak meratanya pendapatan masyarakat
  - Rendahnya pendapatan masyarakat
  - Tingginya harga kebutuhan
  - Ketersediaan jenis pangan yang terbatas (sagu, umbi-umbian)

Prevalensi *Stunting*

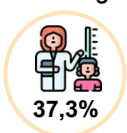

37,3%

Faktor Penghambat:

- Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pangan
  - Tidak meratanya pendapatan masyarakat
  - Rendahnya pendapatan masyarakat
  - Tingginya harga kebutuhan
  - Ketersediaan jenis pangan yang terbatas (sagu, umbi-umbian)
- Terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan
- Tingkat pengetahuan masyarakat terkait gizi seimbang dan pola hidup sehat

*Keterangan: Capaian indikator Provinsi Papua Pegunungan masih merupakan capaian provinsi induk yaitu Provinsi Papua

Rekomendasi

Peningkatan dan penguatan sektor pertanian melalui:
1. Pengembangan produksi dan pengolahan komoditas lokal seperti sagu, umbi-umbian
2. Sistem tanam musiman dengan jenis tanaman yang menyesuaikan musim (embun salju: wortel, kale, bayam, sawi pagoda, kol, bawang prei, dll)
3. Pengembangan bibit unggul yang tahan perubahan cuaca ekstrim
4. Pengembangan teknologi pertanian

(Kementan serta Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan)

Peningkatan mitigasi bencana, khususnya bencana kekeringan melalui penyiapan sarana dan prasarana seperti waduk, bak penampung air, fasilitas pengelolaan air, jaringan irigasi, dll **(Kemenkopangan, KemenPU, dan Dinas PUPR)**

Distribusi kebutuhan pangan secara menyeluruh
1. Peningkatan keamanan
2. Pemerataan infrastruktur konektivitas dan transportasi

(KemenPU, Kemenkum, Kemenhan, Dinas PUPR)

Mendorong penurunan kesenjangan ekonomi melalui:
1. Peningkatan pendapatan masyarakat
2. Pemerataan harga barang

(Kemenkeu dan Pemda)

Pemerataan akses layanan kesehatan melalui pemerataan penyediaan infrastruktur, bantuan biaya kesehatan, dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan **(Kemendikdasmen dan Kemenkes)**

Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pola asuh, gizi seimbang, dan pola hidup sehat melalui sosialisasi dan pendampingan kepada calon pengantin dan orang tua **(Kemenkes dan Dinkes PPKB)**

Highlight EPD Provinsi Papua Pegunungan

Capaian Kurang Optimal

Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan

7,47%*

Faktor Penghambat:

- Kondisi wilayah (geografis dan demografis) yang menyebabkan sulitnya pemerataan infrastruktur
  - Keterbatasan aksesibilitas
  - Kepadatan penduduk
- Keterbatasan akses air bersih

Persentase Kondisi Mantap Jalan

84,42%*

Faktor Penghambat:

- Pembangunan infrastruktur yang belum merata
- Kondisi geografis yang cenderung sulit akses menyebabkan memerlukan biaya yang besar untuk konstruksi

Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi

3,27*

Faktor Penghambat:

- Infrastruktur yang kurang mendukung
  - Infrastruktur konektivitas dan moda transportasi terbatas
  - Akses komunikasi terbatas
- Kondisi SDM Kepegawaian
  - Kuantitas ASN yang dimiliki masih kurang dari jumlah yang dibutuhkan
  - Keterampilan ASN masih perlu ditingkatkan

Rekomendasi

Pembangunan dan pemerataan infrastruktur air bersih:
1. Pembangunan sistem perpipaan air bersih di daerah-daerah prioritas, khususnya daerah dengan *stunting* tinggi dan rawan kekeringan
2. Pemanfaatan infrastruktur air bersih selain perpipaan (waduk, bak penampung air) untuk daerah sulit akses dan rawan kekeringan
3. Pemanfaatan teknologi seperti pompa air dengan tenaga surya
4. Kerja sama dengan pihak NGO

(KemenPU, Dinas PUPR, dan NGO)

Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih:
1. Subsidi infrastruktur air bersih
2. Pemasangan gratis untuk MBR
3. Bantuan tangki air berbasis kelompok masyarakat (RT/RW) atau rumah tangga

(KemenPKP, Dinas PUPR, dan DinsosP3A)

Pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan melalui:
1. Pemanfaatan teknologi konstruksi untuk jalan lebih tahan di medan berat, kondisi tanah labil, dan risiko bencana yang tinggi, seperti BOMAG *Economizer, Vario Control,* atau *Asphalt Manager*
2. Desain konstruksi jalan mengikuti kondisi jalur atau kontur alami
3. Penggunaan material lokal untuk menekan pengeluaran

(KemenPU dan Dinas PUPR)

Pengadaan dan pemerataan infrastruktur komunikasi dan listrik **(Diskominfo dan PLN)**

Peningkatan kuantitas dan kualitas ASN melalui pelatihan dasar, diklat, dan beasiswa ASN **(BKDPSDM)**

*Keterangan: Capaian indikator Provinsi Papua Pegunungan masih merupakan capaian provinsi induk yaitu Provinsi Papua

Seahorse

Terima Kasih

BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

dit.peppdbappenas Direktorat PEPPD peppd.bappenas.go.id dit.peppd@bappenas.go.id